

# Data Statistik

Semester II  
Tahun

**2009**



DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI  
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA







# Kata Pengantar

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karuniaNYA, sehingga kami dapat menyelesaikan buku Data Statistik Bidang Postel Semester II Tahun 2009 dengan baik.

Buku Data Statistik Bidang Postel Semester II Tahun 2009 ini diterbitkan guna memberikan data dan Informasi mengenai Kinerja dan Capaian Ditjen Postel selama Tahun 2009 bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan dan berkepentingan.

Materi, bahan dan data dalam Buku Data Statistik ini bersumber pada capaian dan kinerja masing – masing Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Ditjen Postel dan sumber lain terkait.

Kami sadar bahwa Materi yang tertuang dalam Buku data Statistik Bidang Postel Semester II Tahun 2009 masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran membangun untuk kesempurnaan buku ini sangat kami harapkan dan dapat disampaikan melalui email : [datastatistik@postel.go.id](mailto:datastatistik@postel.go.id)

Akhir kata, Kami mengucapkan terimakasih kepada semua Pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku ini dan kepada pembaca yang telah menggunakan buku ini

Semoga buku ini bermanfaat bagi kami dan para pembaca sekalian.

Jakarta,     Maret 2010

Plt. Dirjen Postel,



**BASUKI YUSUF ISKANDAR**



DAFTAR ISI		
	Kata Pengantar	
	Daftar Isi	
	Daftar Tabel	
	Daftar Gambar	
<b>1</b>	<b>PENDAHULUAN</b>	
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tujuan Penyusunan	2
1.3	Metode Penyusunan	2
	1. 3. 1 Metode Penyusunan Data	2
	1. 3. 2 Metode Penyajian Data	3
1.4	Ruang Lingkup	3
1.5	Sumber Data	4
1.6	Manfaat Penulisan Buku	4
<b>2</b>	<b>PROFILE DIREKTORAT JENDERAL POS DAN TELEKOMUNIKASI</b>	
2.1	Visi	5
2.2	Misi	5
2.3	Fungsi Ditjen Postel	5
2.4	Organisasi Ditjen Postel	6
	2. 4. 1 Sekretariat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi	7
	2. 4. 2 Direktorat Pos	8
	2. 4. 3 Direktorat Telekomunikasi	9
	2. 4. 4 Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi	10
	2. 4. 5 Direktorat Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	11
	2. 4. 6 Direktorat Kelembagaan Internasional	12
	2. 4. 7 Unit Pelaksana Teknis	13
	2. 4. 7.1. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT)	13
	2. 4. 7.2. Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan (BTIP)	16
	2. 4. 7.3. Balai Monitor Spektrum Frekuensi	18

<b>3</b>	<b>BIDANG KEPEGAWAIAN</b>	<b>20</b>
3.1	Jumlah Pegawai	20
3.2	Tingkat Pendidikan	22
	3. 2. 1 Pegawai Setditjen Postel	24
	3. 2. 2 Pegawai Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi	25
	3. 2. 3 Pegawai UPT	27
<b>4</b>	<b>BIDANG REGULASI</b>	<b>30</b>
4.1	Undang-Undang	30
4.2	Peraturan Pemerintah	31
4.3	Peraturan Presiden	31
4.4	Peraturan Menteri Kominfo	32
4.5	Keputusan Menteri Kominfo	33
4.6	Peraturan Dirjen Postel	34
4.7	Keputusan Bersama Menteri Kominfo	34
<b>5</b>	<b>BIDANG POS</b>	
5.1	Ruang Lingkup	39
5.2	Konsep dan Definisi	40
5.3	Uraian Data Statistik PT. Pos	46
	5. 3. 1. Alat Pos	46
	5.3.1.1. Jumlah Kantor Pos	46
	5.3.1.2. Pelayanan Pos Bergerak	56
	5.3.1.3. Pelayanan Pos Lainnya	62
	5.3.1.4. Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya	70
	5. 3. 2. Jangkauan Pelayanan Pos	75
	5. 3. 3. Produksi Pos PT. Pos Indonesia	86
	5. 3. 4. PSO	95
5.4	Bidang Jasa Titipan	96
	5. 4. 1. Selebaran Penyelenggara Jasa Titipan	96
	5. 4. 2. Produksi Jasa Titipan	98
	5. 4. 3. Penerbitan Ijin Penyelenggara Jasa Titipan	101

5.5	Penerbitan Perangkat	103
<b>6</b>	<b>BIDANG TELEKOMUNIKASI</b>	<b>104</b>
6.1	Ruang Lingkup	105
6.2	Konsep dan Definisi	105
6.3	Statistik Telekomunikasi Indonesia	109
	6. 3. 1. Penyelenggaraan Telekomunikasi	109
	6. 3. 2. Kapasitas Penyelenggara Telekomunikasi	111
	6. 3. 3. Perkembangan Pelanggan Jaringan Telekomunikasi	118
	6. 3. 4. Teledensitas	126
	6. 3. 5. Pendapatan Operator Penyelenggara Jaringan	128
	6. 3. 5.1. Pendapatan Total Operasional	128
	6. 3. 5.2. EBITDA	130
	6. 3. 5.3. ARPU (Average Revenue Per User)	132
	6. 3. 6. Biaya Penyelenggara Jasa Telekomunikasi	137
	6. 3. 7. Karyawan Operator Telekomunikasi	139
6.4	Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT)	141
	6. 4. 1. Jumlah Desa Berdering WPUT	141
	6. 4. 2. Jumlah Desa PINTER	145
6.4	Pelayanan Internet	146
	6. 5. 1. Internet Service Provider	146
	6. 5. 2. Network Access Provider (NAP)	148
	6. 5. 3. Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)	151
	6. 5. 4. Sistem Komunikasi Data (Siskomdat)	154
<b>7</b>	<b>BIDANG FREKUENSI</b>	<b>156</b>
7.1	Ruang Lingkup	156
7.2	Konsep dan Definisi	157
7.3	Jumlah Penggunaan Frekuensi (ISR)	158
	7. 3. 1. Penggunaan Berdasarkan Pita Frekuensi	158
	7. 3. 2. Penggunaan Berdasarkan Service	165
	7. 3. 3. Penggunaan Berdasarkan Propinsi	168

	7. 3. 4. Pola Penggunaan Menurut Wilayah Kepulauan	170
7.4	Perbandingan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah	174
	7. 4. 1. Frekuensi TV	174
	7. 4. 2. Frekuensi Radio AM	176
	7. 4. 3. Frekuensi Radio FM	178
	7. 4. 4. Frekuensi GSM	180
7.5	Monitoring dan Penertiban Penggunaan Frekuensi oleh UPT	182
	7. 5. 1. Monitoring dan Penertiban oleh UPT Tahun 2008	183
	7. 5. 2. Monitoring dan Penertiban oleh UPT Tahun 2009	186
<b>8</b>	<b>BIDANG STANDARISASI</b>	190
8.1	Ruang Lingkup	191
8.2	Konsep dan Definisi	191
8.3	Penerbitan Sertifikat Standarisasi	193
	8. 3. 1. Perkembangan Penerbitan Sertifikat Peralatan	193
	8. 3. 2. Fluktuasi Penerbitan Sertifikat Bulanan	196
	8. 3. 3 Penerbitan Sertifikat Menurut Negara Asal	198
8.4	Neraca Perdagangan Perangkat Telekomunikasi	203
<b>9</b>	<b>BIDANG PENGUJIAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI</b>	205
9.1	Ruang Lingkup	206
9.2	Statistik Pengujian Perangkat	207
	9. 2. 1. Hasil Pengujian (RHU)	207
	9. 2. 2. Surat Perintah Pembayaran (SP2)	218
<b>10</b>	<b>BIDANG KELEMBAGAAN INTERNASIONAL</b>	226
10.1	Ruang Lingkup	226
10.2	Kegiatan Kelembagaan Internasional	227
	10. 2. 1. Kegiatan Multilateral	227
	10. 2. 2. Kegiatan Regional	228
	10. 2. 3. Kegiatan Bilateral	229
	10. 2. 4. Kegiatan Kerjasama Investasi dan Pasar Internasional	230

	10. 2. 5. Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Orbit dan Satelit	231
10.3	Penerbitan Izin Hak Labuh ( <i>Landing Right</i> ) Satelit	233
<b>11</b>	<b>ANALISA STATISTIKA EKONOMI</b>	235
11.1	Ruang Lingkup	235
11.2	Konsep dan Definisi	236
11.3	Peran Ditjen Postel dalam Penerimaan Negara	237
	11. 3. 1. PNBPN Bidang Perposan	238
	11. 3. 2. PNBPN Bidang Telekomunikasi	239
	11. 3. 3. PNBPN Bidang Standarisasi	241
	11. 3. 4. PNBPN Bidang Frekuensi	243
	11. 3. 5. PNBPN Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi	246
	11. 3. 6. Komposisi PNBPN Bidang Postel dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Negara	248
11.4	Peran Industri Pos dan Telekomunikasi dalam Pendapatan Nasional	252
11.5	Kinerja an Peran Industri Telekomunikasi Seluler	258

---oOo---

	<b>DAFTAR TABEL</b>	
3. 1	Perkembangan jumlah pegawai Ditjen Postel tahun 2004 – 2009.	22
3. 2	Perkembangan jumlah pegawai Ditjen Postel menurut tingkat pendidikan	24
3. 3	Perkembangan jumlah pegawai Setditjen Postel menurut tingkat pendidikan	26
3. 4	Jumlah pegawai Direktorat di Ditjen Postel menurut tingkat pendidikan.	27
3. 5	Perkembangan jumlah pegawai UPT Ditjen Postel menurut tingkat pendidikan.	28
3.6	Jumlah Pegawai per UPT menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009	30
4. 1	Statistik Undang-Undang menurut Bidang	32
4. 2	Statistik Peraturan Pemerintah menurut Bidang	32
4. 3	Statistik Peraturan Presiden menurut Bidang	33
4. 4	Statistik Peraturan Menteri Koinfo menurut Bidang.	33
4. 5	Statistik Keputusan Menteri Koinfo menurut Bidang.	34
4. 6	Statistik Peraturan Dirjen Postel menurut Bidang.	35
4. 7	Statistik Keputusan Bersama Menteri Koinfo menurut Bidang	36
4. 8	Jumlah produk regulasi yang dikeluarkan pada perioda 2005- 2009	36
5. 1	Perkembangan jumlah kantor Pos menurut jenisnya tahun 2004-2009	47
5. 2	Perkembangan jumlah kantor Pos menurut Wilpos tahun 2004-2009	50
5. 3	Sebaran Jumlah Kantor Pos menurut Jenis dan Wilayah Pos 2009	52
5.4	Cakupan dan Jangkauan pelayanan Kantor Pos menurut Wilayah Pos 2009	54
5. 5	Sebaran Jumlah Pelayanan Pos Bergerak menurut Jenis dan Wilayah Pos 2009	57
5.6	Cakupan dan Jangkauan Pelayanan Pos Pelayanan bergerak menurut Wilayah Pos 2009	60
5.7	Perkembangan Pelayanan Pos Lainnya Tahun 2005-2009	63
5. 8	Sebaran Jumlah Pelayanan Pos Lainnya menurut jenis dan Wilayah Pos 2009	64
5. 9	Sebaran Pelayanan Pos Lainnya menurut Jenis dan Pulau Tahun 2009	66
5.10	Komposisi Pelayanan Pos Lainnya menurut Jenis dan Wilayah Pos Tahun	67



	2009	
5.11	Cakupan dan Jangkauan Pelayanan Pos Lainnya menurut Wilayah Pos Tahun 2009	68
5. 12	Perkembangan Jumlah Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya 2004-2009	71
5. 13	Sebaran Jumlah Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya menurut Wilayah Pos 2009	73
5. 14	Sebaran Jumlah Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya menurut Pulau 2009	74
5. 15	Perkembangan Jangkauan pelayanan Pos di Kecamatan 2004-2009	76
5. 16	Jangkauan Pelayanan Pos di Kecamatan di Wilayah Usaha Pos Tahun 2009	77
5.17	Proporsi jangkauan pelayanan di kecamatan menurut pelayanan di Wilayah Pos 2009	78
5. 18	Perkembangan Jangkauan pelayanan Pos di Lokasi Transmigrasi 2004-2009	80
5. 19	Jangkauan Pelayanan Pos di Lokasi Transmigrasi di Wilayah Pos Tahun 2009	80
5. 20	Perkembangan Jangkauan Pelayanan Pos di Kelurahan/Desa Tahun 2004-2009	83
5. 21	Jangkauan Pelayanan Pos di Kelurahan/Desa di Wilayah Usaha Pos Tahun 2009	84
5. 22	Produksi Perposan Indonesia Tahun 2004-2009	86
5. 23	Produksi Surat Pos dari Luar Negeri Indonesia Tahun 2004-2009	90
5. 24	Produksi Perposan Indonesia di Setiap Wilayah Pos Tahun 2008	92
5.25	Produksi Pos Express PT. Pos Tahun 2005-2009	94
5. 26	Jumlah KPCLK dari tahun 2003-2008.	95
5. 27	Perkembangan Sebaran Penyelenggara Jasa Titipan Menurut Pulau	96
5. 28	Perkembangan Sebaran Penyelenggara Jasa Titipan Menurut Propinsi	98
5. 29	Produksi Jasa Titipan PT. Pos Tahun 2009	100
5. 30	Produksi dan Perkiraan Permintaan Pasar Jasa Ekspres Indonesia menurut Jenis.	101
5.31	Jumlah penerbitan izin penyelenggara jasa titipan tahun 2004 hingga 2009	102
5.32	Jumlah Penerbitan izin penyelenggara Jasa Titipan 2004-2009 (menurut pulau)	103
5. 33	Data penerbitan perangko Tahun 2004-2009	103
6. 1	Jumlah penyelenggaraan telekomunikasi di Indonesia 2008-2009	109
6.2	Penyelenggara telepon di Indonesia tahun 2009	110

6. 3	Kapasitas terpasang dan tersambung telepon tetap kabel dan wireless 2007-2009	112
6. 4	Kapasitas terpasang dan tersambung telepon bergerak tahun 2007-2009	116
6. 5	Perkembangan pelanggan telepon tetap lokal 2005-2009	119
6. 6	Profil penyelenggara jaringan telepon tetap wireless.	121
6. 7	Perkembangan Jumlah pelanggan telepon bergerak seluler 2004-2009.	123
6. 8	Pendapatan operasional operator telepon tahun 2006-2009.	129
6. 9	EBITDA operator utama telepon di Indonesia tahun 2006-2009.	131
6. 10	Perkembangan ARPU operator telepon tahun 2004-2009.	132
6. 11	Perkembangan ARPU operator telepon bergerak seluler 2007-2009.	134
6. 12	Perkembangan ARPU operator telepon tetap 2006-2009.	136
6. 13	Trend penurunan ARPU operator telepon tetap 2006-2009.	137
6. 14	Perkembangan biaya operasional operator telepon 2004-2009.	138
6. 15	Perkembangan jumlah karyawan operator telepon 2005-2009	139
6.16	Target jumlah desa untuk program WPUT Tahun 2009	142
7. 1	Jumlah penggunaan frekuensi berdasarkan pita frekuensi (ISR)	159
7. 2	Penggunaan pita frekuensi per propinsi tahun 2009	162
7. 3	Jumlah penggunaan kanal frekuensi menurut service 2007-2009	165
7.4	Penggunaan Frekuensi menurut Propinsi, Service dan Subservice sampai Desember 2009	169
7.5	Hasil Penertiban Frekuensi oleh UPT Tahun 2008	184
7.6	Hasil Penertiban Frekuensi oleh UPT Tahun 2009	187
8. 1	Jumlah penerbitan sertifikat untuk masing-masing jenis 2004-2009	193
8. 2	Pertumbuhan Penerbitan sertifikat menurut jenis sertifikat	195
8. 3	Perkembangan Penerbitan Sertifikat Perangkat Telekomunikasi Tahun 2009	197
8. 4	Jumlah Sertifikat yang dikeluarkan per Jenis Sertifikat menurut negara asal Tahun 2009	199
8. 5	Komposisi asal negara dari sertifikat standardisasi yang dikeluarkan Tahun 2009	200
8. 6	Jumlah Sertifikat yang dikeluarkan per bulan menurut negara Asal Barang Tahun 2009	202
8. 7	Ekspor dan Impor Perangkat Telekomunikasi 2005-2008.	203

9. 1	Rekapitulasi Hasil Pengujian Perangkat menurut Negara Asal Tahun 2008	207
9. 2	Rekapitulasi Hasil Pengujian Perangkat menurut Jenis Perangkat Tahun 2008	209
9. 3	Rekapitulasi Hasil Pengujian Perangkat menurut Negara Asal Tahun 2009	211
9. 4	Rekapitulasi Hasil Pengujian Perangkat menurut Jenis Perangkat Tahun 2009	213
9.5	Jumlah perangkat yang diuji menurut jenis perangkat dan negara asal tahun 2009	216
9.6	Jumlah dan Nilai Penanganan Surat Perintah Pembayaran (SP2) Tahun 2009	218
9.7	Jumlah dan Nilai Penanganan SP2 menurut negara asal Tahun 2009	221
9.8	Jumlah dan Nilai Penanganan SP2 menurut jenis perangkat Tahun 2009	223
9.9	Jumlah Penerbitan SP2 menurut jenis perangkat dan negara asal Tahun 2009	225
10. 1	Jumlah Kegiatan bersifat Multilateral Kelembagaan Internasional 2008 - 2009	227
10. 2	Jumlah Kegiatan bersifat Regional Kelembagaan Internasional 2008-2009	228
10. 3	Jumlah Kegiatan bersifat Bilateral Kelembagaan Internasional 2008-2009	229
10. 4	Jumlah Kegiatan terkait Investasi dan Pasar Internasional 2008-2009	231
10. 5	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Orbit dan Satelit 2008-2009	232
10.6	Izin Hak Labuh yang Dikeluarkan oleh Ditjen Pos dan Telekomunikasi	234
11. 1	Perkembangan PNBP dari Jasa Titipan Tahun 2005-2009	238
11. 2	Perkembangan PNBP dari Sektor Telekomunikasi Tahun 2005-2009	240
11. 3	Perkembangan PNBP dari Bidang Standarisasi Tahun 2005-2009	242
11. 4	Perkembangan PNBP dari BHP Frekuensi Tahun 2005-2009	244
11. 5	PNBP dari PREOR dan SKOR (Frekuensi) Tahun 2005-2009	245
11.6	PNBP dari Kewajiban Pelayanan Universal (USO) Tahun 2006-2009	247
11. 7	Realisasi PNBP Bidang Pos dan Telekomunikasi Tahun 2005-2009	249
11.8	PDB atas dasar harga Berlaku Tahun 2003 - Q3 2009 (Rp. Milyar)	252
11. 9	Peran Sektor Pos dan Telekomunikasi Terhadap PDB Tahun 2003 - Q3 2009	254
11.10	Laju Pertumbuhan Sektoral PDB di Indonesia 2004-2009 (%)	257
11.11	Profil Kinerja Industri Telekomunikasi Seluler Indonesia 2005-2009	259

	<b>DAFTAR GAMBAR</b>	
2. 1	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi	8
2.2	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi	9
2. 3	Struktur Organisasi Direktorat Pos	10
2. 4	Struktur Organisasi Direktorat Telekomunikasi dan Informatika	11
2. 5	Struktur Organisasi Direktorat Pengelolaan Frekuensi Radio	12
2. 6	Struktur Organisasi Direktorat Standarisasi Pos dan Telekomunikasi	13
2.7	Struktur Organisasi Direktorat Kelembagaan Internasional	14
2.8	Struktur Organisasi Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi	16
2.9	Struktur Organisasi Balai Telekomunikasi dan Informasi Pedesaan	18
3. 1	Perkembangan jumlah pegawai Ditjen Postel tahun 2004-2009.	23
3. 2	Proporsi pegawai di Ditjen Postel menurut Pendidikan 2004-2009	24
3. 3	Komposisi pegawai Ditjen Postel menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009	25
3. 4	Komposisi pegawai di SetDitjen Postel menurut Pendidikan 2004-2009	26
3. 5	Komposisi pegawai di Direktorat di Ditjen Postel menurut Pendidikan 2004-2009	28
3.6	Komposisi Pegawai UPT Ditjen Postel menurut Pendidikan 2004-2009	29
4. 1	Jumlah produk regulasi yang dikeluarkan pada perioda 2005- 2009.	37
4. 2	Komposisi produk regulasi yang dikeluarkan pada perioda 2005- 2009	38
5. 1	Perkembangan jumlah Kantor Pos yang dikelola PT. Pos Tahun 2004-2009	48
5. 2	Distribusi Kantor Pos (total) menurut Wilayah Pos tahun 2009	50
5. 3	Trend perubahan jumlah Kantor Pos menurut Wilayah Pos 2004-2009	51
5.4	Jumlah penduduk yang dilayani per satu kantor pos menurut Wilpos 2009	55
5.5	Luas wilayah yang dilayani per satu kantor pos di tiap Wilayah Pos 2009	56
5. 6	Distribusi Pelayanan Pos Bergerak antar Wilpos Pos menurut jenis Tahun 2009	58
5. 7	Proporsi jumlah pelayanan pos bergerak antar Wilpos Tahun 2009	59
5.8	Cakupan pelayanan penduduk pos pelayanan bergerak menurut Wilayah Pos	61
5.9	Jangkauan Pelayanan per satu unit Pos Pelayanan Bergerak menurut Wilayah Pos	62

5. 10	Jumlah pelayanan pos lainnya antar Wilpos Tahun 2009	64
5. 11	Jumlah pelayanan pos lainnya antar Wilpos Tahun 2009	65
5. 12	Proporsi pelayanan pos lainnya menurut jenis Tahun 2009	67
5.13	Cakupan pelayanan pos lainnya menurut Wilayah Pos Tahun 2009	69
5.14	Jangkauan pelayanan pos lainnya menurut Wilayah Pos Tahun 2009	70
5. 15	Proporsi fasilitas pelayanan pos lainnya menurut jenis Tahun 2009	72
5. 16	Sebaran fasilitas pelayanan pos lainnya menurut jenis Tahun 2009	73
5. 17	Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya menurut Wilpos 2009	74
5. 18	Komposisi Jangkauan Pelayanan Pos di Kecamatan menurut Wilpos tahun 2009	78
5. 19	Perbandingan jangkauan pelayanan kecamatan antar Kantor Pos dengan Pos Keliling menurut Wilpos tahun 2009	79
5. 20	Perbandingan Pelayanan Pos di Lokasi Transmigrasi menurut Wilpos tahun 2009	82
5. 21	Perbandingan Pelayanan Pos di kelurahan/desa menurut pelayanan di Wilayah Pos tahun 2009	85
5. 22	Perbandingan Tingkat Keterjangkauan Pelayanan Pos di Desa menurut Wilpos tahun 2009	86
5. 23	Trend Produksi Perposan Indonesia menurut Jenis Tahun 2004-2009	87
5. 24	Proporsi Produksi Surat Indonesia Tahun 2004-2009	88
5. 25	Proporsi Produksi Paket Indonesia Tahun 2004-2009	89
5.26	Trend Produksi Pos dari Luar Negeri Tahun 2004-2009	90
5. 27	Proporsi Produksi Surat dari Luar Negeri Tahun 2004-2009	91
5. 28	Proporsi Produksi Paket dari Luar Negeri Tahun 2004-2009	92
5. 29	Rasio antara produksi dengan jumlah pegawai menurut Wilpos	94
5. 30	Jumlah KPCLK Pelaksana Program PSO Tahun 2009 menurut Wilayah Pos	96
5. 31	Proporsi Penyebaran Penyelenggara Jasa Titipan 2007-2009	97
5. 32a	Proporsi Volume Produksi Jasa Titipan menurut Jenis 2009	99
5. 32b	Proporsi Berat Produksi Jasa Titipan menurut Jenis 2009	99
5. 33	Perkembangan Penerbitan Izin Penyelenggara Jasa Titipan menurut Jenis 2009	102
6. 1	Kapasitas terpasang dan telepon tersambung telepon tetap kabel	113

6. 2	Tingkat pemanfaatan kapasitas kapasitas telepon tetap kabel 2007-2009	113
6. 3	Kapasitas terpasang dan telepon tersambung telepon tetap wireless/FWA	114
6. 4	Tingkat pemanfaatan kapasitas kapasitas telepon tetap wireless	115
6. 5	Kapasitas terpasang dan telepon tersambung telepon bergerak seluler	116
6. 6	Tingkat pemanfaatan kapasitas kapasitas telepon bergerak seluler	118
6. 7	Perbandingan Jumlah Pelanggan Telepon Kabel dan Nirkabel 2004-2009	120
6. 8	Pertumbuhan Jumlah Pelanggan Jaringan Tetap Lokal 2004-2009	121
6. 9	Komposisi Pangsa Pasar Penyelenggara Jaringan Telepon Tetap Wireless.	122
6. 10	Perkembangan Jumlah Pelanggan Telepon Bergerak Seluler	124
6. 11	Perkembangan Pertumbuhan Pelanggan Telepon Bergerak Seluler	125
6. 12	Pergeseran pangsa pasar telepon bergerak seluler 2008-Q32009.	126
6. 13	Perkembangan Teledensitas untuk tiap jenis Telepon di Indonesia	127
6. 14	Teledensitas Telepon Rumah menurut Propinsi	128
6. 15	Pertumbuhan Pendapatan Operator Telepon Seluler.	130
6. 16	Pertumbuhan EBITDA Operator Utama Telepon	131
6. 17	Trend Perkembangan ARPU Operator Telepon di Indonesia	133
6. 18	Trend Perkembangan ARPU Prabayar Telepon Bergerak Seluler	134
6.19	Trend Perkembangan ARPU Pascabayar Telepon Bergerak Seluler	135
6. 20	Trend Peningkatan biaya operasional operator telekomunikasi	139
6. 21	Komposisi Gender Pegawai Operator Telepon Tahun 2008	140
6. 22	Proporsi Desa Target Program DERING Tahun 2009 menurut WPUT	142
6. 23	Proporsi Desa Target Program DERING Tahun 2009 menurut Propinsi	144
6. 24	Jumlah Desa Program DESA PINTER Tahun 2009 menurut Propinsi	145
6.25	Sebaran lokasi POP ISP per Propinsi Tahun 2008	146
6.26	Sebaran Pelanggan Internet Perorangan Menurut Propinsi Tahun 2008	147
6.27	Sebaran Pelanggan Internet Perusahaan menurut Propinsi Tahun 2008	148
6.28	Sebaran Jumlah Penyelenggaraan NAP menurut Propinsi Tahun 2008	149
6.29	Sebaran Jumlah Pelanggan NAP dengan Kabel menurut Propinsi Tahun 2008	149
6.30	Sebaran Jumlah Pelanggan NAP dengan Satelit menurut Propinsi Tahun 2008	150
6.31	Sebaran Jumlah Pelanggan NAP dengan FO menurut Propinsi Tahun 2008	151

6.32	Sebaran Pelanggan NAP dengan teknologi lainnya menurut Propinsi Tahun 2008	151
6.33	Sebaran Penyelenggaraan POP ITKP menurut Propinsi Tahun 2008	152
6.34	Sebaran Jumlah Pelanggan ITKP Personal menurut Propinsi Tahun 2008	152
6.35	Sebaran Jumlah Pelanggan ITKP Perusahaan menurut Propinsi Tahun 2008	153
6.36	Sebaran Penyelenggaraan POP SISKOMDAT menurut Propinsi Tahun 2008	154
6.37	Cakupan Wilayah Layanan Siskomdat menurut Propinsi Tahun 2008	154
6.38	Sebaran Jumlah Pelanggan SISKOMDAT menurut Propinsi Tahun 2008	155
7. 1	Komposisi Penggunaan Frekuensi berdasarkan Pita Frekuensi.	160
7. 2	Penggunaan Pita Frekuensi menurut pulau besar	161
7. 3	Komposisi penggunaan Frekuensi menurut Pita Frekuensi per Propinsi	164
7. 4	Komposisi penggunaan frekuensi menurut <i>service</i> tahun 2007-2009	166
7. 5	Komposisi Penggunaan Frekuensi menurut Service dan Subservice Tahun 2009.	167
7. 6	Penggunaan Frekuensi menurut Service di wilayah Sumatera	170
7. 7	Penggunaan Frekuensi menurut Service di wilayah Jawa	171
7. 8	Penggunaan Frekuensi menurut Service di wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Sulawesi	172
7. 9	Penggunaan Frekuensi menurut Service di wilayah Kalimantan, Maluku dan Papua	173
7. 10A	Perbandingan Jumlah Frekuensi TV dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah	175
7. 10B	Perbandingan Jumlah Frekuensi TV dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah	175
7. 11A	Perbandingan Jumlah Frekuensi AM dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah	177
7. 11B	Perbandingan Jumlah Frekuensi AM dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah	178
7. 12A	Perbandingan Jumlah Frekuensi FM dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah	179
7. 12B	Perbandingan Jumlah Frekuensi FM dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah	180
7. 13A	Perbandingan Jumlah Frekuensi GSM dengan Jumlah Penduduk dan Luas	181

	Wilayah	
7. 13B	Perbandingan Jumlah Frekuensi GSM dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah	182
7.14	Komposisi Jenis Pelanggaran dan Tindakan Penertiban oleh UPT Tahun 2008	186
7.15	Komposisi Jenis Pelanggaran dan Tindakan Penertiban oleh UPT Tahun 2008	188
8. 1	Perkembangan Penerbitan Sertifikat Perangkat Telekomunikasi 2004-2009	194
8. 2	Komposisi Penerbitan Sertifikat Perangkat Telekomunikasi menurut jenis 2006 – 2009	195
8. 3	Pertumbuhan Penerbitan Sertifikat Perangkat menurut Jenis Perangkat	196
8. 4	Fluktuasi bulanan penerbitan sertifikat perangkat telekomunikasi Tahun 2008	197
8. 5	Perkembangan penerbitan sertifikat perangkat telekomunikasi Tahun 2009	198
8. 6	Komposisi Sertifikat Standardisasi Perangkat menurut Negara Asal 2008	201
8. 7	Komposisi Penerbitan Sertifikat Standardisasi Perangkat menurut Negara Asal	202
8. 8	Trend Pertumbuhan Ekspor dan Impor Perangkat Telekomunikasi	204
9. 1	Komposisi perangkat yang Diuji menurut Negara Asal Tahun 2008	208
9. 2	Komposisi perangkat yang Diuji menurut jenis perangkat Tahun 2008	210
9. 3	Komposisi perangkat yang Diuji menurut Negara Asal Tahun 2009	212
9. 4	Komposisi perangkat yang Diuji menurut jenis perangkat Tahun 2009	214
9.5	Perbandingan jumlah perangkat yang diuji setiap bulannya Tahun 2008 dan 2009	214
9.6	Komposisi jumlah perangkat yang diuji menurut jenis perangkat dan negara asal tahun 2009	217
9. 7	Fluktuasi Jumlah dan Nilai Penanganan SP2 Tahun 2009	219
9.8	Perbandingan Penerbitan SP2 per bulan Tahun 2008 dan 2009	220
9.9	Komposisi Penerbitan dari SP2 menurut Negara Asal Tahun 2009	222
9.10	Komposisi Penerbitan dari SP2 menurut Jenis Perangkat Tahun 2009	224
10. 1	Perkembangan Kegiatan Multilateral Tahun 2008-2009	228
10. 2	Perkembangan Kegiatan Regional Tahun 2008-2009	229
10. 3	Perkembangan Kegiatan Bilateral Tahun 2008-2009	230
10. 4	Perkembangan Kegiatan Investasi dan Pasar Internasional Tahun 2008-2009	231
10.5	Perkembangan Kegiatan kerjasama Pengelolaan Orbit dan Satelit Tahun 2008 - 2009	232



10. 6	Komposisi Kegiatan Kelembagaan Internasional Tahun 2008 dan 2009	233
11. 1	Perbandingan antara Target dan Realisasi PNBPN Sektor Jasa Titipan	239
11. 2	Perbandingan antara Target dan Realisasi PNBPN Sektor Telekomunikasi	241
11. 3	Perbandingan antara Target dan Realisasi PNBPN Bidang Standarisasi	243
11. 4	Perbandingan antara Target dan Realisasi PNBPN dari BHP Frekuensi	245
11. 5	Perbandingan antara Target dan Realisasi PNBPN dari PREOR dan SKOR	246
11. 6	Perbandingan antara Target dan Realisasi PNBPN dari USO	248
11. 7	Proporsi penerimaan PNBPN antar Bidang dalam PNBPN Pos dan telekomunikasi	249
11. 8	Kontribusi PNBPN Bidang Pos dan Telekomunikasi terhadap penerimaan negara	251
11. 9	Kontribusi Sektoral Terhadap PDB dengan Migas Tahun 2003-Q3 2009	253
11. 10	Proporsi subsektor komunikasi dalam sektor pengangkutan dan komunikasi	255
11. 11	Proporsi bidang dalam subsektor komunikasi pada PDB Tahun 2003-Q3 2009	256
11. 12	Trend pertumbuhan sektor telekomunikasi pada PDB Tahun 2003-2008	258



# Bab 1

## Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel) yang mempunyai visi “Terciptanya pembinaan penyelenggaraan pos, dan telekomunikasi yang dinamis dengan peran aktif seluruh potensi nasional” melakukan 3 (tiga) fungsi pokok di bidang penyelenggaraan pos dan telekomunikasi nasional, yaitu : pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Fungsi pengaturan meliputi kegiatan yang bersifat umum dan teknis operasional yang antara lain diimplementasikan dalam bentuk pengaturan perizinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.

Fungsi pengawasan merupakan suatu fungsi dari Ditjen Postel untuk memantau dan mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi agar tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi pengendalian merupakan fungsi yang bertujuan memberi pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, termasuk juga agar penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang penyelenggaraan pos dan telekomunikasi dapat dilaksanakan dengan baik.

Ketiga fungsi di atas merupakan penjabaran dari fungsi penetapan kebijakan yang dimiliki oleh Menteri Komunikasi dan Informatika selaku Menteri yang salah satu ruang lingkupnya adalah di bidang pos dan telekomunikasi. Fungsi penetapan kebijakan merupakan fungsi strategis yang dimiliki oleh Menteri dalam hal perumusan perencanaan dasar strategis dan perencanaan dasar teknis pos dan telekomunikasi nasional. Dengan demikian, maka pengaturan pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Ditjen Postel mengacu kepada kebijakan yang telah ditentukan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika. Ditjen Postel selama ini selalu berusaha untuk dapat mengimplementasikan semua kebijakan Menteri

Komunikasi dan Informatika di bidang pos dan telekomunikasi dengan baik, sehingga penyelenggaraan pos dan telekomunikasi nasional dapat dinikmati oleh rakyat banyak dan tidak terbatas pada masyarakat di kota-kota besar saja.

## **1.2. Tujuan Penyusunan**

Tujuan Penyusunan Data statistik ini adalah merangkum, menyusun dan menganalisa data statistik dalam lingkup Ditjen Postel, sehingga khususnya Ditjen Postel dapat menggunakannya sebagai bahan dalam menentukan kebijakan dan umumnya *stakeholder* dapat melihat, menganalisa dan menggunakan data – data statistik yang tersedia dalam buku ini.

## **1.3. Metode Penyusunan**

### **1.3.1. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data untuk penyusunan data statistik Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Semester II Tahun 2009 ini dilakukan dengan beberapa cara. Penggunaan beberapa alternatif cara ini dilakukan untuk mengoptimalkan proses pengumpulan data sehingga data yang terkumpul bisa maksimal dan penyajian data lebih lengkap. Alternatif cara yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

- (a). Membuat format data yang dibutuhkan untuk penyajian dan analisis data yang disampaikan dan dikumpulkan dari dan kepada unit kerja terkait di Ditjen Postel;
- (b). Mendapatkan data langsung (jemput bola) dari sumber data seperti data dari PT. Pos Indonesia, Departemen Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal, Infomedia, Asperindo dan Badan Pusat Statistik (BPS);
- (c). Memanfaatkan data yang tersedia, termasuk yang masih dalam format data mentah (*raw data*) untuk kemudian dilakukan pengolahan untuk penyajian data statistik;
- (d). Memanfaatkan data yang sudah dipublikasikan oleh instansi terkait maupun *stakeholder* seperti data dari publikasi BPS, *annual report* dari operator seluler dan publikasi lain yang terkait.

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan tersebut, kemudian disusun format penyajian data yang sama untuk masing-masing data meskipun jenis data yang didapatkan berbeda.

### **1.3.2. Metode Penyajian Data**

Data yang dikumpulkan kemudian dilakukan penyusunan tabel baik langsung maupun melalui pengolahan data lebih dahulu dalam bentuk format data yang sama untuk penyajian data statistik masing-masing unit kerja di Ditjen Postel. Penyajian data dalam buku Statistik Ditjen Postel Semester II Tahun 2009 ini dilakukan dalam bentuk :

- (1) Statistik deskriptif frekuensi, yaitu penyajian data-data frekuensi/jumlah dari indikator-indikator data statistik yang dipilih untuk masing-masing bidang/unit kerja;
- (2) Statistik komposisi/proporsi, yaitu penyajian data proporsi dari masing-masing variabel dari indikator yang ada terhadap total nilai indikator;
- (3) Statistik trend, yaitu penyajian yang menunjukkan kecenderungan arah perkembangan dari indikator yang dipilih, untuk menunjukkan trend atas variabel tersebut dari waktu ke waktu.

Penyajian data dilakukan dalam format tabel frekuensi maupun dalam bentuk grafik/diagram (chart). Grafik/diagram yang dimunculkan dalam penyajian data dalam bentuk diagram batang, diagram *pie* dan diagram grafik trend.

### **1.4. Ruang lingkup**

Dalam penyusunan buku ini, tim penulis membatasi ruang lingkup untuk data – data internal Ditjen Postel sampai 31 Desember Tahun 2009, dan untuk data – data *stakeholder* dari *quarterly report* sampai semester III tahun 2009. Data yang disajikan meliputi data tahunan maupun data bulanan. Ruang lingkup dalam penyajian buku Data Statistik Semester II Tahun 2009 Ditjen Postel ini meliputi :

- (1) Statistik kepegawaian dan sumberdaya manusia Ditjen Postel;
- (2) Statistik peraturan terkait bidang Pos dan Telekomunikasi;
- (3) Statistik sarana dan produksi perposan, termasuk jasa titipan;

- (4) Statistik telekomunikasi (internal dan stakeholder);
- (5) Statistik pengelolaan spektrum frekuensi radio dan monitoring frekuensi;
- (6) Statistik sertifikasi perangkat telekomunikasi;
- (7) Statistik kelembagaan internasional;
- (8) Statistik pengujian perangkat telekomunikasi;
- (9) Statistik peran ekonomi pos dan telekomunikasi.

### 1.5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyajian data statistik bidang Pos dan Telekomunikasi Semester II Tahun 2009 ini berasal dari berbagai sumber yang sudah disetujui dan dapat digunakan untuk keperluan publikasi. Data yang digunakan berasal dari :

- (1) Unit kerja di lingkup Ditjen Postel seperti Setditjen Postel, Direktorat di lingkungan Ditjen Postel, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi, Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan dan Unit Pelaksana Teknis Monitoring Spektrum Frekuensi Radio (dengan data sampai dengan 31 Desember 2009);
- (2) *Stakeholder* terkait Bidang Pos dan Bidang Datakom dari PT. Pos Indonesia;
- (3) *Quarterly Report* Semester III tahun 2009 yang dipublikasikan di akhir tahun 2009 dari beberapa operator telekomunikasi;
- (4) Badan Pusat Statistik, berupa data yang sudah dipublikasikan dalam buku statistik maupun belum disajikan dalam format buku;
- (5) Nota Keuangan dari Departemen Keuangan;
- (6) Infomedia, untuk sumber data penyebaran telepon tetap perumahan;
- (7) Asperindo, untuk sumber data .....

### 1.6. Manfaat Penyusunan Buku

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan buku statistik ini adalah:

- (1) Memberikan informasi yang terkini data – data yang terdapat dalam ruang lingkup Ditjen Postel dan data – data *stakeholder* yang telah disusun secara sistematis, jelas dan ringkas;

- (2) Memberi informasi bagi masyarakat, sehingga masyarakat umum dapat mempergunakan data – data statistik bidang Pos dan Telekomunikasi untuk masing – masing keperluan.

# Bab 2

## Profil Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

### 2.1. Visi

Terciptanya pembinaan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi yang dinamis dengan peran aktif seluruh potensi nasional.

### 2.2. Misi

- Meningkatkan kualitas pengaturan dan sumber daya manusia;
- Meningkatkan pemerataan pelayanan ke seluruh pelosok nusantara;
- Meningkatkan iklim usaha dan peran serta masyarakat;
- Meningkatkan jenis dan kualitas pelayanan jasa;
- Mendorong optimalisasi penguasaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan yang tepat guna;
- Meningkatkan pembinaan potensi pos dan telekomunikasi.

### 2.3. Fungsi Ditjen Postel

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel), berwenang merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi di bidang pos dan telekomunikasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyiapan perumusan kebijaksanaan Departemen Komunikasi dan Informatika di bidang pos, telekomunikasi, informatika, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi;
- (2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi;
- (3) Perumusan standardisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi;



- (4) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan internasional di bidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan orbit satelit serta standardisasi;
- (5) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi;
- (6) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

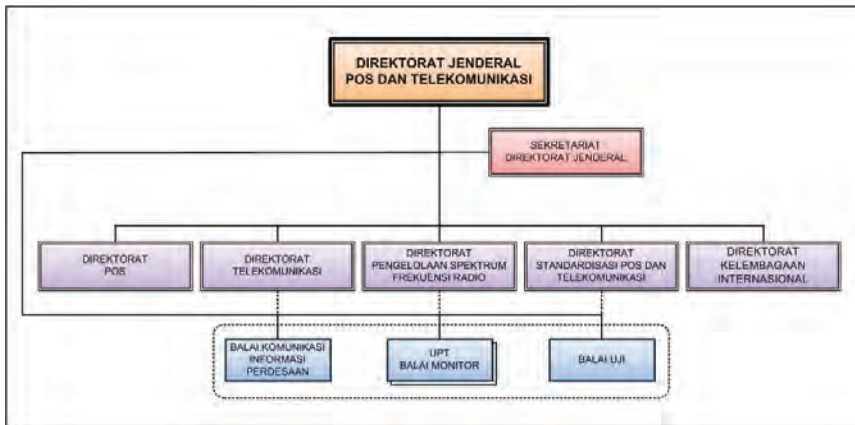
Selama ini, Ditjen Postel menjalankan 3 (tiga) fungsi pokok di bidang penyelenggaraan pos dan telekomunikasi nasional, yaitu: pengaturan, pengawasan dan pengendalian. Fungsi pengaturan meliputi kegiatan yang bersifat umum dan teknis operasional yang antara lain diimplementasikan dalam bentuk pengaturan perijinan dan persyaratan dalam penyelenggaraan pos dan telekomunikasi. Fungsi pengawasan merupakan suatu fungsi dari Ditjen Postel untuk memantau dan mengawasi seluruh kegiatan penyelenggaraan pos dan telekomunikasi agar tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan fungsi pengendalian merupakan fungsi yang bertujuan memberi pengarahan dan bimbingan terhadap penyelenggaraan pos dan telekomunikasi, termasuk juga agar penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang penyelenggaraan pos dan telekomunikasi dapat dilaksanakan dengan baik.

#### **2.4. Organisasi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi**

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :

- (1) Sekretariat Jenderal Pos dan Telekomunikasi;
- (2) Direktorat Pos;
- (3) Direktorat Telekomunikasi;
- (4) Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio;
- (5) Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi;
- (6) Direktorat Kelembagaan Internasional;
- (7) Unit Pelaksana Teknis :
  1. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi;
  2. Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan;
  3. Balai/Loka/Pos Monitoring Spektrum Frekuensi Radio.

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

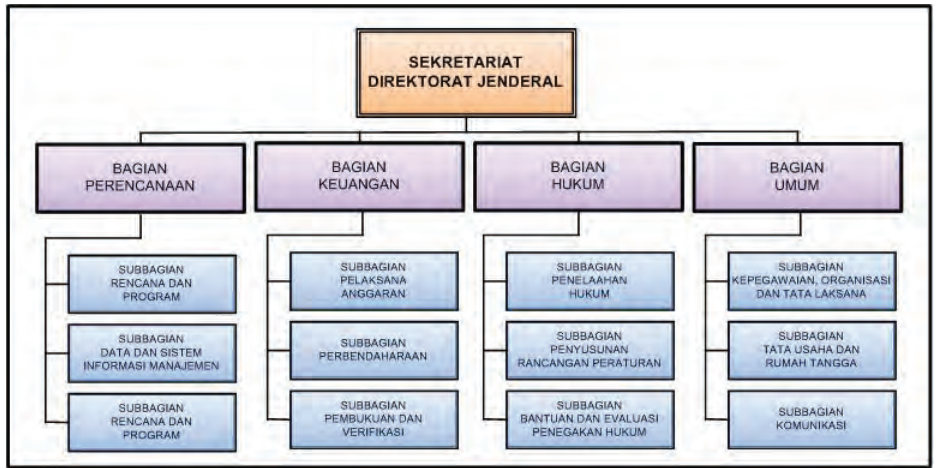


#### 2.4.1. Sekretariat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

Sekretariat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Setditjen Postel) memiliki tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Dalam menjalankan tugasnya, Sekretariat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi menjalankan fungsi :

- (1) Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan kebijakan, rencana, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan serta pelaksanaan bantuan teknik luar negeri dan data serta sistem informasi manajemen bidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan standardisasi;
- (2) Pengelolaan urusan keuangan;
- (3) Penyiapan telaahan hukum dan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan bantuan dan penyuluhan hukum, analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan di bidang pos dan telekomunikasi;
- (4) Pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, tata laksana, tata usaha, rumah tangga, hubungan masyarakat dan hubungan antar lembaga.

Gambar 2.2. Struktur Sekretariat Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi

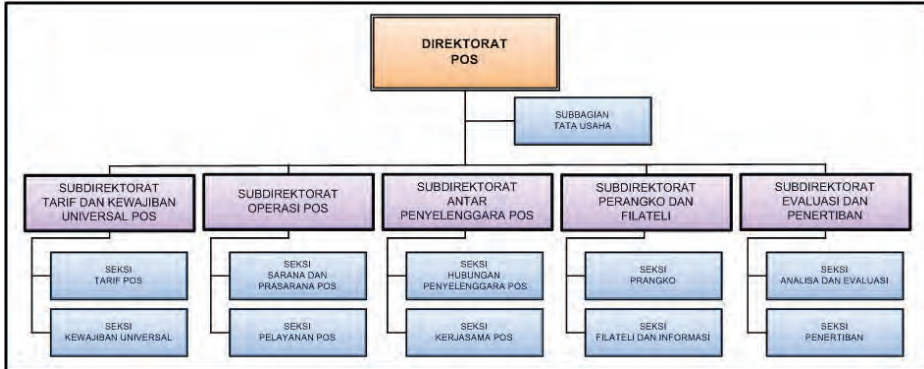


#### 2.4.2. Direktorat Pos

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi di bidang pos berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Direktorat Pos mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pos. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat Pos mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tarif dan kewajiban universal perposan, operasi perposan, penyelenggaraan perposan, perprangkoan dan filateli;
- (2) Penyiapan perumusan norma, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang tarif dan kewajiban universal perposan, operasi perposan, penyelenggaraan perposan, perprangkoan dan filateli;
- (3) Pemberian bimbingan teknis bidang produk perposan, operasi perposan penyelenggaraan perposan, perprangkoan dan filateli;
- (4) Penyiapan pemberian perijinan penyelenggaraan jasa titipan;
- (5) Pelaksanaan analisa dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan dibidang produk dan tarif perposan operasi perposan penyelenggaraan perposan, perprangkoan dan filateli;
- (6) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan dan rumah tangga Direktorat.

Gambar 2.3. Struktur Organisasi Direktorat Pos



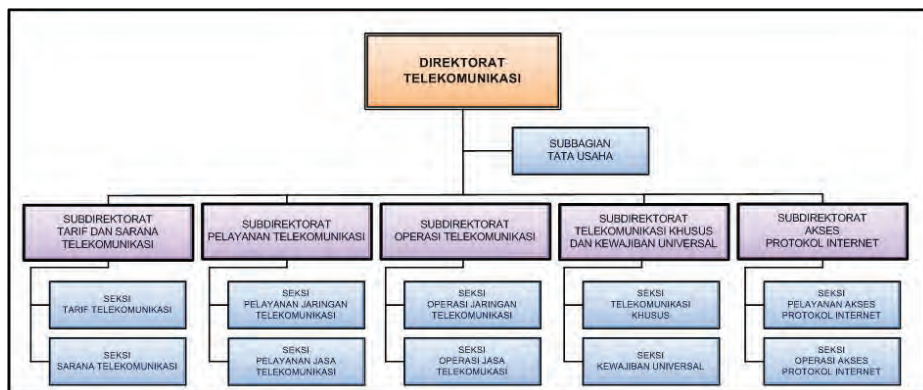
### 2.4.3. Direktorat Telekomunikasi

Direktorat Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi di bidang telekomunikasi berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Direktorat Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi dibidang hubungan telekomunikasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat Telekomunikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, operasional telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal dan akses protokol internet;
- (2) Penyusunan rencana strategis pembangunan dan rencana dasar teknis telekomunikasi nasional;
- (3) Penyiapan perumusan norma, kriteria, pedoman dan prosedur di bidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, operasional telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal dan akses protokol internet;
- (4) Pemberian bimbingan teknis di bidang tarif dan sarana telekomunikasi, pelayanan telekomunikasi, operasional telekomunikasi, telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal dan akses protokol internet;

- (5) Penyiapan pemberian perijinan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, jasa telekomunikasi khusus dan kewajiban pelayanan universal dan akses protokol internet;
- (6) Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di bidang tarif dan sarana akses protokol internet, penyelenggaraan jasa, jaringan akses protokol internet, telekomunikasi khusus dan pelayanan kewajiban pelayanan universal dan akses protokol internet;
- (7) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Gambar 2.4. Struktur Organisasi Direktorat Telekomunikasi dan Informatika



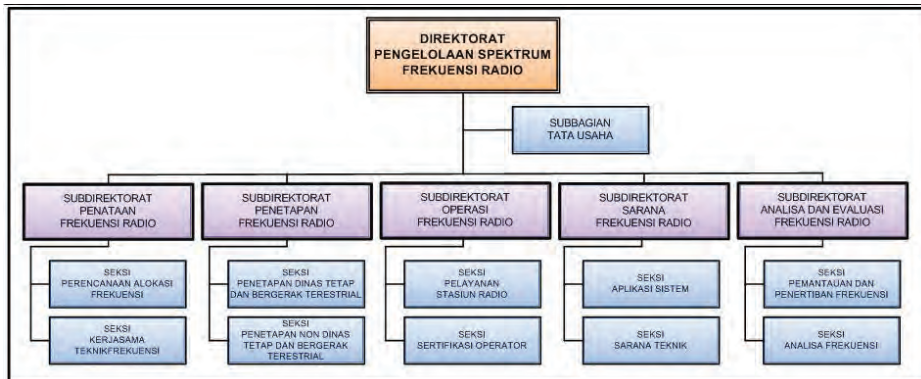
#### 2.4.4. Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio

Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, melakukan pengaturan, penyusunan program, mengadakan bimbingan teknis, serta melakukan evaluasi dan peningkatan di bidang pengelolaan spektrum frekuensi radio. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang penataan, penetapan, operasi dan sarana frekuensi radio;
- (2) Penyiapan perumusan norma, kriteria, pedoman, dan prosedur di bidang penataan, penetapan, operasi dan sarana frekuensi radio;

- (3) Pelaksanaan penataan, penetapan, operasi dan sarana frekuensi radio;
- (4) Penyiapan dan pemrosesan perijinan penggunaan frekuensi radio;
- (5) Pelaksanaan analisa dan evaluasi di bidang operasi frekuensi radio;
- (6) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Gambar 2.5. Struktur Organisasi Direktorat Pengelolaan Frekuensi Radio



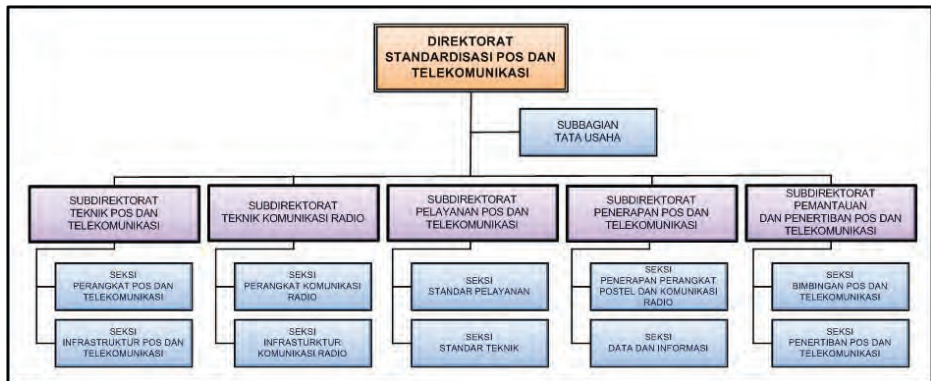
## 2.4.5. Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi

Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi di bidang standardisasi pos dan telekomunikasi berdasarkan kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Tugas dari Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi ini adalah melaksanakan perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi di bidang standar teknik dan standar pelayanan pos dan telekomunikasi serta komunikasi radio. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang standardisasi teknik pos dan telekomunikasi, teknik komunikasi radio, pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi;
- (2) Penyiapan perumusan standar di bidang standardisasi teknik pos dan telekomunikasi, teknik komunikasi radio, pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi;

- (3) Pemberian bimbingan teknis di bidang standarisasi teknik pos dan telekomunikasi, teknik komunikasi radio, pelayanan pos dan telekomunikasi, penerapan standar pos dan telekomunikasi;
- (4) Pemantauan dan penertiban standarisasi pos dan telekomunikasi;
- (5) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian dan rumah tangga Direktorat.

Gambar 2.6. Struktur Organisasi Direktorat Standardisasi Pos dan Telekomunikasi



#### 2.4.6. Direktorat Kelembagaan Internasional

Direktorat Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis, dan evaluasi, di bidang kelembagaan internasional pos dan telekomunikasi.

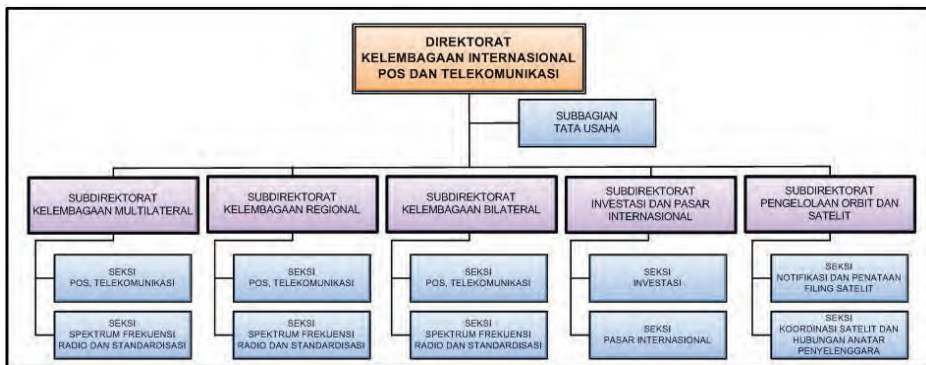
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Kelembagaan Internasional Pos dan Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi :

- (1) Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kelembagaan dan penanganan fora multilateral, regional, bilateral, investasi asing dan pengembangan pasar internasional di bidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan standarisasi pos dan telekomunikasi serta pengelolaan orbit dan satelit;
- (2) Penyiapan perumusan pedoman, norma, kriteria dan prosedur di bidang kelembagaan dan penanganan fora multilateral, regional, bilateral, investasi asing dan pengembangan pasar internasional di bidang pos, telekomunikasi, spektrum

frekuensi radio dan standardisasi pos dan telekomunikasi serta pengelolaan orbit dan satelit;

- (3) Pelaksanaan kerjasama kelembagaan multilateral, regional, bilateral, investasi asing dan pengembangan pasar internasional di bidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan standardisasi pos dan telekomunikasi serta pengelolaan orbit dan satelit;
- (4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan internasional, kegiatan fora internasional dan investasi asing serta pengembangan pasar internasional di bidang pos, telekomunikasi, spektrum frekuensi radio dan standardisasi pos dan telekomunikasi serta pengelolaan orbit dan satelit;
- (5) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

Gambar 2.7. Struktur Organisasi Direktorat Kelembagaan Internasional



## 2.4.7. Unit Pelaksana Teknis

### 2.4.7.1. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT)

Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi. Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi mengacu pada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20/PER/M.KOMINFO/4/2007 tanggal 30 April 2007.



Peranan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dalam proses Pengujian alat/perangkat telekomunikasi melakukan pengujian antara lain:

- (1) Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Radio;
- (2) Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Non Radio;
- (3) *Electromagnetic Compatibility* Alat/Perangkat Telekomunikasi;
- (4) Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi;
- (5) Jasa Penyewaan Alat.

Dari perkembangan jumlah alat dan perangkat telekomunikasi yang beredar di Indonesia yang semakin meningkat dan dirasakan kebutuhannya oleh masyarakat, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi secara terus menerus mengembangkan kemampuannya baik infrastruktur maupun sumber daya manusia.

Untuk menjamin mutu pengujian dan kompetensi laboratorium yang lebih baik, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang mengacu pada ISO-17025:2005 dan telah memperoleh akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional (KAN) LP-112-IDN sejak tahun 2001.

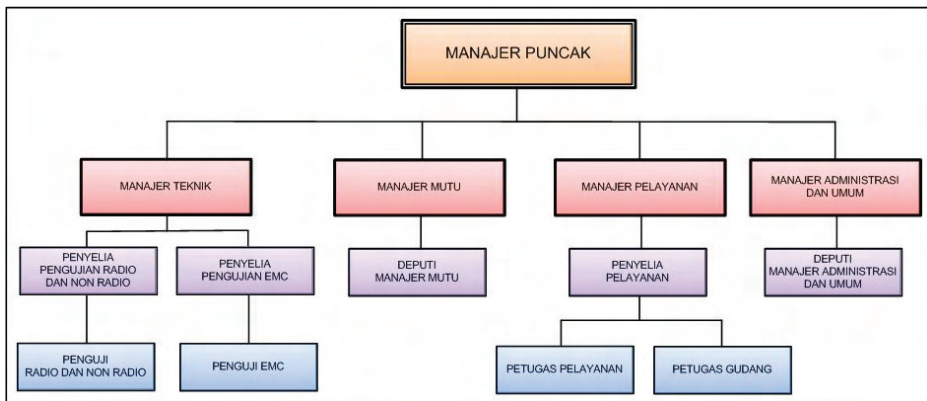
Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dalam melaksanakan pengujian alat/perangkat telekomunikasi mengacu pada Spesifikasi Teknis Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (*Technical Specification Regulation*), Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Acuan Internasional seperti ISO, ETSI, RR, ITU, IEC sehingga mampu melindungi dan menjaga kualitas alat/perangkat telekomunikasi serta menjamin bahwa alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan atau beredar di Indonesia benar-benar sesuai dengan persyaratan teknis.

Dengan misi menjadi laboratorium pengujian bertaraf internasional, BBPPT mempunyai misi untuk :

- (1) Meningkatkan kualitas pengujian perangkat telekomunikasi;
- (2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- (3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

- (4) Mendukung tumbuh kembangnya industri telematika dalam negeri;
- (5) Meningkatkan peran serta kerjasama nasional dan internasional bidang laboratorium;
- (6) Meningkatkan ruang lingkup (inovasi) layanan jasa laboratorium;
- (7) Mendukung penerapan standar wajib bagi perlindungan keselamatan, keamanan, dan kesehatan.

Gambar 2.8. Struktur Organisasi Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi



Tugas pokok Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah melaksanakan pengujian alat/perangkat telekomunikasi. Fungsi Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah :

- (1) Penyusunan rencana dan program di lingkungan Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi;
- (2) Pelaksanaan pelayanan administrasi pengujian alat/perangkat telekomunikasi;
- (3) Pelaksanaan analisa evaluasi sistem mutu pelayanan dan pengujian alat/perangkat telekomunikasi;
- (4) Pelaksanaan pengujian dan pemeliharaan alat/perangkat telekomunikasi, *electromagnetic compatibility* (EMC), dan kalibrasi;
- (5) Pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan rumah tangga.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi dilengkapi dengan sarana pendukung berupa:

- (1) Laboratorium Pengujian Perangkat Radio;
- (2) Laboratorium Pengujian Perangkat Berbasis Kabel;
- (3) Laboratorium Pengujian EMC;
- (4) Laboratorium Kalibrasi.

Jenis layanan pengujian yang dilayani oleh laboratorium-laboratorium di lingkungan BBPPT adalah :

- (1) Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Radio;
- (2) Pengujian Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Non Radio;
- (3) Pengujian *Electromagnetic Compatibility* Alat/Perangkat Telekomunikasi;
- (4) Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi;
- (5) Jasa Penyewaan Alat.

#### **2.4.7.2. Balai Telekomunikasi dan Informatika Pedesaan**

Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP) dibentuk dalam rangka pengelolaan pembiayaan penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika pedesaan yang dilaksanakan melalui pihak ketiga. Adapun tujuan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan adalah mempercepat pemerataan penyediaan akses dan layanan telekomunikasi dan informatika pedesaan sebagai bentuk tanggungjawab pelayanan dari Departemen Komunikasi dan Informatika.

Pembentukan BTIP didasari atas azas adil dan merata dalam pelayanan telekomunikasi. Azas adil dan merata, bahwa penyelenggaraan telekomunikasi memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang memenuhi syarat dan hasil-hasil dinikmati oleh masyarakat secara adil dan merata.

Visi dari pembentukan BTIP adalah sebagai “pionir penyediaan infrastruktur telematika pedesaan sebagai landasan bagi pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial serta ekonomi dalam upaya pengentasan masyarakat dari kemiskinan, penciptaan kesempatan

kerja dan pengembangan wilayah dan masyarakat serta menjembatani kesenjangan digital”.

Visi ini diterjemahkan dalam misi BTIP untuk :

- (1) Melaksanakan kegiatan pembiayaan jasa penyediaan sarana dan prasarana telematika perdesaan, dan perusahaan serta pengawasannya secara transparan, profesional dan akuntabel;
- (2) Menyediakan akses dan layanan telematika perdesaan yang dapat dimanfaatkan secara berkesinambungan dan terjangkau oleh masyarakat melalui pihak ketiga;

Tugas dan fungsi Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan adalah melaksanakan tugas pengelolaan pembiayaan penyediaan akses dan layanan telekomunikasi dan informatika.

Gambar 2.9. Struktur Organisasi Balai Telekomunikasi dan Informasi Pedesaan



Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan mempunyai wewenang untuk melakukan penarikan dan mengelola dana kontribusi pelayanan universal, mengimplementasikan evaluasi, pengawasan dan pengendalian penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan informatika perdesaan yang dilaksanakan oleh mitra usaha. Dalam melaksanakan program perluasan akses telekomunikasi ke perdesaan, BTIP menetapkan program jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Masing-masing program tersebut adalah :

**Program Jangka Pendek**

Terwujudnya desa berdering pada tahun 2009 untuk 38.471 desa di seluruh Indonesia

**Program Jangka Menengah**

Terwujudnya desa punya internet (Desa Pinter) tahun 2015 dengan mengimplementasikan layanan akses informasi diseluruh kecamatan untuk informasi cuaca, harga komoditi, pendidikan dan kebutuhan lainnya dalam rangka kemudahan informasi untuk masyarakat.

**Program Jangka Panjang**

Terbentuknya masyarakat cerdas pada tahun 2015 melalui penyelenggaraan pemusatan pelatihan pemanfaatan akses informasi, penyelenggaraan TV Broadcast (*aggregator broadcast*) berbasis kebutuhan masyarakat dan pelayanan informasi lainnya

**2.4.7.3. Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Monitor Spektrum Frekuensi Radio mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian dibidang penggunaan spektrum frekuensi radio yang meliputi kegiatan pengamatan, deteksi sumber pancaran, monitoring, penertiban, evaluasi dan pengujian ilmiah, pengukuran, koordinasi monitoring frekuensi radio, penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan dan perbaikan perangkat, serta urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Monitor Spektrum Frekuensi Radio menyelenggarakan fungsi:

- (1) Penyusunan rencana dan program, penyediaan suku cadang, pemeliharaan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- (2) Pelaksanaan pengamatan, deteksi lokasi sumber pancaran, pemantauan/monitor spektrum frekuensi radio;
- (3) Pelaksanaan kalibrasi dan perbaikan perangkat monitor spektrum frekuensi radio;
- (4) Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio;
- (5) Koordinasi monitoring spektrum frekuensi radio;

- (6) Penertiban dan penyidikan pelanggaran terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio;
- (7) Pelayanan/pengaduan masyarakat terhadap gangguan spektrum frekuensi radio;
- (8) Pelaksanaan evaluasi dan pengujian ilmiah serta pengukuran spektrum frekuensi radio.

Unit Pelaksana Teknis Monitor Spektrum Frekuensi Radio di klasifikasikan dalam 4 (empat) kelas yaitu :

- (1) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas I
- (2) Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio Kelas II
- (3) Loka Monitor Spektrum Frekuensi Radio
- (4) Pos Monitor Spektrum Frekuensi Radio

## Bab 3

# Bidang Kepegawaian

Kondisi dan komposisi kepegawaian dalam satu unit kerja menggambarkan daya dukung yang dimiliki oleh unit kerja tersebut dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kondisi dan komposisi tersebut juga mencerminkan kemampuan pelayanan yang seharusnya dapat dilakukan oleh unit kerja tersebut, termasuk unit-unit kerja di dalam lingkup Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi (Ditjen Postel). Data dan informasi statistik bidang kepegawaian ini akan memberikan gambaran tentang perkembangan kondisi dan komposisi sumber daya manusia (pegawai) di Ditjen Postel dan unit kerja didalamnya, baik di kantor pusat maupun di Unit Pelayanan Teknis (UPT). Kuantitas dan kualitas yang dicerminkan oleh tingkat pendidikan SDM Ditjen Postel sebagai pelaksana tugas dapat menjadi indikator yang mencerminkan kemampuan Ditjen Postel dalam menjalankan fungsi regulator dalam penyelenggaraan pos dan fasilitator sektor telekomunikasi di Indonesia.

### 3.1. Jumlah Pegawai

Penggabungan Ditjen Postel ke Kementerian Komunikasi dan Informatika sejak tahun 2006 dari sebelumnya berada dibawah Departemen Perhubungan berdampak juga pada perubahan jumlah dan komposisi pegawai di lingkup Ditjen Postel. Pengaruh tersebut diantaranya adalah pada pendataan khusus untuk pegawai yang statusnya diperbantukan ke instansi lain. Sampai dengan tahun 2007, belum terdata pegawai Ditjen Postel yang diperbantukan ke instansi lain. Pada tahun 2008 terdata 18 pegawai Ditjen Postel yang diperbantukan ke instansi lain.

Pada tahun 2009 terdapat 26 orang pegawai Ditjen Postel yang diperbantukan. Pegawai yang diperbantukan tersebut diantaranya ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Departemen Teknis lainnya. Semakin banyaknya lembaga-lembaga yang memiliki tugas khusus dan membutuhkan tenaga yang ahli pada bidang telekomunikasi

dan yang terkait menyebabkan adanya kebutuhan dari pegawai di Ditjen Pos dan Telekomunikasi yang diperbantukan pada lembaga-lembaga khusus tersebut.

Tabel 3.1 Perkembangan jumlah pegawai Ditjen Postel tahun 2004 – 2009.

No	Unit Kerja	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Setditjen	185	193	185	184	184	191
2	DIT. POS	40	40	40	41	44	45
3	DIT. Telekomunikasi	63	63	69	58	62	63
4	DIT. Frekuensi	93	96	92	92	89	92
5	DIT. Standarisasi	50	51	51	54	57	54
6	DIT. Kelembagaan Int'l	36	34	31	31	34	42
7	UPT	492	609	600	694	838	883
8	Pegawai Diperbantukan	0	0	0	0	18	26
	Jumlah	959	1.086	1.068	1.154	1.326	1.396

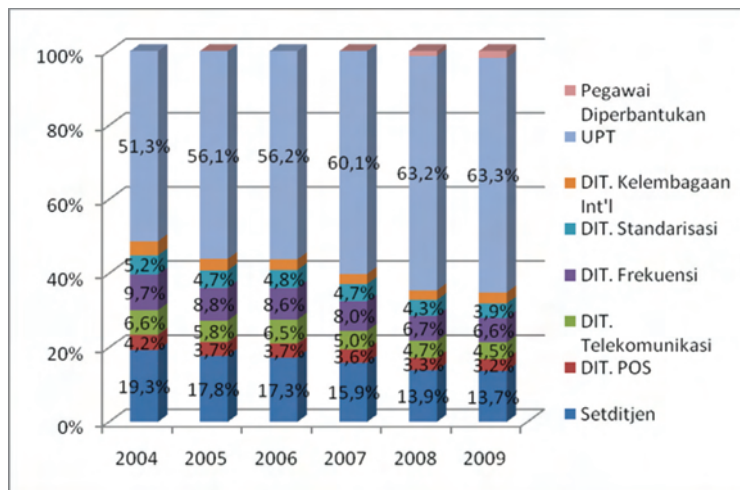
Peningkatan jumlah pegawai di Ditjen Postel berlangsung secara gradual. Setelah meningkat cukup banyak pada tahun 2005, dalam dua tahun berikutnya tidak banyak perubahan jumlah pegawai, bahkan menurun di tahun 2006. Peningkatan signifikan jumlah pegawai di Ditjen Pos dan Telekomunikasi terjadi lagi pada tahun 2008. Peningkatan ini terutama berasal dari penambahan pegawai di UPT yang jumlahnya bertambah 144 orang. Peningkatan jumlah pegawai pada tahun 2009 juga terutama berasal dari penambahan jumlah pegawai UPT sebanyak 45 orang, diantaranya karena mulai beroperasinya dua UPT baru yaitu UPT Tahuna dan UPT Sorong.

Dari sisi komposisi jumlahnya, pegawai Ditjen Postel didominasi oleh pegawai dari UPT yang jumlahnya juga meningkat dari tahun ke tahun seperti ditunjukkan oleh gambar 3.1. Pada tahun 2001 proporsi pegawai UPT sudah mencapai 51,3% dari total pegawai di Ditjen Pos dan Telekomunikasi. Semakin bertambahnya pegawai UPT dan dioperasikannya UPT baru menyebabkan proporsinya juga meningkat dimana pada tahun 2009, sekitar 63% dari total pegawai Ditjen Postel adalah pegawai UPT. Urutan terbanyak berikutnya adalah pegawai yang berada di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) di Ditjen Postel. Meskipun jumlahnya fluktuatif dari tahun ke tahun, proporsi pegawai Setditjen mencapai 13,7%. Menurunnya proporsi pegawai Setditjen maupun satuan kerja lain di Ditjen Postel bukan karena jumlah pegawainya yang menurun, namun lebih disebabkan oleh jumlah pegawai UPT yang semakin meningkat signifikan dan menyebabkan proporsinya semakin besar. Dibandingkan dengan UPT dan Setditjen, satuan kerja (satker) lain di lingkup Ditjen Postel memiliki jumlah pegawai yang jauh lebih sedikit dan hampir



tidak ada penambahan signifikan. Sementara Direktorat Kelembagaan Internasional menjadi satker di Ditjen Postel dengan jumlah pegawai paling sedikit.

Gambar 3.1. Perkembangan Proporsi jumlah pegawai di Ditjen Postel



### 3.2 Tingkat Pendidikan

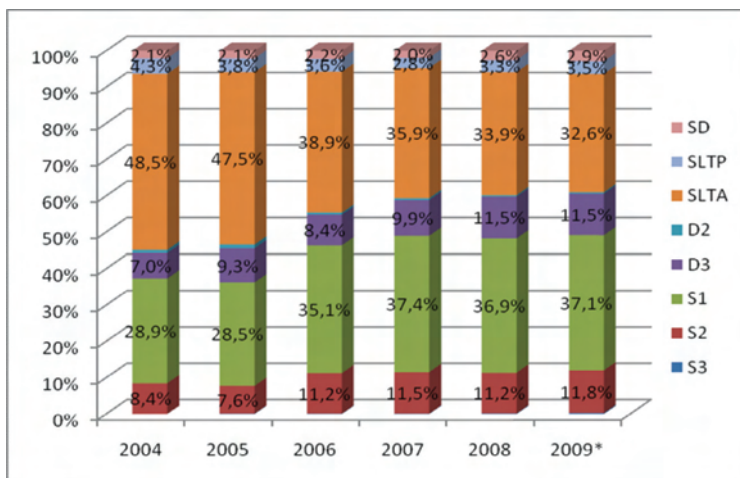
Tingkat pendidikan menjadi salah satu indikator kualitas sumberdaya manusia pegawai yang dimiliki oleh Ditjen Postel. Tantangan tugas dan fungsi yang semakin berat sejalan dengan perkembangan industri teknologi yang semakin pesat. Komposisi pegawai Ditjen Postel menurut tingkat pendidikan juga menunjukkan semakin bertambahnya jumlah pegawai dengan strata pendidikan tinggi. Tabel 3.2. menunjukkan pegawai dengan pendidikan sarjana yang pada tahun 2004 baru berjumlah 277, pada tahun 2009 meningkat sekitar 86% menjadi 440. Bahkan untuk pegawai berpendidikan strata 2 (Master/Magister) peningkatannya dari tahun 2004 ke tahun 2009 menjadi lebih dari 100% yaitu dari hanya 81 orang pegawai berpendidikan strata 2 pada 2004 menjadi 164 pada tahun 2009. Sebaliknya jumlah pegawai dengan pendidikan dasar dan menengah hanya mengalami sedikit penambahan. Bahkan untuk pegawai dengan jenjang pendidikan SLTA menunjukkan penurunan jumlah, meskipun tidak cukup besar penurunannya.

Tabel 3.2 Perkembangan jumlah pegawai Ditjen Postel menurut tingkat pendidikan.

Tahun	S3	S2	Pendidikan Dokter	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
2004	0	81	0	277	67	8	465	41	20	959
2005	1	83	0	310	101	11	516	41	23	1.086
2006	1	122	0	383	92	6	424	39	24	1.091
2007	1	135	0	440	116	6	422	33	23	1.176
2008	2	149	0	489	153	5	450	44	34	1.326
2009	4	164	2	517	160	5	455	49	40	1.396

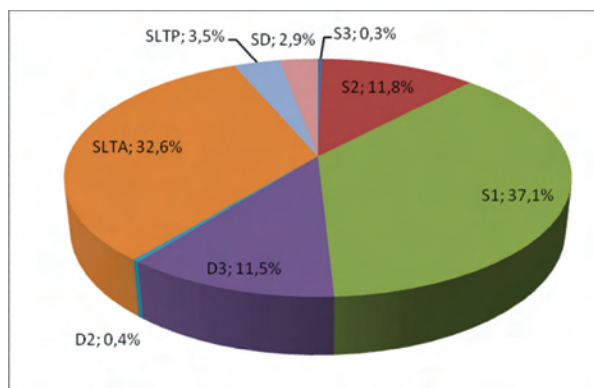
Jika dilihat komposisinya, peningkatan jumlah pegawai yang berpendidikan tinggi yang cukup banyak telah memberikan kontribusi pada terjadinya pergeseran komposisi pegawai Ditjen Postel menurut tingkat pendidikan seperti ditunjukkan oleh gambar 3.2. Jika pada 2004 pegawai Ditjen Postel masih didominasi oleh pegawai berpendidikan menengah yang mencapai 48,5% (atau hampir 50% jika digabung dengan pegawai berpendidikan dasar), pada tahun 2009 proporsi terbesar pegawai Ditjen Postel adalah yang berpendidikan sarjana yang mencapai 37,1% dari hanya 28,9% pada 2004. Gambar 3.2 juga menunjukkan proporsi yang semakin menurun untuk pegawai berpendidikan dasar dan menengah. Sebaliknya untuk pegawai berpendidikan tinggi terutama sarjana, diploma dan pasca sarjana, proporsinya menunjukkan peningkatan.

Gambar 3.2. Proporsi pegawai di Ditjen Postel menurut Pendidikan 2004-2009



Komposisi pegawai dengan tingkat pendidikan tinggi yang semakin dominan terlihat jelas pada gambar 3.3. yang menunjukkan proporsi pegawai menurut tingkat pendidikan pada tahun 2009. Jika digabungkan, pegawai Ditjen Postel dengan pendidikan sarjana dan pasca sarjana sudah mencapai hampir 50%. Bahkan jika digabung dengan pegawai berpendidikan diploma, proporsinya mencapai 61% dari total pegawai Ditjen Postel. Hal ini menjadi wajar dan merupakan sebuah tuntutan mengingat Ditjen Postel harus melayani kegiatan dan industri telekomunikasi yang perkembangannya demikian cepat dan teknologi yang juga semakin berkembang pesat.

Gambar 3.3 Komposisi pegawai Ditjen Postel menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009



### 3.2.1 Pegawai Setditjen Postel

Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) merupakan satuan kerja non UPT yang memiliki jumlah pegawai paling banyak dilingkungan Ditjen Postel. Satuan kerja yang menjalankan tugas sebagai pendukung bagi direktorat-direktorat teknis yang di lingkup Ditjen Postel ini memiliki pegawai hampir 200 orang pada 2009, sementara direktorat hanya memiliki pegawai kurang dari 100 orang bahkan kurang dari 50 orang pegawai.

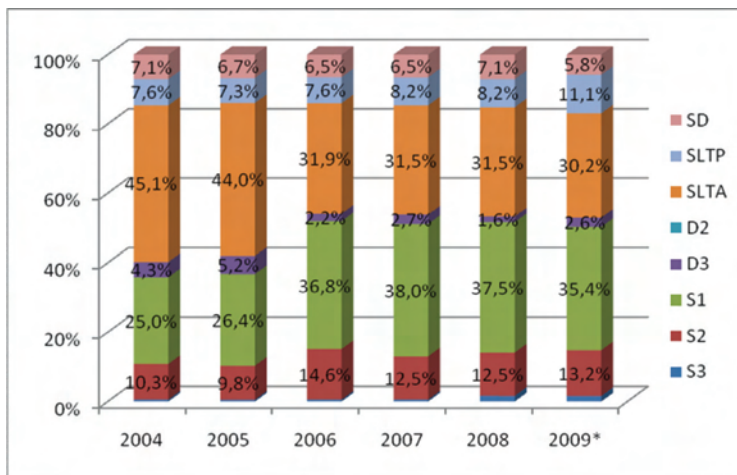
Dari sisi tingkat pendidikan, komposisi pegawai di Setditjen yang berpendidikan tinggi cukup banyak. Pegawai dengan pendidikan sarjana di Setditjen pada tahun 2009 telah mencapai 69 orang atau 35,4% dari total pegawai Setditjen. Bahkan untuk pegawai berpendidikan S3 (doktoral), proporsinya adalah 75% dari pegawai di Ditjen Postel yang berpendidikan S3.

Tabel 3.3 Perkembangan jumlah pegawai Setditjen Postel menurut tingkat pendidikan

No	Tahun	S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	2004	1	19	47	8	0	83	14	13	185
2	2005	1	19	51	10	0	85	14	13	193
3	2006	1	27	68	4	0	59	14	12	185
4	2007	1	23	70	5	0	58	15	12	184
5	2008	3	23	69	3	0	58	15	13	184
6	2009	3	25	69	5	0	57	21	11	191

Jika dilihat dari perkembangan komposisinya seperti ditunjukkan oleh gambar 3.4, terjadi pergeseran yang cukup signifikan dalam komposisi pegawai terutama dari sebelum tahun 2005 ke 2006 dan berlanjut hingga ke 2009. Jika pada tahun 2004, pegawai Setditjen dengan tingkat pendidikan dasar dan menengah masih hampir 60% dengan tamatan SMA mencapai 45%, pada tahun 2009 hanya tinggal 45% dengan tamatan SMA hanya 30,2%. Sebaliknya, pegawai berpendidikan tinggi meningkat dari total hanya 37,3% pada tahun 2004 menjadi 48,9% pada tahun 2009. Secara implisit ini juga menunjukkan ada upaya kuat dari jajaran Setditjen Postel untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang dimilikinya.

Gambar 3.4. Komposisi pegawai di SetDitjen Postel menurut Pendidikan 2004-2009



### 3.2.2 Pegawai Direktorat di Ditjen Postel

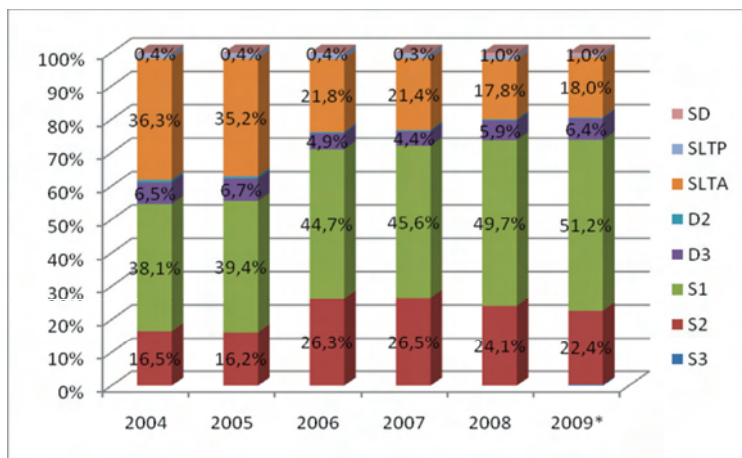
Sementara untuk pegawai di Direktorat di Ditjen Postel, meskipun jumlah pegawai tidak meningkat secara signifikan dalam lima tahun terakhir (hanya meningkat 6% dari 2004 ke 2009), namun terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam tingkat pendidikan pegawainya. Pegawai dengan pendidikan sekolah menengah misalnya menurun tajam dari 105 pada tahun 2004 menjadi hanya tinggal 55 pada tahun 2009, atau berkurang hampir 50%. Sebaliknya pegawai dengan pendidikan tinggi (sarjana dan pasca sarjana) meningkat dari 152 pada tahun 2004 menjadi 218 pada tahun 2009 atau meningkat 43%. Seperti terlihat pada tabel 3.4.

Tabel 3.4 Jumlah pegawai Direktorat di Ditjen Postel menurut tingkat pendidikan.

No	Tahun	S3	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	2004	0	46	106	18	2	101	4	1	278
2	2005	0	46	112	19	2	100	4	1	284
3	2006	0	70	119	13	1	58	4	1	266
4	2007	0	78	134	13	1	63	4	1	294
5	2008	0	69	142	17	1	51	3	3	286
6	2009	1	66	151	19	1	53	2	3	295

Peningkatan jenjang pendidikan ini secara otomatis juga menggeser komposisi pegawai di Direktorat di Ditjen Postel menurut pendidikan. Dari gambar 3.5 terlihat bahwa terjadi pergeseran komposisi yang cukup signifikan dari struktur pegawai di Direktorat di Ditjen Postel menurut tingkat pendidikan. Pegawai berpendidikan menengah yang proporsinya mencapai hampir 37% pada tahun 2004 menjadi hanya tinggal 19% pada tahun 2009. Sebaliknya pegawai dengan pendidikan tinggi meningkat tajam proporsinya dari 54,6% pada tahun 2004 menjadi 73,6% pada tahun 2009. Meskipun sejak lima tahun lalu komposisi pegawai yang berpendidikan tinggi lebih dominan di direktorat, namun tetap ada upaya dari direktorat di lingkungan Ditjen Postel untuk meningkatkan kualitas pegawainya melalui peningkatan jenjang pendidikan.

Gambar 3.5. Komposisi pegawai Direktorat di Ditjen Postel menurut Pendidikan 2004-2009



### 3.2.3 Pegawai UPT

Unit Pelaksana Teknis yang keberadaannya menyebar di 35 lokasi di seluruh Indonesia merupakan satuan kerja di lingkungan Ditjen Postel yang memiliki jumlah pegawai paling banyak. Jumlah pegawai di UPT ini juga meningkat pesat dari tahun ke tahun sejalan dengan semakin banyaknya UPT yang dibentuk dan beroperasi. Pegawai UPT yang baru berjumlah 525 pada tahun 2004 meningkat menjadi 883 pada tahun 2009 atau meningkat sebanyak 68,2%. Setiap tahun pegawai jumlah pegawai UPT meningkat rata-rata 11,4%.

Tabel 3.5 Perkembangan Jumlah Pegawai UPT Ditjen Postel Menurut Tingkat Pendidikan.

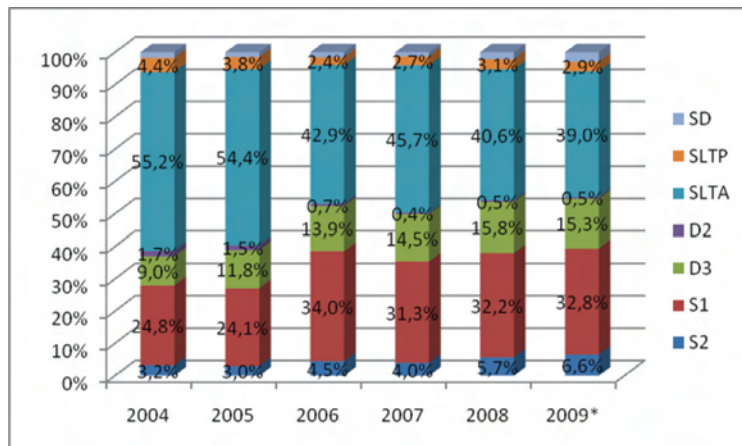
No	Tahun	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	2004	17	130	47	9	290	23	9	525
2	2005	18	147	72	9	331	23	9	609
3	2006	32	240	98	5	303	17	11	706
4	2007	27	211	98	3	308	18	9	674
5	2008	48	270	132	4	340	26	18	838
6	2009	58	290	135	4	344	26	26	883

Dari sisi jenjang pendidikan, meskipun sama-sama mengalami peningkatan, namun peningkatan jumlah pegawai untuk jenjang pendidikan tinggi jauh lebih besar daripada pegawai dengan pendidikan menengah. Pegawai dengan jenjang pendidikan SMA hanya naik 18% dalam 5 tahun terakhir sementara pegawai dengan jenjang pendidikan sarjana

meningkat 123% pada periode yang sama. Bahkan untuk pegawai dengan jenjang pendidikan S2 meningkat 241%.

Peningkatan tersebut juga berdampak pada pergeseran dalam komposisi pegawai UPT menurut jenjang pendidikan. Pegawai dengan jenjang pendidikan menengah yang sampai tahun 2004 lebih dominan dalam komposisi pegawai UPT, pada tahun 2009 menjadi hampir sama dengan pegawai berpendidikan tinggi seperti terlihat pada gambar 3.6. Komposisi pegawai berpendidikan menengah menurun dari hampir 60% pada tahun 2004 menjadi tinggal sekitar 42 pada 2009. Pada periode yang sama, pegawai berpendidikan tinggi meningkat dari hanya 28% menjadi 39,4%. Meskipun lebih banyak pada kegiatan teknis lapangan, namun upaya peningkatan kualitas pegawai di UPT juga berlangsung sebagaimana pada Direktorat dan Setditjen di Ditjen Postel.

Gambar 3.6. Komposisi Pegawai UPT Ditjen Postel menurut Pendidikan 2004-2009



Sebaran pegawai UPT juga bervariasi antar UPT di berbagai kota. UPT-UPT yang berlokasi di kota besar dengan unit kerja yang lebih besar memiliki jumlah pegawai yang lebih banyak. Sementara UPT yang berlokasi di kota kecil atau daerah kabupaten memiliki jumlah pegawai yang lebih sedikit. UPT yang berlokasi di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan dan Yogyakarta memiliki tenaga kerja lebih dari 30, bahkan untuk Jakarta mencapai 50 orang dengan komposisi jenjang pendidikan pegawai yang juga lebih tinggi. Sementara UPT yang berada di Gorontalo, Ternate, Aceh, Palangkaraya, Banjarmasin, Bangka Belitung hanya

memiliki pegawai berjumlah kurang dari 20. Hal ini terkait dengan beban pengawasan yang harus dilakukan dimana pada daerah kota besar memiliki beban pengawasan lebih besar dengan banyaknya stasiun radio dan sejenisnya.

Tabel 3.6. Jumlah Pegawai per UPT menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2009

N o	UPT	S2	S1	D3	D2	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
1	UPT NAD	0	8	4	0	5	0	0	17
2	UPT MEDAN	0	12	0	0	18	1	2	33
3	UPT PADANG	0	3	4	0	14	1	1	23
4	UPT PEKANBARU	2	5	5	0	7	0	0	19
5	UPT JAMBI	2	5	7	0	11	0	0	25
6	UPT BABEL	0	3	5	0	7	1	0	16
7	UPT BATAM	1	11	4	0	8	0	0	24
8	UPT PALEMBANG	1	17	2	0	6	0	0	26
9	UPT BENGKULU	1	9	5	0	5	0	1	21
10	UPT LAMPUNG	2	9	5	0	3	1	1	21
11	UPT DKI JAKARTA	4	10	1	1	24	8	2	50
12	UPT BANTEN	3	12	3	0	4	0	0	22
13	UPT BANDUNG	4	10	3	0	21	3	3	44
14	UPT YOGYAKARTA	3	11	1	1	19	1	1	37
15	UPT SEMARANG	5	18	4	0	13	1	2	43
16	UPT SURABAYA	3	15	1	0	20	2	3	44
17	UPT DENPASAR	2	9	6	0	8	0	1	26
18	UPT MATARAM	0	10	2	0	8	0	1	21
19	UPT KUPANG	1	8	4	1	11	1	2	28
20	UPT SAMARINDA	2	6	4	8	0	0	0	20
21	UPT BALIKPAPAN	1	6	4	0	7	0	0	18
22	UPT PONTIANAK	2	5	5	0	7	0	1	20
23	UPT PALANGKARAYA	1	2	5	0	7	1	0	16
24	UPT BANJARMASIN	1	5	3	1	6	2	0	18
25	UPT MANADO	1	13	1	0	5	0	0	20
26	UPT PALU	0	10	4	0	16	0	0	30
27	UPT MAKASAR	3	10	4	0	16	0	0	33
28	UPT AMBON	0	6	1	0	11	0	0	18
29	UPT GORONTALO	1	7	4	0	2	0	0	14
30	UPT TERNATE	0	5	3	0	5	0	1	14
31	UPT KENDARI	1	4	5	0	8	0	0	18
32	UPT JAYAPURA	0	6	3	0	8	0	0	17
33	UPT MERAUKE	0	4	3	0	7	1	0	15
34	UPT Tahuna	0	1	2	0	2	0	0	5
35	UPT Sorong	0	1	0	0	0	0	0	1
	Jumlah	47	276	117	12	319	24	22	817



# Bab 4

## Bidang Regulasi

Fungsi Ditjen Postel sebagai regulator pada bidang pos dan telekomunikasi ditunjukkan dengan perangkat peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan dalam bidang tersebut. Ditjen Postel dalam hal ini berperan sebagai lembaga yang melaksanakan, mengawasi, mengawal atau yang mengeluarkan peraturan tersebut untuk diikuti oleh semua pihak (stakeholder) di bidang pos dan telekomunikasi.

Perangkat peraturan yang dikeluarkan untuk mengatur dan mengawasi operasional bidang pos dan telekomunikasi ini meliputi peraturan dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Peraturan Direktur Jenderal (Dirjen) Pos dan Telekomunikasi serta Surat Edaran Menteri. Dalam lima tahun terakhir, cukup banyak peraturan yang dikeluarkan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan bidang pos dan telekomunikasi, khususnya yang bersifat teknis. Sementara peraturan yang bersifat kebijakan dan ketentuan umum tidak terlalu banyak dikeluarkan.

### 4.1 Undang-Undang

Selama lima tahun terakhir, hanya terdapat dua undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat terkait dengan kebijakan bidang pos dan telekomunikasi. Peraturan dalam bentuk undang-undang ini memang tidak banyak dikeluarkan, untuk yang lebih bersifat ketentuan umum akan diterjemahkan lagi dalam ketentuan yang lebih bersifat teknis melalui peraturan-peraturan dibawahnya. Selain itu, masa berlaku peraturan dalam bentuk Undang-Undang relatif lebih lama dibanding peraturan teknis.

Dari dua Undang-Undang yang dikeluarkan tersebut, satu Undang-Undang dikeluarkan pada tahun 2005 yang tidak secara khusus terkait dengan bidang-bidang teknis di Ditjen Postel. Satu Undang-Undang lainnya dikeluarkan pada tahun 2009, terkait dengan bidang Peroposan yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 2009 tentang Pos. Undang-Undang ini

menggantikan Undang-Undang No. 6 Tahun 1984 tentang Pos yang dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan yang terjadi saat ini terutama dalam industri pos dan jasa titipan.

Tabel 4.1 Statistik Undang-Undang menurut Bidang.

NO.	JENIS PERATURAN	2005	2006	2007	2008	2009	JUMLAH
1	PERPOSAN	0	0	0	0	1	1
2	TELEKOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0
3	FREKUENSI	0	0	0	0	0	0
4	STANDARDISASI	0	0	0	0	0	0
5	BIDANG LAIN-LAIN	1	0	0	0	0	1

## 4.2 Peraturan Pemerintah

Pada tingkatan peraturan yang sedikit lebih teknis yaitu dalam bentuk Peraturan Pemerintah, selama lima tahun terakhir juga tidak banyak peraturan pemerintah yang dikeluarkan terkait dengan bidang pos dan telekomunikasi. Selama periode ini hanya dikeluarkan dua peraturan pemerintah yaitu yang dikeluarkan pada tahun 2005 dan 2009 sebagaimana ditunjukkan pada tabel 4.2. Kedua Peraturan Pemerintah ini juga lebih terkait bidang lain dalam tugas pokok dan fungsi Ditjen Postel dan tidak terkait secara khusus dengan direktorat teknis di Ditjen Postel. Pada periode ini, belum dikeluarkan Peraturan Pemerintah yang lebih teknis yang menjabarkan UU No. 38 tahun 2009 tentang Pos.

Tabel 4.2 Statistik Peraturan Pemerintah menurut Bidang.

NO.	JENIS PERATURAN	2005	2006	2007	2008	2009	JUMLAH
1	PERPOSAN	0	0	0	0	0	0
2	TELEKOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0
3	FREKUENSI	0	0	0	0	0	0
4	STANDARDISASI	0	0	0	0	0	0
5	BIDANG LAIN-LAIN	1	0	0	0	1	2

## 4.3 Peraturan Presiden

Regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden dalam lima tahun terakhir lebih banyak dikeluarkan pada tahun 2008. Dari lima Peraturan Presiden yang dikeluarkan pada periode 2005 sampai 2009, tiga peraturan dikeluarkan pada tahun 2008. Sementara dua Peraturan Presiden lainnya dikeluarkan masing-masing pada tahun 2006 dan 2009 seperti terlihat pada

Tabel 4.3. Dari sisi jenis peraturannya, Peraturan Presiden pada bidang pos dan telekomunikasi yang dikeluarkan pada periode ini lebih banyak terkait dengan bidang pos. Dari lima Peraturan Presiden yang dikeluarkan, 80% merupakan Peraturan Presiden yang terkait dengan bidang perposan.

Tabel 4.3 Statistik Peraturan Presiden menurut Bidang.

NO.	JENIS PERATURAN	2005	2006	2007	2008	2009	JUMLAH
1	PERPOSAN	0	1	0	3	0	4
2	TELEKOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0
3	FREKUENSI	0	0	0	0	0	0
4	STANDARDISASI	0	0	0	0	0	0
5	BIDANG LAIN-LAIN	0	0	0	0	1	1

#### 4.4 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika

Pada tingkatan yang lebih teknis, yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, lebih banyak peraturan yang dikeluarkan. Tabel 4.4. menunjukkan jumlah peraturan dalam bentuk Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dikeluarkan dalam lima tahun terakhir. Pada periode tersebut telah dikeluarkan 82 buah Peraturan Menteri Kominfo pada berbagai bidang teknis di Ditjen Pos dan telekomunikasi.

Tabel 4.4 Statistik Peraturan Menteri Kominfo menurut Bidang.

NO.	JENIS PERATURAN	2005	2006	2007	2008	2009	JUMLAH
1	PERPOSAN	1	0	0	0	0	1
2	TELEKOMUNIKASI	10	11	5	16	8	50
3	FREKUENSI	2	5	2	0	14	23
4	STANDARDISASI	1	0	0	2	3	6
5	BIDANG LAIN-LAIN	0	0	1	0	2	3

Dari sisi persebaran periode dikeluarkan, relatif merata pada lima tahun terakhir ini kecuali pada tahun 2007 yang relatif sedikit dan tahun sebaliknya 2009 yang relatif lebih banyak. Pada tahun 2007 hanya dikeluarkan 8 Peraturan Menteri Kominfo, sementara pada tahun 2009 dikeluarkan 27 Peraturan Menteri Kominfo. Namun dari sisi jenis dan keterkaitan dengan bidang teknis, paling banyak dikeluarkan Peraturan Menteri Kominfo untuk bidang telekomunikasi. Hal ini terkait dengan perkembangan bidang telekomunikasi yang sangat

pesat pada periode tersebut. Dari 82 Peraturan Menteri yang dikeluarkan, sebanyak 50 atau 61% merupakan Peraturan Menteri Kominfo yang terkait dengan bidang telekomunikasi, diikuti dengan bidang Frekuensi sebanyak 28%. Sebaliknya, Peraturan Menteri Kominfo yang dikeluarkan terkait bidang Perposan pada periode lima tahun terakhir ini hanya 1 buah.

#### 4.5 Keputusan Menteri Kominfo

Peraturan lain yang dikeluarkan pada level kementerian adalah Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika. Dibanding Peraturan Menteri, lebih sedikit Keputusan Menteri Kominfo yang dikeluarkan sepanjang lima tahun terakhir. Dalam periode tahun 2005 - 2009 telah dikeluarkan sebanyak 36 Keputusan Menteri Kominfo seperti terlihat pada tabel 4.5. Tahun 2009 ini menjadi tahun terbanyak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kominfo yaitu sebanyak 17 keputusan atau hampir separuh dari Keputusan Menteri yang dibuat dalam periode tersebut.

Tabel 4.5 Statistik Keputusan Menteri Kominfo menurut Bidang.

NO.	JENIS PERATURAN	2005	2006	2007	2008	2009	JUMLAH
1	PERPOSAN	0	0	0	0	0	0
2	TELEKOMUNIKASI	0	3	2	3	4	12
3	FREKUENSI	0	7	1	1	12	21
4	STANDARDISASI	0	0	0	0	0	0
5	BIDANG LAIN-LAIN	0	0	0	0	3	3

Berbeda dengan tema-tema atau bidang isu pada Peraturan Menteri Kominfo, Keputusan Menteri Kominfo yang dikeluarkan pada periode 2005-2009 paling banyak adalah yang terkait dengan bidang Frekuensi, diikuti oleh bidang telekomunikasi. Tidak ada Keputusan Menteri yang dikeluarkan yang terkait dengan bidang pos dan standarisasi. Pada tahun 2006, dari 10 Keputusan Menteri Kominfo yang dikeluarkan, sekitar 70% nya terkait dengan bidang frekuensi. Demikian juga pada tahun 2009 dimana sekitar 70 Keputusan Menteri yang dikeluarkan juga terkait dengan Frekuensi. Keputusan ini umumnya terkait dengan penetapan penggunaan atau alokasi frekuensi. Secara total dalam periode lima tahun terakhir, sekitar 58% Keputusan Menteri yang dikeluarkan dalah terkait dengan frekuensi dan hanya 33% yang terkait dengan telekomunikasi.

## 4.6 Peraturan Dirjen Postel

Pada peraturan di tingkatan yang lebih rendah, terdapat Peraturan Dirjen Postel sebagai instrumen pengaturan yang dilakukan oleh Ditjen Postel. Dalam lima tahun terakhir telah dikeluarkan 50 Peraturan Dirjen Postel yang terkait dengan bidang-bidang di Ditjen Postel seperti terlihat pada Tabel 4.6. Dari sisi bidang yang terkait, berbeda dengan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri, peraturan Ditjen yang dikeluarkan dalam lima tahun terakhir ini paling banyak justru yang terkait dengan bidang standarisasi. Dari 50 Peraturan Dirjen yang dikeluarkan, sebanyak 72% terkait dengan bidang standarisasi, diikuti dengan bidang telekomunikasi sebanyak 18%. Peraturan Dirjen yang terkait dengan bidang standarisasi terutama banyak dikeluarkan pada tahun 2005, 2008 dan 2009. Dari sisi persebaran tahun dikeluarkannya, Peraturan Dirjen Postel ini paling banyak dikeluarkan tahun 2009 yaitu sebanyak 14 peraturan.

Tabel 4.6 Statistik Peraturan Dirjen Postel menurut Bidang.

NO.	JENIS PERATURAN	2005	2006	2007	2008	2009	JUMLAH
1	PERPOSAN	0	0	0	1	0	1
2	TELEKOMUNIKASI	2	4	2	0	1	9
3	FREKUENSI	1	0	0	0	1	1
4	STANDARDISASI	8	4	2	11	11	36
5	BIDANG LAIN-LAIN	0	1	0	1	1	3

## 4.7 Keputusan Bersama Menteri Kominfo

Selain melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian dan Ditjen Postel, pengaturan bidang pos dan telekomunikasi juga dilakukan melalui Keputusan Bersama antara Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan Kementerian lainnya. Namun peraturan dalam bentuk Keputusan Bersama ini tidak banyak dikeluarkan dibanding peraturan lainnya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir hanya dikeluarkan dua buah Keputusan Bersama Menteri Komunikasi dan Informatika dengan Kementerian lainnya seperti ditunjukkan oleh Tabel 4.7. Satu keputusan bersama dikeluarkan tahun 2005 terkait bidang frekuensi, sementara satu keputusan bersama lagi dikeluarkan tahun 2009. Tidak banyaknya peraturan dalam bentuk Keputusan Bersama Menteri ini karena hanya dikeluarkan untuk hal-hal yang

terkait dengan bidang kerja pada kementerian lainnya dan memerlukan pengaturan bersama.

Tabel 4.7 Statistik Keputusan Bersama Menteri Kominfo menurut Bidang.

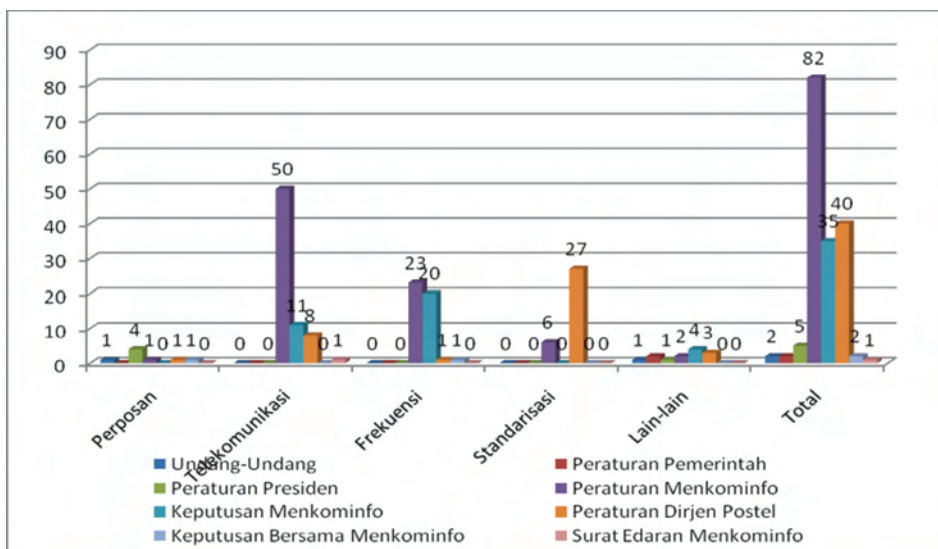
NO.	JENIS PERATURAN	2005	2006	2007	2008	2009	JUMLAH
1	PERPOSAN	0	0	0	0	1	1
2	TELEKOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0
3	FREKUENSI	1	0	0	0	0	1
4	STANDARDISASI	0	0	0	0	0	0
5	BIDANG LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0

Secara keseluruhan dalam lima tahun terakhir, bidang telekomunikasi dan bidang frekuensi merupakan bidang-bidang di Ditjen Postel yang paling banyak pengaturan didalamnya dan memerlukan adanya regulasi khusus untuk pengaturannya. Selain karena kedua bidang ini saling terkait khususnya penggunaan frekuensi untuk telekomunikasi, hal ini juga terkait dengan booming perkembangan industri telekomunikasi khususnya telekomunikasi nirkabel dan seluler sehingga membutuhkan payung perangkat peraturan. Dalam lima tahun terakhir telah dikeluarkan sekitar 70 peraturan yang terkait dengan bidang telekomunikasi atau 41% dari total peraturan yang dikeluarkan pada periode 2005-2009 seperti ditunjukkan pada Tabel 4.8 dan gambar 4.1. Sementara untuk yang terkait dengan bidang Frekuensi telah dikeluarkan 45 peraturan atau 27% dari total peraturan yang telah dikeluarkan.

Tabel 4.8. Jumlah produk regulasi yang dikeluarkan pada periode 2005- 2009

Jenis Peraturan	Perposan	Telekomu- nikasi	Frekuensi	Standari- sasi	Lain-lain	JUMLAH
Undang-Undang	1	0	0	0	1	2
Peraturan Pemerintah	0	0	0	0	2	2
Peraturan Presiden	4	0	0	0	1	5
Peraturan Menkominfo	1	50	23	6	2	82
Keputusan Menkominfo	0	11	20	0	4	35
Peraturan Dirjen Postel	1	8	1	27	3	40
Keputusan Bersama Menkominfo	1	0	1	0	0	2
Surat Edaran	0	1	0	0	0	1
<b>JUMLAH</b>	<b>8</b>	<b>70</b>	<b>45</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>169</b>

Gambar 4.1 Jumlah produk regulasi yang dikeluarkan pada perioda 2005- 2009.

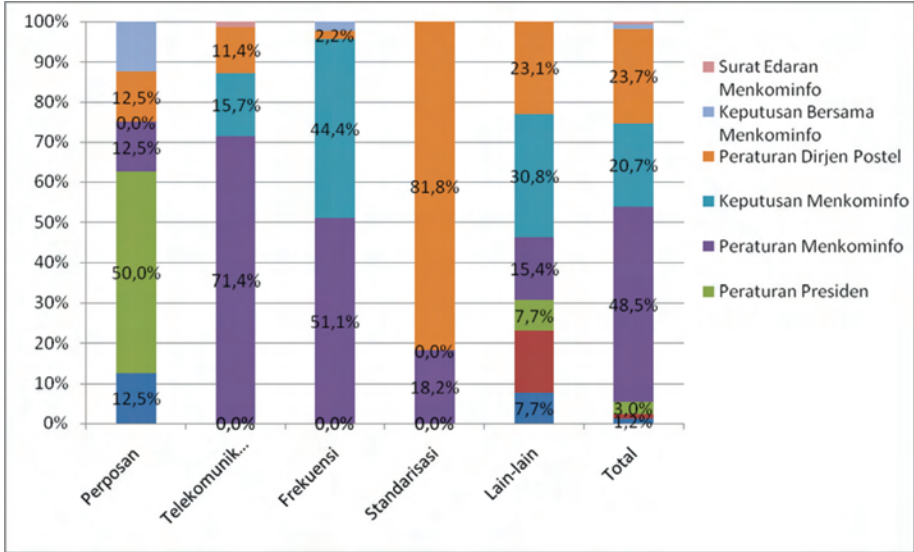


Pengaturan untuk bidang telekomunikasi ini paling banyak dilakukan melalui Peraturan Menteri Kominfo. Sekitar 71,4% peraturan yang terkait dengan bidang telekomunikasi ini dilakukan pengaturannya melalui Peraturan Menteri. Hanya 15,7% saja peraturan terkait bidang telekomunikasi ini yang dilakukan melalui Keputusan Menteri. Sementara untuk bidang standarisasi hampir berimbang pengaturan yang dibuat dalam bentuk Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri. Gambar 4.2 menunjukkan 51% peraturan yang terkait dengna bidang frekuensi diatur melalui Peraturan Menteri dan 44% diatur melalui Keputusan Menteri. Sebaliknya peraturan yang terkait dengan standarisasi yang jumlahnya juga cukup banyak dalam lima tahun terakhir, paling banyak diatur melalui Peraturan Dirjen Postel yang tingkatannya lebih rendah. Hal ini karea pengaturan pada bidang standarisasi ini lebih bersifat teknis sehingga lebih banyak diatur melalui Peraturan Dirjen Postel

Secara total, hampir 50% peraturan yang dikeluarkan dalam lima tahun terakhir adalah alam bentuk Peraturan Menteri dan merupakan yang terbanyak dibanding jenis peraturan lainnya. Terbanyak berikutnya adalah peraturan dalam bidang Peraturan Dirjen Postel yaitu 23,7% dan Keputusan Menteri sebanyak 20,7%. Cukup banyaknya peraturan Dirjen yang

dikeluarkan terutama karena banyaknya pengaturan pada bidang standarisasi yang pengaturannya sebagian besar dilakukan melalui Peraturan Dirjen Postel.

Gambar 4.2 Komposisi produk regulasi yang dikeluarkan pada periode 2005-2009





# Bab 5

## Bidang Pos

Penyusunan data statistik pos tahun 2009 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kondisi bidang perposan yang meliputi pos dan jasa titipan di Indonesia serta perkembangannya dalam lima tahun terakhir (2005-2009) dan secara khusus menganalisis kondisi perposan pada tahun 2009. Data yang disajikan meliputi sarana dan peralatan bidang perposan, pelayanan pos, fasilitas pelayanan pos dan jangkauan pelayanan pos, produksi pos dan jasa titipan sampai akhir tahun 2009. Penyajian data ini juga mencoba menunjukkan kinerja PT. Pos dalam memberikan pelayanan perposan kepada masyarakat Indonesia. Khusus untuk analisis statistik jasa titipan/pengiriman ekspres juga menyajikan perkiraan pasar dari jasa titipan serta pangsa pasar antar pelaku usaha jasa titipan ekspres. Penyajian data ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang perkembangan dan kinerja bidang perposan dan logistik di Indonesia.

### 5.1 Ruang Lingkup

Untuk penyajian statistik pos ini, data diperoleh dari Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (selanjutnya disebut PT. Pos) terutama divisi proses dan antaran dan divisi data dan informasi. Sedangkan data jasa titipan diperoleh dari masing-masing propinsi yang datanya telah dikumpulkan di Direktorat Pos. PT. Pos terdiri atas 11 Wilayah Usaha Pos (Wilpos), dimana setiap Wilpos meliputi propinsi sebagai berikut:

1. Wilpos I : Daerah Istimewa Aceh dan Sumatera Utara
2. Wilpos II : Sumatera Barat dan Riau
3. Wilpos III : Bengkulu, Jambi, Lampung dan Sumatera Selatan
4. Wilpos IV : Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Wilpos V : Jawa Barat
6. Wilpos VI : Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta
7. Wilpos VII : Jawa Timur
8. Wilpos VIII : Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
9. Wilpos IX : Kalsel, Kalteng, Kaltim dan Kalbar

- 10. Wilpos X : Sulsel, Sultra, Sulteng dan Sulut
- 11. Wilpos XI : Maluku dan Irian Jaya

Untuk jasa pengiriman ekspres, data juga diperoleh dari Asosiasi Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (ASPERINDO) dan telah digunakan juga untuk analisis oleh USAID dan Bank Dunia.

Ruang lingkup data yang disajikan dalam statistik perposan tahun 2009 ini meliputi:

- 1. Banyaknya Kantor Pos di seluruh Indonesia pada tahun 2009 yang terdiri dari Kantor Pos, Kantor Pos Cabang Kabupaten, Kantor Pos Cabang Dalam Kota, Kantor Pos Cabang Luar Kota, Loker Ekstensi, Pelayanan Pos Bergerak, Pelayanan pos lainnya, serta Fasilitas Pos Lainnya.
- 2. Realisasi produksi surat pos yang meliputi:

2.1. Surat Pos Dalam Negeri

a). Surat Pos Standar

- 1). Biasa
- 2). Tercatat
- 3). Perlakuan Khusus

b). Surat Pos Prioritas

- 1). Surat Pos Kilat
- 2). Surat Pos Kilat Khusus Produk Regional
- 3). Surat Pos Perlakuan Khusus

2.2. Surat Pos Luar Negeri

a). Surat Pos Standar

- 1). Biasa
- 2). Tercatat

b). Surat Pos Prioritas

- 1). Express Mail Service (EMS)
- 2). Speedpost
- 3). Expresspost

c). Surat Pos Luar Negeri Lainnya

2.3. Realisasi Produksi PT. (Persero) Pos Indonesia lainnya

a). Paket Pos

- b). Wesel Pos
  - c). Giro dan Cek Pos
3. Jumlah penyelenggara jasa titipan dan produksinya.
  4. Produksi dan Perkiraan Permintaan Pasar Jasa Ekspres Indonesia menurut Jenis

## 5.2 Konsep dan Definisi

Karena bidang pos dan jasa titipan mengandung banyak sekali istilah, berikut ini disampaikan penjelasan berupa definisi dari terminologi yang digunakan. Definisi ini diantaranya berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos.

1. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
2. Kiriman adalah satuan komunikasi tertulis, surat elektronik, paket, logistik atau uang yang dikirim melalui penyelenggara pos.
3. Penyelenggara pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos.
4. Kantor Pos adalah Unit Pelayanan Teknis dalam penyelenggaraan jasa perposan, terdiri
  - dari:
    - a. Kantor Pos adalah Unit Pelaksana Teknis yang menyediakan jasa, pos dan giro secara lengkap dan pelayanannya dilakukan oleh PT. Pos Indonesia.
    - b. Kantor Pos Cabang Kabupaten adalah unit usaha PT. Pos Indonesia disuatu kota yang bertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran serta eksploitasinya kepada kantor pos yang berada di kota tersebut.
    - c. Kantor Pos Cabang Dalam Kota adalah fasilitas pelayanan pos di ibukota kecamatan yang belum ada kantor posnya, bertempat di kantor kecamatan atau tempat lain di ibukota kecamatan itu yang disediakan oleh pemerintah daerah dan diselenggarakan oleh pegawai pemerintah daerah.
    - d. Kantor Pos Cabang Luar Kota adalah unit usaha PT. Pos Indonesia di luar kota yang bertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran serta eksploitasinya kepada Kantor Pos.

5. Locket Ekstensi adalah sarana, pelayanan pos berbentuk locket yang disediakan oleh PT. Pos Indonesia yang lokasinya di luar kantor pos.
6. Pelayanan Pos Bergerak adalah terdiri dari:
  - a. Pos Keliling Kota (M) adalah penyediaan jasa pos bergerak di tempat tertentu dalam kota secara tetap dan teratur dengan menggunakan mobil atau kendaraan bermotor roda empat.
  - b. Pos Keliling Desa (PKD) adalah kegiatan penyediaan jasa pos yang bergerak dari desa ke desa secara tetap dan teratur dengan menggunakan kendaraan roda dua.
  - c. Pos Pemasaran Keliling (Pos Sarling) adalah unit pelayanan pos bergerak yang melaksanakan tugasnya secara tetap dan teratur dari pintu ke pintu (door to door) dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua.
7. Pelayanan Pos Lainnya, adalah terdiri dari:
  - a. Waralaba adalah unit pelayanan pos yang diselenggarakan oleh pihak ketiga berdasarkan kerjasama bagi hasil dengan PT. Pos.
  - b. Rumah Pos adalah unit pelayanan pos yang berlokasi di unit pemukiman transmigrasi yang dikelola oleh seorang petugas yang ditunjuk oleh Kanwil/Kandep Transmigrasi dan diberi bimbingan dan panjar kerja berupa benda pos dan materai (BPM) dari PT. (Persero) Pos Indonesia.
  - c. Agen Pos adalah unit pelayanan pos yang dikelola pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia berdasarkan perjanjian kerja sama dan berkedudukan di kota.
  - d. Agen Pos Desa adalah unit pelayanan pos yang dikelola pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia berdasarkan perjanjian kerja sama dan berkedudukan di desa.
  - e. Agen Pos Koperasi adalah unit pelayanan pos yang dikelola pihak lain yang bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia berdasarkan perjanjian kerja sama dan berkedudukan di desa.
  - f. Depo BPM adalah sarana pelayanan pos yang diselenggarakan oleh pihak tertentu atas ijin yang diberikan oleh PT. Pos Indonesia untuk melakukan penjualan benda pos dan materai sesuai dengan harga nominal.

- g. Pos Serba adalah sarana pelayanan pos dengan tampilan menarik yang menyediakan layanan, baik yang berkaitan maupun tidak berkaitan dengan layanan pos. Pengelolanya adalah pegawai PT. Pos Indonesia yang diberi tugas atau pihak lain berdasarkan perjanjian kerja sama. Lokasi pos serba diruang kantor pos atau tempat lain yang ditunjuk.
  - h. Pos Desa adalah fasilitas fisik pelayanan di luar ibukota kecamatan yang belum ada kantor pos, bertempat di kantor desa/kelurahan atau tempat lain di luar ibukota kecamatan yang disediakan oleh pemerintah desa/kelurahan dan diselenggarakan oleh pegawai perangkat pemerintah desa kelurahan.
  - i. Kantor Pos Desa adalah unit pelayanan pos di desa/kelurahan.
  - j. Warpos Kesra adalah fasilitas pelayanan pos yang diselenggarakan oleh paguyuban keluarga sejahtera.
  - k. Pos Sekolah adalah fasilitas pelayanan pos di sekolah untuk keperluan para siswa dan sekolah, yang dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala sekolah dengan mengikut sertakan organisasi resmi atau koperasi siswa dibawah pembinaan dan bimbingan kepala sekolah dan kepala kantor pos.
8. Fasilitas Pos Lainnya, adalah terdiri dari:
- a. Kotak Pos adalah kotak berkunci yang disediakan oleh PT. Pos Indonesia, dipasang pada dinding kantor pos atau tempat lain yang disediakan untuk disewa oleh masyarakat yang menginginkan kiriman untuknya disampaikan melalui kotak pos itu. Tiap kotak pos diberi nomor urut tersendiri.
  - b. Tromol Pos adalah kotak atau wadah lain yang terkunci, disediakan di kantor pos oleh pemakai jasa pos yang menginginkan kiriman untuknya disampaikan melalui kotak pos atau wadah itu. Tromol pos dapat juga digunakan untuk pengeposan kiriman.
  - c. Bis Surat adalah kotak surat milik PT. Pos Indonesia yang disediakan bagi masyarakat sebagai tempat untuk memasukkan surat pos yang akan dikirim.
  - d. Peti Pos adalah kotak yang disusun dan terdiri dari 16 sampai 20 kotak yang terkunci yang ditempatkan di tempat umum seperti pusat pertokoan, rumah susun dan lain lain sebagai sarana mempermudah pengantar pos menyampaikan kiriman pos.

9. Sentral Giro

- a. Sentral Giro (SG) adalah unit pelaksana teknis yang bertindak sebagai pusat penyelenggaraan administrasi rekening giro pos dalam wilayah tertentu. Pada sentral giro ini disediakan juga loket pelayanan giro pos.
- b. Sentral Giro Gabungan (SGG) adalah unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan administrasi rekening giro pos dalam wilayah tertentu, yang digabungkan pada Kantor Pos, karena volume pekerjaan belum memenuhi syarat.  
untuk berdiri sendiri. Pimpinannya dirangkap oleh Kepala Kantor Pos.
- c. Sentral Giro Gabungan Khusus adalah unit pelaksana teknis yang menyelenggarakan administrasi rekening giro pos (khusus penerimaan setoran keuangan negara pajak) di kota tertentu yang digabungkan dengan kantor pos yang sekota dengan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) yang tidak ada Sentral Giro/ Sentral Giro Gabungannya.
- d. Sentral Pengelolaan Pos (SPIP) adalah unit pelaksana teknis yang khusus mengadakan satu jenis pekerjaan berupa pengelolaan dan antaran surat pos.
- e. Kios Benda Pos dan Materai (BPM) adalah sarana pelayanan pos berupa kios yang disertai tugas menjual benda pos dan meterai. Kios ini biasanya di halaman kantor pos atau sekitarnya.

10. Produksi Pos, adalah

- a. Surat adalah bagian dari komunikasi tertulis dengan atau tanpa sampul yang ditujukan kepada individu atau badan dengan alamat tertentu, yang dalam proses penyampaian dilakukan secara fisik
- b. Surat Pos adalah himpunan bagi surat, warkat pos, kartu pos, barang cetakan, surat kabar, sekogram dan bungkusan.
- c. Paket Pos adalah kemasan yang berisi barang dengan syarat syarat tertentu, seperti bentuk, ukuran dan berat yang dikirim melalui pos.
- d. Wesel Pos adalah sarana pelayanan pengiriman uang di dalam negeri dan ke luar negeri melalui pos yang paling sederhana dan ekonomis.
- e. Kiriman adalah satuan surat pos atau paket pos dalam proses pertukaran.
- f. Kiriman Pos adalah kantung atau wadah lain yang berisi himpunan surat pos dan atau paket pos untuk dipertukarkan.

- g. Giro Pos adalah sarana pelayanan lalu lintas uang dengan pemindahbukuan melalui pos.
  - h. Cek Pos adalah sarana pelayanan lalu lintas uang untuk pembayaran dengan cek melalui pos.
  - i. Barang Cetak adalah segala jenis publikasi yang dicetak pada kertas atau bahan termasuk, tetapi tidak terbatas pada buku, brosur, katalog, surat kabar dan majalah..
  - j. Express Mail Service (EMS) adalah pengiriman surat (termasuk dokumen) secara ekspres ke Luar negeri dengan angkutan udara. Tersedia jaminan ganti rugi atas keterlambatan atau kehilangan.
  - k. Pos Cepat Antar Kota Terbatas (Pos Patas) adalah pengiriman surat (termasuk dokumen) di dalam negeri dengan angkutan udara darat. Tersedia jaminan ganti rugi atas keterlambatan atau kehilangan.
  - l. Pos Kilat Khusus adalah pengiriman surat (termasuk dokumen) secara khusus dengan angkutan udara dan darat. Pengirim menerima bukti kirim, bukti terima dan ganti rugi atas keterlambatan atau kehilangan.
  - m. Pos Cepat Antar Kota (Pos Cempa) adalah layanan pengiriman surat (termasuk dokumen) di dalam kota berikut jaminan ganti rugi atas keterlambatan atau kehilangan.
  - n. Surat Elektronik (Ratron) adalah layanan surat yang proses penyampaiannya kepada penyelenggara pos melalui elektronik atau berupa softcopy untuk disampaikan secara fisik kepada individu atau badan dengan alamat tertentu.
11. Jasa titipan adalah layanan jasa tertentu dari sektor pos yang diijinkan untuk diselenggarakan oleh perusahaan swasta.
- a. Barang cetakan adalah dokumen yang beratnya tidak melebihi 1 kg.
  - b. Paket adalah barang yang dikemas dalam bentuk paket.
  - c. Bungkus kecil adalah paket yang beratnya tidak melebihi 1 kg.
  - d. Sekogram adalah paket yang beratnya sampai 7 kg dapat berupa dokumen.
  - e. Surat kabar adalah media cetak.
  - f. Koli adalah barang yang ditentukan biaya pengirimannya berdasarkan unit jumlah barang (koli).

- g. Kg adalah barang yang ditentukan biaya pengirimannya berdasarkan unit berat dalam satuan kg.
12. Layanan Pos Universal adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.

### **5.3 Uraian Data Statistik Perposan**

Pemaparan data statistik bidang Perposan pada bagian ini terdiri dari statistik sarana dan prasarana pos, statistik bidang logistik dan penerbitan perangko. Sarana dan prasarana pos meliputi kantor pos menurut berbagai jenisnya, pelayanan pos bergerak, fasilitas pelayanan pos bergerak dan jangkauan pelayanannya. Sementara untuk produksi mencakup produksi surat, produksi jasa titipan dan keadaan usaha jasa titipan. Uraaian data statistik bidang perposan ini juga akan menganalisis kinerja dan jangkauan pelayanan dari PT Pos sebagai pelaku utama perposan di Indonesia.

#### **5.3.1 Alat Pos**

Pada bagian ini disajikan data dan informasi statistik alat dan sarana penunjang pos yang terdiri dari sebaran kantor pos menurut jenis dan lokasi (wilayah pos), Pelayanan pos lainnya menurut jenis pelayanan dan lokasi (wilayah pos dan pulau), pelayanan pos bergerak menurut jenis dan lokasi (wilayah pos), fasilitas pelayanan pos lainnya menurut jenis dan lokasi (wilayah pos) dan jangkauan pelayanan pos yang meliputi jangkauan pelayanan di kecamatan, desa dan lokasi transmigrasi. Data-data yang disajikan meliputi data lima tahun terakhir, data sampai akhir tahun 2008 dan data sampai semester I Tahun 2009.

##### **5.3.1.1 Jumlah Kantor Pos**

###### **a. Perkembangan Jumlah Kantor Pos Tahun 2004-2009**

Jumlah kantor pos di Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan adanya fluktuasi meskipun tidak memperlihatkan perubahan yang signifikan. Jumlah kantor pos ini sekaligus menunjukkan jaringan pelayanan pos di Indonesia oleh unit terbesar pelayanan pos. Jumlah



kantor pos yang menurun sejak tahun 2005 sampai tahun 2008, meningkat kembali pada tahun 2009. Namun dibandingkan jumlahnya pada tahun 2004, jumlah kantor pos keseluruhan pada tahun 2009 hanya meningkat 22 unit. Jika dibandingkan dengan pemekaran wilayah yang terjadi di Indonesia dimana saat ini sudah berkembang setidaknya menjadi hampir 500 kabupaten/kota yang diikuti dengan pemekaran di tingkat kecamatan, jumlah kantor pos yang tidak banyak berubah menunjukkan belum sepenuhnya merespon pemekaran wilayah tersebut.

Tabel 5.1 Perkembangan jumlah kantor Pos menurut jenisnya tahun 2004-2009.

No	Jenis Kantor Pos	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
1	Kantor Pos	207	207	207	207	207	207
2	Kantor Pos Cabang (Kabupaten)	88	88	88	88	88	195
3	Kantor Pos Cabang (Dalam Kota)	765	760	755	754	751	761
4	Kantor Pos Cabang (Luar Kota)	2.450	2.433	2.425	2.422	2.427	2369
	Jumlah	3.510	3.488	3.475	3.471	3.473	3.532

Sumber : PT. Pos Indonesia

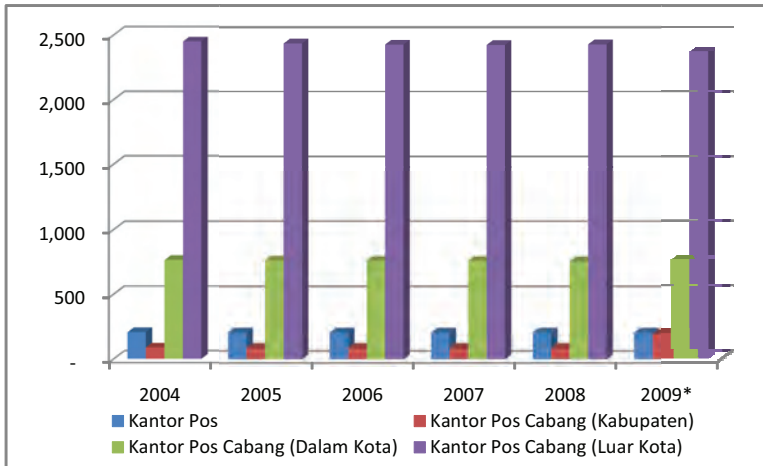
Tahun 2009 menjadi tahun pembenahan kembali infrastruktur PT. Pos dengan penambahan atau mengaktifkan kembali kantor pos untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Setelah menurun selama beberapa tahun terakhir, jumlah kantor pos pada tahun 2009 kembali meningkat meskipun masih terendah yaitu hanya 1,37% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini terutama berasal dari peningkatan jumlah kantor pos cabang kabupaten dan kantor pos cabang dalam kota. Peningkatan dalam jumlah kantor cabang kabupaten sebanyak 107 buah atau 121% dari tahun sebelumnya sebagian merupakan kantor cabang yang baru dan sebagian lagi merupakan perubahan status dari kantor pos cabang luar kota. Hal ini karena pada periode yang sama, jumlah kantor pos cabang luar kota menurun 58 buah atau 2,4% dari tahun sebelumnya.

Gambar 5.1 juga menunjukkan kantor cabang luar kota yang merupakan jenis terbanyak dari pelayanan dalam bentuk kantor pos menunjukkan penurunan. Sebaliknya kantor cabang kabupaten menunjukkan peningkatan meskipun jumlahnya masih jauh dibawah kantor cabang luar kota maupun kantor cabang dalam kota. Dari gambar tersebut terlihat rasio yang masih jauh antara jumlah kantor pos cabang (luar kota) dengan kantor pos jenis

lainnya. Bahkan untuk kantor pos cabang (dalam kota) jumlahnya masih kurang dari 800 dan belum ada penambahan yang berarti dalam lima tahun terakhir.

Jumlah kantor pos yang tidak banyak berubah dalam kurun 2005-2009 menunjukkan belum sepenuhnya merespon pemekaran wilayah kabupaten yang banyak terjadi pada periode tersebut, termasuk kecamatannya

Gambar 5.1. Perkembangan jumlah Kantor Pos yang dikelola PT. Pos Tahun 2004-2009



Namun perkembangan jumlah kantor pos tersebut juga menunjukkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dari tahun 2008 ke tahun 2009 dalam komposisi kantor pos yang dikelola oleh PT. Pos meskipun selama lima tahun sebelumnya cenderung stagnan. Perubahan paling banyak terjadi pada Kantor Pos Cabang (Kabupaten) dan Kantor Pos Cabang Luar Kota. Jika dilihat dari pola perubahannya, tampak bahwa banyak Kantor Pos Cabang (Luar Kota) yang berubah status menjadi Kantor Pos Cabang (Kabupaten). Hal ini terlihat dari penambahan yang signifikan dari tahun 2008 ke 2009 untuk Kantor Pos Cabang (Kabupaten). Sebaliknya terjadi penurunan yang signifikan pada Kantor Pos Cabang (Luar Kota).

#### b. Distribusi Jumlah Kantor Pos Tahun 2004-2009

Persebaran kantor pos untuk semua jenis kantor pos menurut wilayah pos menunjukkan adanya wilayah pos tertentu yang memiliki jumlah kantor pos jauh lebih banyak dibanding

wilayah pos lainnya. Wilayah pos VI yang meliputi wilayah propinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta merupakan wilayah pos dengan jumlah kantor pos paling banyak. Peningkatan jumlah kantor pos di wilayah pos ini dari tahun 2008 ke 2009 juga paling signifikan dibanding wilayah pos lainnya. Wilayah yang berada di pulau Jawa dengan kepadatan penduduk tinggi dan area yang cukup luas menyebabkan kebutuhan kantor pos di wilayah pos ini juga besar. Disamping itu, karena terdiri dari dua propinsi, maka wilayah administratifnya juga lebih banyak sehingga cenderung memiliki kantor pos yang juga lebih banyak.

Wilayah pos berikutnya yang memiliki kantor pos lebih banyak adalah wilayah pos VII yang mencakup wilayah Jawa Timur seperti yang terlihat pada Tabel 5.2. Wilayah pos lain yang berada di pulau Jawa seperti wilayah pos IV dan V juga cenderung memiliki kantor pos yang lebih banyak dibanding wilayah pos lainnya. Bahkan jika dirasiokan dengan luas wilayah, maka wilayah Pos IV yang meliputi Banten, DKI Jakarta plus Bogor dan Bekasi merupakan daerah dengan kepadatan kantor pos yang tinggi. Sementara untuk wilayah luar Jawa, jumlah kantor pos paling banyak berada di wilayah pos IX yang mencakup seluruh wilayah Kalimantan, disusul wilayah pos III yang mencakup Sumatera Bagian Selatan (Sumatera Selatan, Bengkulu, Jambi, Lampung dan Bangka Belitung)

Wilayah Pos VI yang meliputi Jawa Tengah dan Yogyakarta memiliki jumlah kantor pos yang paling banyak. Kepadatan penduduk yang tinggi dan daerah administratif yang banyak karena terdiri dari dua propinsi menyebabkan penempatan kantor pos di wilayah pos ini cukup banyak. Namun jika dibandingkan dengan luas wilayahnya, maka kepadatan jumlah kantor pos, wilayah Pos IV yang meliputi wilayah Jabotabek memiliki kepadatan paling tinggi karena kebutuhan untuk memenuhi aktivitas sosial ekonomi yang juga tinggi.

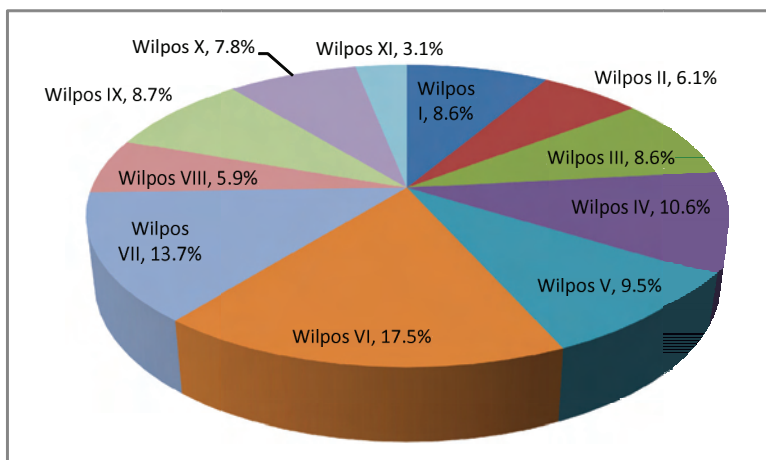
Tabel 5.2. Perkembangan jumlah kantor Pos menurut Wilpos tahun 2004-2009

No.	Wilayah Pos	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	I	308	300	298	298	299	302
2	II	220	218	218	215	215	215
3	III	320	316	306	306	304	304
4	IV	338	331	375	375	374	374
5	V	387	383	338	338	334	334
6	VI	577	574	574	574	574	619
7	VII	488	485	484	484	484	484
8	VIII	210	207	205	206	207	207
9	IX	314	314	306	305	308	308
10	X	276	273	272	272	273	276
11	XI	109	109	99	99	101	109
Jumlah		<b>3.547</b>	<b>3.510</b>	<b>3.475</b>	<b>3.472</b>	<b>3.473</b>	<b>3.532</b>

Sumber : PT. Pos Indonesia

Komposisi persebaran kantor pos menurut wilayah pos juga menunjukkan bahwa konsentrasi keberadaan kantor pos memang cenderung berada di Jawa seperti terlihat pada gambar 5.2. Secara total, proporsi kantor pos yang berada di pulau Jawa mencapai 51,3% atau lebih dari separuh kantor pos yang ada. Proporsi terbesar ada di wilayah pos VI yang mencapai 17,5% diikuti dengan wilayah pos VII sebesar 13,7%.

Gambar 5.2. Distribusi Kantor Pos (total) menurut Wilayah Pos sampai tahun 2009

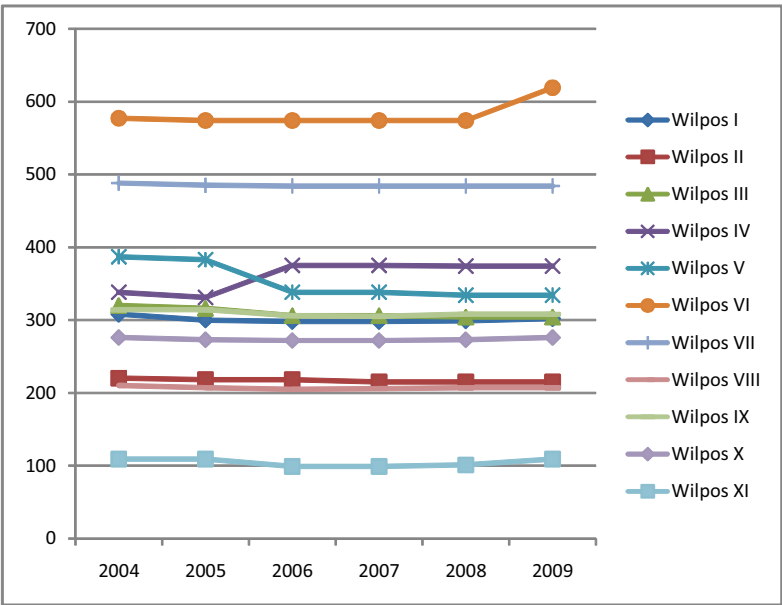


Proporsi jumlah kantor pos yang berada di pulau Sumatera hanya mencapai 23,2% dengan proporsi terbesar ada di wilayah pos I (Sumatera bagian Utara) dan wilayah pos III

(Sumatera bagian Selatan) yang masing-masing mencapai 8,6%. Sementara proporsi jumlah kantor pos yang mencakup wilayah pos XI hanya sebesar 3,1%. Kepadatan penduduk yang rendah karena wilayah yang luas serta dinamika kegiatan sosial ekonomi yang relatif rendah menyebabkan jumlah kantor pos di wilayah pos ini juga tidak terlalu banyak.

Pertumbuhan kantor pos antar wilayah pos menunjukkan bahwa hampir tidak ada pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah kantor pos di semua wilayah pos. Gambar 5.3 menunjukkan bahwa perubahan yang cukup terlihat hanya terjadi pada wilayah pos V dan IV pada tahun 2006 dan pada wilayah pos VI di tahun 2009. Penambahan jumlah kantor pos yang cukup signifikan hanya terjadi di wilayah pos IV pada tahun 2006 dan wilayah pos VI pada tahun 2009. Pada wilayah pos XI hanya terjadi sedikit peningkatan pada tahun 2009 setelah menurun pada tahun 2006. Jumlah kantor pos di wilayah V justru mengalami penurunan pada tahun 2006.

Gambar 5.3. Trend perubahan jumlah Kantor Pos menurut Wilayah Pos 2004-2009



Penambahan kantor pos yang terjadi pada wilayah pos IV dan VI menunjukkan bahwa arah pengembangan penyediaan sarana kantor pos lebih didasarkan atas tingginya kebutuhan untuk mendukung kegiatan publik dibandingkan atas luas area yang harus dilayani

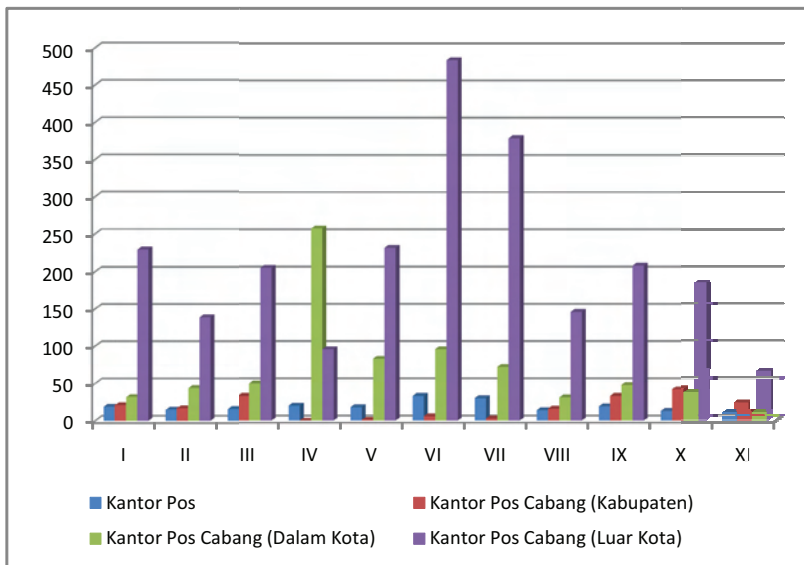
Posisi sebaran kantor pos sampai dengan akhir tahun 2009 juga menunjukkan konsentrasi keberadaan kantor pos yang lebih banyak berada di Pulau Jawa khususnya di wilayah pos VI dan VII. Namun dari komposisinya menurut jenis kantor pos, terlihat adanya perbedaan distribusi terutama untuk wilayah pos IV. Jika pada wilayah pos lainnya proporsi terbanyak kantor pos adalah untuk jenis kantor pos cabang (luar kota), maka untuk wilayah pos IV proporsi terbanyak adalah untuk kantor pos cabang (dalam kota). Hal ini dapat dipahami mengingat daerah-daerah pada wilayah pos IV sebagian besar adalah daerah perkotaan sehingga lebih banyak ditempatkan kantor pos cabang (dalam kota). Pada wilayah pos IV juga tidak terdapat kantor pos cabang (kabupaten).

Tabel 5.3. Sebaran Jumlah Kantor Pos menurut Jenis dan Wilayah Pos 2009

No	Jenis	Wilayah Pos											Jumlah
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	Kantor Pos	19	15	16	20	18	33	30	14	19	13	10	207
2	Kantor Pos Cabang (Kabupaten)	21	17	33	0	1	6	3	16	33	42	23	195
3	Kantor Pos Cabang (Dalam Kota)	32	44	50	258	83	96	72	31	48	37	10	761
4	Kantor Pos Cabang (Luar Kota)	230	139	205	96	232	484	379	146	208	184	66	2369
Jumlah		302	215	304	374	334	619	484	207	308	276	109	3532

Diagram pada gambar 5.3 semakin menunjukkan adanya perbedaan komposisi antar jenis kantor pos pada wilayah pos IV dibanding wilayah pos lainnya. Pada wilayah pos IV ini jumlah kantor pos cabang (dalam kota) lebih dominan daripada jenis kantor pos lainnya. Sementara untuk wilayah pos lain, jumlah kantor pos cabang (luar kota) yang lebih dominan. Dari diagram tersebut juga terlihat jumlah kantor pos di wilayah pos VI dan VII yang jauh lebih banyak dibanding wilayah pos lainnya. Namun jumlah kantor pos cabang (dalam kota) di wilayah pos V lebih banyak daripada wilayah pos VII meskipun secara total jumlah kantor pos di wilayah pos VII lebih banyak daripada wilayah pos V. Sementara jumlah kantor pos di wilayah pos XI yang meliputi wilayah Maluku dan Papua jauh lebih sedikit secara total maupun per jenis kantor pos dibanding wilayah pos lainnya.

Gambar 5.4. Perbandingan jumlah kantor Pos antar Wilpos Pos menurut jenis Tahun 2009



### c. Cakupan Jangkauan Pelayanan Kantor Pos

Rasio antara jumlah kantor pos dengan jumlah penduduk dan luas wilayah mencerminkan cakupan pelayanan penduduk dan jangkauan pelayanan oleh kantor pos. Indikator cakupan pelayanan penduduk dari kantor pos menunjukkan bahwa wilayah pos V memiliki cakupan pelayanan penduduk yang paling tinggi, diikuti dengan wilayah pos VII. Satu kantor pos di wilayah pos V harus melayani 118.710 penduduk, sementara di wilayah pos VII satu kantor pos harus melayani 75.603 penduduk. Tingginya cakupan pelayanan penduduk oleh kantor pos di wilayah pos V dan VII ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang besar di wilayah ini sebagaimana wilayah di Pulau Jawa, namun jumlah kantor posnya tidak sebanyak di wilayah pos VI.

Untuk wilayah di luar Jawa, cakupan pelayanan penduduk yang besar terdapat pada kantor pos di wilayah pos III yang meliputi propinsi-propinsi di Sumatera bagian Selatan. Sebagaimana pada wilayah pos V dan VII, besarnya cakupan pelayanan penduduk di wilayah pos III juga disebabkan oleh jumlah kantor pos yang tidak cukup banyak sementara jumlah penduduk cukup besar. Wilayah pos III yang meliputi 5 propinsi yaitu Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung memiliki jumlah penduduk yang cukup

besar, namun jumlah kantornya tidak banyak berbeda dengan wilayah pos I yang hanya terdiri dari dua propinsi yaitu Sumatera Utara dan NAD. Gambar 5.4 yang menampilkan perbandingan cakupan pelayanan kantor pos menunjukkan cakupan pelayanan penduduk oleh kantor pos paling rendah adalah di wilayah pos IV dan IX. Rendahnya cakupan pelayanan penduduk di wilayah pos IV disebabkan oleh jumlah kantor pos yang cukup banyak untuk memenuhi pelayanan kegiatan sosial dan bisnis yang tinggi di wilayah ini sementara jumlah penduduk tidak terlalu banyak karena luas wilayahnya tidak luas.

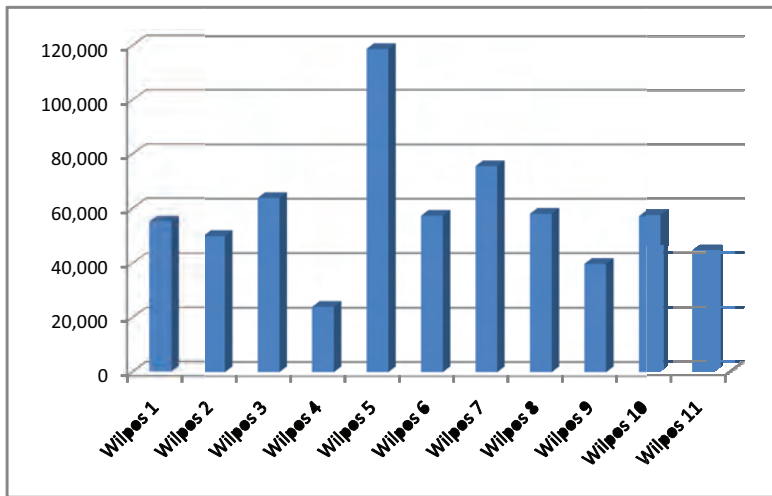
Tabel 5.4. Cakupan dan Jangkauan pelayanan kantor pos menurut Wilayah Pos 2009

No.	Wilayah Pos	Cakupan penduduk per kantor pos	Jangkauan luas pelayanan per kantor pos (km2)
1	I	55.351	434
2	II	49.921	638
3	III	63.941	699
4	IV	23.965	2
5	V	118.710	106
6	VI	57.460	58
7	VII	75.603	99
8	VIII	58.184	353
9	IX	39.734	1.767
10	X	57.264	683
11	XI	44.514	4.541

Sementara untuk jangkauan pelayanan kantor pos, tabel 5.4 dan gambar 5.5. menunjukkan wilayah pos XI yang meliputi wilayah Maluku dan Papua memiliki jangkauan pelayanan paling luas. Bukan hanya paling luas, jangkauan pelayanan di wilayah pos ini jauh lebih besar daripada wilayah pos lainnya.



Gambar 5.4. Jumlah penduduk yang dilayani per satu kantor pos menurut Wilpos Tahun 2009

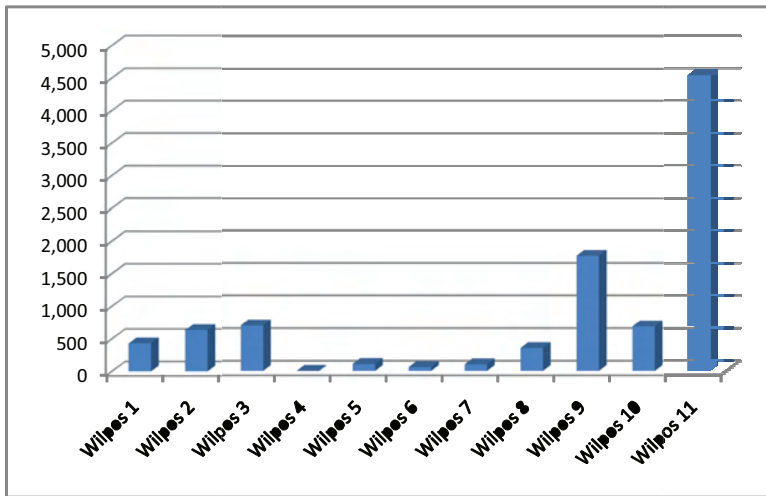


Hal ini disebabkan wilayah yang sangat luas dan kepadatan penduduk yang rendah dengan jumlah kantor pos yang disediakan rendah. Satu kantor pos di wilayah pos XI ini harus menjangkau area seluas 4541 km<sup>2</sup> sementara di wilayah pos IX yang mencakup wilayah Kalimantan, satu kantor pos harus melayani areal seluas 1767 km<sup>2</sup>.

Sementara wilayah-wilayah di Jawa justru memiliki jangkauan pelayanan yang rendah. Hanya wilayah pos V yang memiliki jangkauan pelayanan lebih dari 100 km<sup>2</sup>, sementara wilayah pos IV, VI dan VII memiliki jangkauan pelayanan yang kurang dari 100 km<sup>2</sup>. Bahkan untuk wilayah pos III jangkauan pelayanan pos-nya hanya 2 km<sup>2</sup>. Artinya satu kantor hanya melayani daerah seluas 2 km<sup>2</sup> karena jumlah kantor yang cukup banyak sementara wilayahnya tidak terlalu luas.

Wilayah yang sangat luas sementara jumlah kantor pos yang relatif sedikit menyebabkan jangkauan luas yang harus dilayani oleh kantor pos di wilayah pos XI dan IX menjadi sangat besar.

Gambar 5.5. Luas wilayah yang dilayani per satu kantor pos di tiap Wilayah Pos



#### 5.3.1.2. Pelayanan Pos Bergerak

Pelayanan Pos Bergerak merupakan upaya PT. Pos untuk memperluas jangkauan pelayanan pos dan mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan pos dalam bentuk penyediaan sarana dalam bentuk Pos Keliling Kota, Pos Keliling Desa, dan Pos Pasar Keliling (Pos Sarling). Dilihat dari jumlah unit, Pos Keliling Desa merupakan yang terbanyak hampir di semua wilayah, dibanding dengan bentuk pelayanan pos bergerak lainnya.

##### a. Komposisi dan Distribusi Pos Pelayanan Bergerak

Sampai tahun 2009, kegiatan PT Pos dalam melayani kebutuhan perposan masyarakat didukung oleh 2076 unit pos pelayanan bergerak dengan 3042 trayek dan 637 terminal yang tersebar di sebelas wilayah pos seperti terlihat di tabel 5.5. Dari komposisinya, pos keliling desa merupakan bentuk pelayanan pos bergerak yang paling banyak jumlahnya dibanding jenis pelayanan pos bergerak lainnya, termasuk di semua wilayah pos kecuali wilayah pos IV. Hal ini dapat dipahami mengingat pengadaanya lebih mudah dan kebutuhannya lebih tinggi karena jumlah desa yang sangat banyak di seluruh Indonesia dibanding daerah perkotaan. Distribusi pelayanan pos bergerak menurut wilayah pos menunjukkan bahwa untuk pelayanan pos bergerak ini juga masih terkonsentrasi di Pulau Jawa terutama di wilayah pos VI, V dan VIII yang juga masih banyak daerah pedesaan.

Tabel 5.5. Sebaran Jumlah Pelayanan Pos Bergerak menurut Jenis dan Wilayah Pos 2009

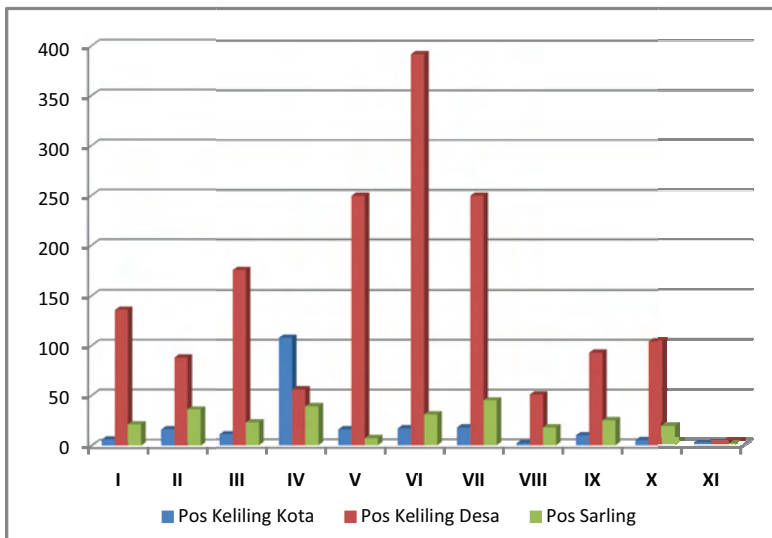
No	Pos Pelayanan Bergerak	Satuan	Wilayah Pos											Jumlah
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	Pos Keliling Kota	Unit	6	16	11	108	16	17	18	2	10	5	2	211
		Trayek	6	17	16	112	20	21	22	2	16	9	2	243
		Terminal	15	35	30	182	38	45	43	5	40	19	3	455
2	Pos Keliling Desa	Unit	136	88	176	56	250	392	250	51	93	104	4	1600
		Trayek	239	155	328	95	455	673	428	103	153	160	10	2799
		Terminal	440	446	546	212	1014	1432	919	211	285	329	28	5862
3	Pos Sarling	Unit	21	36	23	39	7	31	45	18	25	19	1	265
		Trayek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Terminal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah Pos Pelayanan Bergerak	Unit	163	140	210	203	273	440	313	71	128	128	7	2076
		Trayek	245	172	344	207	475	694	450	105	169	169	12	3042
		Terminal	455	481	576	394	1052	1477	962	216	325	348	31	6317

Banyaknya pos keliling desa ini disebabkan wilayah Indonesia yang lebih banyak berada pada wilayah perdesaan dibanding perkotaan. Disamping itu, akses penduduk desa yang lebih sulit terhadap pelayanan pos menyebabkan perlunya menyediakan sarana pelayanan pos bergerak yang lebih banyak bagi masyarakat di pedesaan.

Konsentrasi sebaran pos pelayanan bergerak di Pulau Jawa ini disebabkan oleh jumlah penduduk yang padat yang harus dilayani dan jumlah desa yang juga banyak di pulau Jawa khususnya di ketiga wilayah pos tersebut. Gambar 5.6 yang memperlihatkan distribusi pelayanan pos bergerak ini juga menunjukkan untuk wilayah pos IV memiliki komposisi yang berbeda dengan wilayah pos lainnya karena jumlah pos keliling kota yang lebih banyak dibanding pos keliling desa. Komposisi yang demikian terjadi karena pada wilayah pos IV merupakan daerah yang lebih banyak perkotaan.

Pola distribusi dan komposisi pos pelayanan bergerak juga mengikuti pola distribusi dan komposisi sebaran kantor pos menurut wilayah pos dan jenis. Hal ini dimungkinkan karena pos pelayanan bergerak khususnya pos keliling memang lebih berfungsi untuk mendukung pelayanan kantor pos yang ada. Sehingga komposisi jumlah dan distribusi sebarannya juga mengikuti pola pada komposisi dan distribusi jumlah kantor pos.

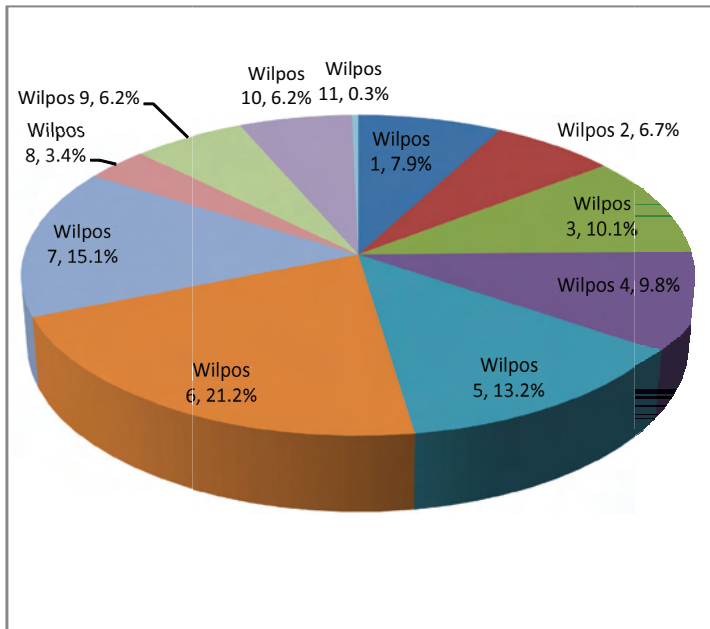
Gambar 5.6. Distribusi Pelayanan Pos Bergerak antar Wilpos Pos menurut jenis Tahun 2009



Dari analisis terhadap tabel 5.5 juga menunjukkan bahwa untuk pos keliling desa, satu unit pos pelayanan bergerak rata-rata memiliki dua trayek dan setiap trayek melayani dua terminal. Artinya, setiap unit pelayanan bergerak pos keliling desa setidaknya melayani empat titik terminal. Sementara untuk pos keliling kota, satu unit pos pelayanan bergerak tersebut hanya memiliki rata-rata satu trayek dan untuk setiap trayek melayani dua terminal. Dengan demikian setiap unit pos keliling kota setidaknya melayani dua titik terminal.

Berdasarkan distribusi tersebut terlihat bahwa sebaran pos pelayanan bergerak memang lebih banyak berada di pulau Jawa seperti ditunjukkan pada gambar 5.7. Sekitar hampir 60% dari pos pelayanan bergerak yang ada terdapat di pulau Jawa dengan proporsi terbesar ada di wilayah pos VI sebanyak 21,2% diikuti wilayah pos VII sebanyak 15,1%. Proporsi sebaran pos pelayanan bergerak di pulau Sumatera hanya 24,7% dengan terbanyak di wilayah pos III sebesar 10,1%. Bahkan untuk wilayah pos XI yang memiliki wilayah yang sangat luas, pos pelayanan bergerak yang ada proporsinya hanya 0,3% dari total pos pelayanan bergerak.

Gambar 5.7. Proporsi jumlah pelayanan pos bergerak antar Wilpos Tahun 2009



#### b. Cakupan dan Jangkauan Pelayanan Pos Bergerak

Meskipun keberadaan pos pelayanan bergerak lebih banyak terkonsentrasi di pulau Jawa, namun dari sisi cakupan penduduk yang dilayani, beban pelayanan pos pelayanan bergerak yang ada di Pulau Jawa juga masih cukup besar, bahkan sebagian lebih besar dari beban cakupan pelayanan penduduk di luar Jawa. Tabel 5.6 dan gambar 5.7. menunjukkan bahwa cakupan pelayanan penduduk dari pelayanan pos bergerak di pulau Jawa rata-rata mencapai hampir 100 ribu penduduk. Artinya setiap unit pos pelayanan bergerak di pulau Jawa harus melayani hampir 100 ribu penduduk. Cakupan pelayanan penduduk terbesar di Pulau Jawa ada di wilayah pos V yaitu sebesar 145.234. Ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah unit pos pelayanan bergerak di wilayah pos ini paling banyak, namun beban pelayanannya juga cukup besar, bahkan lebih besar daripada pos pelayanan bergerak di Sumatera dan Kalimantan (wilayah pos IX).

Tabel 5.6. Cakupan dan Jangkauan Pelayanan Pos Pelayanan bergerak menurut Wilayah Pos 2009

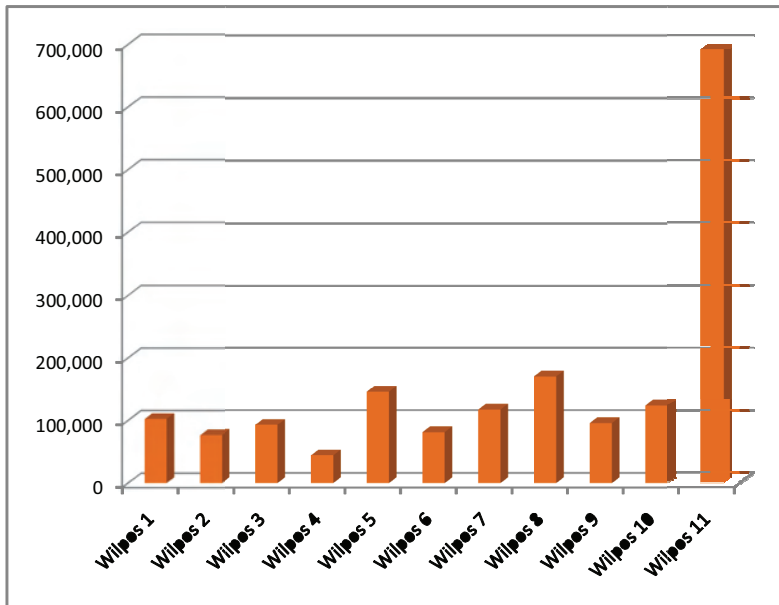
No.	Wilayah Pos	Cakupan penduduk per pos bergerak	Jangkauan luas pelayanan per pos bergerak (km2)
1	I	102.552	803
2	II	76.664	980
3	III	92.562	1.012
4	IV	44.153	3
5	V	145.234	130
6	VI	80.836	82
7	VII	116.907	153
8	VIII	169.634	1.029
9	IX	95.609	4.251
10	X	123.477	1.473
11	XI	693.143	70.708

Satu unit pos pelayanan bergerak di wilayah pos XI harus melayani sekitar 693 ribu penduduk. Sementara beban pelayanan penduduk yang paling kecil ada pada pos pelayanan bergerak di wilayah pos IV. Disamping karena jumlah penduduk yang tidak terlalu besar dibanding wilayah pos lainnya, jumlah pos pelayanan bergerak yang cukup banyak di wilayah ini menjadikan beban pelayanan penduduknya relatif sangat rendah. Satu unit pos pelayanan bergerak di wilayah ini hanya melayani sekitar 44 ribu penduduk.

Gambar 5.8. menunjukkan cakupan beban pelayanan pos pelayanan bergerak yang paling besar ada di wilayah pos XI. Meskipun jumlah penduduk di wilayah ini tidak terlalu padat, namun karena keberadaan pos pelayanan bergerak masih sedikit, maka beban pelayanan penduduknya masih sangat besar dan jauh lebih besar daripada pos pelayanan bergerak di wilayah pos lainnya.

Jumlah pelayanan pos bergerak yang sedikit di wilayah pos XI juga berdampak pada beban jangkauan pelayanan yang sangat besar bagi pos pelayanan bergerak di wilayah tersebut. Satu unit pos pelayanan bergerak harus melayani daerah seluas 70.708 km2. Besaran beban ini bahkan jauh lebih besar dibanding beban jangkauan pelayanan pos pelayanan bergerak di wilayah pos lainnya. Jangkauan pos pelayanan bergerak di wilayah pos IX yang juga memiliki daerah yang luas hanya sebesar 4.251 km2.

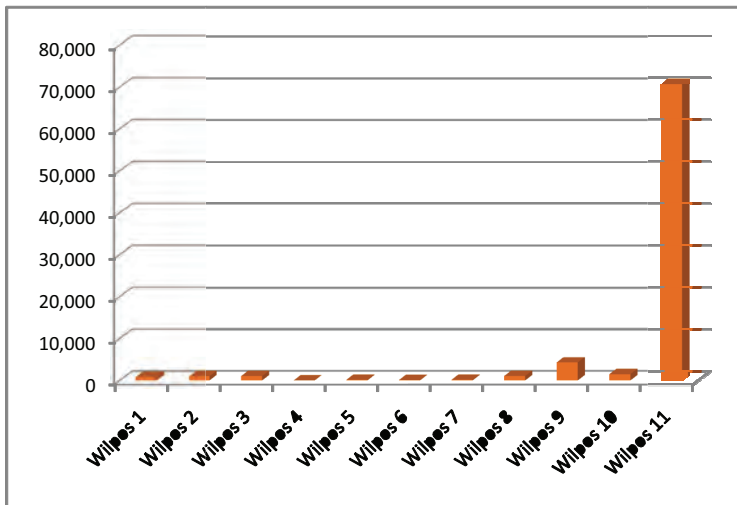
Gambar 5.8. Cakupan pelayanan penduduk pos pelayanan bergerak menurut Wilayah Pos



Sementara beban jangkauan pos pelayanan bergerak di pulau Jawa rata-rata hanya sebesar 97 km<sup>2</sup>. Bahkan untuk wilayah pos IV yang meliputi wilayah Jabotabek, beban jangkauan pelayanannya hanya sekitar 3 km<sup>2</sup>. Artinya setiap unit pos pelayanan bergerak hanya melayani daerah seluas 3 km<sup>2</sup>. Pola keberadaan pos pelayanan bergerak yang lebih bersifat membantu pelayanan yang ada di kantor pos menyebabkan beban pelayanannya juga cenderung mengikuti pola kantor pos meskipun seharusnya pos pelayanan bergerak ini lebih mampu menjangkau wilayah yang luas dengan sedikit pelayanan kantor pos.

Untuk memenuhi kebutuhan pelayan pada wilayah yang lebih luas, seharusnya pelayanan pos bergerak ini lebih didorong ke daerah yang lebih luas dengan sedikit pelayanan kantor pos terutama di luar Jawa.

Gambar 5.9. Jangkauan Pelayanan per satu unit Pos Pelayanan Bergerak menurut Wilayah Pos



### 5.3.1.3. Pelayanan Pos Lainnya.

#### a. Jumlah Pelayanan Pos Lainnya

Untuk mendukung pelayanan pada wilayah yang luas dan penduduk yang banyak dan tersebar, pelayanan pos dilakukan juga melalui bentuk pelayanan pos lainnya selain melalui kantor pos dan pos pelayanan bergerak. Terdapat 12 bentuk pelayanan pos lainnya dari mulai waralaba, pos, mailing room, agen pos sampai dengan warpos Kesra dan Pos sekolah.

Tabel 5.7. menunjukkan perkembangan jumlah pelayanan pos lainnya dari masing-masing jenis pelayanan pos. Dari tabel tersebut terlihat bahwa pelayanan pos lainnya yang paling banyak adalah pelayanan dalam bentuk Depo BPM, diikuti dengan pos sekolah. Tabel tersebut juga menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir tidak terjadi penambahan yang berarti, dari jumlah pelayanan pos lainnya untuk mendukung pelayanan perposan di daerah. Bahkan sejak tahun 2005 jumlahnya cenderung menurun sehingga secara total pada tahun 2009 penurunannya mencapai 6% dibanding tahun 2006. Penurunan terjadi terutama untuk jenis Depo BPM, Pos Desa dan Warpos Kesra.



Tabel 5.7. Perkembangan Pelayanan Pos Lainnya Tahun 2005-2009

No	Pelayanan Pos Lainnya	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Waralaba	7	7	7	23	23
2	Rumah Pos	368	368	368	368	368
3	Agenpos	1543	1543	1577	1573	1573
4	Agenpos Desa	319	319	319	318	318
5	Agenpos Koperasi	428	428	428	427	427
6	Depo Bpm	5226	5226	5226	5220	5220
7	Posserba	0	0	0	0	0
8	Pos Desa	2873	2827	2732	2723	2723
9	Kantor Pos Desa	868	866	888	889	889
10	Warpos Kesra	1438	1438	1438	1426	1426
11	Pos Sekolah	3291	3291	3291	3294	3294
	Jumlah	16361	16313	16274	16261	16261

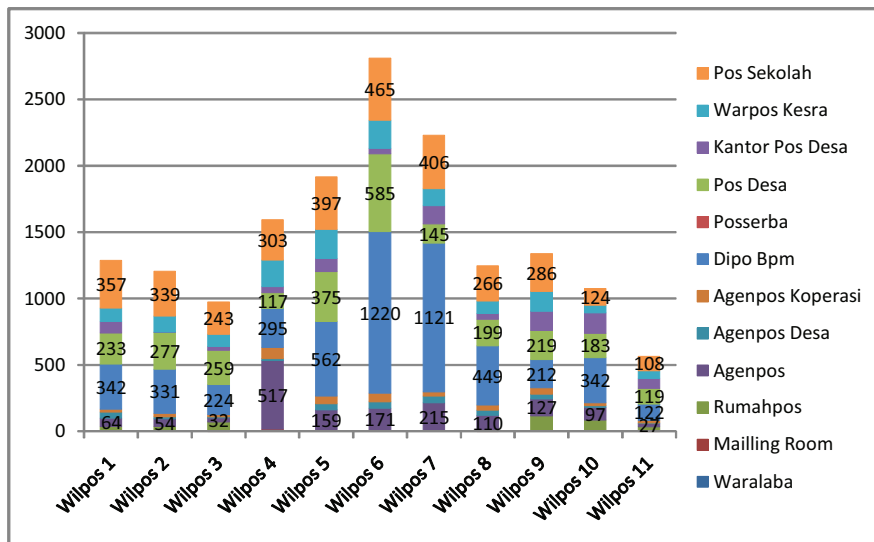
Distribusi pelayanan pos lainnya menurut wilayah pos menunjukkan bahwa pelayanan pos lainnya juga paling banyak terdapat di wilayah pos yang berada di pulau Jawa terutama wilayah pos V dan VI. Tabel 5.8 dan gambar 5.10 yang memperlihatkan jumlah pelayanan pos menurut jenis dan wilayah pos menunjukkan bahwa pelayanan pos lainnya di semua wilayah pos paling banyak adalah dalam bentuk Depo BPM, disusul pos sekolah dan pos desa. Sesuai fungsinya sebagai perangkat pendukung untuk pelayanan pos, maka prasarana dalam bentuk pelayanan pos lainnya dituntut lebih banyak dan tersebar agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat pengguna jasa perposan. Depo BPM sebagai pelayanan pos lainnya yang paling banyak dan hampir pada seluruh daerah karena sifat dari Depo BPM yang penyelenggaraanya dapat dilakukan oleh pihak tertentu (tidak harus PT. Pos) atas ijin PT. Pos untuk melakukan penjualan benda pos dan materei sesuai harga nominal. Hal ini memungkinkan pihak lain ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Depo BPM untuk memenuhi kebutuhan publik sehingga jumlahnya menjadi lebih banyak. Sementara pelayanan pos lainnya juga cukup banyak karena keberadaannya yang dikaitkan dengan sekolah yang juga jumlahnya sangat banyak tersebar dan sebagai bagian dari pendidikan pengenalan perposan kepada siswa sekolah. Pada beberapa daerah dengan jumlah penduduk maupun desa yang banyak seperti di Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur, jumlah Depo BPM ini jauh lebih banyak daripada bentuk pelayanan pos lainnya.

Tabel 5.8. Sebaran Jumlah Pelayanan Pos Lainnya menurut jenis dan Wilayah Pos 2009

No	Pelayanan Pos Lainnya	Wilayah Pos											Jumlah
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	Waralaba	5	1	0	6	3	3	1	0	1	3	0	23
2	Mailling Room	0	2	1	10	0	0	0	1	2	1	1	18
3	Rumahpos	30	35	68	0	0	0	0	9	113	80	33	368
4	Agenpos	64	54	32	517	159	171	215	110	127	97	27	1573
5	Agenpos Desa	46	17	7	15	45	47	49	40	37	12	3	318
6	Agenpos Koperasi	20	27	18	83	59	64	32	36	49	21	18	427
7	Depo Bpm	342	331	224	295	562	1220	1121	449	212	342	122	5220
8	Posserba	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pos Desa	233	277	259	117	375	585	145	199	219	183	119	2711
10	Kantor Pos Desa	88	5	29	47	99	42	136	43	145	152	74	860
11	Warpos Kesra	101	118	91	200	218	213	127	93	147	59	59	1426
12	Pos Sekolah	357	339	243	303	397	465	406	266	286	124	108	3294
	Jumlah	1286	1206	972	1593	1917	2810	2232	1246	1338	1074	564	16238

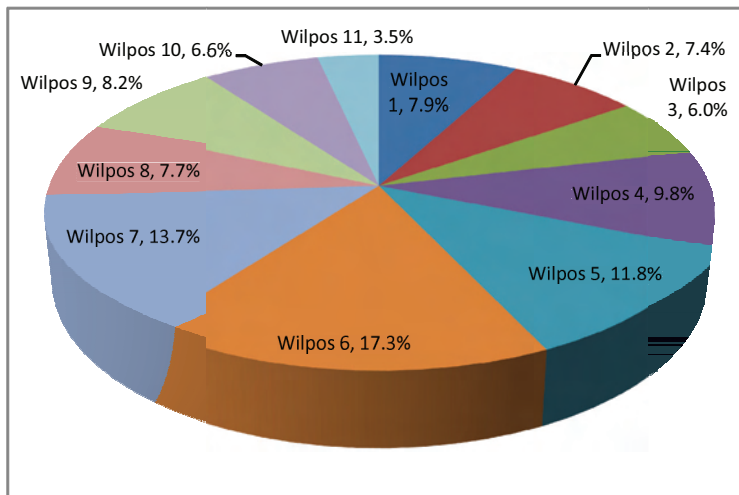
Namun pada daerah lainnya seperti di Wilpos III, IV, VIII dan IX, pelayanan pos lainnya dalam bentuk Pos Sekolah lebih banyak daripada Depo BPM meskipun perbedaannya tidak terlalu besar. Jika dilihat berdasarkan pulau, terlihat bahwa di Pulau Jawa penyelenggaraan Depo BPM lain banyak dilakukan.

Gambar 5.10. Jumlah pelayanan pos lainnya antar Wilpos Tahun 2009



Jika dilihat dari distribusinya menurut wilayah pos, gambar 5.11 menunjukkan pelayanan pos lainnya paling banyak terdapat di wilayah pos VI dengan proporsi mencapai 17,86%, diikuti dengan wilayah pos VII dengan proporsi 13,7%. Meskipun distribusi proporsi ini hampir sama dengan distribusi proporsi untuk kantor pos dan pelayanan pos bergerak, namun distribusi pelayanan pos lainnya ini terdistribusi lebih baik. Tidak ada wilayah pos yang proporsi pelayanan pos lainnya yang lebih dari 30% dan tidak ada yang kurang dari 1%. Bahkan untuk wilayah pos XI yang meliputi kawasan timur Indonesia, proporsinya sudah mencapai 3,5% meskipun masih yang paling kecil.

Gambar 5.11. Proporsi pelayanan pos lainnya antar Wilpos Tahun 2009



Jika dilihat dari sebarannya menurut pulau, tabel 5.9 menunjukkan bahwa untuk hampir semua jenis pelayanan pos lainnya, persebarannya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Konsentrasi di pulau Jawa terutama sangat terlihat untuk jenis Depo BPM, Agen Pos dan warpos Kesra. Jumlah penduduk yang besar dan kebutuhan pelayanan pos yang tinggi diduga menjadi faktor yang mendorong pihak ketiga (pelaku usaha) untuk bekerjasama dengan PT. Pos untuk membuka pelayanan pos lainnya seperti untuk jenis Depo BPM dan Agen Pos. Wilayah kepulauan lain yang cukup banyak memiliki unit pelayanan pos lainnya setelah Jawa adalah Sumatera. Ketersediaan unit pelayanan pos lainnya yang cukup menonjol untuk wilayah Sumatera adalah untuk jenis Depo BPM, Pos Desa dan pos sekolah. Dari pola persebaran pelayanan pos lainnya menurut pulau ini secara implisit bahwa kegiatan yang

berkembang di masyarakat dan perkembangan ekonomi suatu wilayah yang mendorong adanya kebutuhan pelayanan pos menjadi faktor yang mendukung berkembangnya pelayanan pos lainnya di suatu daerah.

Tabel 5.9. Sebaran Pelayanan Pos Lainnya menurut Jenis dan Pulau Tahun 2009

No	Pelayanan Pos Lainnya	Wilayah kepulauan						Jumlah
		Sumatera	Jawa	Bali, NTB, NTT	Kalimantan	Sulawesi	Maluku, Irian	
1	Waralaba	6	13	0	1	3	0	23
2	Mailling Room	3	10	1	2	1	1	18
3	Rumahpos	133	0	9	113	80	33	368
4	Agenpos	150	1062	110	127	97	27	1573
5	Agenpos Desa	70	156	40	37	12	3	318
6	Agenpos Koperasi	65	238	36	49	21	18	427
7	Depo Bpm	897	3198	449	212	342	122	5220
8	Posserba	0	0	0	0	0	0	0
9	Pos Desa	769	1222	199	219	183	119	2711
10	Kantor Pos Desa	122	324	43	145	152	74	860
11	Warpos Kesra	310	758	93	147	59	59	1426
12	Pos Sekolah	939	1571	266	286	124	108	3294
	Jumlah	3464	8552	1246	1338	1074	564	16238

Komposisi pelayanan pos lainnya pada masing-masing wilayah pos juga menunjukkan bahwa pelayanan pos lainnya dalam bentuk Depo BPM paling banyak muncul dan berkembang di semua wilayah pos. Tabel 5.10 dan gambar 5.12 menunjukkan terdapat perbedaan komposisi pelayanan pos lainnya antara wilayah pos I, II, III dan IX dengan wilayah pos lainnya. Pada wilayah pos lainnya, komposisi pelayanan pos lainnya menunjukkan bahwa paling banyak adalah dari jenis Depo BPM sebagaimana komposisi pelayanan pos lainnya secara total. Namun untuk wilayah pos I, II dan IX komposisinya menunjukkan bahwa jenis pos sekolah justru memiliki proporsi paling besar dibanding Depo BPM maupun pelayanan pos lainnya. Pelayanan jenis pos sekolah juga cukup signifikan proporsinya. Sementara untuk wilayah pos III, proporsi terbesar dari pelayanan pos lainnya adalah untuk jenis pos desa.

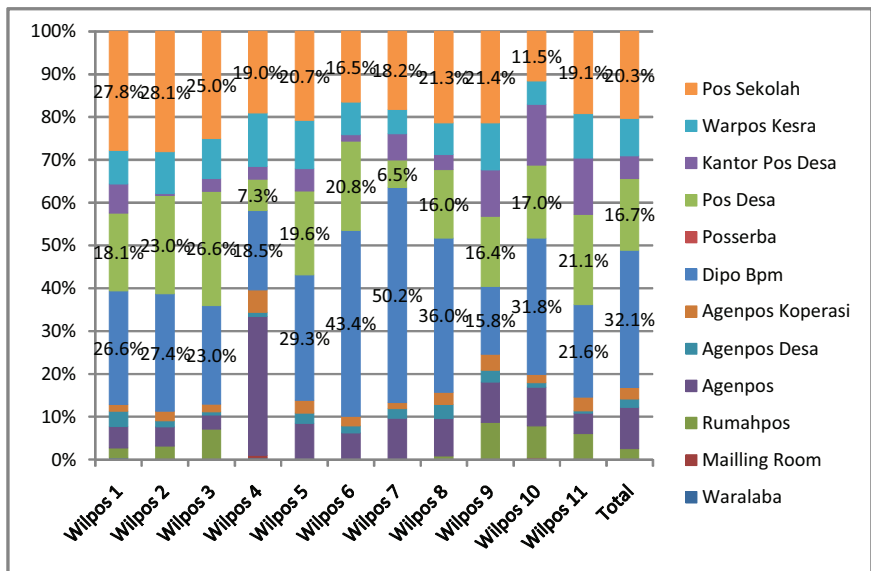
Secara total proporsi Depo Bpm mencapai 32,1% dari total pelayanan pos lainnya yang tersedia, diikuti dengan pelayanan pos sekolah yang proporsinya mencapai 20,3%. Sementara jenis pelayanan pos lainnya yang masih sangat rendah proporsinya adalah untuk

jenis Waralaba pos, mailing room dan posserba. Pelayanan dalam bentuk mailing room memang masih tergolong baru sehingga penyediannya belum banyak disamping karena pemanfaatannya masih rendah. Penyediaan pelayanan pos lainnya yang signifikan nampaknya hanya yang melibatkan keterlibatan masyarakat dalam penyediaanya atau yang memiliki keterkaitan dengan penyelenggaraan lain seperti pos sekolah dan pos desa.

Tabel 5.10. Komposisi Pelayanan Pos Lainnya menurut Jenis dan Wilayah Pos Tahun 2009

No	Pelayanan Pos Lainnya	Wilayah Pos											Total
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	Waralaba	0,4%	0,1%	0,0%	0,4%	0,2%	0,1%	0,0%	0,0%	0,1%	0,3%	0,0%	0,1%
2	Mailing Room	0,0%	0,2%	0,1%	0,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,1%
3	Rumahpos	2,3%	2,9%	7,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,7%	8,4%	7,4%	5,9%	2,3%
4	Agenpos	5,0%	4,5%	3,3%	32,5%	8,3%	6,1%	9,6%	8,8%	9,5%	9,0%	4,8%	9,7%
5	Agenpos Desa	3,6%	1,4%	0,7%	0,9%	2,3%	1,7%	2,2%	3,2%	2,8%	1,1%	0,5%	2,0%
6	Agenpos Koperasi	1,6%	2,2%	1,9%	5,2%	3,1%	2,3%	1,4%	2,9%	3,7%	2,0%	3,2%	2,6%
7	Depo Bpm	26,6%	27,4%	23,0%	18,5%	29,3%	43,4%	50,2%	36,0%	15,8%	31,8%	21,6%	32,1%
8	Posserba	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
9	Pos Desa	18,1%	23,0%	26,6%	7,3%	19,6%	20,8%	6,5%	16,0%	16,4%	17,0%	21,1%	16,7%
10	Kantor Pos Desa	6,8%	0,4%	3,0%	3,0%	5,2%	1,5%	6,1%	3,5%	10,8%	14,2%	13,1%	5,3%
11	Warpos Kesra	7,9%	9,8%	9,4%	12,6%	11,4%	7,6%	5,7%	7,5%	11,0%	5,5%	10,5%	8,8%
12	Pos Sekolah	27,8%	28,1%	25,0%	19,0%	20,7%	16,5%	18,2%	21,3%	21,4%	11,5%	19,1%	20,3%

Gambar 5.12. Proporsi pelayanan pos lainnya menurut jenis Tahun 2009



## b. Cakupan dan Jangkauan Pelayanan Pos Lainnya

Beban pelayanan dari pelayanan pos lainnya menunjukkan bahwa beban cakupan pelayanan kepada penduduk cukup bervariasi antar wilayah pos namun dengan deviasi yang tidak terlalu besar sebagaimana pada kantor pos dan pelayanan pos bergerak. Kondisi ini terjadi karena jumlah pelayanan pos lainnya di masing-masing wilayah relatif cukup banyak. Beban cakupan pelayanan terhadap penduduk untuk pelayanan pos lainnya paling besar ada di wilayah pos V yang justru merupakan daerah dengan sarana pos yang cukup banyak dibanding wilayah pos lainnya. Setiap unit pelayanan pos lainnya di wilayah pos V harus mencakup pelayanan untuk 20.672 penduduk. Urutan berikutnya dari cakupan pelayanan pos lainnya yang besar adalah 20.019 penduduk.

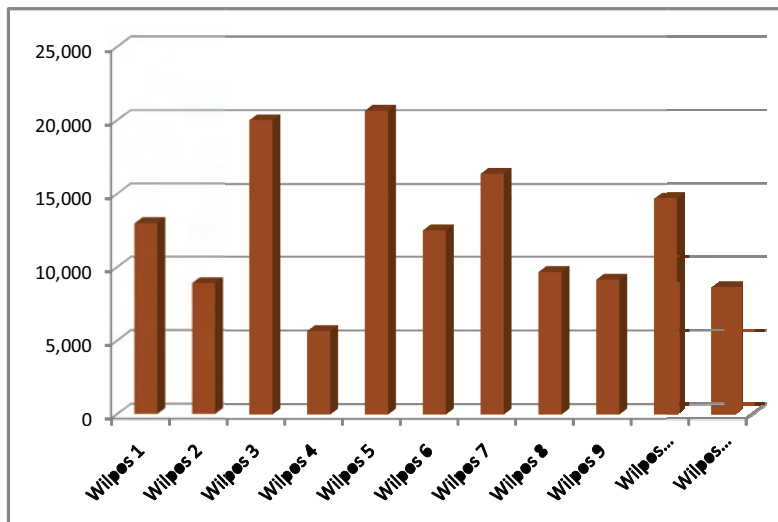
Tabel 5.11. Cakupan dan Jangkauan Pelayanan Pos Lainnya menurut Wilayah Pos Tahun 2009

No.	Wilayah Pos	Cakupan penduduk per pos pelayanan lainnya	Jangkauan luas pelayanan per pos pelayanan lainnya (km <sup>2</sup> )
1	I	12.988	102
2	II	8.914	114
3	III	20.019	219
4	IV	5.662	0,4
5	V	20.672	18
6	VI	12.502	13
7	VII	16.394	21
8	VIII	9.674	59
9	IX	9.160	407
10	X	14.689	175
11	XI	8.603	878

Tabel 5.11 dan gambar 5.13 juga menunjukkan beban cakupan pelayanan penduduk untuk pelayanan pos lainnya yang paling rendah juga ada di Pulau Jawa yaitu di wilayah pos IV. Hal ini lebih disebabkan oleh jumlah penduduk yang tidak terlalu besar di wilayah tersebut sementara sarana pos pelayanan lainnya juga cukup banyak. Hal yang menarik adalah bahwa cakupan beban pelayanan untuk daerah-daerah yang memiliki sarana pos yang cenderung rendah seperti wilayah pos II, IX dan XI justru termasuk daerah yang memiliki beban cakupan pelayanan penduduk untuk pelayanan pos lainnya yang cukup rendah. Kondisi ini bisa terjadi karena jumlah penduduk di wilayah-wilayah tersebut yang tidak terlalu besar/padat sebagaimana di Jawa dan pelayanan pos lainnya yang sudah lebih

tersebar. Dengan demikian fungsi dari pelayanan pos lainnya dalam mendukung pelayanan pos relatif sudah cukup berjalan.

Gambar 5.13. Cakupan pelayanan pos lainnya menurut Wilayah Pos Tahun 2009

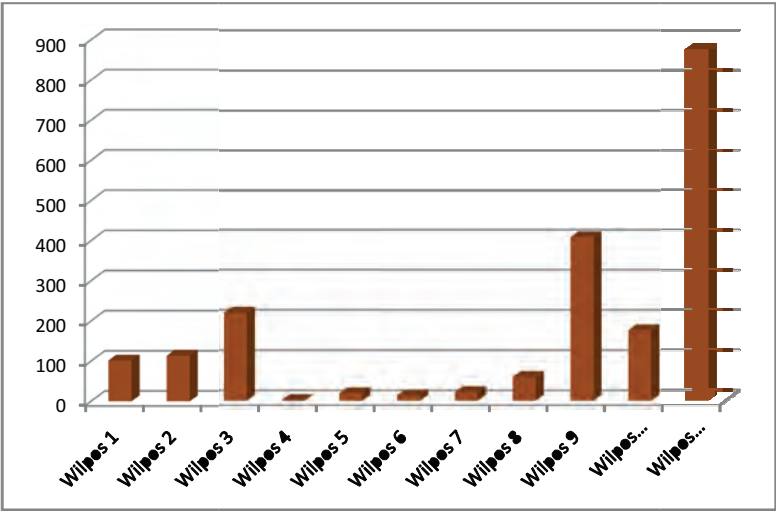


Peranan pelayanan pos lainnya dalam mendukung pelayanan penduduk yang lebih luas relatif sudah memadai. Pada wilayah pos dengan sarana pos yang cenderung rendah, beban cakupan pelayanan penduduk untuk setiap unit pelayanan pos lainnya tergolong relatif kecil.

Dari sisi jangkauan pelayanannya, sebagaimana pada sarana pos lainnya, beban jangkauan pelayanan dari pelayanan pos lainnya pada wilayah pos tertentu seperti wilayah pos XI dan IX adalah yang paling besar. Diagram pada gambar 5.14 menunjukkan beban jangkauan pelayanan pada kedua wilayah pos ini dan khususnya pada wilayah pos XI jauh lebih besar daripada jangkauan pelayanan pos lainnya di wilayah pos di Pulau Jawa. Satu unit pelayanan pos lainnya di wilayah pos XI harus melayani daerah seluas 878 km<sup>2</sup> sementara di wilayah pos IX jangkauannya mencapai 407 km<sup>2</sup>.

Sebaliknya di pulau Jawa, satu unit pelayanan pos lainnya hanya melayani daerah seluas kurang dari 20 km2. Bahkan untuk wilayah pos IV, satu unit pelayanan pos lainnya hanya melayani area seluas 0.4 km2. Artinya, meskipun dari sisi cakupan pelayanan penduduk sudah relatif seimbang, namun karena kepadatan penduduk yang sangat berbeda, jangkauan pelayanannya juga masih sangat besar untuk daerah dengan kepadatan penduduk rendah.

Gambar 5.14. Jangkauan pelayanan pos lainnya menurut Wilayah Pos Tahun 2009



**5.3.1.4. Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya**

Fasilitas pelayanan pos lainnya adalah fasilitas yang disediakan oleh PT. Pos untuk mendukung pelayanan perposan kepada masyarakat. Fasilitas ini relati bersifat pasif dalam bentuk penyediaan fasilitas di tempat tertentu untuk dimanfaatkan selain sarana dalam bentuk kantor pos, pelayanan pos bergerak dan pelayanan pos lainnya. Bentuk dari fasilitas ini adalah kotak pos yang bisa disewa oleh individu atau badan hukum, tromol pos, bis surat dan peti pos. Perkembangan jumlah fasilitas pelayanan pos lainnya menunjukkan dalam lima tahun terakhir tidak ada penambahan dari fasilitas pelayanan pos yang disediakan seperti terlihat pada tabel 5.12. Bukan hanya tidak mengalami penambahan dalam pengadaan sarana fasilitas yang disediakan, namun tingkat pemanfaatan atas kotak pos yang



tersedia juga tidak mengalami peningkatan. Sejak tahun 2004, jumlah kotak pos yang disewa hanya 50.560 atau sekitar 60% dari kotak pos yang disediakan.

Tidak adanya penambahan fasilitas pelayanan pos lainnya ini diduga karena pemanfaatannya juga tidak terlalu optimal mengingat mulai berkembangnya fasilitas yang sejenis ataupun sarana pengiriman dokumen lain yang disediakan oleh pihak diluar PT. Pos dengan pelayanan yang lebih beragam. Untuk pengiriman surat misalnya banyak berkembang jasa kurir dengan sistem jemput dengan biaya yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perkembangan fasilitas pelayanan pos lainnya ini juga cenderung mengikuti perkembangan pada sarana kantor pos yang juga tidak banyak mengalami penambahan signifikan dalam lima tahun terakhir. Hal ini karena keberadaan dari fasilitas pelayanan pos lainnya ini seperti melekat untuk mendukung pelayanan oleh kantor pos.

Tabel 5.12. Perkembangan Jumlah Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya 2004-2009

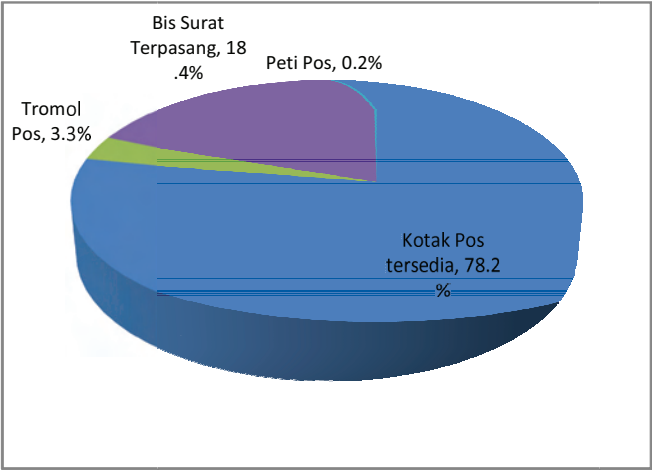
	Fasilitas Pos	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Kotak Pos tersedia	77.768	77.768	77.768	77.768	77.768	77.768
2	Kotak Pos Disewa	50.560	50.560	50.560	50.560	50.560	50.560
3	Tromol Pos	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270	3.270
4	Bis Surat Terpasang	18.260	18.260	18.260	18.260	18.260	18.260
5	Peti Pos	199	199	199	199	199	199
	Jumlah	99.497	99.497	99.497	99.497	99.497	99.497

Tidak adanya penambahan fasilitas pelayanan pos lainnya dalam lima tahun terakhir diduga terkait dengan banyaknya penyediaan layanan sejenis atau pelayanan perposan yang disediakan oleh pihak selain PT. Pos dan penyediaan sarana ini juga terkait dengan keberadaan kantor pos yang juga tidak mengalami banyak perubahan.

Dari sisi komposisinya, fasilitas pos lainnya yang paling banyak disediakan oleh PT. Pos adalah dalam bentuk kotak pos tersedia yang mencapai 77.768 buah atau 78,2% dari total fasilitas pelayanan pos yang disediakan. Gambar diagram 5.15 menunjukkan bahwa proporsi bis surat terpasang hanya mencapai 18,4% dari fasilitas pelayanan pos yang tersedia. Proporsi jumlah fasilitas pelayanan yang lebih banyak untuk kotak pos dapat dipahami mengingat

penyediaanya relatif mudah dan tersebar pada Kantor pos serta memberikan sumber pendapatan bagi PT. Pos melalui penyewaan fasilitas pelayanan Kotak Pos tersebut.

Gambar 5.15. Proporsi fasilitas pelayanan pos lainnya menurut jenis Tahun 2009



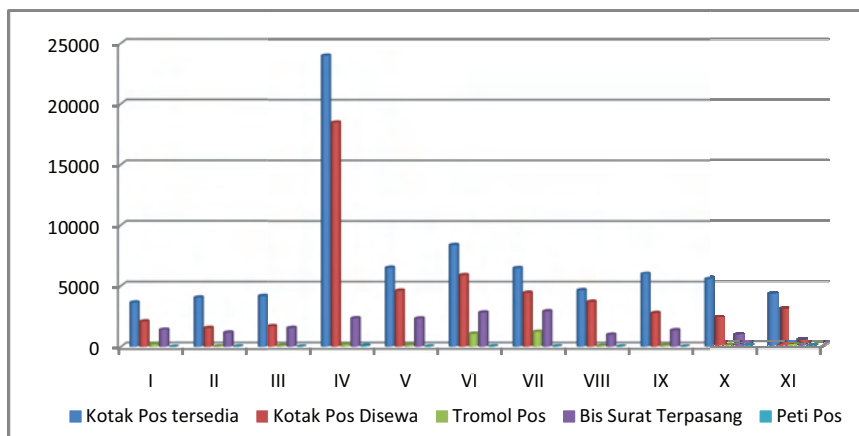
Jika dilihat dari sebaran penyediaan fasilitas pelayanan pos lainnya menurut wilayah pos, fasilitas pelayanan pos lainnya ini juga masih lebih banyak dan terkonsentrasi pada wilayah pos di pulau Jawa. Penyediaan fasilitas pelayanan pos lainnya seperti terlihat pada tabel 5.13 dan gambar 5.16, penyediaan sarana fasilitas pelayanan pos lainnya paling banyak adalah di wilayah pos IV, disusul wilayah pos VI dan VII. Meskipun wilayahnya tidak terlalu luas dan lebih banyak perkotaan serta jumlah penduduk tidak sebesar beberapa wilayah pos lainnya, namun penyediaan fasilitas pelayanan pos lainnya di wilayah pos IV ini jauh lebih banyak daripada wilayah pos lainnya. Untuk wilayah pos di luar Jawa bahkan penyediaan fasilitas pelayanan pos ini tidak terlalu banyak dan paling tinggi hanya di pos. Penyediaan sarana pelayanan pos lainnya diluar Jawa paling banyak ada di wilayah pos IX yang berjumlah 7.492 unit dari berbagai jenis fasilitas.

Tabel 5.13. Sebaran Jumlah Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya menurut Wilayah Pos 2009

No	Pelayanan Pos Lainnya	Wilayah Pos											Jumlah
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	Kotak Pos tersedia	3.658	4.058	4.181	23.971	6.514	8.365	6.486	4.661	6.009	5.578	4.287	77.768
2	Kotak Pos Disewa	2.090	1.570	1.693	18.465	4.613	5.879	4.438	3.704	2.766	2.321	3.021	50.560
3	Tromol Pos	218	35	89	169	143	1.073	1.237	69	112	30	95	3.270
4	Bis Surat Terpasang	1.419	1.154	1.550	2.338	2.321	2.812	2.898	1.004	1.366	901	497	18.260
5	Peti Pos	6	33	1	84	9	24	27	7	5	3	0	199
	Jumlah *	5.301	5.280	5.821	26.562	8.987	12.274	10.648	5.741	7.492	6.512	4.879	99.497

\*) tidak termasuk Kotak Pos Disewa

Gambar 5.16. Sebaran fasilitas pelayanan pos lainnya menurut jenis Tahun 2009



Sebaran penyediaan fasilitas pelayanan pos lainnya menurut pulau juga menunjukkan konsentrasi penyebaran dan penyediaan fasilitas pelayanan lainnya di Pulau Jawa. Tabel 5.14 secara implisit menunjukkan penyediaan sarana fasilitas pelayanan pos lainnya mencapai 58,8% dari total fasilitas pelayanan pos lainnya di Indonesia. Proporsi terbanyak kedua adalah di wilayah Pulau Sumatera yang hanya 15,3%. Penyediaan sarana fasilitas pelayanan pos lainnya di wilayah Maluku dan Papua yang wilayahnya luas proporsinya bahkan hanya 4,9%.

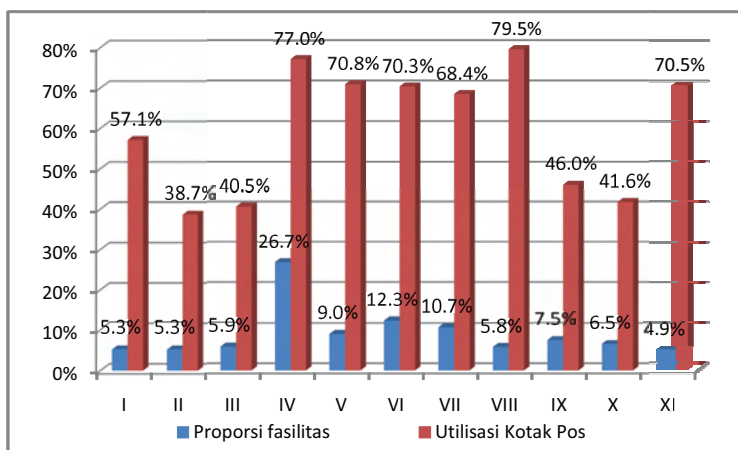
Tabel 5.14. Sebaran Jumlah Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya menurut Pulau 2009

No	Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya	Wilayah kepulauan						Jumlah
		Suma- tera	Jawa	Bali, NTB, NTT	Kaliman- tan	Sula- wesi	Maluku, Irian	
1	Kotak Pos tersedia	11.897	45.336	4.661	6.009	5.578	4.287	77.768
2	Kotak Pos Disewa	5.353	33.395	3.704	2.766	2.321	3.021	50.560
3	Tromol Pos	342	2.622	69	112	30	95	3.270
4	Bis Surat Terpasang	4.123	10.369	1.004	1.366	901	497	18.260
5	Peti Pos	40	144	7	5	3	0	199
	Jumlah *	16.402	58.471	5.741	7.492	6.512	4.879	99.497

\*) tidak termasuk Kotak Pos Disewa

Jika dilihat dari sebaran menurut wilayah pos juga terlihat pada gambar 5.17 bahwa proporsi terbesar ada di wilayah pos IV. Penyediaan fasilitas pelayanan pos lainnya di wilayah pos IV ini mencapai 26,7% dari total fasilitas pelayanan pos lainnya yang tersedia, diikuti oleh wilayah pos VI dan VII yang proporsinya mencapai 12,3% dan 10,7%. Penyediaan fasilitas pos lainnya di Pulau Jawa juga lebih dominan dan jauh lebih banyak dibanding daerah lain. Hal ini wajar mengingat jumlah penduduk yang lebih banyak dan padat di Jawa serta dinamika kegiatan sosial dan bisnis yang juga lebih tinggi di Jakarta. Dari pola penyebaran ini juga terlihat bahwa distribusi penyediaan fasilitas pelayanan pos lainnya dilakukan dengan memperhatikan tingkat kepadatan penduduk dan dinamika kegiatan sosial dan bisnis.

Gambar 5.17. Tingkat Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Pos Lainnya menurut Wilpos 2009



Pola penyebaran fasilitas pelayanan pos lainnya yang lebih banyak disediakan di Jawa menjadi relevan ketika tingkat penggunaannya juga cukup tinggi. Pada kasus penyediaan fasilitas kotak pos misalnya, menunjukkan bahwa tingkat utilisasi atau pemanfaatan kotak pos yang disediakan juga lebih tinggi di Jawa. Diagram pada gambar 5.17 menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan kotak pos di Jawa relatif lebih tinggi daripada pemanfaatan kotak pos diluar Jawa seperti di Sumatera, Sulawesi dan Kalimantan. Hal yang menarik dari pola utilisasi kotak pos ini adalah cukup tingginya pemanfaatan kotak pos di wilayah pos VIII yang meliputi propinsi Bali, NTB dan NTT dan wilayah pos XI yang meliputi wilayah Bali dan Papua. Namun tingginya tingkat pemanfaatan kotak pos di wilayah pos ini lebih disebabkan oleh tingkat penyediaannya juga sebenarnya tidak terlalu besar (kurang dari 5.000), disisi lain juga karena adanya kegiatan ekonomi yang cukup tinggi pada daerah tertentu di kedua wilayah pos ini seperti pariwisata di Bali dan NTB dan usaha pertambangan di Papua dan Perikanan di Maluku, disamping untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah.

Penyediaan fasilitas pelayanan pos lainnya yang jauh lebih banyak di Jawa menjadi wajar karena tingkat pemanfaatan fasilitas pelayanan pos lainnya ini juga lebih tinggi di pulau Jawa

### **5.3.2. Jangkauan Pelayanan Pos.**

Analisis jangkauan pelayanan pos ini dilakukan untuk melihat tingkat jangkauan pelayanan pos dalam melayani penduduk melalui sarana pos yang tersedia di masing-masing tingkatan. Jangkauan pelayanan ini secara khusus menggambarkan tingkat jangkauan pada daerah bukan pusat pemerintahan kabupaten/kota atau pelayanan terhadap penduduk yang jauh dari pusat kota. Jangkauan pelayanan pos yang dilakukan oleh PT. Pos dapat dibagi menjadi tiga yaitu jangkauan pelayanan pos di Kecamatan, Jangkauan pelayanan pos di lokasi transmigrasi dan jangkauan pelayanan pos di Kelurahan/Desa.

#### **a. Pelayanan Di Kecamatan**

Upaya menjangkau pelayanan perposan kepada masyarakat di tingkat kecamatan dilakukan melalui Kantor Pos, Kantor Pos Vab (Kabupaten, Dalam Kota, Luar Kota), Kantor Po Desa dan Kantor Pos Keliling. Meskipun terjadi peningkatan jumlah kecamatan dari tahun 2004 ke 2009, namun seluruh wilayah kecamatan telah dilayani oleh berbagai sarana pelayanan pos

yang tersedia. Tabel 5.15 menunjukkan bahwa seluruh kecamatan telah terlayani dengan paling banyak dilayani oleh Kantor Pos Cabang (Luar Kota). Namun dari sisi peningkatan jangkauan pelayanan untuk merespon peningkatan jumlah kecamatan paling banyak dilakukan melalui pelayanan oleh Kantor Pos Cabang dalam kota. Sementara untuk pelayanan melalui Kantor Cabang Luar Kota justru mengalami penurunan. Namun pada 2009, peningkatan paling banyak dalam pelayanan dilakukan oleh kantor pos cabang kabupaten dengan peningkatan mencapai 120%. Hal ini sebenarnya merupakan perubahan dari pelayanan yang semula dilakukan oleh kantor pos cabang luar kota (terjadi perubahan status dari kantor pos cabang luar kota menjadi kantor pos cabang kabupaten).

Tabel 5.15. Perkembangan Jangkauan pelayanan Pos di Kecamatan 2004-2009

No	Jangkauan Pelayanan	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
1	Jumlah Kecamatan	3.782	3.790	3.791	3.823	3.896	3923
2	Dilayani Kp- I-VI (Kprk)	206	206	206	206	206	206
3	Dilayani Kp-VI-X Cab/Kab	88	88	88	88	88	195
4	Dilayani Kp-VI-X Cab/DK	287	289	285	286	292	299
5	Dilayani Kp-VI-X Cab/Lk	2.258	2.256	2.233	2.228	2.238	2184
6	Dilayani Kantor Pos Desa	854	853	852	873	875	846
7	Dilayani Pos Keliling Kota/Desa	89	98	127	142	197	193
8	Jumlah Kec. Dilayani	3.782	3.790	3.791	3.823	3.896	3923
9	Jumlah Kec. Belum Dilayani	0	0	0	0	0	0

Dilihat dari sebaran antar wilayah pos, jangkauan pelayanan pos di kecamatan paling banyak terdapat di wilayah pos VI dan VII yang meliputi Jawa Tengah, DIY dan Jawa Timur. Hal ini sejalan dengan jumlah kecamatan yang banyak pada kedua wilayah tersebut. Pelayanan di tingkat kecamatan pada kedua wilayah pos tersebut maupun wilayah pos lainnya juga paling banyak dilakukan oleh kantor pos cabang luar kota dibandingkan unit pelayanan lainnya. Namun tabel 5.16 juga menunjukkan bahwa untuk wilpos IV, V dan VII, hanya sedikit yang dilayani Kantor Pos Cabang (kabupaten). Untuk wilayah pos VII, kondisi ini menjadi menarik karena banyak daerah di wilayah pos tersebut masih merupakan bukan daerah perkotaan. Sementara untuk wilayah pos IV hal ini menjadi wajar karena wilayah pos IV merupakan daerah perkotaan sehingga pelayanan oleh kantor pos cabang dalam kota juga cukup besar proporsinya.

Tabel 5.16. Jangkauan Pelayanan Pos di Kecamatan di Wilayah Usaha Pos Tahun 2009

No	Jangkauan Pelayanan di Kecamatan	Wilayah Pos											JUM-LAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	Jumlah Kecamatan	386	186	270	210	394	614	599	219	403	467	175	3.923
2	Dilayani Kp- I-VI (Kprk)	19	15	16	19	18	33	30	14	19	13	10	206
3	Dilayani Kp-VI-X Cab/Kab	21	17	33	0	1	6	3	16	33	42	23	195
4	Dilayani Kp-VI-X Cab/DK	20	26	24	62	36	52	34	9	11	22	3	299
5	Dilayani Kp-VI-X Cab/Lk	213	111	153	79	227	468	376	132	192	179	54	2.184
6	Dilayani Kantor Pos Desa	86	5	26	45	99	41	136	40	143	151	74	846
7	Dilayani Pos Keliling Kota/Desa	27	12	18	5	13	14	20	8	5	60	11	193
8	Jumlah Kec. Dilayani	386	186	270	210	394	614	599	219	403	467	175	3.923
9	Jumlah Kec. Belum Dilayani	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabel 5.17 dan gambar 5.18 menunjukkan bahwa pada hampir semua wilayah pos, pelayanan di kecamatan ini paling banyak dijangkau oleh kantor pos cabang luar kota. Secara total, proporsi pelayanan oleh kantor pos cabang luar kota di kecamatan ini mencapai 55,7% dengan terbesar ada di wilayah pos VI yang proporsinya mencapai 76,2%. Bahkan untuk wilayah pos IV yang kebanyakan merupakan daerah perkotaan, proporsi terbesar jangkauan pelayanan masih oleh kantor pos cabang luar kota yang mencapai 37,6%, baru kemudian diikuti oleh pelayanan melalui kantor pos cabang dalam kota sebesar 29,5%.

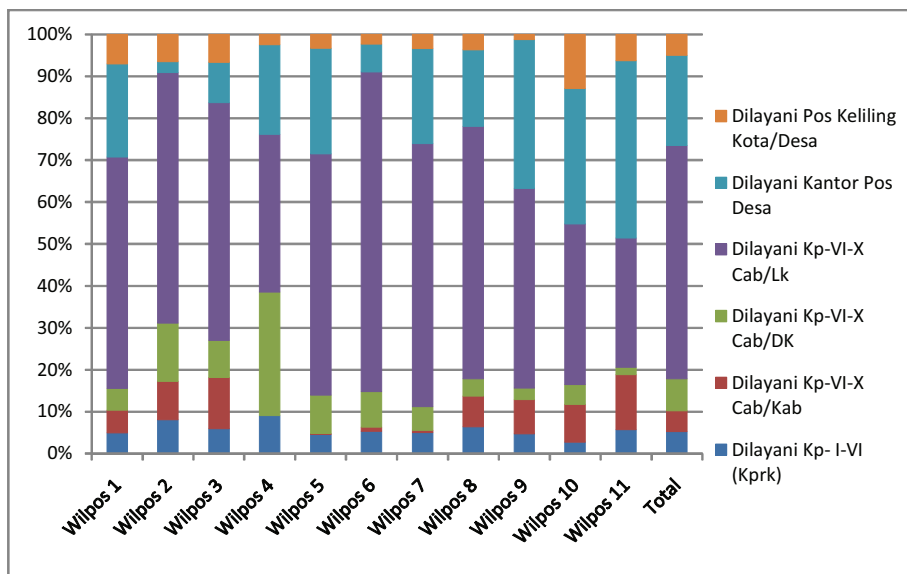
Namun untuk wilayah pos XI, proporsi terbesar pelayanan pos di kecamatan justru oleh kantor pos desa yang mencapai 42,3%. Sementara pelayanan oleh kantor pos cabang luar kota hanya 30,9%. Hal ini bisa terjadi karena wilayah pos memiliki wilayah yang sangat luas dengan kepadatan penduduk yang rendah serta infrastruktur belum terlalu baik. Sehingga pelayanan oleh kantor pos desa masih menjadi andalan. Wilayah lain yang juga cukup mengandalkan pelayanan oleh kantor pos desa adalah wilayah pos IX dan X meskipun proporsinya bukan yang paling besar. Kedua wilayah pos ini juga sebagian besar daerahnya masih merupakan daerah pedesaan dengan kepadatan penduduk yang rendah dan infrastruktur belum terlalu berkembang.

Tabel 5.17. Proporsi jangkauan pelayanan di kecamatan menurut pelayanan di Wilayah Pos 2009

No	Jangkauan Pelayanan di Kecamatan	Wilayah Pos											Total
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	Dilayani Kp- I-VI (Kprk)	4,9%	8,1%	5,9%	9,0%	4,6%	5,4%	5,0%	6,4%	4,7%	2,8%	5,7%	5,3%
2	Dilayani Kp-VI-X Cab/Kab	5,4%	9,1%	12,2%	0,0%	0,3%	1,0%	0,5%	7,3%	8,2%	9,0%	13,1%	5,0%
3	Dilayani Kp-VI-X Cab/DK	5,2%	14,0%	8,9%	29,5%	9,1%	8,5%	5,7%	4,1%	2,7%	4,7%	1,7%	7,6%
4	Dilayani Kp-VI-X Cab/Lk	55,2%	59,7%	56,7%	37,6%	57,6%	76,2%	62,8%	60,3%	47,6%	38,3%	30,9%	55,7%
5	Dilayani Kantor Pos Desa	22,3%	2,7%	9,6%	21,4%	25,1%	6,7%	22,7%	18,3%	35,5%	32,3%	42,3%	21,6%
6	Dilayani Pos Keliling Kota/Desa	7,0%	6,5%	6,7%	2,4%	3,3%	2,3%	3,3%	3,7%	1,2%	12,8%	6,3%	4,9%

Jika dilihat perbandingan antara pelayanan oleh kantor pos dengan pelayanan melalui pos keliling dan pos desa, secara total untuk menjangkau pelayanan di kecamatan memang lebih banyak dilakukan oleh kantor pos.

Gambar 5.18. Komposisi Jangkauan Pelayanan Pos di Kecamatan menurut Wilpos tahun 2009



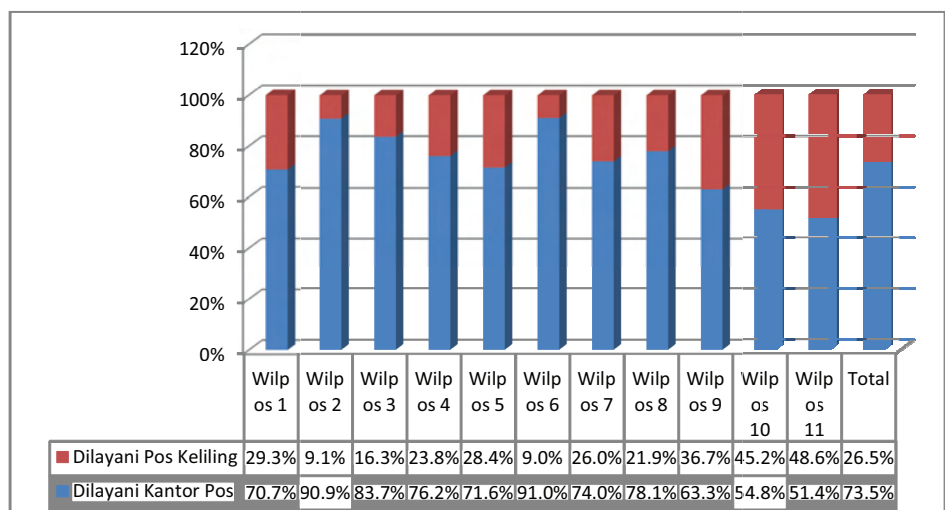
Sekitar 73,5% pelayanan pos di kecamatan dijangkau oleh kantor pos. Namun untuk wilayah tertentu seperti wilayah pos IX, X dan XI, pelayanan oleh pos desa dan pos keliling juga cukup signifikan di tingkat kecamatan. Bahkan untuk wilayah pos XI yang meliputi Maluku



dan Papua, pelayanan oleh pos keliling dan pos desa hampir berimbang dengan pelayanan melalui kantor pos. Sementara untuk wilayah pos X, jangkauan pelayanan di kecamatan oleh pos keliling mencapai 45,2% seperti ditunjukkan gambar 5.19.

Keberadaan pos keliling dan pos desa ternyata cukup efektif dalam menjangkau pelayanan di tingkat kecamatan terutama di Kawasan Timur Indonesia. Proporsi pelayanan melalui pos keliling ini dalam menjangkau pelayanan di kecamatan di Indonesia Timur hampir sama dengan pelayanan melalui kantor pos

Gambar 5.19. Perbandingan pelayanan di kecamatan menurut pelayanan di Wilayah Pos 2009



### b. Pelayanan di Lokasi Transmigrasi

Untuk menjangkau pelayanan di lokasi transmigrasi, pelayanan dengan menggunakan pelayanan pos lainnya seperti rumah pos dan agen pos desa juga dilakukan selain pelayanan melalui kantor pos dan pelayanan pos bergerak seperti pos keliling. Lokasi yang jauh dan infrastruktur yang belum cukup baik serta kepadatan penduduk yang rendah menjadikan pelayanan pos lainnya dan pelayanan bergerak ini juga menjadi alternatif untuk menjangkau pelayanan di lokasi transmigrasi. Jangkauan pelayanan di lokasi transmigrasi tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dalam lima tahun. Hal ini karena jumlah lokasi transmigrasi yang juga tidak mengalami peningkatan (tidak ada lagi pembukaan daerah

transmigrasi baru) sehingga PT. Pos tidak meresponnya dengan peningkatan jumlah pelayanan untuk menjangkau lokasi transmigrasi. Tabel 5.18 menunjukkan bahwa seluruh lokasi transmigrasi sudah terjangkau pelayanan pos dalam lima tahun terakhir, namun tidak menunjukkan terjadinya peningkatan pelayanan. Penurunan pelayanan oleh pos keliling diimbangi dengan peningkatan pelayanan oleh rumah pos dan agen pos desa. Kondisi ini berlangsung mulai terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan masyarakat di lokasi transmigrasi tertentu sehingga pelayanan mulai dilakukan melalui sarana tidak bergerak seperti rumah pos dan agen pos desa.

Tabel 5.18. Perkembangan Jangkauan pelayanan Pos di Lokasi Transmigrasi 2004-2009

No	Jangkauan Pelayanan	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
1	Jumlah Lokasi Transmigrasi	951	951	951	951	951	951
2	Dilayani Kantor Pos Cab LK	242	243	243	243	243	243
3	Dilayani Kantor Pos Desa	6	6	6	6	6	6
4	Dilayani Pos Keliling	293	293	293	293	288	288
5	Dilayani Rumah Pos	405	404	404	404	407	407
6	Dilayani Agenpos Desa	5	5	5	5	7	7
7	Jumlah Lokasi Dilayani	951	951	951	951	951	951
8	Jumlah Lokasi Belum Dilayani	0	0	0	0	0	0

Sebaran jangkauan pelayanan pos di lokasi transmigrasi menurut wilayah pos menunjukkan bahwa lokasi pelayanan pos di lokasi transmigrasi hanya berlangsung pada wilayah diluar Jawa dengan terbesar berada wilayah pos III dan IX. Kedua wilayah pos ini yang mencakup wilayah Sumatera bagian selatan dan Kalimantan memang merupakan lokasi transmigrasi yang paling banyak sehingga membutuhkan dukungan pelayanan pos untuk menjangkau pelayanan di lokasi transmigrasi ini.

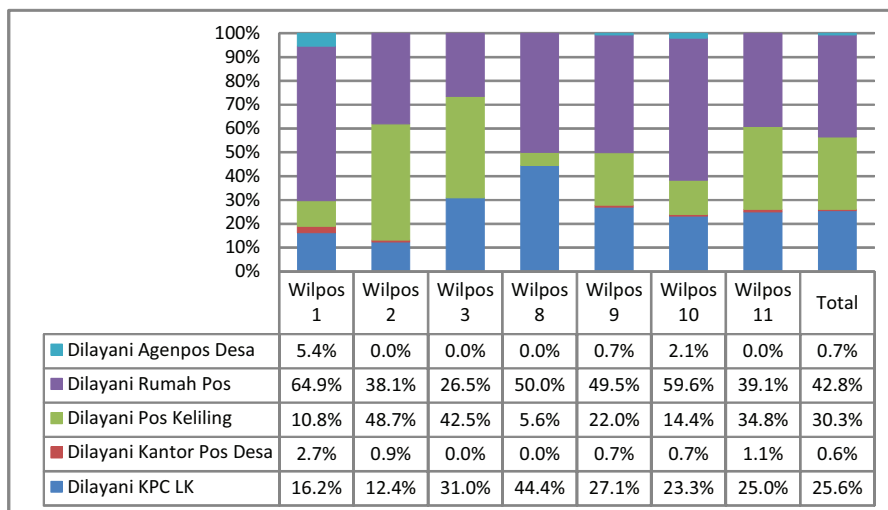
Tabel 5.19. Jangkauan Pelayanan Pos di Lokasi Transmigrasi di Wilayah Pos Tahun 2009

No	Jangkauan Pelayanan di Kecamatan	Wilayah Pos											JUM-LAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	Jumlah Lokasi Transmigrasi	37	133	268	0	0	0	0	18	277	146	92	971
2	Dilayani Kantor Pos Cab LK	6	14	83	0	0	0	0	8	75	34	23	243
3	Dilayani Kantor Pos Desa	1	1	0	0	0	0	0	0	2	1	1	6
4	Dilayani Pos Keliling	4	55	114	0	0	0	0	1	61	21	32	288
5	Dilayani Rumah Pos	24	43	71	0	0	0	0	9	137	87	36	407
6	Dilayani Agenpos Desa	2	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	7
7	Jumlah Lokasi Dilayani	37	113	268	0	0	0	0	18	277	146	92	951
8	Jumlah Lokasi Belum Dilayan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Namun tabel 5.19 yang memperlihatkan jangkauan pelayanan di lokasi transmigrasi menunjukkan bahwa jangkauan pelayanan di lokasi transmigrasi untuk wilayah pos XI belum terlalu banyak. Hal ini disebabkan meskipun wilayahnya cukup luas dan kepadatan penduduk rendah, tidak banyak lokasi transmigrasi yang dikembangkan di wilayah tersebut yang meliputi Maluku dan Papua. Sehingga pelayanan pos yang disediakan khusus untuk menjangkau pelayanan di wilayah tersebut juga belum terlalu banyak. Daerah lain yang tidak banyak menyediakan pelayanan pos untuk lokasi transmigrasi adalah di wilayah pos I dan VIII yang juga disebabkan lokasi transmigrasi yang relatif sedikit di wilayah tersebut.

Jika dilihat dari jenis sarana yang melayani, terdapat perbedaan antar wilayah pos dalam jenis sarana yang digunakan untuk menjangkau wilayah transmigrasi. Pada wilayah pos I, VIII, IX dan X, pelayanan lebih dominan dilakukan melalui rumah pos dibandingkan sarana pelayanan lainnya seperti ditunjukkan oleh gambar 5.20. Hal ini disebabkan lokasi transmigrasi pada wilayah pos tersebut sudah cukup banyak dihuni dan mulai banyak kegiatan masyarakat sehingga penyediaan sarana pos mulai bergeser melalui pelayanan dalam bentuk rumah pos. Sementara untuk wilayah pos II dan III, pelayanan pos di lokasi transmigrasi lebih banyak dilakukan melalui pos keliling karena belum padatnya penduduk di lokasi transmigrasi di wilayah pos ini. Pelayanan pos melalui pos keliling juga cukup signifikan di lokasi transmigrasi di wilayah pos XI. Sementara untuk wilayah pos VIII, pelayanan di lokasi transmigrasi juga banyak dilakukan melalui sarana kantor pos cabang luar kota, karena sebagian lokasi transmigrasi sudah berkembang menjadi kota kecamatan.

Gambar 5.20. Perbandingan pelayanan di lokasi transmigrasi menurut pelayanan diWilayah Pos 2009



Pelayanan pos untuk menjangkau lokasi transmigrasi mengikuti perkembangan kepadatan penduduk lokasi transmigrasi tersebut. Pada lokasi dengan kepadatan penduduk yang mulai tinggi pelayanan cenderung dilakukan melalui rumah pos

### c. Jangkauan Pelayanan di Desa.

Jangkauan pelayanan di desa oleh PT Pos dilakukan melalui berbagai unit pelayanan mulai dari pelayanan oleh kantor pos, pelayanan pos bergerak maupun pelayanan pos lainnya seperti pos desa, agen pos desa dan warpos. Hal ini disebabkan jumlah desa yang sangat banyak sehingga perlu menggunakan beragam sarana pelayanan yang mungkin menjangkau pedesaan. Tabel 5.20 menunjukkan bahwa semakin meningkatnya jumlah desa dengan adanya berbagai pemekaran wilayah administratif (dari kabupaten sampai kecamatan dan desa), belum sepenuhnya dapat direspon oleh pelayanan pos yang menjangkau desa. Jumlah desa meningkat terutama sejak tahun 2007 dari 68.298 pada 2007 menjadi 70.629 (3,4%) pada tahun 2009. Peningkatan jumlah desa yang tidak besar ini justru diikuti dengan penurunan jumlah desa yang terjangkau pelayanan pos. Jumlah desa yang terjangkau pelayanan menurun sejak tahun 2005 dari 34.450 desa menjadi 29.489 atau menurun 16,8%. Dengan ini berarti tingkat keterjangkauannya juga menjadi semakin rendah. Tabel

5.20 menunjukkan tingkat keterjangkauan desa oleh pelayanan pos menurun dari 50,49% pada tahun 2004 menjadi hanya 41,75% pada tahun 2009.

Tabel 5.20. Perkembangan Jangkauan Pelayanan Pos di Kelurahan/Desa Tahun 2004-2009

No	Jangkauan Pelayanan	2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Jumlah Kelurahan/Desa	68.298	68.298	68.298	68.298	70.629	70.629
2	Dilayani KPrk	6.045	6.045	6.045	6.045	5.705	5.705
3	Dilayani Kantor Pos Cabang Luar Kota	9.718	9.698	9.578	9.554	10.888	10.516
4	Dilayani Kantor Pos Desa	2.584	2.581	2.578	2.617	3.558	3.552
5	Dilayani Pos Keliling Desa	11.466	11.466	5.810	5.445	5.307	5.307
6	Dilayani Pos Desa	2.994	2.986	2.940	2.864	2.759	2.759
7	Dilayani Agenpos Desa	422	422	422	422	430	430
8	Dilayani Warpos Kesra	1.256	1.252	1.252	1.252	1.220	1.220
9	Jumlah Kel/Desa Terjangkau	34.485	34.450	28.625	28.199	29.867	29.489
10	% Kel/Desa Terjangkau	50,49	50,44	41,91	41,29	42,29	41,75
11	Jumlah Kel/Desa Belum Terjangkau	33.813	33.848	39.673	40.099	40.762	41.140
12	% Kel/Desa Belum Terjangkau	49,51	49,56	58,09	58,71	57,71	58,25

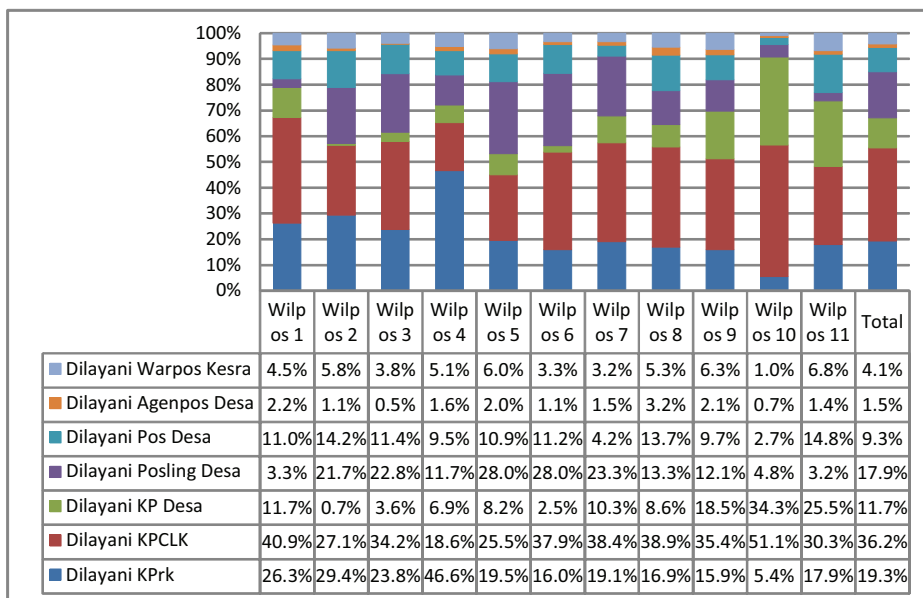
Tingkat keterjangkauan pelayanan pos di kelurahan dan desa juga berbeda-beda antar wilayah pos. Namun untuk semua wilayah pos, tidak seluruh desa/kelurahan yang terjangkau oleh pelayanan pos yang disediakan. Artinya pelayanan pos melalui berbagai sarana dalam bentuk kantor pos, pelayanan bergerak maupun pelayanan pos lainnya tidak terdapat pada semua desa/kelurahan. Namun tidak berarti penduduk di desa yang tidak tersedia sarana pos tidak dapat menjangkau pelayanan pos karena mereka dapat memanfaatkan pelayanan pos dalam bentuk fasilitas pelayanan pos lainnya, pos keliling yang menjangkau desanya atau pelayanan pos yang ada di desa tetangga. Jangkauan pelayanan pos di kelurahan desa paling tinggi ada di wilayah pos V yang mencapai 69,37% diikuti oleh wilayah pos IV yang mencapai 66,4%. Sementara jangkauan pelayanan yang rendah justru ada di wilayah pos I yang mencapai 19,84%. Jangkauan pelayanan pos di kelurahan/desa yang rendah di wilayah pos I ini diduga berada di propinsi NAD terkait dengan konflik yang ada di propinsi tersebut selama beberapa tahun dan membuat penyediaan pelayanan pos di wilayah pedesaan di wilayah tersebut beresiko cukup tinggi.

Tabel 5.21. Jangkauan Pelayanan Pos di Kelurahan/Desa di Wilayah Usaha Pos Tahun 2009

No	Jangkauan Pelayanan di Kecamatan	Wilayah Pos											JUM-LAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	Jumlah Kelurahan/Desa	11.334	4.795	7.176	2.110	5.244	8.903	8.379	2.905	9.588	7.337	2.858	70.629
2	Dilayani KPrk	592	602	570	655	710	818	753	254	374	221	156	5.705
3	Dilayani Kantor Pos Cabang Luar Kota	920	556	820	262	928	1.936	1.516	584	832	2.078	264	10.696
4	Dilayani Kantor Pos Desa	264	15	87	97	297	126	408	129	435	1.394	222	3.474
5	Dilayani Pos Keliling Desa	75	446	546	164	1.018	1.432	919	199	285	195	28	5.307
6	Dilayani Pos Desa	248	292	274	134	395	572	165	206	229	110	129	2.754
7	Dilayani Agenpos Desa	49	22	12	22	72	58	58	48	49	28	12	430
8	Dilayani Warpos Kesra	101	118	91	72	218	168	127	80	147	39	59	1.220
9	Jumlah Kel/Desa Terjangkau	2.249	2.051	2.400	1.406	3.638	5.110	3.946	1.500	2.351	4.065	870	29.586
10	% Kel/Desa Terjangkau	19,84	42,77	33,44	66,64	69,37	57,40	47,09	51,64	24,52	55,40	30,44	41,89
11	Jumlah Kel/Desa Belum Terjangkau	9.085	2.744	4.776	704	1.606	3.793	4.433	1.405	7.237	3.272	1.988	41.043
12	% Kel/Desa Belum Terjangkau	80,16	57,23	66,56	33,36	30,63	42,60	52,91	48,36	75,48	44,60	69,56	58,11

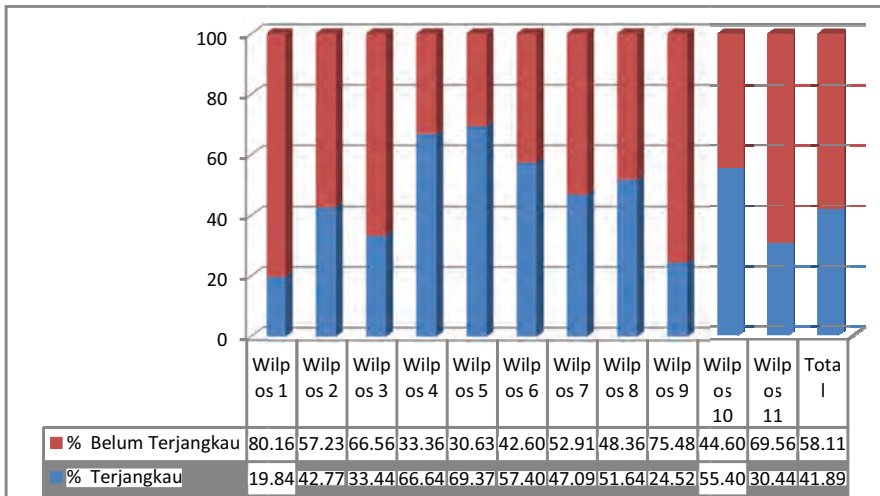
Jika dilihat pelayanan yang dilakukan, pelayanan pos di kelurahan/desa paling banyak dilakukan oleh kantor pos cabang luar kota. Secara total, pelayanan pos di kelurahan/desa oleh kantor pos cabang luar kota 36,2% diikuti oleh pelayanan melalui KPrk yang mencapai 19,3%. Pelayanan pos di kelurahan/desa melalui kantor pos cabang luar kota terutama banyak dilakukan di wilayah pos I, VI, VII, VIII, IX dn X seperti ditunjukkan gambar 5.21. Hal ini disebabkan pelayanan pos lainnya dan pos keliling yang jumlahnya masih terbatas dan lebih banyak berada di Jawa sehingga pelayanan di kelurahan/desa di luar Jawa banyak mengandalkan kantor pos cabang luar kota. Namun wilayah pos IV yang banyak daerah perkotaan, pelayanan pos di kelurahan/desa paling banyak dilakukan melalui KPrk.

Gambar 5.21. Perbandingan pelayanan di kelurahan/desa menurut pelayanan diWilayah Pos 2009



Perbandingan tingkat keterjangkauan antar wilayah pos menunjukkan bahwa untuk daerah-daerah di pulau Jawa memiliki tingkat keterjangkauan lebih tinggi. Jumlah desa/kelurahan yang sudah terjangkau pelayanan pos di wilayah ini yang meliputi wilayah pos IV, V, VI dan VII rata-rata sudah diatas 505, bahkan untuk wilayah pos IV dan V sudah hampir mencapai 70% seperti terlihat pada gambar 5.22. Hal ini disebabkan sarana pos memang lebih banyak berada dan tersedia di wilayah pos yang berada di pulau Jawa. Sementara tingkat keterjangkauan pelayanan pos di desa/kelurahan yang rendah berada di wilayah pos I dan IX yang masing-masing hanya 19.84% dan 24,5%. Jangkauan pelayanan pos di wilayah pos XI juga hanya mencapai 30,44%. Jangkauan pelayanan pos di kelurahan/desa yang rendah di wilayah pos IX dan XI yang rendah disebabkan oleh wilayah yang sangat luas, sementara ketersediaan sarana pos dari PT. Pos masih terbatas. Sementara jangkauan pelayanan pos di kelurahan/desa yang rendah lebih disebabkan oleh wilayah yang pernah mengalami konflik yang cukup panjang dan sebagian besar wilayah kelurahan/desa merupakan daerah konflik.

Gambar 5.22. Perbandingan Tingkat Keterjangkauan Pelayanan Pos di Kelurahan/Desa menurut Wilpos tahun 2009



### 5.3.3. Produksi Pos PT. Pos Indonesia

Produksi perposan digambarkan dengan produksi (jumlah surat/paket) yang dilayani oleh PT. Pos dari mulai surat biasa sampai kilat khusus dalam negeri, paket biasa dan khusus dan pengiriman surat ke luar negeri (EMS dan Experess Post) dan paket pos luar negeri. Tabel 5.22 menunjukkan terjadinya penurunan produksi PT. Pos hampir pada semua jenis kecuali untuk pengiriman paket kilat khusus dalam negeri dan EMS. Namun secara total, produksi PT. Pos mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan drastis produksi dialami PT. Pos terutama sejak tiga tahun terakhir.

Tabel 5.22. Produksi Perposan Indonesia Tahun 2004-2009

No.	Produksi Pos Regule	Satuan	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
1	<b>Dalam Negeri</b>							
	Surat Biasa	ribu pucuk	299.254	298.967	284.473	91.038	39.925	10.245
	Surat Kilat	ribu pucuk	22.351	21.321	20.381	14.821	15.380	1.979
	Surat Kilat Khusus	ribu pucuk	71.184	71.255	71.834	54.600	24.380	31.543
	Paket Biasa	ribu pucuk	60.547	65.367	78.887	82.779	12.003	15.134
	Paket Kilat Khusus	ribu pucuk	1.275	1.472	1.557	2.221	8.050	8.156
2	<b>Keluar Negeri</b>							
	EMS	ribu pucuk	6.425	6.225	6.198	14.949	6.579	14.075
	Express Post	ribu pucuk	1.453	1.413	381	752	151	163
	Paketpos Biasa LN	ribu pucuk	2.455	2.434	2.234	3.021	494	40
	Paketpos Cepat LN	ribu pucuk	498	496	490	486	7	7

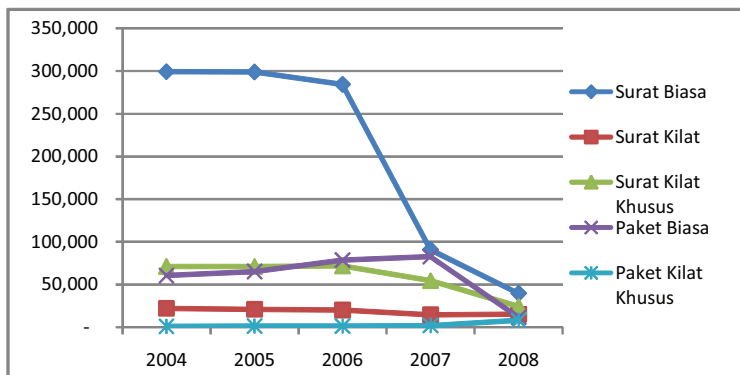
\*) sampai Juni 2009



Grafik trend produksi PT. Pos yang ditunjukkan oleh Gambar 5.23 memperlihatkan untuk produksi dalam negeri, penurunan paling tajam dialami oleh surat biasa yang menurun tajam dari 2006 ke 2007 dan terus menurun pada 2009. Pola yang sama terjadi pada produksi surat kilat khusus. Sementara untuk paket biasa, penurunan tajam baru terjadi dari 2007 ke 2008. Sedangkan untuk pengiriman ke luar negeri, penurunan tajam pada semua jenis produk terjadi dari 2007 ke 2008 .

Penurunan produksi untuk surat biasa yang sangat tajam diduga terkait dengan semakin sedikitnya penggunaan surat melalui pos sebagai sarana pemberi kabar/informasi, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi informasi. Perkembangan teknologi informasi yang pesat seperti penggunaan sarana telekomunikasi dalam bentuk telepon selular dan internet yang semakin mudah dan murah menyebabkan bergesernya sarana penyampaian informasi dari surat manual ke surat elektronik dan pesan singkat. Semakin terjangkaunya penggunaan internet dan telepon selular diduga menyebabkan masyarakat menjadikan penggunaan surat manual terutama yang bersifat biasa menjadi alternatif terakhir dalam penyampaian informasi atau dokumen ketika sarana yang lain seperti pesan singkat dan surat elektronik tidak dapat digunakan. Akibatnya pengiriman surat terutama surat biasa juga mengalami penurunan tajam. Penurunan yang juga terjadi pada paket terutama paket biasa diduga terkait dengan persaingan yang semakin ketat dalam bisnis pengiriman paket/ kurir untuk pengiriman dokumen dan terutama barang dengan semakin banyaknya usaha pada bidang tersebut. Akibatnya PT. Pos harus bersaing secara ketat dengan pelaku usaha sejenis.

Gambar 5.23. Trend Produksi Perposan Indonesia menurut jenis Tahun 2004-2009

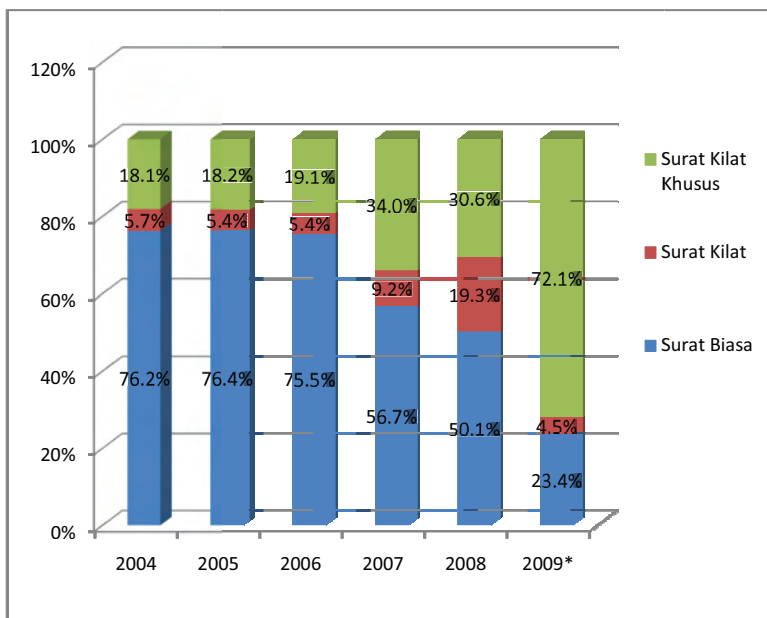


Penurunan yang terjadi pada produksi dalam bentuk paket khususnya paket biasa disebabkan oleh persaingan yang semakin ketat dan semakin banyaknya pelaku bisnis pengiriman paket ini yang disertai dengan tawaran pelayanan yang lebih baik

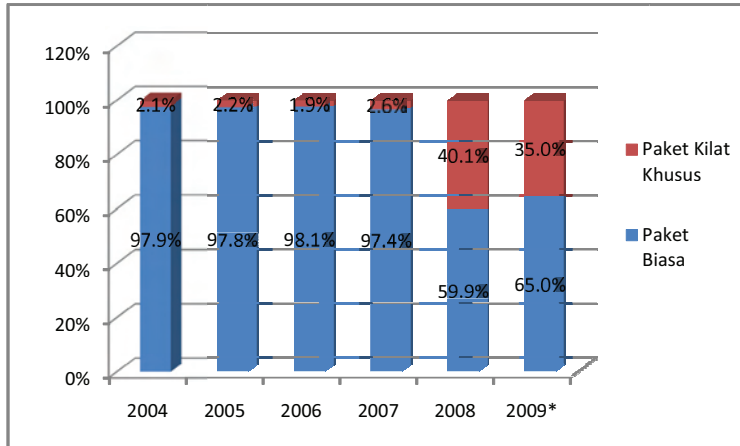
#### a. Pos Reguler Dalam Negeri.

Produksi perposan untuk jenis surat dan paket dalam negeri juga mengalami pergeseran proporsi antar jenis surat dan paket. Seperti yang terlihat pada grafik di gambar 5.24, surat biasa yang semula mendominasi produksi perposan sampai tahun 2006, kini digeser oleh surat kilat khusus. Produksi surat pos biasa pada 2009 hanya mencapai 23,4% dari total produksi, sementara surat kilat khusus mencapai 72,1%. Sementara untuk produksi paket, yang semula lebih dari 95% didominasi oleh pengiriman paket biasa, pada 2009 proporsinya tinggal 65%. Sementara pangsa produksi paket kilat khusus meningkat menjadi 35%. Perubahan proporsi ini terjadi karena adanya penurunan tajam pada produksi surat biasa dan paket biasa dan menurunnya produksi perposan dari PT. Pos secara total.

Gambar 5.24. Proporsi Produksi Surat Indonesia menurut jenis Tahun 2004-2009



Gambar 5.25. Proporsi Produksi Paket Indonesia menurut jenis Tahun 2004-2009



#### b. Produksi Pos Reguler dari Luar Negeri

Produksi pos dalam bentuk surat dari luar negeri melalui PT. Pos juga mengalami penurunan yang tajam dari 2007 ke 2008. Produksi surat pos udara luar negeri menurut 57% pada 2008, sementara untuk surat pos laut dari luar negeri mengalami penurunan 42%. Untuk produksi lain seperti EMS, paket pos udara dan paket pos laut dari luar negeri mengalami peningkatan. EMS meningkat 152% pada 2008 sementara paket pos udara dari luar negeri bahkan meningkat sampai 391%. Produksi kedua jenis ini potensial untuk meningkat lebih tinggi lagi mengingat sampai Juni 2009 volumenya sudah melebihi produksi pada 2008. Hanya paket pos laut dari luar negeri yang mengalami peningkatan rendah yaitu hanya 4,6%.

Dari pola pertumbuhan produksi ini, terlihat bahwa untuk kelompok surat, hanya EMS yang diperkirakan mampu bertahan untuk bersaing dan mengalami peningkatan karena masyarakat semakin membutuhkan pelayanan yang bersifat cepat dan seketika, namun mampu menjangkau wilayah yang luas

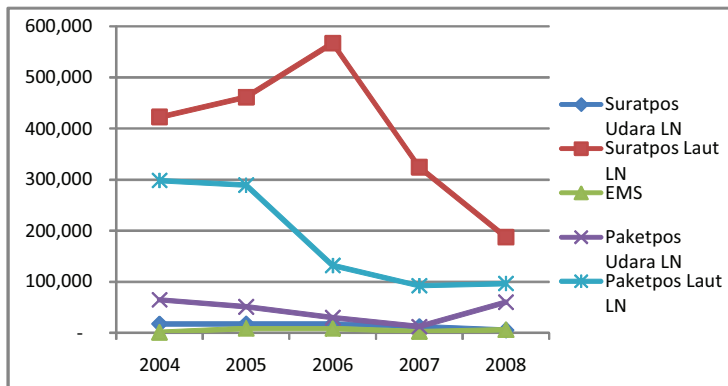
Keunggulan PT. Pos sebenarnya terletak pada kemampuan untuk menjangkau wilayah yang sangat luas bahkan sampai ke pelosok (kecamatan, desa, lokasi transmigrasi). Sehingga ketika masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat dan menjangkau wilayah yang jauh, pelayanan PT. Pos menjadi pilihan yang utama.

Tabel 5.23. Produksi Surat Pos dari Luar Negeri Indonesia Tahun 2004-2009

No.	Jenis	Satuan	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
1	Direct Entry	ribu pucuk	1.254	1.567	2.829	10.067		
2	Suratpos Udara LN	ribu pucuk	17.251	17.297	17.190	12.158	5.231	2.133
3	Suratpos Laut LN	ribu pucuk	422.521	461.461	567.179	324.450	187.178	52.128
4	EMS	ribu pucuk	854	8.570	8.532	2.434	6.144	14.135
5	Paketpos Udara LN	ribu pucuk	64.584	50.920	29.733	12.194	59.869	66.444
6	Paketpos Laut LN	ribu pucuk	298.142	289.124	131.513	92.029	96.230	53.871
	Jumlah		804.606	828.939	756.976	453.332	354.652	188.711

\*) sampai Juni 2009

Gambar 5.26. Trend Produksi Pos dari Luar Negeri Tahun 2004-2009

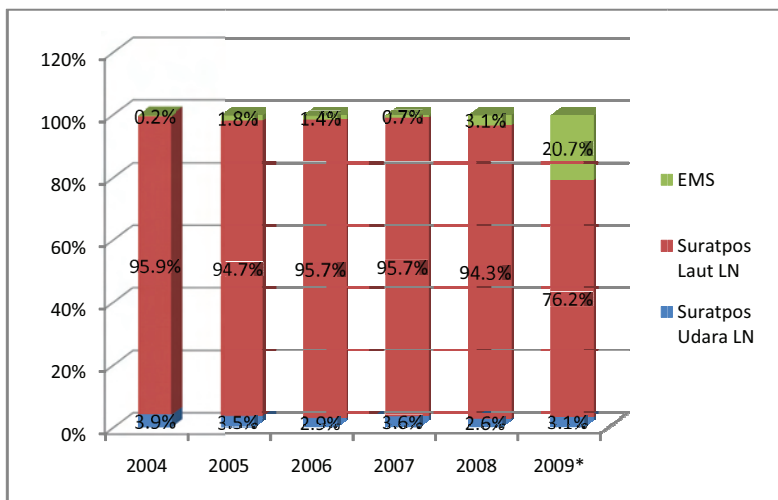


Gambar 5.26 menunjukkan trend produksi perposan dari PT. Pos dalam lima tahun terakhir. Dari gambar tersebut terlihat trend penurunan yang tajam terutama untuk surat pos luar negeri dan paket pos laut luar negeri. Terlihat hanya paket pos udara dari luar negeri dan EMS yang mengalami peningkatan namun volume produksinya terutama untuk EMS masih sangat kecil. Sehingga pengaruh peningkatannya tidak signifikan dibanding penurunan yang terjadi pada surat dan paket pos laut dari luar negeri. Dari trend ini juga terlihat bahwa penurunan terjadi pada pengiriman pelayanan dari luar negeri yang tidak dalam waktu cepat, namun volumenya selama ini cukup tinggi.

Jika dilihat dari proporsi produksi untuk surat maupun paket pos dari luar negeri, penurunan yang terjadi juga menyebabkan terjadinya pergeseran dalam pangsa produksi surat dan paket pos dari luar negeri. Produksi surat dari luar negeri yang semula didominasi surat pos laut dengan pangsa lebih dari 94% , proporsinya semakin berkurang dan sampai Juni 2009,

pangsanya tinggal 76% pada 2009. Sebaliknya pangsa EMS meningkat dari semula kurang dari 5% menjadi 20,7%.

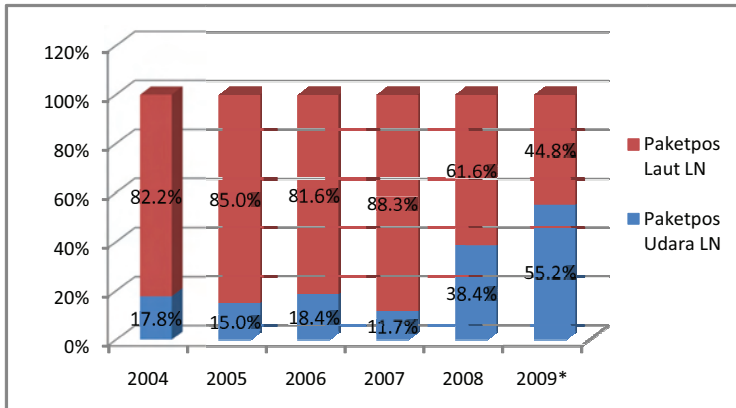
Gambar 5.27. Proporsi Produksi Surat dari Luar Negeri Tahun 2004-2009



Pergeseran juga terjadi untuk pangsa produksi paket pos dari luar negeri antara paket pos laut dengan paket pos udara. Produksi yang semula lebih dominan paket pos laut luar negeri dengan pangsa lebih dari 80% mulai berkurang sejak 2008 dan pada 2009 pangsanya menjadi 44,8%. Sebaliknya produksi paket pos udara mengalami peningkatan dan pangsanya terus meningkat sehingga pada 2009, produksi paket pos udara dari luar negeri lebih tinggi dari produksi paket laut dengan pangsa mencapai 55,2%.

Pergeseran ini menunjukkan masyarakat cenderung hanya memilih pelayanan dari PT. Pos untuk pelayanan yang lebih cepat karena PT. Pos memiliki keunggulan jangkauan pelayanan yang lebih luas dan jauh

Gambar 5.28. Proporsi Produksi Paket dari Luar Negeri Tahun 2004-2009



### c. Kinerja Wilayah Pos

Jika dilihat sebaran produksi perposan menurut wilpos, terlihat bahwa konsentrasi produksi pos baik dalam negeri maupun luar negeri masih terpusat di Pulau Jawa yang dicerminkan oleh produksi di wilayah pos IV, V, VI dan VII. Tabel 5.24 menunjukkan produksi perposan dalam negeri dan luar negeri paling tinggi ada di wilayah pos IV yang mencakup Banten dan Jabotabek, diikuti dengan Wilpos VI yang meliputi Jawa tengah dan DIY. Sementara untuk Wilpos XI yang mencakup wilayah Papua dan Maluku menunjukkan produksi yang sangat rendah. Untuk wilayah luar Jawa, produksi pos yang tinggi terdapat di Wilpos III yang mencakup 5 propinsi di Sumatera Bagian Selatan dan Wilpos II (Sumatera Barat dan Riau) namun dengan total produksi yang masih jauh dibawah Wilpos IV dan VI.

Tabel 5.24. Produksi Perposan Indonesia di Setiap Wilayah Pos Tahun 2008

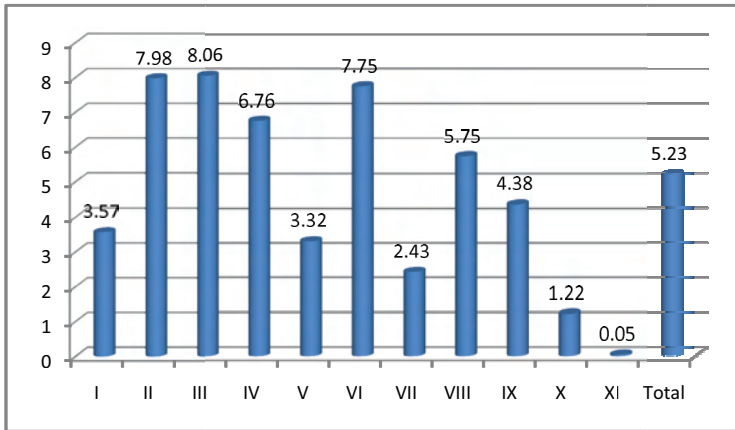
No.	Produksi Pos Reguler	Wilayah Pos											JUMLAH
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	
1	<b>Dalam Negeri</b>												0
	Surat Biasa	2.500	764	671	16.484	2.658	11.431	1.996	2.414	426	578	4	39.925
	Surat Kilat	1.034	5.923	285	816	1.201	2.717	779	2.185	201	234	4	15.380
	Surat Kilat Khusus	992	1.057	1.052	9.785	1.513	2.114	3.144	1.199	3.067	442	17	24.380
	Paket Biasa	24	218	39	3.511	2.012	4.096	62	55	1.971	14	0	12.003
	Paket Kilat Khusus	37	192	7.412	85	28	71	164	35	18	6	2	8.050
2	<b>Keluar Negeri</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	EMS	11	312	15	5.516	108	296	195	101	22	3	0	6.579
	Express Post	27	4	5	63	14	17	4	8	1	8	-	151
	Paketpos Biasa LN	0	0	0	476	0	1	9	7	0	0	-	494
	Paketpos Cepat LN	0	0	0	3	0	1	1	2	-	0	-	7

Hal yang menarik adalah ternyata produksi pos untuk Wilpos V dan VII yang merupakan daerah dengan penduduk yang juga cukup padat dan wilayah administratif yang banyak dengan tingkat sosial ekonomi yang relatif lebih baik, ternyata menunjukkan produksi perposan yang tidak terlalu tinggi, bahkan dibawah wilpos III.

Pada masing-masing Wilpos, produksi tertinggi untuk wilayah yang banyak bercorak perkotaan seperti Wilpos IV, VI dan VIII adalah untuk jenis surat biasa. Wilpos I dan X juga menunjukkan produksi surat biasa paling tinggi. Namun untuk wilayah pos VII dan IX justru menunjukkan produksi tertinggi untuk jenis surat kilat khusus. Sementara untuk Wilpos III, produksi paling tinggi justru untuk jenis paket kilat khusus. Tidak ada pola yang jelas antar wilayah pos terhadap produksi pos yang paling banyak dilayani. Namun daerah dengan aktivitas sosial-ekonomi yang tinggi memang menunjukkan produksi perposan yang lebih tinggi baik untuk surat maupun paket karena adanya kebutuhan untuk pelayanan yang mendukung aktivitas tersebut. Untuk produksi pos keluar negeri, hampir pada semua wilayah paling tinggi adalah untuk jenis EMS kecuali untuk Wilpos I dan X.

Jika dibuat perbandingan antara produksi pos reguler dengan jumlah pegawai pada setiap wilayah pos, terlihat adanya perbedaan “produktivitas” yang cukup tajam antar wilayah pos seperti ditunjukkan oleh gambar 5.29. Daerah-daerah di luar Jawa seperti di Wilayah pos II dan III justru menunjukkan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah pelayanan di Pulau Jawa, kecuali untuk Wilpos VI yang memiliki produktivitas cukup tinggi. Wilpos II dan III misalnya memiliki produktivitas yang cukup tinggi yaitu 7,98 dan 8,06. Sementara untuk Wilpos V dan VII yang berada di Jawa dengan jumlah penduduk dan kepadatan cukup tinggi ternyata justru menunjukkan produktivitas yang rendah yaitu 3,32 dan 2,43. Produktivitas yang paling rendah ditunjukkan oleh wilayah pos yang berada di Kawasan Timur Indonesia seperti Wilpos X dan XI.

Gambar 5.29. Rasio antara produksi dengan jumlah pegawai menurut Wilpos



#### d. Pos Express dan AdMail

Untuk produksi pos express, perkembangan dalam lima tahun terakhir justru menunjukkan fluktuasi produksi yang tinggi. Dari tahun 2005 sampai 2007 menunjukkan peningkatan produksi yang tinggi, namun menurun drastis pada 2008 sampai 80% dan meningkat kembali pada tahun 2009. Sementara untuk produksi pada kelompok Admail Pos, menunjukkan trend perkembangan yang bertolak belakang. Produksi esensial mail menunjukkan peningkatan yang pesat, namun untuk advertising mail justru menunjukkan produksi yang semakin menurun tajam. Kompetisi yang sangat ketat dalam jasa pelayanan perposan menyebabkan terjadinya fluktuasi dan trend penurunan dari produksi perposan untuk Pos Express. PT. Pos yang selama ini menjadi pemain utama dalam industri perposan, kini mulai mendapat persaingan yang sangat ketat dengan pemain-pemain lain yang semakin banyak dan sangat mengandalkan kecepatan dan kualitas pelayanan. Sehingga PT. Pos tidak bisa lagi mengandalkan jangkauan yang luas dalam pelayanan namun juga kecepatan pelayanan dan kualitas pelayanan.

Tabel 5.25 Produksi Pos Express PT. Pos Tahun 2005-2009

No.	Jenis	Satuan	2005	2006	2007	2008	2009*
1	Pos Express						
	Kiriman Pos Ekspres	ribu pucuk	8.896	16.549	54.010	10.540	22.340
2	Admail Pos						
	Esensial Mail	ribu pucuk	3.037	2.678	29.101		
	Advertising Mail	ribu pucuk	51.499	17.501	12.158		

\*) Sampai Juni 2009



#### 5.3.4. PSO

Terdapat sejumlah Kantor Pos Cabang Luar Kota (KPCLK) dalam Wilpos tertentu yang mendapat bantuan PSO (*Public Service Obligation*). Tabel 5.26 menunjukkan pertumbuhan jumlah KPCLK dari tahun 2003 sampai 2009. Terlihat dalam kurun waktu lima tahun peningkatan jumlah KPCLK cukup baik yakni sekitar 50 %.

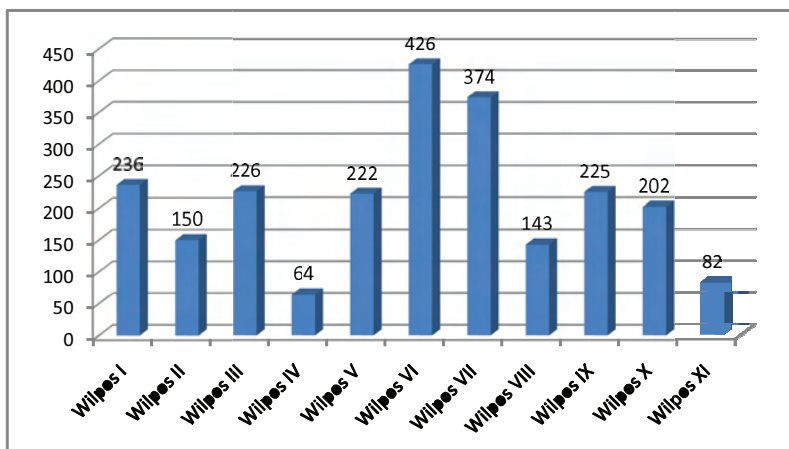
Hal ini menunjukkan kemajuan dalam upaya pelayanan pos ke daerah terpencil yang termasuk dalam kewajiban publik (PSO). Peningkatan ini juga menunjukkan komitmen dari Ditjen Postel dan PT. Pos untuk memberikan kemudahan dan jangkauan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Tabel 5.26 Jumlah KPCLK dari tahun 2003-2009.

No	Tahun	Jumlah KPCLK
1	2003	1.772
2	2004	2.341
3	2005	2.306
4	2006	2.341
5	2007	2.341
6	2008	2.350
7	2009	2.350

Dari distribusi jumlah pelaksana program PSO pada gambar 5.29 terlihat bahwa pelaksana program PSO paling banyak ada di wilayah pos VI dan VII. Disamping karena jumlah penduduk yang besar dan kepadatan cukup tinggi, pada wilayah pos ini relatif cukup banyak tersedia sarana pos sehingga untuk pelaksanaan program PSO lebih mudah.

Gambar 5.30. Jumlah KPCLK Pelaksana Program PSO Tahun 2009 menurut Wilayah Pos



## 5.4. Bidang Jasa Titipan

### 5.4.1. Sebaran Penyelenggara Jasa Titipan

Perkembangan penyelenggaraan jasa titipan menunjukkan rend yang fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Setelah menurun pada tahun 2008 dibanding tahun 2007, penyelenggaraan jasa titipan meningkat kembali pada tahun 2009 meskipun jumlahnya masih lebih rendah dibanding tahun 2007. Sampai dengan akhir tahun 2009, jumlah penyelenggara jasa titipan yang terdaftar di Indonesia mencapai 698 unit, meningkat 43 unit dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 5.27. Perkembangan Sebaran Penyelenggara Jasa Titipan Menurut Pulau

No	Propinsi	Jumlah		
		2007	2008	2009
1	Sumatera	68	67	75
2	Jawa	590	479	506
3	Bali, NTB, NTT	38	35	39
4	Kalimantan	52	51	55
5	Sulawesi	16	17	17
6	Maluku, Papua	6	6	6
Jumlah		770	655	698

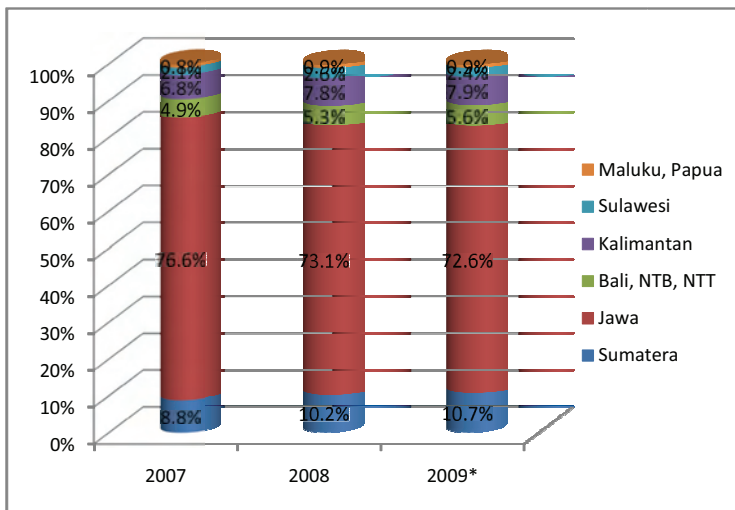
Penyebaran Penyelenggara Jasa Titipan di Indonesia masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dimana lebih dari 70% penyelenggara jasa titipan berada di pulau Jawa dan sisanya tersebar di pulau-pulau lain. Namun jumlah penyelenggara jasa titipan tahun di pulau Jawa ini

mengalami penurunan yang tajam pada tahun 2008 dan hanya meningkat sedikit pada tahun 2009. Sementara jumlah penyelenggara titipan di wilayah pulau Sumatera, Bali+Nusa Tenggara dan Kalimantan justru menunjukkan peningkatan meskipun kecil.

Berdasarkan sebaran jasa penyelenggara titipan seperti ditunjukkan oleh Gambar 5.31 terlihat bahwa terjadi penurunan proporsi jasa penyelenggara titipan di Jawa dan peningkatan di wilayah-wilayah lainnya.

Jika dilihat dari sebaran menurut propinsi seperti pada Tabel 5.28, penyelenggara jasa titipan memang lebih banyak berada di DKI Jakarta yang mejadi pusat kegiatan ekonomi, diikuti oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Penurunan yang dialami oleh penyelenggara jasa titipan terutama disebabkan oleh usaha yang tidak mampu bertahan ditengah persaingan yang semakin ketat terutama dalam pelayanan dan efisiensi biaya. Setelah mengalami booming dengan bertumbuhnya usaha jasa titipan pada tahun 2004-2005, usaha penyelenggara jasa titipan yang menjamur pada akhirnya harus bersaing secara ketat.

Gambar 5.31. Proporsi Penyebaran Penyelenggara Jasa Titipan 2007-2008



Tabel 5.28. Perkembangan Sebaran Penyelenggara Jasa Titipan Menurut Propinsi

No	Propinsi	Jumlah			No	Propinsi	Jumlah		
		2007	2008	2009			2009	2008	2009
1	NAD	4	4	4	18	NTB	14	13	14
2	Sumatera Utara	25	24	28	19	NTT	1	1	1
3	Riau	8	9	9	20	Kalimantan	2	2	2
4	Kepulauan Riau	9	12	14	21	Kalimantan Barat	23	23	24
5	Sumatera Barat	3	1	1	22	Kalimantan	13	13	15
6	Jambi	0	0	0	23	Kalimantan Timur	14	13	14
7	Bengkulu	2	2	2	24	Sulawesi Selatan	11	11	11
8	Sumatera Selatan	7	5	5	25	Sulawesi Utara	5	6	6
9	Bangka Belitung	0	0	0	26	Sulawesi Tengah	0	0	0
10	Lampung	10	10	12	27	Sulawesi Tenggara	0	0	0
11	DKI Jakarta	414	318	340	28	Gorontalo	0	0	0
12	Jawa Barat	64	60	63	29	Maluku	2	2	2
13	Banten	18	18	18	30	Maluku Utara	0	0	0
14	Jawa Tengah	33	29	29	31	Papua Barat	4	4	4
15	DI Yogyakarta	11	8	8					
16	Jawa Timur	50	46	48					
17	Bali	23	21	24		<b>Jumlah</b>	<b>770</b>	<b>655</b>	<b>698</b>

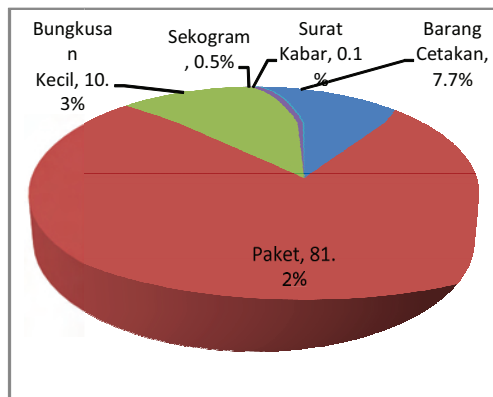
#### 5.4.2. Produksi Jasa Titipan

Penyelenggaraan jasa titipan yang dilakukan oleh sekitar 700 usaha menghasilkan produksi sekitar 198.852 ton dalam berbagai bentuk pengiriman. Produksi yang dihasilkan dari penyelenggara jasa titipan terdiri dalam bentuk barang cetakan, paket, bungkus kecil, sekogram dan surat kabar. Pada Tabel 5.29 terlihat bahwa produksi jasa titipan pada tahun 2009 hampir didominasi di pulau Jawa dengan proporsi mencapai 92,2 % berat produksi jasa titipan nasional yang tercatat. Jika dihitung berdasarkan volumenya, volume produksi jasa titipan yang berada di pulau Jawa mencapai 89% dari volume produksi nasional.

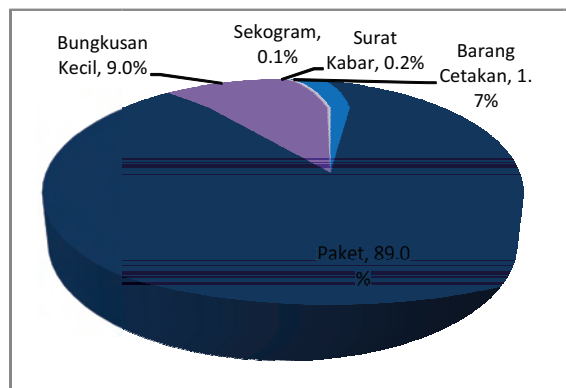
Produksi paling tinggi jasa titipan pada tahun 2009 terdapat di propinsi Jawa Tengah yang mencapai 50 % berat produksi Jasa titipan nasional, diikuti oleh DKI Jakarta yang mencapai 18,9% berat produksi nasional. Jika dilihat dari volumenya, produksi jasa titipan di Jawa tengah bahkan mencapai 65% volume nasional. Kondisi ini sangat berbeda dengan produksi tahun 2008 yang didominasi oleh DKI Jakarta. Daerah-daerah diluar Jawa justru menunjukkan produksi yang rendah dalam jasa titipan nasional. Hal ini diduga terkait dengan keberadaan perusahaan jasa titipan yang terdaftar yang sebagian besar di Pulau Jawa. Sementara usaha jasa titipan yang ada diluar Jawa sebagian mungkin tidak terdaftar

atau hanya sebagai cabang dari yang berada di Jawa sehingga terdaftar di Jawa. Sementara pencatatan produksi berasal dari usaha jasa titipan yang terdaftar. Dari komposisi jenis barang yang diangkut, sebagian besar adalah dalam bentuk paket. Produksi jasa titipan dalam bentuk paket mencapai 89% total berat produksi jasa titipan, sementara dari sisi volume mencapai 81,2% dari total volume jasa titipan seperti terlihat pada gambar 5.32a dan 5.32b. Urutan berikutnya produksi jasa titipan nasional adalah dalam bentuk bungkus kecil dan barang cetakan yang volumenya masing-masing mencapai 10,3% dan 7,7% volume jasa titipan total, namun beratnya hanya mencapai 9% dan 1,7% berat produksi jasa titipan nasional.

Gambar 5.32.a. Proporsi Volume Produksi Jasa Titipan menurut Jenis 2009



Gambar 5.32.b. Proporsi Berat Produksi Jasa Titipan menurut Jenis 2009



Tabel 5.29. Produksi Jasa Titipan PT. Pos Tahun 2009

NO.	PROPINSI	PRODUKSI										JUMLAH	
		BARANG CETAKAN		PAKET		BUNGKUSAN KECIL		SEKOGRAM		SURAT KABAR			
		Koli	Kg	Koli	Kg	Koli	Kg	Koli	Kg	Koli	Kg	Koli	Kg
1	DI ACEH	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SUMUT	20.575	114.780	8.781	199.329	5.358	56.055	0	0	0	0	34.714	370.164
3	RIAU	8.589	114.105	119.501	2.625	1.367	3.626	0	0	0	0	129.457	120.356
4	RIAU KEPULAUAN	98.841	693.612	54.075	820.997	50.013	1.253.477	0	0	203	203	203.132	2.768.289
5	SUMBAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	JAMBI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	BENGKULU	0	0	3.198	9.450	2.171	970	0	0	0	0	5.369	10.420
8	SUMSEL	7.822	45.947	18.195	213.410	25.650	59.394	0	0	0	0	51.667	318.751
9	BANGKA/BELITUNG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	LAMPUNG	2.282	19.830	352.494	3.911.688	1.270.755	2.795.060	0	0	196	1.368	1.625.727	6.727.946
11	DKI JAKARTA	1.864.523	1.247.748	2.104.011	32.879.169	522.842	3.415.925	23.876	1.407	17.004	31.197	4.532.256	37.575.446
12	JABAR	35.930	554.448	1.239.552	25.557.560	276.341	969.668	51.435	14.142	14.943	294.954	1.618.201	27.390.772
13	BANTEN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	JATENG	18.192	21.294	18.813.764	92.547.314	574.649	6.652.898	44.933	171.113	1.089	3.506	19.452.627	99.396.125
15	DI YOGYAKARTA	3.486	3.624	168.869	3.172.509	9.144	45.296	0	0	0	0	181.499	3.221.429
16	JATIM	23.004	98.174	614.823	13.848.956	165.440	1.791.945	423	1.064	278	29.550	803.968	15.769.689
17	BALI	82.292	111.998	327.657	607.767	33.560	82.782	5.015	10.054	2.199	0	450.723	812.601
18	NTB	30.929	45.950	81.258	988.649	43.616	667.823	177	1.778	0	0	155.980	1.704.200
19	NTT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	KALTENG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	KALBAR	33.960	66.258	90.699	174.951	13.512	73.685	33.318	14.358	0	0	171.489	329.252
22	KALSEL	2.609	4.743	20.066	123.845	18.618	34.439	983	1.583	0	0	42.276	164.610
23	KALTIM	51.672	129.263	10.734	986.943	8.201	23.084	0	0	8.283	71.754	78.890	1.211.044
24	SULSEL	2.484	18.990	39.732	83.706	40.713	51.635	0	0	258	390	83.187	154.721
25	SULUT	1.460	31.998	30.210	730.747	0	0	0	0	3	30	31.673	762.775
26	SULTENG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	SULTRA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	GORONTALO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	MALUKU	0	0	1.389	16.580	724	724	0	0	0	0	2.113	17.304
30	MALUKU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	PAPUA	3.484	2.346	1.931	20.542	2.211	2.437	165	969	0	0	7.791	26.294
JUMLAH		2.292.134	3.325.108	24.100.939	176.896.737	3.064.885	17.980.923	160.325	216.468	44.456	432.952	29.662.739	198.852.188

Khusus untuk jasa ekspres, Indonesia merupakan pasar yang cukup potensial untuk usaha jasa pengiriman ekspres yang ditunjukkan oleh produksi yang terus meningkat. Tabel 5.30 menunjukkan produksi jasa ekspres yang terus meningkat dan berdasarkan proyeksi yang dilakukan oleh Asosiasi Perusahaan Pengiriman Ekspres Indonesia (ASPRINDO), permintaan untuk jasa ekspres ini akan terus meningkat dari tahun ke tahun seperti terlihat pada Tabel 5.30. Dari data tersebut terlihat bahwa dalam beberapa tahun ke depan, pertumbuhan produksi total mencapai rata-rata 10% hingga 15% per tahun dengan permintaan terbesar masih untuk pengiriman paket.

Tabel 5.30. Produksi dan Perkiraan Permintaan Pasar Jasa Ekspres Indonesia menurut Jenis

Tahun	Dokumen	Paket
2004	536.737.431	1.495.197.130
2005	610.834.459	1.701.610.278
2006	669.552.537	1.865.098.495
2007	753.212.854	2.098.235.807
2008	843.598.396	2.350.024.104
2009	911.086.268	2.538.026.032
2010	1.002.194.895	2.791.828.635
2011	1.102.414.385	3.071.011.499
2012	1.223.679.967	3.408.822.764

\*) berdasarkan data dan formulasi estimasi dari ASPERINDO

#### 5.4.3. Penerbitan Izin Penyelenggara Jasa Titipan

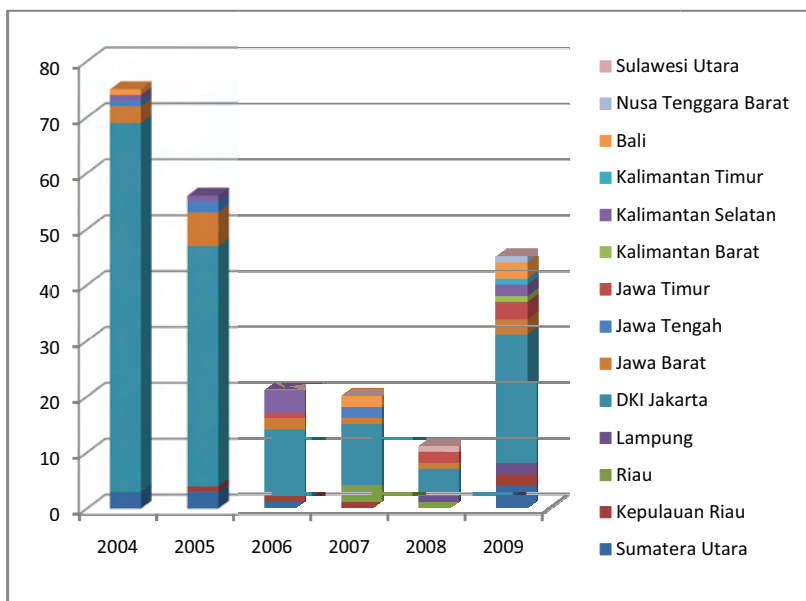
Jumlah izin yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan jasa titipan di Indonesia meningkat kembali pada tahun 2009 setelah mengalami penurunan terus menerus sejak tahun 2004. Penerbitan izin penyelenggara jasa titipann yang mencapai 75 izin pada 2004 menurun terus menjadi hanya hanya 11 pada tahun tahun 2008 namun meningkat kembali menjadi 45 izin pada tahun 2009 seperti terlihat di tabel 5.31. Penurunan yang terjadi menunjukkan adanya kejenuhan jumlah perusahaan penyelenggara jasa titipan. Peningkatan kembali jumlah penerbitan izin penyelenggaraan jasa titipan salah satunya disebabkan oleh usaha penertiban yang terus dilakukan terhadap usaha jasa titipan seperti jasa kurir yang belum berizin untuk dapat mengurus ijin penyelenggaraan untuk mendukung operasionalnya.

Dari sebaran penerbitan izin penyelenggaraan jasa titipan ini, penerbitan paling banyak dari tahun ke tahun termasuk tahun 2009 adalah untuk usaha penyelenggaraan jasa titipan yang berada di Pulau Jawa khususnya di DKI Jakarta seperti ditunjukkan Gambar 5.33 dan Tabel 5.32. Kota Jakarta dengan posisi sebagai pusat pemerintahan dan pusat kegiatan bisnis dengan dinamika kegiatan sosial–ekonomi masyarakat yang tinggi merupakan pasar yang sangat menarik untuk usaha jasa titipan.

Tabel 5.31 Jumlah penerbitan izin penyelenggara jasa titipan tahun 2004 hingga 2009.

No	Propinsi	Tahun					
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Sumatera Utara	3	3	1	0	0	4
2	Kepulauan Riau	0	1	1	1	0	2
3	Riau	0	0	0	3	1	0
4	Lampung	0	0	0	0	1	2
5	DKI Jakarta	66	43	12	11	5	23
6	Jawa Barat	3	6	2	1	1	3
7	Jawa Tengah	1	2	0	2	0	0
8	Jawa Timur	0	0	1	0	2	3
9	Kalimantan Barat	0	0	0	0	0	1
10	Kalimantan Selatan	1	1	4	0	0	2
11	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	1
12	Bali	1	0	0	2	0	3
13	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	1
14	Sulawesi Utara	0	0	0	0	1	0
Jumlah		75	56	21	20	11	45

Gambar 5.33. Perkembangan Penerbitan Izin Penyelenggara Jasa Titipan menurut Jenis 2009





Tabel 5.32. Jumlah Penerbitan izin penyelenggara Jasa Titipan 2004-2009 (menurut pulau)

No	Propinsi	Tahun					
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
1	Sumatera	3	4	2	4	2	8
2	Jawa	70	51	15	14	8	29
3	Bali, Nusa Tenggara	1	0	0	2	0	4
4	Kalimantan	1	1	4	0	0	4
5	Sulawesi	0	0	0	0	1	0
6	Maluku+Papua	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	75	56	21	20	11	45

### 5.5. Penerbitan Perangko

Statistik penerbitan perangko disajikan mulai tahun 2004 sampai dengan 2009 pada tabel 5.33. Jenis penerbitan perangko dalam penyajian data ini terbagi dua yaitu Perangko Nasional dan *Joint Issue Stamp (JIS)*. *Joint Issue Stamp* adalah perangko yang diterbitkan berdasarkan kerjasama dengan negara lain dan beredar di masing-masing negara. Tahun 2006 dengan Slovakia, Tahun 2007 dengan ASEAN dan China, serta tahun 2008 dengan Jepang. Pada tahun 2009, *joint –issue stamp* dilakukan bersama dengan Iran. Sedangkan Perangko Nasional adalah perangko yang diterbitkan dan beredar di Indonesia.

Tabel 5.33 Data penerbitan perangko Tahun 2004-2009

Tahun	Jumlah Seri		
	Nasional	Joint Issue Stamp (JIS)	Total
2004	11	0	11
2005	10	0	10
2006	8	1	9
2007	11	2	13
2008	16	1	17
2009	13	2	15

Jumlah seri perangko yang diterbitkan sejak 2004 hingga 2009 meningkat dari 11 menjadi 15 seri secara total atau naik sebesar 36,3%. Namun jika dilihat perkembangan dari tahun ke tahun menunjukkan adanya fluktuasi dalam penerbitan perangko. Penerbitan perangko ini biasanya terkait dengan momentum atau peringatan peristiwa tertentu yang dapat diabadikan dalam bentuk perangko. Oleh karena itu pada tahun yang banyak kegiatan atau event atau peristiwa tertentu, lebih banyak perangko diterbitkan.

## Bab 6

# Bidang Telekomunikasi

Pembangunan telekomunikasi di Indonesia telah memasuki babak baru dengan semakin berkembang pesatnya industri teknologi informasi. Jangkauan telepon seluler sudah mencapai seluruh propinsi di Indonesia dan sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia. Penyelenggara telekomunikasi juga semakin banyak dengan semakin banyaknya jenis layanan telekomunikasi yang disediakan dari mulai telepon tetap, telepon bergerak, wireless telepon dan sebagainya. Komunikasi seluler juga hanya bukan komunikasi suara tapi juga sudah meluas kepada komunikasi data. Semakin sulit memisahkan antara kegiatan jasa telekomunikasi dengan aplikasi telekomunikasi. Pertumbuhan pengguna layanan telekomunikasi dan pelanggan telepon khususnya untuk telepon bergerak juga semakin tinggi dengan semakin banyaknya aplikasi yang melekat pada perangkat telekomunikasi.

Peran industri telekomunikasi dalam kehidupan masyarakat maupun perekonomian nasional. Pertumbuhan sektor jasa telekomunikasi merupakan yang tertinggi dalam perekonomian nasional dibanding sektor-sektor lainnya. Kelompok transportasi dan komunikasi juga kini menjadi salah satu kelompok kebutuhan pokok yang digunakan dalam penghitungan inflasi. Perkembangan teknologi telekomunikasi yang sangat pesat tidak dapat dipungkiri telah memberikan perubahan yang sangat mendasar dalam pengelolaan aktifitas bisnis. Jarak dan batas teritorial suatu negara tidak menjadi hambatan lagi dengan adanya teknologi telekomunikasi.

Perusahaan telekomunikasi di Indonesia telah menyediakan produk berupa jasa – jasa telekomunikasi, baik domestik maupun internasional. Jasa – jasa telekomunikasi yang ditawarkan meliputi sambungan tetap dan bergerak, komunikasi data dan sewa sambungan, dan berbagai jasa bernilai tambah.

## 6.1. Ruang Lingkup

Pembangunan pertelekomunikasian di Indonesia dapat dilihat dari perkembangan jumlah telepon pengguna berbayar dan kualitas penyelenggaraan telekomunikasi. Peningkatan kesejahteraan masyarakat seiring dengan perkembangan telekomunikasi itu, dapat ditunjukkan oleh beberapa indikator yang dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan untuk menentukan strategi pembangunan yang terkait dengan pertelekomunikasian secara nasional maupun regional. Untuk mendukung keinginan ini, penyajian data telekomunikasi tentu merupakan suatu kebutuhan.

Ruang lingkup penyajian data telekomunikasi meliputi data dan statistik yang terkait dengan layanan penyelenggaraan telekomunikasi baik dari sisi operator, pelanggan, revenue dan pendapatan operator, satuan sambungan telekomunikasi sampai dengan program pengembangan telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah.

## 6.2. Konsep dan Definisi

Layanan-layanan penyelenggaran telekomunikasi di Indonesia meliputi berbagai bentuk.

Layanan-layanan tersebut secara rinci sebagai berikut :

- Jaringan telepon umum/*public switched telephone network*
  - Layanan pelanggan telepon / *telephone subscriber services*
  - Jasa interkoneksi operator telekomunikasi / *interconnection services to other telecommunication operators*
    - Interkoneksi jarak jauh internasional / *international long distance interconnection*
    - Interkoneksi sambungan tetap dan bergerak / *mobile and fixed cellular interconnection*
- Layanan sambungan bergerak / *mobile cellular services*
  - Jasa sambungan analog / *analog cellular services*
  - Jasa sambungan GSM / *GSM cellular services*
  - Jasa sambungan PCN / *PCN cellular services*
- Layanan satelit / *Satellite services*
- Layanan lainnya

- o VSAT
- o E-mail
- o Kartu telepon /*calling cards*

Dalam perkembangan layanan sambungan bergerak, terdapat beberapa nomor awal yang dimiliki oleh masing-masing operator yang ada. Di bawah ini daftar produk menurut nomor awal :

<b>Nomor awal</b>	<b>Produk</b>	<b>Penyedia</b>
0811	KartuHALO	Telkomsel
0812	SimPATI, KartuHALO	Telkomsel
0813	SimPATI, KartuHALO	Telkomsel
0814	Indosat 3,5G Broadband	Indosat ( <u>IndosatM2</u> )
0815	<u>Mentari, Matrix</u>	<u>Indosat</u>
0816	Mentari, Matrix	Indosat
0817	XL Prabayar, XL Pascabayar	<u>XL</u>
0818	XL Prabayar, XL Pascabayar	XL
0819	XL Prabayar, XL Pascabayar	XL
0828	Ceria	Sampoerna Telekom
0831	Solusi	Natrindo Telepon Seluler
0838	Axis	Natrindo Telepon Seluler
0852	Kartu As	Telkomsel
0853	Kartu As Fress	Telkomsel
0855	Matrix Auto	Indosat
0856	IM3	Indosat
0857	IM3	Indosat
0858	Mentari	Indosat
0859	XL Prabayar	XL
0877	XL Prabayar	XL
0878	XL Prabayar	XL
0879	XL Prabayar	XL
0881	Smart	Smart Telecom
0888	Fren	Mobile-8

0889	Mobi	Mobile-8
0898	3	Hutchison Charoen Pokphand Telecom
0899	3	Hutchison Charoen Pokphand Telecom

Untuk menciptakan interpretasi yang sama dari setiap pemakai data terhadap terminologi yang digunakan dalam penyajian data telekomunikasi ini, diberikan pengertian atas penggunaan beberapa terminologi yang digunakan, yang meliputi :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Jasa telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
3. Jaringan telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
4. Penyelenggara telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
5. Penyelenggaraan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
6. Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jaringan telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Penyelenggaraan jasa telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
8. Penyelenggaraan telekomunikasi untuk keperluan khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan dan pengoperasiannya khusus.
9. Kapasitas terpasang sentral telepon adalah banyaknya telepon yang tersedia yang telah terpasang dan siap untuk dipasarkan.

10. Telepon tersambung adalah banyaknya telepon yang telah tersambung dan siap untuk digunakan berkomunikasi.
11. Pelanggan atau pengguna adalah perseorangan, badan hukum, atau instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak.
12. Teledensitas adalah indikator yang menunjukkan jumlah satuan sambungan telepon per seratus penduduk.
12. Kewajiban Pelayanan Universal (Universal Service Obligation/USO) bidang Telekomunikasi adalah kewajiban pelayanan dari pemerintah di bidang telekomunikasi dalam rangka mendukung peningkatan akses dan keterjangkauan masyarakat terhadap jaringan telekomunikasi khususnya telepon.
13. Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT) adalah wilayah-wilayah yang menjadi sasaran dari program USO dibidang telekomunikasi di seluruh Indonesia. Propinsi-propinsi di Indonesia kecuali DKI Jakarta menjadi wilayah sasaran kebijakan dan program USO oleh pemerintah yang dibagi dalam 11 WPUT dengan pembagian :

WPUT I	: Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat
WPUT II	: Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bangka Belitung
WPUT III	: Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung
WPUT IV	: Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah
WPUT V	: Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan
WPUT VI	: Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah
WPUT VII	: Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara
WPUT VIII	: Papua, Irian Jaya Barat
WPUT IX	: Maluku, Maluku Utara
WPUT X	: Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur
WPUT XI	: Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur.

### 6.3. Statistik Telekomunikasi Indonesia.

#### 6.3.1. Penyelenggara Telekomunikasi di Indonesia.

Penyelenggara telekomunikasi Indonesia bukan hanya menunjukkan jumlah pelaku usaha layanan telekomunikasi yang terus meningkat sebagaimana umumnya, namun juga dicirikan oleh jumlah pelaku usahanya yang cukup banyak. Jumlah pelaku usaha penyelenggara telekomunikasi yang banyak ini tidak sebagaimana umumnya di banyak negara lain dimana jumlah pelaku usahanya tidak terlalu banyak. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduk Indonesia yang besar dan wilayah yang luas dan menyebar serta ekonomi yang terus tumbuh sehingga menjadi pasar yang sangat potensial bagi industri telekomunikasi dan industri perangkatnya. Oleh karena itu, jumlah penyelenggara telekomunikasi di Indonesia terus bertambah seiring dengan kebijakan pemerintah yang mendorong berkembangnya investasi di bidang telekomunikasi dan dibukanya keterlibatan berbagai pihak dalam usaha penyelenggaraan telekomunikasi.

Tabel 6.1. Jumlah Penyelenggara Telekomunikasi di Indonesia 2008 - 2009

No	Jenis-Jenis Penyelenggaraan	2008	2009
I	Penyelenggara Jaringan Tetap	<b>64</b>	<b>86</b>
	1. Penyelenggara jaringan tetap lokal		
	- Circuit Switch + Jasa Teleponi dasar	16	6
	- Packet Switch		17
	2. Penyelenggara jaringan tetap jarak jauh (SLJ)	2	2
	3. Penyelenggara jaringan tetap Internasional (SLI)	2	3
	4. Penyelenggara jaringan tetap tertutup	44	58
II	Penyelenggara Jaringan Bergerak	<b>15</b>	<b>17</b>
	1. Penyelenggara jaringan bergerak terrestrial radio trunking	6	8
	2. Penyelenggara jaringan bergerak selular	8	8
	3. Penyelenggara jaringan bergerak satelit	1	1
III	Penyelenggara Jasa	<b>271</b>	<b>269</b>
	1. Penyelenggara jasa nilai tambah teleponi (Calling Card, Premium Call dan Call Center)	58	29
	2. Penyelenggara jasa ISP	150	169
	3. Penyelenggara jasa NAP	32	39
	4. Penyelenggara jasa ITKP	25	25
	5. Penyelenggara jasa Siskomdat	6	7
IV	Penyelenggara Telekomunikasi Khusus	<b>14</b>	<b>20</b>

Tabel 6.1 menunjukkan bahwa jumlah penyelenggara telekomunikasi untuk masing-masing jenis penyelenggaraan mengalami peningkatan dari 2008 ke 2009 kecuali untuk penyelenggaraan jasa. Secara total jumlah penyelenggaraan telekomunikasi meningkat 7,4% dari 364 menjadi 392 penyelenggara. Namun jika dilihat menurut jenis penyelenggaraan jasa, dalam waktu dua tahun terakhir ini ada jenis-jenis penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang mengalami peningkatan cukup pesat dalam jumlah pelaku usahanya dan ada yang justru menunjukkan penurunan jumlah pelaku usaha. Peningkatan jumlah pelaku usaha terjadi untuk penyelenggaraan jaringan tetap dan penyelenggaraan jaringan bergerak. Untuk penyelenggaraan jaringan tetap, peningkatan yang terjadi dari 2008 ke 2009 juga cukup signifikan yaitu 32%, terutama yang berasal dari peningkatan penyelenggara jaringan tetap lokal dan penyelenggara jaringan tetap tertutup.

Penurunan justru terjadi untuk kegiatan penyelenggaraan jasa telekomunikasi terutama untuk jenis penyelenggara jasa nilai tambah teleponi yang menurun sebesar sebesar 50% dari 58 penyelenggara pada tahun 2008 menjadi hanya 29 penyelenggara pada 2009. Hal ini terjadi karena pengaruh pasar yang tidak lagi menarik dan adanya himbauan untuk lebih berhati-hati dalam pemanfaatan jasa khususnya premium call. Namun untuk penyelenggara jasa jenis terutama ISP dan NAP, jumlah pelaku usahanya masih mengalami peningkatan.

Tabel 6.2 Penyelenggara telepon di Indonesia tahun 2009.

No	Jenis Penyelenggaraan	Nama Operator	Jumlah
1	Telepon Tetap Kabel	PT. Telekomunikasi Indonesia (Telkom)	3
		PT. Indosat	
		PT. Batam Bintang Telekomunikasi (BBT)	
2	Telepon Tetap Nirkabel	PT. Telkom	4
		PT. Indosat	
		PT. Bakrie Telecom	
		PT. Mobile-8	
3	Telepon Bergerak	PT. Telkomsel	8
		PT. Indosat	
		PT. Excelkomindo	
		PT. Mobile-8	
		PT. Sampoerna Telekomunikasi Indonesia (STI)	
		PT. Natrindo Telepon Seluler (NTS)	
		PT. Hutchison CP Telecommunication	
		PT. Smart Telecom	
		PT. Pacific Satelit Nusantara (PSN)	



Dalam hal penyelenggara telepon di Indonesia, terjadi peningkatan jumlah penyelenggara telepon pada tahun 2009 ini yang berasal dari penyelenggara jaringan telepon bergerak. Untuk jaringan telepon tetap kabel dan telepon tetap nirkabel, jumlah pelaku usaha tidak menunjukkan peningkatan yaitu 3 operator untuk telepon tetap kabel dan 4 operator untuk telepon tetap nirkabel. Namun untuk operator telepon bergerak, tabel 6.2 menunjukkan bertambahnya satu operator pada tahun 2009 ini yaitu PT. Pacific Satelit Nusantara. Perkembangan telepon bergerak di Indonesia memang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir dari hanya tiga operator utama pada 6 tahun sebelumnya menjadi delapan operator. Tiga operator terakhir yang intensif melakukan ekspansi adalah PT. Hutchison CP Telecommunication (Three/3), PT. Natrindo Telepon Seluler (AXIS) dan PT. Pacific Satelit Nusantara.

### **6.3.2. Kapasitas Penyelenggaraan Telekomunikasi.**

Dari sisi kapasitas, prospek pasar industri jasa telepon bergerak yang sangat besar dengan pertumbuhan pelanggan yang tinggi direspon oleh operator dengan meningkatkan kapasitas terpasang layanan yang disediakan. Masing-masing operator telah menyiapkan kapasitas terpasang sambungan yang cukup besar dan meningkatkan kapasitas tersebut terutama pada tahun 2008. Pada tahun 2009, peningkatan kapasitas terpasang oleh operator diikuti oleh peningkatan jumlah kapasitas tersambungannya namun masih memenuhi kapasitas tersambungannya.

Perkembangan penyediaan kapasitas sambungan pada telepon tetap kabel dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa secara total terjadi peningkatan kapasitas. Peningkatan terjadi pada tahun 2008 hanya sebesar 1,5% dibanding tahun sebelumnya dan pada tahun 2009 meningkat 9,8%. Peningkatan yang rendah ini terutama bersumber pada peningkatan kapasitas terpasang dari Telkom yang hanya sebesar 1,4%. Meskipun kapasitas terpasang Indosat meningkat sebesar 12,9%, namun karena volumenya kecil dibanding Telkom, maka dampak peningkatannya terhadap kapasitas terpasang total menjadi tidak signifikan. Peningkatan yang relatif signifikan pada tahun 2009 juga lebih disebabkan terjadinya peningkatan kapasitas Telkom sebesar 9,8%.

Peningkatan yang relatif tidak besar yang terjadi dalam dua tahun terakhir ini diduga terjadi karena prospek permintaan sambungan telepon tetap kabel yang tidak sebaik pada tahun-tahun sebelumnya seiring dengan semakin banyak dan gencarnya penggunaan telepon tetap nirkabel ataupun telepon bergerak seluler. Hal ini bisa terlihat juga dari penggunaan kapasitas tersambung telepon tetap kabel menurun sebesar 0,5% pada tahun 2008 dan menurun kembali sebesar 2,9% pada tahun 2009. Penurunan ini terjadi karena penurunan penggunaan kapasitas tersambung dari PT. Telkom yang merupakan operator terbesar untuk telepon tetap kabel yang menurun 0,6% pada tahun 2008 dan menurun kembali sebesar 2,9% pada tahun 2009. Sementara penggunaan kapasitas tersambung Indosat pada tahun 2009 hanya meningkat 1,3% dengan nilai absolut yang kecil.

Peningkatan kapasitas terpasang telepon tetap kabel yang tidak signifikan diduga disebabkan oleh prospek permintaan sambungan telepon tetap yang tidak lagi tinggi seiring dengan semakin banyaknya penggunaan telepon tetap nirkabel maupun telepon bergerak seluler

Tabel 6.3. Kapasitas Terpasang dan Tersambung telepon tetap kabel dan wireless Tahun 2007-2009

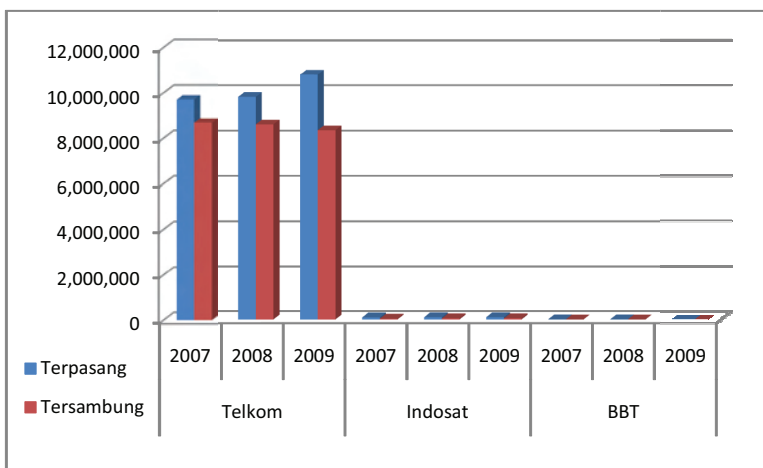
Jenis Penyelenggaraan	Operator	2007		2008		2009*	
		Kapasitas Terpasang	Tersambung	Kapasitas Terpasang	Tersambung	Kapasitas Terpasang	Tersambung
Tetap Kabel	Telkom	9.706.576	8.685.000	9.839.000	8.629.783	10.816.558	8.376.793
	Indosat	80.880	30.478	91.290	42.145	91.290	42.674
	BBT	5.404	2.393	5.404	2.300	5.404	2.207
Jumlah		9.792.860	8.717.871	9.935.694	8.674.228	9.935.694	10.913.252
Tetap Wireless	Telkom	9.383.924	6.363.000	19.861.324	13.305.181	26.700.761	15.139.057
	Indosat	3.403.900	627.934	3.771.400	761.589	3.771.400	542.858
	Bakrie	2.141.667	1.479.198	13.251.700	7.304.543	18.099.610	9.787.540
	Mobile 8			1.497.600	332.530	1.600.560	66.763
Jumlah		14.929.491	8.470.132	38.382.024	21.703.843	38.382.024	50.172.331

\*) Untuk Indosat dan BBT, data masih sampai dengan Kuartal III 2009

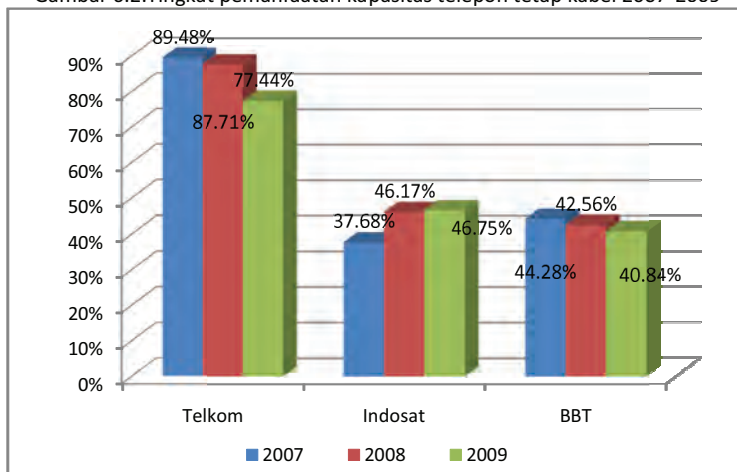
Dengan posisi kapasitas tersambung yang tidak mengalami peningkatan berarti, maka sejak tahun 2008 terdapat kapasitas yang belum dimanfaatkan khususnya untuk Telkom. Gambar 6.1 dan 6.2 menunjukkan sejak tahun 2008 sudah terdapat perbedaan yang signifikan antara kapasitas terpasang dengan kapasitas tersambung, khususnya untuk

Telkom. Namun dari sisi tingkat pemanfaatan kapasitasnya, tingkat pemanfaatan kapasitas jaringan telepon tetap kabel milik PT. Telkom tetap merupakan yang terbesar dibanding dua operator lainnya. Meskipun terjadi fluktuasi dalam jumlah kapasitas tersambung yang berdampak pada fluktuasi tingkat pemanfaatan kapasitas terpasangnya, namun tingkat pemanfaatan kapasitas PT Telkom dalam tiga tahun sudah diatas 85%. Sementara tingkat pemanfaatan kapasitas jaringan milik Indosat meskipun mengalami peningkatan, masih dibawah 50% seperti terlihat pada gambar 6.2. Tingkat pemanfaatan kapasitas jaringan telepon tetap kabel milik Indosat maupun BBT masih sekitar 40%-48%.

Gambar 6.1. Kapasitas Terpasang dan Telepon tersambung telepon tetap kabel



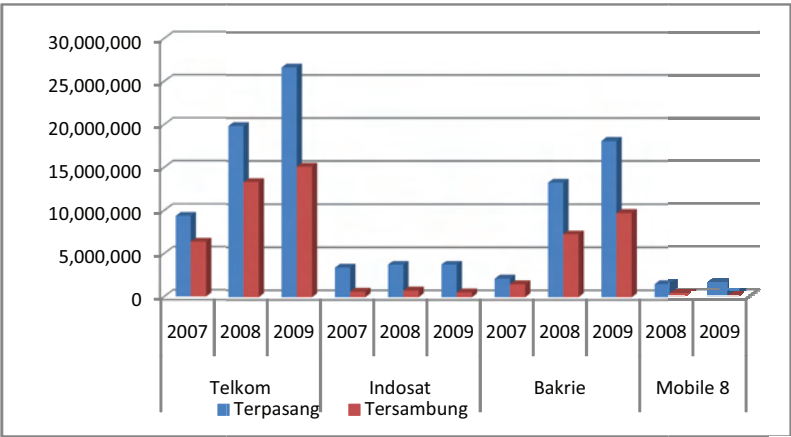
Gambar 6.2. Tingkat pemanfaatan kapasitas telepon tetap kabel 2007-2009



Kapasitas terpasang telepon tetap nirkabel (*wireless*) justru menunjukkan peningkatan yang sangat pesat dalam tiga tahun terakhir terutama pada tahun 2008 dan berlanjut pada tahun 2009. Pada tahun 2008, peningkatan kapasitas terpasang telepon tetap nirkabel ini mencapai 157% dengan peningkatan terbesar terjadi pada Bakrie (Esia) yang meningkat sampai 518,8% dan Telkom (Flexi) yang meningkat 111,7%. Pada tahun 2009, kapasitas terpasang telepon tetap nirkabel ini meningkat 30,7%. Secara rata-rata dalam tiga tahun terakhir, kapasitas terpasang telepon tetap nirkabel meningkat 70% per tahun, dengan peningkatan terbesar oleh Bakrie Telecom yang mencapai 186% per tahun. Permintaan yang terus meningkat dan potensi pasar yang besar membuat operator telepon tetap nirkabel ini melakukan ekspansi dengan meningkatkan kapasitas terpasangnya cukup besar.

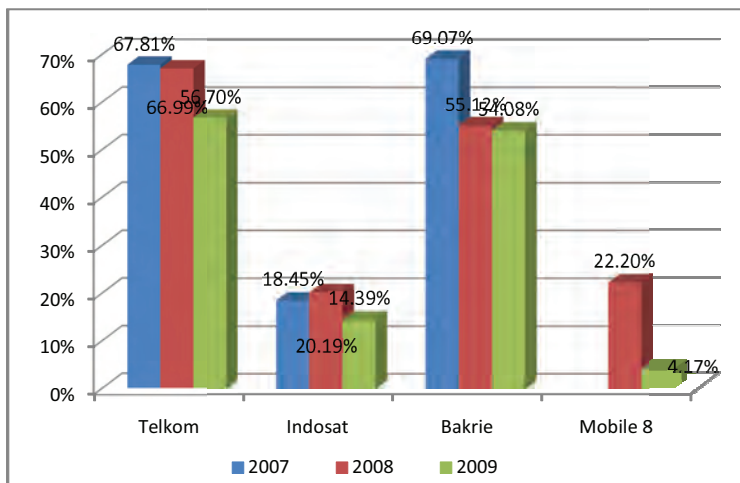
Sejalan dengan peningkatan kapasitas terpasang yang disediakan operator, kapasitas tersambung jaringan telepon tetap nirkabel ini juga meningkat dalam tiga tahun terakhir. Secara total, kapasitas tersambung telepon tetap nirkabel meningkat sebesar 156,2% pada tahun 2008 dan meningkat lagi sebesar 17,8% pada tahun 2009. Peningkatan kapasitas tersambung ini juga disumbang oleh dua operator utama yaitu Telkom melalui produk Flexi yang meningkat 109,1% pada tahun 2008 dan 13,8% pada tahun 2009 serta Bakrie Telecom melalui produk Esia yang kapasitas tersambung meningkat sebesar 393,8% pada tahun 2008 dan 34% pada tahun 2009. Meskipun peningkatan pada tahun 2009 ini lebih kecil dibanding tahun sebelumnya, namun kapasitas tersambung telepon tetap nirkabel masih menunjukkan trend peningkatan seperti ditunjukkan gambar 6.3.

Gambar 6.3. Kapasitas terpasang dan Telepon tersambung telepon tetap wireless 2007-2009



Peningkatan kapasitas terpasang dan tersambung jaringan untuk telepon tetap nirkabel ini berdampak juga pada peningkatan pemanfaatan dari kapasitas terpasang yang disediakan. Peningkatan kapasitas terpasang yang cukup besar oleh operator pada tahun 2008 memang menurunkan tingkat pemanfaatan kapasitas tersebut. Demikian pula dengan peningkatan kapasitas terpasang yang terus dilakukan pada tahun 2009 yang belum diimbangi dengan peningkatan kapasitas tersambung yang tinggi sehingga tingkat pemanfaatan kapasitas pada tahun 2009 kembali menurun seperti terlihat pada gambar 6.4. Dua operator terbesar yaitu Telkom dan Bakrie, tingkat pemanfaatan kapasitas yang dimiliki relatif cukup tinggi khususnya pada tahun 2007 yang hampir mencapai 70% meskipun menurun mendekati 55% pada 2009, Hal ini menunjukkan bahwa ekspansi yang dilakukan dengan meningkatkan kapasitas terpasangnya belum cukup diikuti dengan peningkatan kapasitas tersambung. Sementara untuk dua operator lainnya yaitu Indosat (Star One) dan Mobile 8 (Hepi), tingkat pemanfaatan kapasitasnya masih rendah bahkan pada 2009 kurang dari 15%

Gambar 6.4. Tingkat pemanfaatan kapasitas telepon tetap wireless 2007 – 2009



Jenis penyelenggaraan telepon bergerak seluler menunjukkan jumlah kapasitas yang besar dan untuk kapasitas tersambung menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sejak tahun 2007, total kapasitas terpasang operator telepon bergerak seluler telah mencapai hampir 200 juta sambungan dengan kapasitas terbesar dimiliki oleh Indosat, diikuti Telkomsel. Namun pada tahun 2008, kapasitas terpasang ini mengalami penurunan sebesar 5,5%.

Penurunan ini terjadi disebabkan oleh menurunnya kapasitas terpasang Indosat sebesar 52,1%, meskipun operator-operator telepon bergerak seluler lainnya meningkatkan kapasitas terpasangnya pada tahun 2008. Bahkan peningkatan kapasitas terpasang dua operator yaitu Natrindo (NTS) dan Sampoerna(STI) mencapai lebih dari 200%. Namun karena jumlahnya kecil, peningkatannya menjadi tidak signifikan pengaruhnya. Pada tahun 2009 dari data yang masuk, terjadi peningkatan kapasitas terpasang oleh Excelcomindo sebesar 11,5% dan STI sebesar 15,3%. Peningkatan terbesar dilakukan oleh HTCP dimana kapasitas terpasangnya pada 2009 ditingkatkan sebesar 41,4%. Namun secara total kapasitas terpasang telepon bergerak seluler pada 2009 baru meningkat sebesar 8,5% dan dalam tiga tahun terakhir peningkatannya rata-rata 32% per tahun.

Tabel 6.4. Kapasitas Terpasang dan Telepon Tersambung telepon Bergerak Tahun 2007 - 2009

Operator	2007		2008		2009*	
	Kapasitas	Tersambung	Kapasitas	Tersambung	Kapasitas	Tersambung
Telkomsel	50.500.000	47.890.000	67.300.000	65.299.991	67.300.000	81.643.532
Indosat	95.230.280	24.545.422	45.651.920	36.510.246	45.651.920	28.707.198
Excelcomindo	30.045.325	15.469.000	46.645.061	26.015.517	52.000.000	31.438.377
Mobile-8		3.012.801	7.748.400	2.701.914	7.880.400	2.805.842
Natrindo Telepon Seluler	1.451.085	4.788	4.719.107	3.234.800	4.902.808	4.105.156
STI	488.000	310.464	1.494.134	784.343	1.722.093	636.868
Hutchison CP Telecommuni-cation	3.250.000	2.039.406		4.500.609	7.857.000	7.311.000
Smart Telecom	1.470.000	115.000	3.300.000	1.530.823	4.665.000	2.599.665
Jumlah	182.434.690	93.386.881	176.858.622	140.578.243	191.979.221	159.247.638

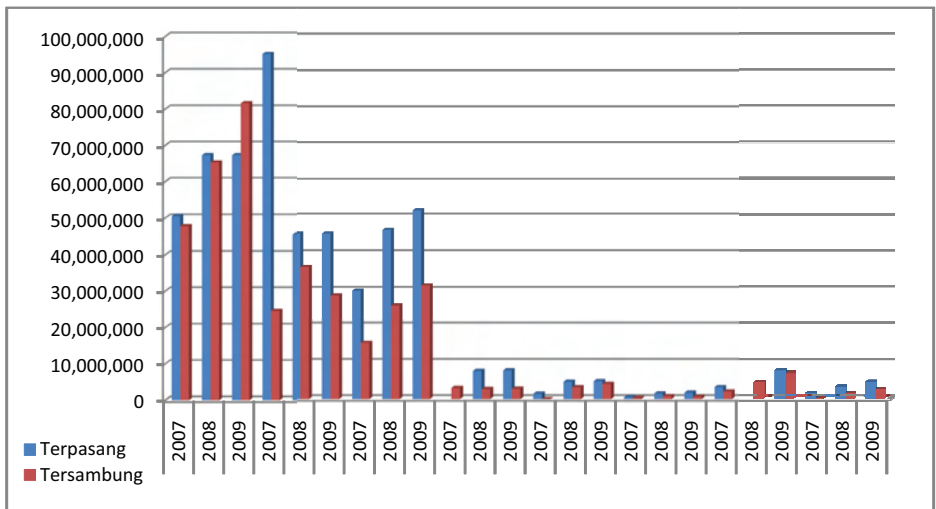
\*) Sampai Desember 2009

\*\*) Untuk Telkomsel dan Indosat masih menggunakan data kapasitas Tahun 2008

Meskipun kapasitas terpasangnya hanya mengalami sedikit peningkatan, namun kapasitas tersambung dari telepon bergerak seluler ini mengalami peningkatan cukup baik dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2008, secara total peningkatan kapasitas tersambung telepon bergerak mencapai 50,5% dibanding tahun sebelumnya dan pada tahun 2009 masih tetap meningkat meskipun hanya sebesar 13,3%. Peningkatan kapasitas tersambung yang besar ini bukan hanya berasal dari operator kecil khususnya operator baru yang giat melakukan ekspansi seperti HTCP dan NTS, namun juga dari operator besar yang lama seperti ditunjukkan oleh gambar 6.5.

Pada operator besar peningkatan kapasitas tersambung terbesar yang terjadi adalah sebesar 36,4% untuk Telkomsel, 48,7% untuk Indosat dan 68,2% untuk Exelcomindo. Satu-satunya operator yang mengalami penurunan kapasitas tersambung pada 2008 adalah Mobile-8. Pada tahun 2009, terjadi perlambatan pertumbuhan kapasitas tersambung dimana dua operator besar yang mengalami peningkatan kapasitas tersambung yaitu Telkomsel sebesar 25% dan Exelcomindo sebesar 20,8%, namun Indosat mengalami penurunan kapasitas tersambung sebesar 21,4%. Dua operator kecil yang mengalami peningkatan adalah NTS (26%) dan Smart Telecom (69,8%) namun HTCP menurun 18,8%. Secara total kapasitas terambung pada 2009 hanya meningkat 13,3%

Gambar 6.5. Kapasitas Terpasang dan Telepon tersambung telepon bergerak seluler 2007-2009

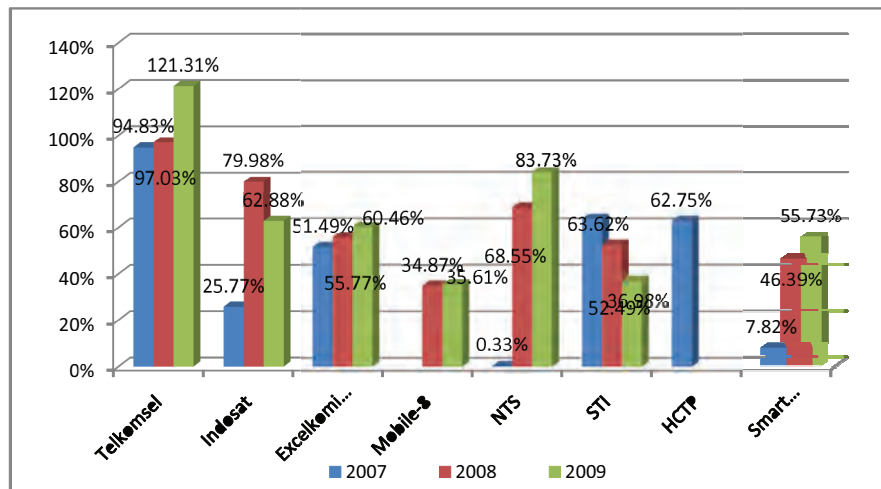


Catatan : kapasitas terpasang Indosat dan Telkomsel tahun 2009, menggunakan data tahun 2008

Peningkatan kapasitas tersambung berdampak pada tingkat pemanfaatan kapasitas terpasangnya yang juga menunjukkan trend meningkat pada semua operator. Hanya Indosat yang mengalami penurunan tingkat pemanfaatan kapasitas terpasang pada tahun 2009 setelah meningkat cukup besar pada tahun 2008 dan STI yang terus menurun sejak 2008. Dari sisi besarnya, tingkat pemanfaatan kapasitas terpasang yang terbesar adalah oleh Telkomsel yang telah mencapai diatas 90% seperti ditunjukkan oleh gambar 6.6. Sementara untuk dua operator besar lainnya yaitu Indosat dan Exelcomindo, tingkat pemanfaatan kapasitasnya masing-masing telah mencapai kisaran 60%-80% untuk Indosat dan

50%-60% untuk Exelcomindo. Untuk operator kecil, tingkat pemanfaatan kapasitas jaringannya juga sudah relatif cukup besar dimana pada tahun 2009 telah mencapai lebih dari 50% kecuali STI, bahkan untuk NTS telah mencapai 83,7% pada 2009.

Gambar 6.6. Tingkat pemanfaatan kapasitas telepon bergerak 2007 – 2009



\*) untuk Indosat dan Telkomsel, kapasitas terpasang 2009 masih menggunakan data 2008

### 6.3.3. Perkembangan Pelanggan Jaringan Telekomunikasi.

Pertumbuhan pelanggan menjadi salah satu indikator perkembangan industri telekomunikasi di suatu negara dan prospek pasar dari industri tersebut. Pertumbuhan pelanggan jaringan telepon tetap lokal menunjukkan perbedaan yang sangat tajam antara telepon tetap kabel dengan telepon tetap bergerak. Jumlah pelanggan jaringan tetap kabel menunjukkan kecenderungan penurunan dalam lima tahun terakhir seperti ditunjukkan tabel 6.5. Setelah mengalami peningkatan pada tahun 2006, jumlah pelanggan telepon tetap terus menurun pada tahun 2009 dengan penurunan rata-rata 1,2% per tahun. Dibandingkan tahun 2005, jumlah pelanggan telepon tetap kabel pada tahun 2009 telah menurun sebesar 3,3%. PT. Telkom sebagai pemain utama pada jaringan telepon tetap lokal ini dengan pangsa 99,5% juga penurunan pelanggannya pada periode yang sama mencapai 3,6%. Pelanggan jaringan telepon tetap kabel yang semakin menurun ini diduga disebabkan sulitnya bersaing dengan telepon bergerak seluler maupun telepon tetap nirkabel yang penetrasi pasarnya semakin jauh dan menjangkau pedesaan dengan biaya yang relatif lebih murah untuk koneksi maupun perangkatnya. Sehingga pertumbuhan pelanggan telepon



tetap kabel hanya mengandalkan dari permintaan untuk kebutuhan fixed line untuk bisnis dan pemerintahan dan sebagian rumah tangga. Untuk Indosat misalnya masih menunjukkan peningkatan pelanggan rata-rata sebesar 19,1% per tahun sejak 2005.

Tabel 6.5. Perkembangan Pelanggan Jaringan Tetap Lokal 2005 - 2009

No	Jenis Infrastruktur	2005	2006	2007	2008	2009*
<b>A</b>	<b>Kabel</b>	<b>8.710.385</b>	<b>8.738.343</b>	<b>8.717.872</b>	<b>8.674.228</b>	<b>8.421.674</b>
1	PT. Telkom	8.686.131	8.709.211	8.685.000	8.629.783	8.376.793
2	PT Indosat I-Phone	21.724	26.632	30.479	42.145	42.674
3	PT. BBT	2.530	2.500	2.393	2.300	2.207
<b>B</b>	<b>Nir Kabel (wireless)</b>	<b>4.683.363</b>	<b>6.014.031</b>	<b>10.811.635</b>	<b>21.703.843</b>	<b>25.536.218</b>
1	PT Telkom Flexi	4.061.800	4.175.853	6.363.000	13.305.181	15.139.057
	Prabayar	3.240.500	3.381.426	5.535.000	12.568.620	14.490.010
	Pasca bayar	821.300	794.427	828.000	736.561	649.047
2	PT. Indosat StarOne	249.434	358.980	627.934	761.589	542.858
	Prabayar	229.726	338.435	594.203	681.362	478.732
	Pasca bayar	19.708	20.545	33.731	80.227	64.126
3	PT. Bakrie Tel- Esia	372.129	1.479.198	3.820.701	7.304.543	9.787.540
	Prabayar	351.826	1.414.920	3.695.817	7.196.518	9.693.441
	Pasca bayar	20.303	64.278	124.884	108.025	94.099
4	PT. Mobile-8**	N.A	N.A	N.A	332.530	66.763
	Prabayar	N.A	N.A	N.A	N.A	66.526
	Pasca bayar	N.A	N.A	N.A	N.A	237
	Jumlah	<b>13.393.748</b>	<b>14.752.374</b>	<b>19.529.507</b>	<b>30.378.071</b>	<b>33.957.892</b>

\*) Sampai Desember 2009 kecuali Indosat dan Bakrie sampai kuartal III Tahun 2009

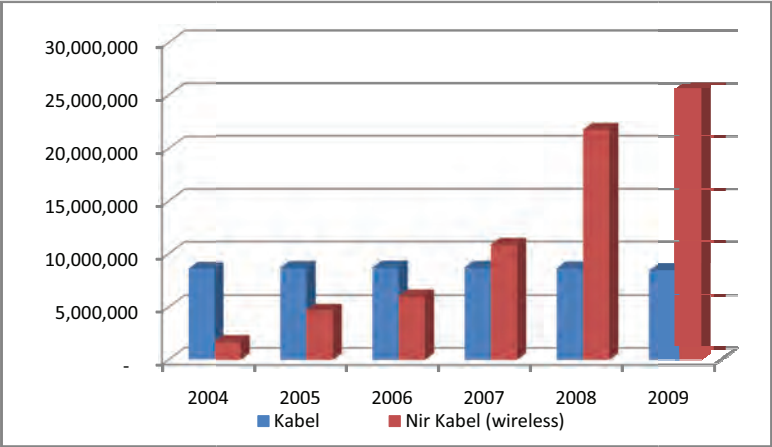
\*\*) Mulai beroperasi tahun 2008

Sementara untuk telepon tetap nirkabel, pertumbuhan pelanggannya menunjukkan peningkatan yang sangat pesat. Pertumbuhan jumlah pelanggan telepon tetap nirkabel secara total dalam lima tahun terakhir rata-rata mencapai 81,3% per tahun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2005 yang mencapai 180% dan tahun 2008 yang mencapai 100%. Jika dibandingkan posisi tahun 2005, jumlah pelanggan telepon tetap nirkabel telah meningkat hampir 450%.

Gambar 6.7 juga menunjukkan perkembangan jumlah pelanggan yang sangat pesat untuk telepon tetap nirkabel sejak tahun 2004. Sementara untuk telepon tetap kabel menunjukkan jumlah pelanggan yang bahkan menurun dalam lima tahun terakhir. Sekali lagi hal ini menunjukkan bahwa dengan fungsi yang hampir sama, telepon tetap kabel

semakin sulit bersaing dengan telepon tetap nirkabel dengan segala kelebihan yang dimiliki untuk mendukung komunikasi. Hal inilah yang menjadikan peningkatan jumlah pelanggan telepon tetap nirkabel menjadi jauh lebih cepat dibanding telepon tetap kabel.

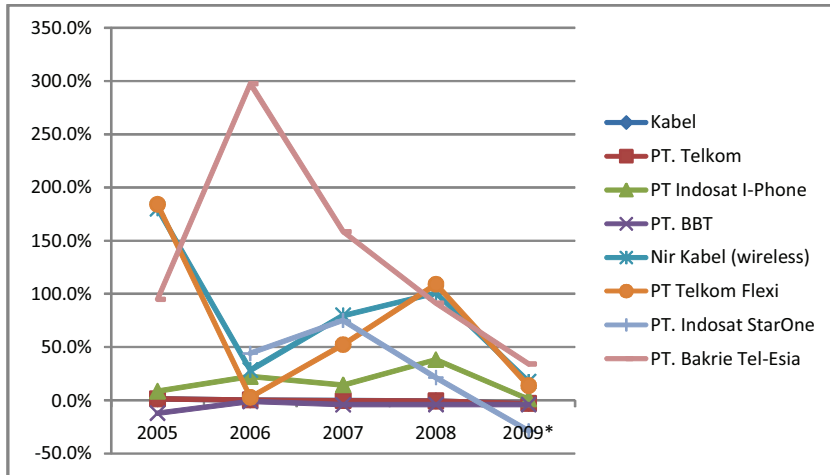
Gambar 6.7 Perbandingan Jumlah Pelanggan Telepon Kabel dan Nirkabel 2004-2009



Trend pertumbuhan jumlah pelanggan telepon tetap semakin jelas ditunjukkan oleh gambar 6.8. Pada gambar 6.8 terlihat pertumbuhan pelanggan dari operator telepon tetap kabel yang negatrif. Sementara pertumbuhan pelanggan telepon tetap nirkabel meskipun menunjukkan trend pertumbuhan yang fluktuatif, namun berada pada level pertumbuhan yang tinggi seperti ditunjukkan oleh pertumbuhan pelanggan Bakrie Tel-Esia dan Telkom Flexi. Fluktuasi ini diduga lebih disebabkan oleh persaingan dan strategi pemasaran baru yang ditawarkan oleh masing masing operator. Sehingga ketika pertumbuhan pelanggan dari satu operator telepon nirkabel menurun, pertumbuhan pelanggan operator lain justru meningkat.

Perkembangan dan peningkatan jumlah pelanggan telepon tetap nirkabel yang sangat pesat disamping karena kelebihan yang dimiliki dalam hal mobilitas dibanding telepon tetap kabel, juga disebabkan oleh persaingan yang sangat ketat diantara operator untuk menjaring pelanggan dengan berbagai strategi pemasaran dan persaingan harga

Gambar 6.8. Pertumbuhan Jumlah Pelanggan Jaringan Tetap Lokal 2004-2009



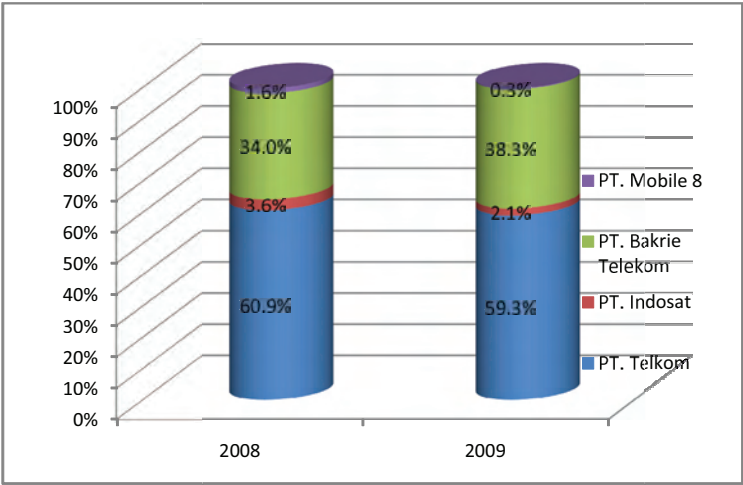
Dalam pasar telepon tetap nirkabel, dua operator mendominasi dengan pangsa pasar yang besar yaitu Telkom (Flexi) dan Bakrie Telecom (Esia) dimana total pangsa pasar keduanya mencapai sekitar 94,9% pada 2008 dan 97,6% sampai kuartal III tahun 2009. Dari penguasaan pangsa pasar, seperti ditunjukkan pada gambar 6.9, terjadi sedikit pergeseran dalam penguasaan pangsa pasar telepon tetap nirkabel ini. Telkom Flexi yang menguasai 60,0% pangsa pasar pada tahun 2008, sampai kuartal III tahun 2009 mengalami sedikit penurunan pangsa pasar menjadi 59,3%. Sementara PT. Bakrie Telecom melalui produk Esia, pangsa pasarnya meningkat dari 34% pada tahun 2008 meningkat menjadi 38,3% sampai kuartal III 2009.

Tabel 6.6. Profil Penyelenggara Jaringan Telepon tetap Wireless

No	Operator	Produk	Tahun Mulai Operasi	2008		2009*	
				Jumlah Pelanggan	Pangsa Pasar	Jumlah Pelanggan	Pangsa Pasar
1	PT. Telkom	Telkom Flexi	2002	13.051.181	60,9%	15.139.057	59,3%
2	PT. Indosat	StarOne	2004	761.589	3,6%	542.858	2,1%
3	PT. Bakrie Telekom	Esia	2003	7.302.543	34,0%	9.787.540	38,3%
4.	PT. Mobile 8	Hepi	2008	332.530	1,6%	66.763	0,3%

Peningkatan pangsa pasar kedua operator khususnya Bakrie ini juga merupakan pengambilan sebagian pangsa dari dua operator kecil lain yaitu PT. Indosat dan PT. Mobile-8 yang juga mengalami penurunan pangsa pasar. Peningkatan pangsa pasar dari PT. Bakrie Telecom dalam pasar telepon tetap nirkabel tidak terlepas dari berbagai strategi pemasaran dan inovasi produk yang semakin menarik dan terjangkau oleh konsumen, termasuk melalui berbagai paket *bundling* dengan pesawat telepon (*handset*) yang menggunakan operator PT. Bakrie Telecom (Esia).

Gambar 6.9. Komposisi Pangsa Pasar Penyelenggara Jaringan Telepon Tetap Wireless



Peningkatan jumlah pengguna terbesar sekaligus juga menjadi penggunaan terbesar dalam jaringan telepon adalah untuk jaringan telepon bergerak seluler. Jumlah pelanggan telepon seluler bergerak di Indonesia pada tahun 2009 sudah mencapai hampir 160 juta pelanggan baik prabayar maupun pasca bayar. Dalam enam tahun terakhir terjadi peningkatan jumlah pelanggan yang sangat signifikan dengan pertumbuhan pelanggan pada periode 2005-2009 rata-rata mencapai 40,2% per tahun. Secara total dari tahun 2004 sampai tahun 2009, jumlah pelanggan telepon bergerak seluler ini meningkat sebesar 425%. Peningkatan jumlah pelanggan ini berasal dari bertambahnya jumlah operator (dari hanya 4 operator pada 2004 menjadi 8 operator pada 2009) maupun peningkatan jumlah pelanggan yang meningkat di masing-masing operator dari variasi produk yang ditawarkan yang semakin mudah diakses konsumen. Peningkatan terbesar dialami oleh STI yang dalam periode 2005-2009 yang

meningkat 358,5% per tahun. Namun operator dengan pangsa pasar besar, pertumbuhan pelanggan yang tinggi dialami oleh Exelcomindo yang tumbuh sebesar 54,4% per tahun.

Tabel 6.7. Perkembangan Jumlah Pelanggan Telepon Bergerak Seluler 2004-2009

No	Operator	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
1	Telkomsel	16.291.000	24.269.000	35.597.000	47.890.000	65.299.991	81.643.532
	Prabayar	14.963.000	22.798.000	33.935.000	45.977.000	63.359.619	79.608.839
	Pasca bayar	1.328.000	1.471.000	1.662.000	1.913.000	1.940.372	2.034.693
2	Indosat	9.754.607	14.512.453	16.704.729	24.545.422	36.510.246	28.707.198
	Prabayar	9.214.663	13.836.046	15.878.870	23.945.431	35.591.033	27.416.788
	Pasca bayar	539.944	676.407	825.859	599.991	919.213	1.290.410
3	Excelcomindo	3.791.000	6.978.519	9.527.970	15.469.000	26.015.517	31.438.377
	Prabayar	3.743.000	6.802.325	9.141.331	14.988.000	25.599.297	31.101.047
	Pasca bayar	48.000	176.194	386.639	481.000	416.220	337.330
4	Mobile 8	500.000	1.200.000	1.825.888	3.012.801	2.701.914	2.805.842
	Prabayar		1.150.000	1.778.200	2.920.213	2.552.975	2.683.776
	Pasca bayar		50.000	47.688	92.588	148.939	122.066
5	STI		10.609	134.713	310.464	784.343	636.868
	Prabayar			133.746	310.176	784.129	636.566
	Pasca bayar			967	288	214	302
6	Natrindo		21.537	12.715	4.788	3.234.800	4.105.156
	Prabayar			10.155	4.788	3.234.800	4.105.156
	Pasca bayar			2.560	-	-	-
7	Hutchison		-	-	2.039.406	4.500.609	7.311.000
	Prabayar				2.036.202	4.490.202	7.295.000
	Pasca bayar				3.204	10.407	16.000
8	Smart Telecom		-	-	115.000	1.530.823	2.599.665
	Prabayar					1.456.372	2.528.026
	Pasca bayar					74.451	71.639
	Jumlah	<b>30.336.607</b>	<b>46.992.118</b>	<b>63.803.015</b>	<b>93.386.881</b>	<b>140.578.243</b>	<b>159.247.638</b>

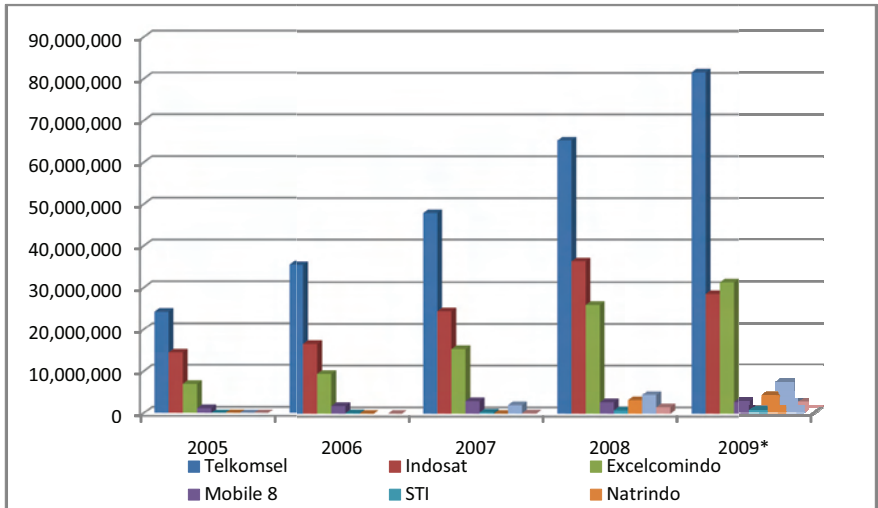
\*) Sampai Desember 2009 kecuali untuk Bakrie dan Indosat sampai kuartal III 2009

\*\*) untuk Indosat, terjadi penurunan karena sedang berlangsung proses penghapusan nomor-nomor pelanggan yang tidak aktif

Pada masing-masing operator, komposisi pelanggan masih didominasi pelanggan prabayar dengan pasca bayar. Sebagian besar dari pelanggan telepon bergerak seluler ini adalah pelanggan dengan sistem prabayar yang proporsinya mencapai 97,8% dari total pelanggan telepon bergerak seluler. Pada masing-masing operator, pelanggan jenis prabayar ini proporsinya berkisar antara 95% sampai dengan 98%. Pada operator utama seperti Telkomsel, Indosat dan Exelcomindo, pelanggan prabayar ini proporsinya masing-masing

mencapai 97,5%, 95,5% dan 98,9%. Gambar 6.10 juga menunjukkan trend perkembangan jumlah pelanggan yang positif terjadi pada semua operator kecuali Indosat yang menurun pada tahun 2009. Tapi penurunan ini lebih disebabkan proses penghapusan nomor-nomor yang tidak aktif yang dilakukan oleh Indosat.

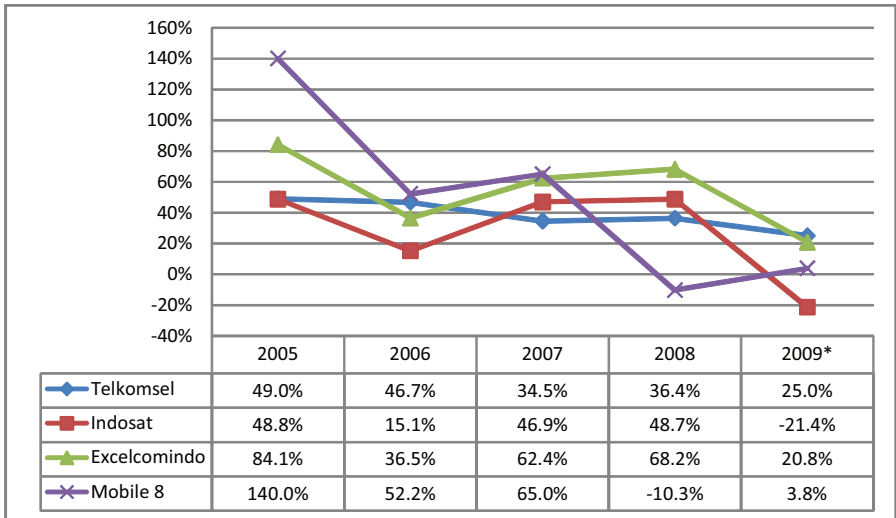
Gambar 6.10. Perkembangan Jumlah Pelanggan Telepon Bergerak Seluler



\*) Sampai Desember 2009 kecuali Bakrie dan Indosat sampai September 2009

Dari sisi pertumbuhan pelanggan, gambar 6.11 menunjukkan adanya trend penurunan pertumbuhan pelanggan telepon bergerak seluler. Jika pada tahun 2005, hampir semua operator memiliki pertumbuhan pelanggan yang tinggi, pada tahun 2006 pertumbuhan melambat juga hampir pada semua operator telepon bergerak seluler kecuali Telkomsel yang pertumbuhan pelanggannya hanya sedikit menurun. Penurunan ini diduga terkait dengan kenaikan harga BBM pada akhir 2005 yang cukup tinggi dan memicu kenaikan harga-harga lain. Hal ini disamping mengurangi permintaan di sisi konsumen, juga menyebabkan operator mengurangi promosi dan pengembangan produk. Pertumbuhan meningkat lagi pada tahun 2007 dan kembali menurun pada tahun 2009 termasuk Indosat yang menurun tajam. Pertumbuhan pelanggan Mobile 8 mengalami penurunan yang paling tajam meskipun dari 2008 ke September 2009 justru menunjukkan peningkatan pada saat operator lain menurun pertumbuhannya.

Gambar 6.11. Perkembangan Pertumbuhan Pelanggan Telepon Bergerak Seluler

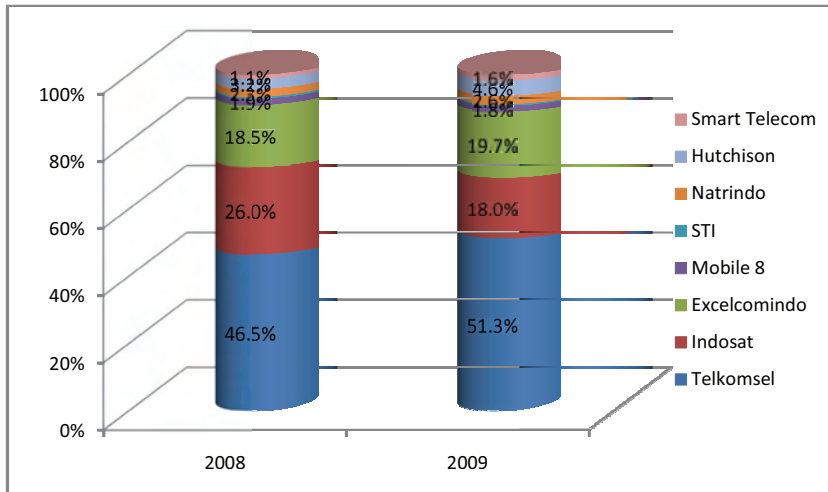


\*) Sampai Desember 2009 kecuali untuk Indosat dan Excelcomindo

Perubahan pola pertumbuhan jumlah pelanggan ini juga berdampak pada terjadinya pergeseran pangsa pasar antar operator telepon seluler bergerak meskipun tidak sampai menyebabkan pergeseran yang besar. Telkomsel sebagai operator yang memiliki pangsa pasar terbesar meningkatkan pangsa pasarnya dari 46,5% pada 2008 menjadi 51,3% pada 2009. Excelcomindo juga meningkat pangsa pasarnya dari 18,5% pada 2008 menjadi 19,7% pada 2009. Sebaliknya Indosat mengalami penurunan pangsa pasar dari 26% pada tahun 2008 menjadi 18% sampai September 2009. Sementara pada operator kecil, sebagian meningkatkan pangsa pasarnya seperti Natrindo (NTS), Hutchinson (HTCP) dan Smart Telecom dan sebagian lagi mengalami penurunan pangsa pasar seperti dialami STI dan Mobile-8 namun dengan besaran yang kecil.

Penurunan pertumbuhan pelanggan telepon seluler bergerak dalam tiga terakhir diduga disebabkan oleh mulai adanya kejenuhan pasar akibat persaingan yang sangat ketat diantara operator. Jumlah pelanggan yang sudah melebihi setengah penduduk Indonesia menjadi indikasi pasar yang sudah mulai jenuh

Gambar 6. 12. Pergeseran pangsa pasar telepon bergerak seluler 2008- 2009



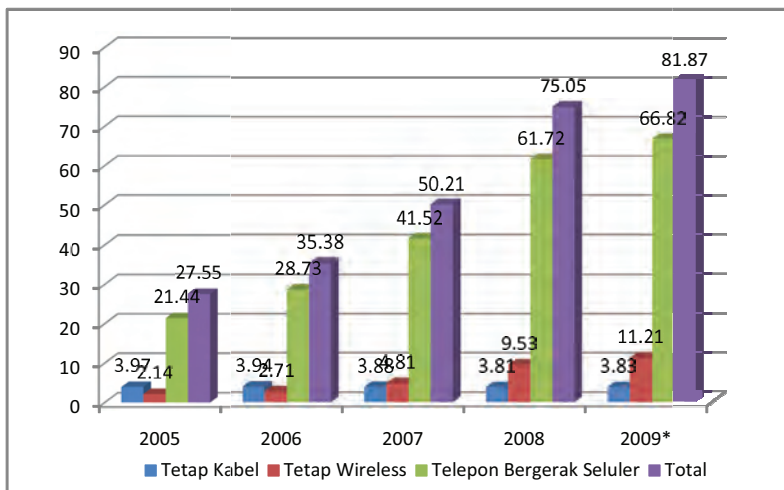
#### 6.3.4. Teledensitas.

Teledensitas adalah indikator yang lazim digunakan dalam bidang telekomunikasi untuk menunjukkan jumlah satuan sambungan telepon terpasang per seratus penduduk. Ukuran yang umum dipakai adalah dari penggunaan telepon tetap kabel. Pada saat ini teledensitas Indonesia untuk sambungan telepon tetap baru mencapai 3,82. Ini artinya, setiap 100 orang baru terdapat 4 sambungan telepon tetap kabel yang terpasang. Angka ini tergolong rendah terutama jika dibandingkan dengan negara maju atau bahkan negara tetangga ASEAN. Namun saat ini penggunaan telepon nirkabel baik telepon tetap maupun bergerak seluler jauh lebih banyak dan menunjukkan penetrasi pasar yang jauh.

Gambar 6.13 menunjukkan teledensitas untuk masing-masing jenis telepon di Indonesia. Jika dilihat berdasarkan penggunaan seluruh jenis telepon termasuk telepon tetap nirkabel dan telepon bergerak seluler, teledensitas Indonesia sampai kuartal III 2009 sudah mencapai 81,87. Hal ini tidak terlepas dari pertumbuhan pelanggan telepon tetap nirkabel dan telepon bergerak seluler yang sangat pesat dalam lima tahun terakhir. Jika hanya dilihat dari penggunaan telepon bergerak seluler teledensitasnya juga sudah cukup tinggi yaitu 66,82. Bahkan jika hanya diukur dengan penggunaan telepon tetap nirkabel, teledensitas telepon tetap nirkabel ini sudah lebih dari 10 yaitu 11.21 .



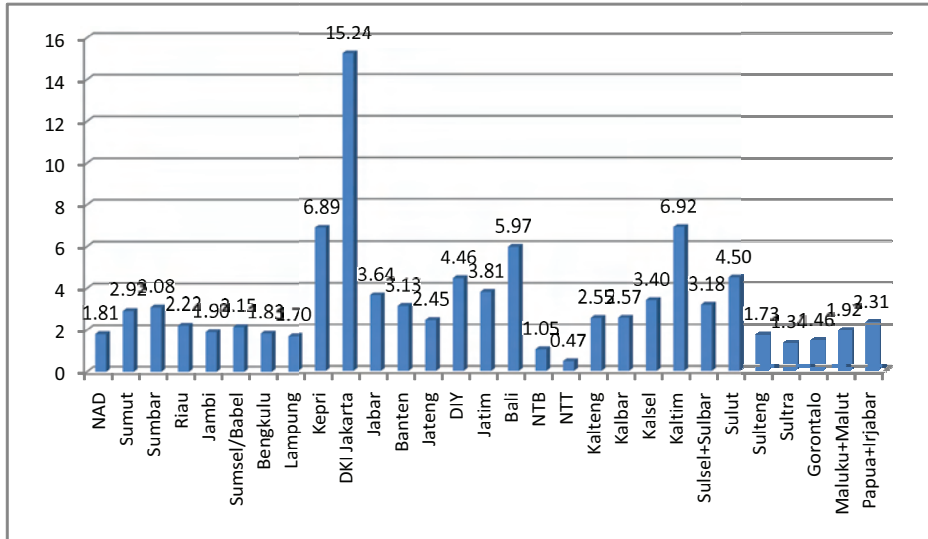
Gambar 6.13. Perkembangan Teledensitas untuk tiap jenis Telepon di Indonesia



Untuk telepon tetap kabel khususnya telepon rumah, meskipun secara total teledensitasnya masih dibawah 4, namun untuk beberapa propinsi, sudah menunjukkan teledensitas yang tinggi. Gambar 6.14 yang memperlihatkan teledensitas menurut propinsi menunjukkan bahwa untk DKI Jakarta teledensitasnya sudah mencapai 15,24. Hal ini wajar mengingat Jakarta merupakan daerah perkotaan dengan pendapatan per kapita penduduk yang tinggi sekaligus menjadi pusat kegiatan bisnis dan pemerintahan. Beberapa daerah lain juga menunjukkan teledensitas yang tinggi meskipun berada di luar Jawa seperti Kepulauan Riau, Kalimantan Timur dan Bali yang masing-masing sebesar 6.89, 6.92 dan 5.97. Cukup tingginya teledensitas telepon tetap kabel di ketiga propinsi ini disebabkan jumlah penduduk yang tidak terlalu banyak namun banyak kegiatan bisnis dan ekonomi dengan pendapatan perkapita penduduk yang tinggi. Sementara teledensitas yang masih sangat rendah dengan angka kurang dari 2 terlihat di wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Maluku. Dari sebaran daerahnya, propinsi-propinsi yang memiliki teledensitas yang rendah juga dicirikan dengan pendapatan per kapita penduduk yang rendah.

Berdasarkan variasi angka teledensitas menurut propinsi di Indonesia, terdapat korelasi positif antara teledensitas dengan pendapatan per kapita penduduk. Propinsi dengan pendapatan per kapita tinggi memiliki teledensitas yang tinggi dan juga sebaliknya.

Gambar 6.14. Teledensitas Telepon Rumah menurut Propinsi



\*) Data jumlah telepon berasal dari PT. Infomedia

### 6.3.5. Pendapatan Operator Jaringan Telekomunikasi.

Untuk menilai kinerja penerimaan dari operator telepon, digunakan tiga indikator yaitu penerimaan operasional, EBITDA (Earning Before Interest Tax Depreciation and Ammortization), dan ARPU (Average Revenue Per User) . Ketiga indikator ini pada dasarnya mencerminkan penerimaan yang didapat operator dari jasa pelayanan telepon yang diberikan.

#### 6.3.5.1. Pendapatan Total Operasional (*Operating Revenue*)

Salah satu indikator lain untuk melihat perkembangan industri telekomunikasi adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan penyelenggara telekomunikasi, diantaranya pendapatan operasional. Pendapatan operasional operator adalah pendapatan yang diterimanya dari layanan yang disediakan seperti layanan telepon pasca bayar (postpaid), Prabayar (prepaid), international roaming, interkoneksi dan layanan-layanan lainnya seperti penyewaan jaringan.

Pendapatan operasional dari operator telepon seluler di Indonesia menunjukkan trend yang meningkat dalam empat tahun terakhir kecuali Mobile-8 yang mengalami penurunan. Pendapatan operasional tahun 2009 yang baru pada kuartal III sudah menunjukkan angka yang cukup tinggi, lebih dari 75% dari pendapatan tahun sebelumnya. Dengan demikian diperkirakan pada akhir tahun nilainya akan lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Untuk Exelcomindo yang datanya sudah pada akhir tahun misalnya menunjukkan angka yang lebih besar dari tahun sebelumnya. Tabel 6.8 yang menampilkan perkembangan pendapatan operasional dari operator telepon seluler menunjukkan bahwa semakin besar pendapatan dari operator, maka pertumbuhan pendapatannya cenderung akan semakin kecil meskipun secara nominal nilainya besar. Telkom Group (mencakup Telkomsel dan Telkom-Flexi) yang pada tahun 2008 membukukan pendapatan lebih dari Rp. 60 Triliun, pertumbuhan pendapatannya pada 2008 justru hanya 2,1%. Sementara Bakrie Telecom yang memiliki penerimaan operasional pada 2008 baru mencapai Rp. 2.2 triliun menunjukkan pertumbuhan penerimaan yang cukup besar yaitu 70,7%.

Tabel 6.8. Pendapatan Operasional Operator Telepon (Rp. Milyar)

No	Operator	2006	2007	2008	2009*
1	Telkom Group**	51.294	59.440	60.689	44.700
3	Indosat	12.239	16.488	18.659	13.410
4	Excelcomindo	4.682	6.460	9.765	10.790
5	Bakrie	608	1.290	2.202	449
6	Mobile-8	589	883	732	408

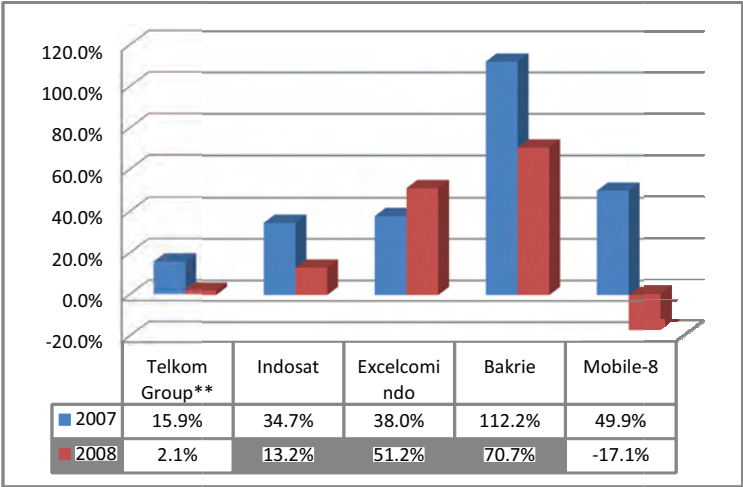
\*) Sampai kuartal III Tahun 2009 kecuali untuk Exelcomindo

\*\*) mencakup seluruh operator telekomunikasi yang berada dalam group PT. TELKOM

Pendapatan operasional operator ini juga menunjukkan trend pertumbuhan pendapatan yang semakin menurun seperti ditunjukkan tabel 6.8 dan gambar 6.15. Setelah mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi pada tahun 2007, pertumbuhan pendapatan operasional ini menurun pada tahun 2008. Peningkatan pertumbuhan pendapatan operasional hanya dialami oleh PT. Exelcomindo dimana penerimaan operasionalnya pada tahun 2008 tumbuh 51,2% setelah tahun sebelumnya tumbuh 38%. Mobile-8 bahkan menunjukkan penurunan penerimaan operasional sampai 17,1% setelah pada tahun 2007 penerimaan operasionalnya tumbuh hampir 50%. Jika dilihat dari posisi pendapatan pada kuartal III tahun 2009, diperkirakan pertumbuhan pendapatannya sampai akhir tahun 2009 juga akan lebih rendah

dari tahun-tahun sebelumnya. Kecenderungan penurunan penerimaan operasional ini sejalan dengan semakin menurunnya pertumbuhan pelanggan karena persaingan yang semakin ketat sementara pasar mulai jenuh. Sementara pertumbuhan penerimaan operasional Exelcomindo yang masih menunjukkan peningkatan karena strategi pemasaran yang cukup berhasil, termasuk dengan fasilitas dan bonus bagi pelanggan.

Gambar 6.15. Pertumbuhan Pendapatan Operator Telepon Seluler



Pasar yang sudah jenuh dan persaingan yang semakin ketat bukan hanya berdampak pada penurunan pertumbuhan pelanggan, tapi juga pada penurunan pertumbuhan pendapatan operasional operator telepon

### 6.3.5.2. EBITDA (*Earning Before Interest, Tax, Depreciation and Ammortization*)

EBITDA adalah pendekatan penerimaan yang dihitung dari penerimaan operator telepon sebelum dikurangi dengan bunga, pajak, penyusutan/depresiasi dan amortisasi. Tabel 6.9 menyajikan EBITDA dari lima operator utama telepon seluler di Indonesia yang secara umum menunjukkan trend peningkatan kecuali untuk Telkom Group. Dari tabel tersebut terlihat bahwa EBITDA dari Telkom Group yang mencakup Telkomsel dan Telkom-Flexi menunjukkan nilai yang jauh lebih besar daripada operator lainnya, namun mengalami penurunan pada tahun 2008 setelah meningkat sampai tahun 2007. Bahkan EBITDA dari

Indosat belum sampai Rp. 10 Triliun. Sementara dua operator yang relatif baru yaitu Bakrie dan Mobile-8 masih pada angka dibawah Rp. 1 triliun.

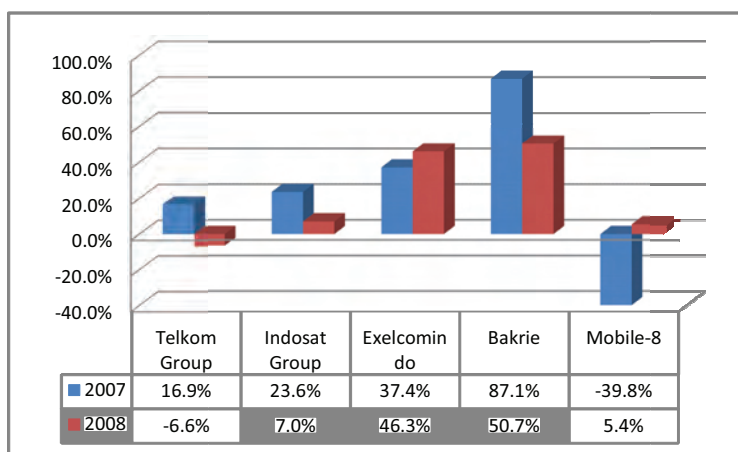
Tabel 6.9 EBITDA Operator Utama Telepon di Indonesia 2006-2009 (Rp. Milyar)

No	Operator	2006	2007	2008	2009*
1	Telkom Group	31.716	37.067	34.621	26.000
2	Indosat Group	7.051	8.714	9.321	6.719
3	Exelcomindo	2.554	3.509	5.132	4.111
4	Bakrie	292	545	822	1.359
5	Mobile-8	397	239	252	279

\*) Data sampai kuartal III 2009 kecuali Bakrie sampai Desember 2009

Jika dilihat dari pertumbuhannya, tiga operator yaitu Indosat, Exelcomindo dan Bakrie menunjukkan pertumbuhan EBITDA yang masih positif dalam tiga tahun terakhir. Bakrie menjadi operator dengan pertumbuhan EBITDA yang paling tinggi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 68,9% per tahun sampai 2008. Sementara pertumbuhan EBITDA dari Exelcomindo mencapai 41,8% per tahun dan Indosat hanya sebesar 15,3% per tahun. Jika dilihat data tahun 2009, Bakrie Telecom memperlihatkan EBITDA yang terus meningkat dengan EBITDA yang tumbuh 65,3% dibanding tahun sebelumnya. Mobile-8 dan Exelcomindo juga menunjukkan potensi peningkatan EBITDA karena nilainya yang sudah cukup tinggi meskipun baru kuartal III tahun 2009.

Gambar 6.16. Pertumbuhan EBITDA Operator Utama Telepon



### 6.3.5.3. ARPU (*Average Revenue Per User*)

ARPU menunjukkan penerimaan yang diraih oleh operator per satu pelanggan yang menggunakan produknya. Besaran nilai ARPU menunjukkan besarnya rata-rata penerimaan yang didapat oleh operator dari satu pelanggannya. Artinya, meskipun jumlah pelanggan sedikit, namun bisa jadi ARPU dari operator tersebut besar jika pelanggan cukup intensif menggunakan layanan sambungan telepon dari operator tersebut. Tabel 6.10 menunjukkan bahwa secara umum terjadi penurunan ARPU pada semua operator dengan penurunan yang cukup tajam dalam lima tahun terakhir. Bakrie Telekom mengalami penurunan ARPU dari Rp. 500,953 pada 2004 menjadi hanya Rp. 33.080 pada tahun 2009. Artinya, jika semula Bakrie Telecom memperoleh penerimaan Rp, 500.935 per pelanggannya pada 2004, menurun hanya menjadi Rp Rp. 33.080 per pelanggan. Penurunan ini diduga terkait dengan semakin bertambahnya jumlah pelanggan Bakrie Telecom yang mengalami peningkatan pelanggan sangat besar. Secara umum, penurunan ARPU yang terjadi juga merupakan implikasi dari bertambahnya jumlah pelanggan yang cukup besar dalam lima tahun terakhir. Penurunan ARPU dari tahun 2004 sampai September 2009 berkisar antara yang paling rendah yaitu sebesar 48,6% (Exelcomindo) sampai dengan yang paling tinggi yaitu sebesar 94,1% (Mobile-8)

Tabel 6.10. Perkembangan ARPU Operator Telepon Tahun 2004-2009\*

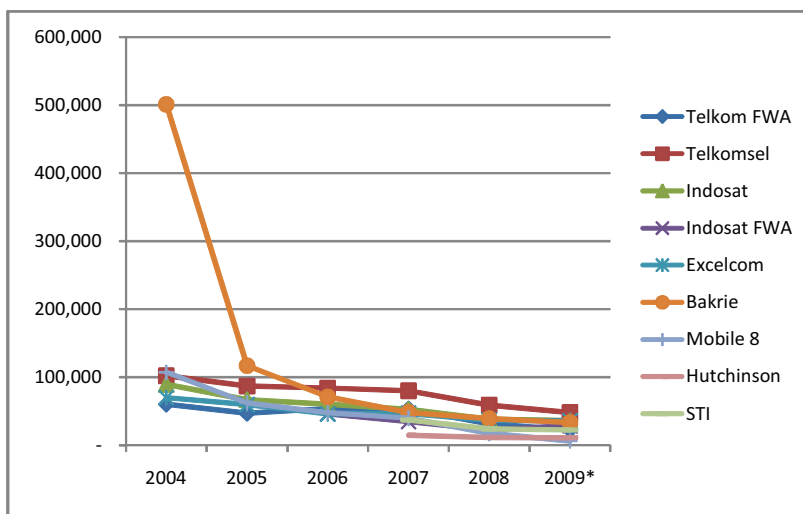
Operator	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
Telkom FWA	60.000	47.000	54.000	53.000	31.335	22.319
Telkomsel	102.000	87.000	84.000	80.000	59.000	48.000
Indosat	89.489	67.113	60.023	52.828	38.282	36.032
Indosat FWA	N.A	N.A	45.905	34.641	22.858	28.638
Excelcom	70.000	60.000	46.000	47.000	37.000	36.000
Bakrie	500.935	116.913	70.891	48.315	39.000	33.380
Mobile 8	107.273	62.332	48.013	39.791	17.621	6.300
Hutchinson	N.A	N.A	N.A	14.971	11.414	11.000
STI	N.A	N.A	N.A	37.147	23.857	22252

\*) Sampai Kwartal III 2009

Gambar 6.17 yang memperlihatkan perkembangan ARPU operator telepon di Indonesia semakin menunjukkan terjadinya kecenderungan penurunan ARPU operator dari tahun ke tahun. Hampir semua operator menunjukkan trend penurunan ARPU dengan penurunan paling besar dialami oleh Bakrie dan Mobile-8. Dari pola penurunan ini terlihat bahwa

operator yang berbasis teknologi CDMA menunjukkan penurunan ARPU yang lebih tajam dibanding operator yang berbasis teknologi GSM.

Gambar 6.17. Trend Perkembangan ARPU Operator Telepon di Indonesia



Kecenderungan penurunan ARPU operator telepon secara implisit menunjukkan bahwa peningkatan jumlah pelanggan melalui berbagai strategi pemasaran berimplikasi pada semakin menurunnya ARPU.

Analisis secara khusus untuk ARPU telepon bergerak seluler seperti ditunjukkan oleh Tabel 6.11 menunjukkan bahwa penurunan ARPU sangat terlihat untuk jenis pelanggan prabayar. Bahkan untuk operator telepon bergerak seluler yang sudah besar dan cukup dikenal oleh pelanggan seperti Telkomsel, Indosat dan Exelcomindo. Sementara untuk ARPU pasca bayar, sebagian justru mengalami peningkatan seperti pada Exelcomindo dan HTCP. Penurunan ARPU prabayar dari Exelcomindo dari 2006 ke 2009 mencapai 80,2% dengan rata-rata penurunan 32,2% per tahun. Sementara penurunan ARPU prabayar untuk Telkomsel dari 2006 ke 2009 mencapai 39,5% dengan penurunan rata-rata 16,1% per tahunnya. Sementara untuk pelanggan pasca bayar, ARPU Exelcomindo dari 2006 ke 2009 meningkat 297% dengan peningkatan rata-rata 92,3% per tahun. ARPU pasca bayar dari HTCP meningkat dari 2007 ke 2009 sebesar 70,1% dengan peningkatan rata-rata 31,8%. Jika

dilihat bahwa penambahan pelanggan juga paling banyak terjadi untuk jenis pelanggan pra bayar, maka hal ini sejalan dengan thesis bahwa peningkatan pelanggan berimplikasi pada penurunan ARPU dari operator.

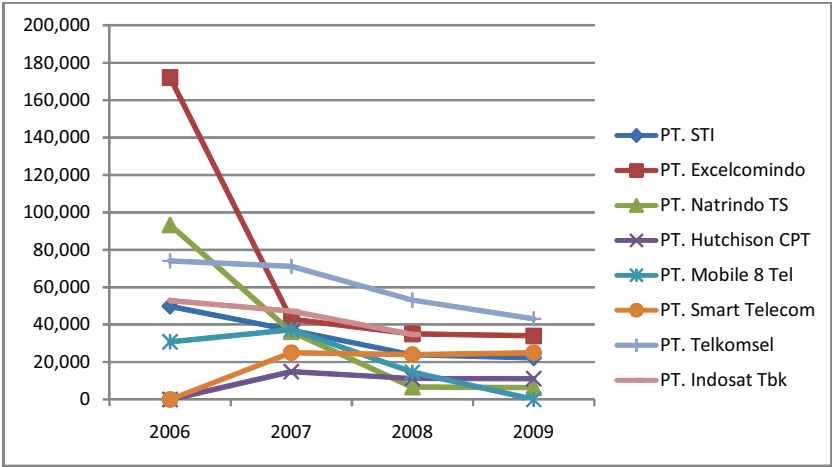
Beberapa operator baru juga mengalami penurunan ARPU untuk jenis pelanggan prabayar meskipun tidak signifikan seperti ditunjukkan oleh gambar 6.18. Penurunan ARPU prabayar ini diduga terkait dengan persaingan yang ketat antar operator yang salah satunya dalam bentuk kemudahan untuk menjadi pelanggan prabayar (biaya awal yang semakin murah dengan banyak fasilitas) sehingga membuat pelanggan mudah berpindah operator tanpa harus intensif memanfaatkan jasa operator tersebut

Tabel 6.11. Perkembangan ARPU Telepon Bergerak Seluler Tahun 2007 - 2009

No	Nama Operator	2007			2008			2009		
		Pra-bayar	Pasca bayar	Blended	Pra-bayar	Pasca bayar	Blended	Pra-bayar	Pasca bayar	Blended
1	STI	37.000	196.000	37.147	23.813	186.483	210.296	22.221	128.541	22.252
2	Excelcomindo	43.000	155.000	47.000	35.000	152.000	37.000	34.000	167.000	36.000
3	Natrindo Telepon Selular	36.124	48.351	41.666	6.500	0	6.500	6.300	-	6.300
4	Hutchison CPT	14.829	114.049	14.971	11.161	128.928	11.414	11.000	194.000	11.000
5	Mobile 8 Tel	37.218	115.312	39.791	14.495	73.963	17.621	-	-	-
6	Smart Telecom	25.000	110.000	45.000	24.000	55.000	26.000	25.000	52.000	26.000
7	Telkomsel	71.086	264.000	80.000	53.000	216.000	59.000	43.000	214.000	48.000
8	Indosat Tbk	47.028	182.682	52.828	34.654	182.147	38.282			36.032

\*) Sampai Desember 2009 kecuali untuk Bakrie dan Indosat sampai September 2009

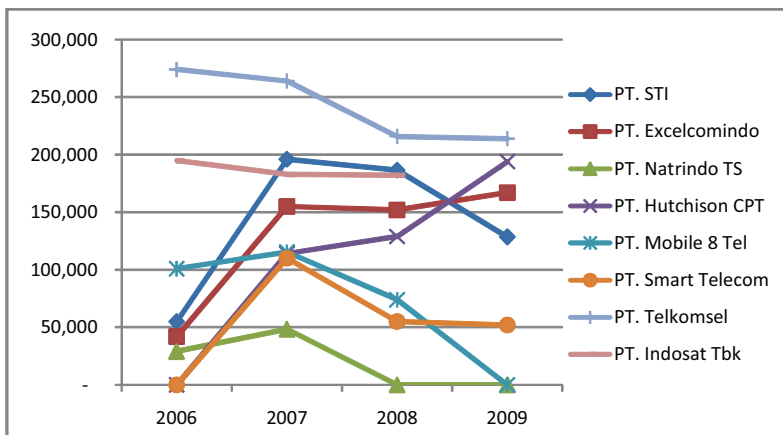
Gambar 6.18. Trend Perkembangan ARPU Prabayar Telepon Bergerak Seluler





Untuk pelanggan pasca bayar, ARPU penyelenggara telepon bergerak tidak terlalu menunjukkan trend penurunan. Gambar 6.19 menunjukkan untuk beberapa operator, ARPU pasca bayar justru menunjukkan kenaikan signifikan dari 2006 ke 2007 seperti yang dialami Exelcomindo dan terutama operator baru seperti Hutchinson, STI dan Smart Telecom meskipun kemudian menurun kembali pada tahun 2008. Namun penurunan ARPU prabayar ini pada tahun berikutnya pada beberapa operator tidak terlalu besar sehingga secara rata-rata pertumbuhannya masih positif seperti pada STI dan Exelcomindo. Bahkan untuk Hutchinson, ARPU prabayar-nya terus menunjukkan pertumbuhan yang positif sehingga menunjukkan trend peningkatan yang kuat. Hanya operator besar lama seperti Telkomsel dan Indosat yang menunjukkan trend penurunan ARPU dalam 3 tahun terakhir namun dengan penurunan yang relatif kecil. Namun untuk Mobile-8 dan STI, penurunan ARPU pasca bayarnya pada 2009 cukup besar

Gambar 6.19 Trend Perkembangan ARPU Pascabayar Telepon Bergerak Seluler



Kinerja penerimaan dengan indikator ARPU untuk telepon tetap kabel juga menunjukkan trend yang fluktuatif, meningkat pada tahun 2007 namun kemudian menurun pada tahun 2008. Pola ini dialami oleh hampir semua operator telepon tetap baik untuk telepon tetap kabel maupun telepon tetap nirkabel prabayar. Pada operator besar seperti PT. Telkom, penurunan ini terus berlanjut sampai dengan tahun 2009. Secara umum, untuk semua jenis, ARPU telepon tetap ini menunjukkan trend menurun dengan penurunan masing-masing 16,4% untuk telepon kabel, 14,3% untuk telepon nirkabel prabayar, 11,9% untuk telepon nirkabel pascabayar dan 16,9% untuk telepon nirkabel *blended*,

Tabel 6.12 menunjukkan untuk telepon tetap kabel, nilai nominal ARPU masih cukup tinggi terutama untuk PT. Telekom dan BBT. ARPU telepon tetap kabel Telkom sampai tahun 2009 masih sebesar Rp. 150.640, sementara ARPU telepon tetap kabel PT. BBT masih sebesar Rp. 776.198. Hal ini disebabkan bahwa untuk jenis telepon tetap kabel, sudah memiliki pelanggan tetap dengan peningkatan pelanggan yang tidak terlalu banyak. Akibatnya penggunaan oleh pelanggan tetap yang jumlahnya tidak sebanyak pelanggan telepon nirkabel atau bergerak menyebabkan ARPU-nya masih cukup tinggi. ARPU telepon nirkabel pasca bayar juga masih menunjukkan nilai nominal yang tinggi yaitu dalam kisaran Rp. 100.000. Sama seperti telepon tetap kabel, pelanggan telepon nirkabel juga merupakan pelanggan tetap dengan jumlah pelanggan yang tidak banyak. Sementara untuk pelanggan nirkabel Prabayar, menunjukkan nilai nominal ARPU yang tidak besar meskipun trend penurunannya sebenarnya juga tidak terlalu besar. Hal ini disebabkan jumlah pelanggan telepon nirkabel Prabayar yang cukup banyak sehingga ARPU cenderung kecil.

Tabel 6.12. Perkembangan ARPU Telepon Tetap

No	Operator	Tahun	Kabel	Nirkabel Prabayar	Nirkabel Pascabayar	Nirkabel Blended
1	PT. Telkom	2006	179.330	34.745	135.278	54.464
		2007	186.000	45.000	114.000	53.000
		2008	166.131	24.509	110.314	31.335
		2009	150.640	16.232	139.125	22.319
2	PT. Bakrie Telecom	2006	121.410	57.396	190.973	63.200
		2007	-	45.326	131.329	48.315
		2008	-	39.000	130.000	39.000
		2009*	-	32.520	106.577	33.380
3	PT. Batam Bintan Telekomunikasi	2006	1.023.000	-	-	-
		2007	856.000	-	-	-
		2008	776.198	-	-	-
4	PT. Indosat	2006	278.029	25.333	211.875	40.083
		2007	316.965	26.590	170.160	34.641
		2008	797	17.955	94.955	22.858
		2009	824	18.050	95.100	28.638

\*) Sampai September 2009

Dari sisi trend penurunannya, tabel 6.13 menunjukkan rata-rata penurunan ARPU per tahun menunjukkan pola yang berbeda antar telepon dan antar jenis jasa telekomunikasi/jenis pelanggannya. Pada PT. Telkom, penurunan ARPU rata-rata pertahun menunjukkan trend

penurunan paling kecil adalah untuk telepon tetap kabel dan terbesar pada telepon tetap nirkabel blended. Total penurunan dalam empat tahun terakhir juga menunjukkan pola yang sama dimana telepon tetap kabel paling rendah penurunannya dan nirkabel blended yang paling besar penurunannya. Sebaliknya untuk PT Indosat, penurunan terbesar ARPU justru terjadi untuk telepon tetap kabel dan penurunan paling kecil justru pada telepon tetap nirkabel dengan pola blended. Sementara untuk PT. Bakrie Telecom yang hanya menyelenggarakan jasa telepon tetap nirkabel, tidak menunjukkan perbedaan signifikan antara penurunan telepon tetap nirkabel Prabayar, pascabayar maupun blended. Namun catatan yang terpenting adalah terjadinya trend penurunan yang signifikan dalam ARPU telepon tetap baik kabel maupun nirkabel kecuali untuk nirkabel pasca bayar Telkom yang masing meningkat kembali di tahun 2009.

Tabel 6.13. Trend penurunan ARPU Operator Telepon Tetap 2006-2009

No.	Operator	Perubahan	Kabel	Nirkabel Prabayar	Nirkabel Pascabayar	Nirkabel Blended
1.	PT. Telkom	Rata-Rata per tahun	-5,4%	-16,6%	2,4%	-24,1%
		Total 2006-2009	-16,0%	-53,3%	2,8%	-59,0%
2.	PT. Bakrie Telecom	Rata-Rata per tahun		-17,2%	-16,8%	-19,1%
		Total 2006-2009		-43,3%	-44,2%	-47,2%
3.	PT.Indosat	Rata-Rata per tahun	-27,5%	-9,0%	-21,2%	-7,4%
		Total 2006-2009	-99,7%	-28,7%	-55,1%	-28,6%

### 6.3.6. Biaya Operasional Penyelenggara Telekomunikasi

Dari sisi biaya, penyelenggaraan telekomunikasi oleh operator salah satunya ditunjukkan dengan biaya operasional operator telepon tetap maupun bergerak. Tabel 6.14 yang menunjukkan perkembangan biaya operasional tiap operator menunjukkan kecenderungan biaya operasional yang semakin meningkat. Hal ini disebabkan oleh peningkatan jumlah pelanggan dan kapasitas terpasang sambungan yang dilakukan oleh masing-masing operator. Biaya operasional Telkom Group merupakan yang terbesar diantara operator lain karena mencakup penyelenggaraan layanan telepon tetap dan tetap bergerak, disamping juga karena besarnya kapasitas terpasang yang dimiliki dan jumlah pelanggan. Pada tahun 2008 biaya operasional Telkom Group mencapai hampir Rp. 39 triliun dan sampai kuartal III 2009 sudah mencapai Rp. 27,5 miliar. Untuk operator telepon bergerak seluler, Telkomsel juga menunjukkan biaya operasional yang paling besar dibanding operator lainnya. Pada tahun 2008 biaya operator Telkomsel sudah mencapai lebih dari Rp. 20 triliun sementara

Indosat baru hampir mencapai Rp. 14 triliun serta operator lainnya masih dibawah Rp. 5 triliun. Bahkan pada kuartal III 2009, biaya operasional Telkomsel telah mencapai Rp. 21 triliun. Peningkatan yang besar ini tidak terlepas dari peningkatan jumlah pelanggan yang dialami dan peningkatan kapasitas tersambungannya.

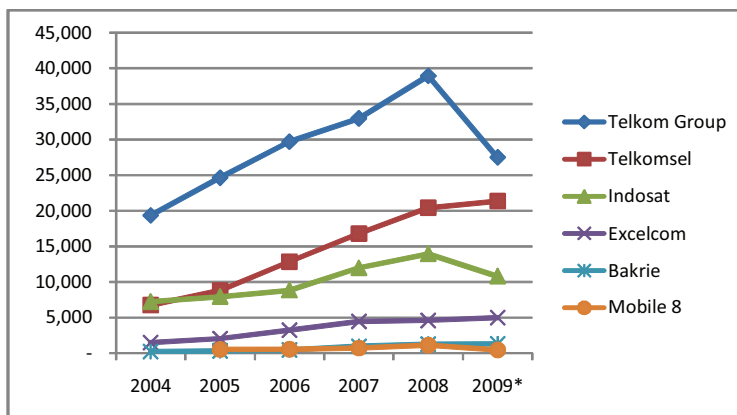
Tabel 6.14. Perkembangan Biaya Operasional Operator Telepon 2004 - 2009 (Rp. Miliar)

Operator	2004	2005	2006	2007	2008	2009*
Telkom Group	19.360	24.636	29.701	32.967	38.933	27.500
Telkomsel	6.745	8.771	12.836	16.792	20.425	21.350
Indosat	7.232	7.938	8.841	11.969	13.925	10.817
Excelcom	1.507	2.055	3.224	4.480	4.600	4.993
Bakrie	229	344	469	972	1.270	1.315
Mobile 8	N.A	530	560	715	1.119	445
Hutchinson					2.054	2.100
STI					344	530

\*) Sampai kuartal III tahun 2009.

Biaya operasional operator telepon terutama Telkomsel juga mengalami peningkatan pesat dan sejak tahun 2005. Dalam lima tahun terakhir, peningkatan biaya operasional Telkomsel mencapai 202,8%, dengan peningkatan rata-rata 32,3% per tahun. Sementara biaya operasional Indosat dari 2004 ke 2008 hanya meningkat 92,5% dengan peningkatan rata-rata 18,5% per tahun. Operator telekomunikasi yang memiliki pangsa pasar lebih kecil seperti Bakrie dan Mobile 8 juga menunjukkan biaya operasional yang semakin besar dengan peningkatan biaya yang cukup tinggi per tahunnya. Biaya operasional Bakrie Telecom bahkan meningkat hingga 454% dari tahun 2005 ke 2008 dengan peningkatan rata-rata 56,1% per tahun. Trend peningkatan biaya operasional Telkomsel, Exelcondo dan Bakrie Telecom terus berlanjut pada tahun 2009 dan diperkirakan dengan peningkatan lebih besar lagi. Hal ini dikarenakan sampai kuartal III 2009 saja biaya operasionalnya sudah lebih besar dari biaya operasional pada tahun 2008. Sementara untuk Indosat, biaya operasionalnya sampai kuartal III 2009 baru mencapai 70% dari biaya operasional tahun 2008.

Gambar 6.20 Trend Peningkatan biaya operasional operator telekomunikasi



### 6.3.7. Karyawan Operator Telekomunikasi

Sejalan dengan pertumbuhan pelanggan, penerimaan operasional dan biaya operasional, jumlah pegawai operator juga menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir. Pada sebagian besar operator, peningkatan ini diperkirakan terus berlanjut pada tahun 2009 kecuali untuk Telkomsel yang menunjukkan penurunan jumlah pegawai pada tahun 2009 seperti ditunjukkan tabel 6.15. Pada kelompok operator telepon seluler, Indosat memiliki jumlah pegawai paling banyak dibanding operator telepon seluler lainnya. Namun jumlah pegawai Indosat ini diduga adalah jumlah total pegawai Indosat yang mencakup bisnis lain diluar operator seluler.

Tabel 6.15. Perkembangan Jumlah karyawan Operator Telepon 2005 - 2009

Operator	2005	2006	2007	2008	2009*
Telkom*	28.179	27.658	25.361	25.016	29.091
Telkomsel	3.566	3.797	4.080	4.129	3.980
Indosat	8.137	7.786	7.645	7.700	7.815
Excelcom	1.867	2.042	2.136	2.114	2.047
Bakrie	544	743	1.485	1.671	1.715
Mobile 8	846	790	867	865	872
Hutchinson	-	-	-	N.A	650
STI	-	-	-	N.A	350

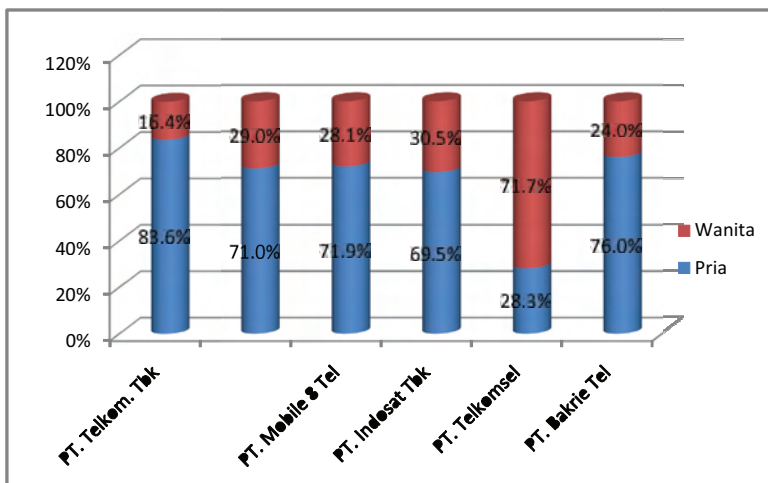
\*) Sampai September 2009

Dari sisi perkembangannya, jumlah pegawai Telkom Group dan Indosat juga menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Dalam lima tahun terakhir peningkatan jumlah pegawainya di kedua operator ini rata-rata hanya 0,1% per tahun. Peningkatan paling besar dialami oleh Bakrie Telecom yang dalam lima tahun terakhir peningkatan jumlah pegawainya rata-rata mencapai 35,2% per tahun. Dalam lima tahun, pegawai Bakrie Telecom telah meningkat sebanyak 292,4%. Peningkatan ini sejalan dengan ekspansi yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjangkau pelanggan dan meningkatkan kapasitas yang dimilikinya.

Peningkatan jumlah pegawai yang makin kecil menunjukkan persaingan yang semakin ketat antar operator telepon yang memaksa masing-masing perusahaan melakukan efisiensi untuk menekan biaya, termasuk dalam hal tenaga kerja.

Dari sisi komposisinya antara pria dengan wanita, hampir pada semua operator menunjukkan lebih banyak pegawai pria daripada wanita. Secara total dari enam operator telekomunikasi utama, proporsi pegawai pria mencapai 74,8% dan pegawai wanita hanya 25,2%. Proporsi karyawan pria terbesar ada di PT. Telkom seperti ditunjukkan oleh gambar 6.21 yang mencapai 83.6%. Namun hal yang menarik adalah bahwa di Telkomsel, proporsi pegawai wanita justru lebih besar daripada pegawai pria dengan proporsi 71,7% berbanding 28,3%.

Gambar 6.21. Komposisi Gender Pegawai Operator Telepon Tahun 2008



## 6.4. Wilayah Pelayanan Universal Telekomunikasi (WPUT)

### 6.4.1. Jumlah Desa Berdering WPUT

Dalam rangka meningkatkan akses dan keterjangkauan masyarakat terhadap sarana telekomunikasi dan pemanfaatan sarana telekomunikasi secara lebih luas, pemerintah melalui Departemen Komunikasi dan Informatika membuat sebuah program peningkatan keterjangkauan masyarakat terhadap telekomunikasi. Program ini merupakan implementasi dari Kebijakan Pelayanan Universal Telekomunikasi (*Universal Service Obligation/USO*) sebagai perwujudan Indonesia dalam melaksanakan komitmen ITU *Information Society Declaration*. Tema besar dari program ini adalah terwujudnya masyarakat berbasis telekomunikasi secara bertahap. Program ini dilaksanakan dalam bentuk penetapan desa-desa yang menjadi wilayah pelayanan universal telekomunikasi (WPUT), yaitu desa-desa yang belum mendapatkan akses yang memadai terhadap pelayanan telekomunikasi dan di targetkan untuk mendapat pelayanan telekomunikasi.

Dalam program ini telah ditetapkan 36.471 desa yang menjadi target wilayah pelayanan universal seperti ditunjukkan pada tabel 6.16 dan tersebar di seluruh Indonesia kecuali DKI Jakarta. Berdasarkan sebaran desanya, jumlah desa yang masuk program WPUT paling banyak berada di wilayah Sumatera, diikuti dengan Jawa. Meskipun wilayah di pulau Jawa relatif lebih mudah mengakses pelayanan telekomunikasi, namun ternyata masih banyak desa-desa yang belum terakses pelayanan telekomunikasi yang ditunjukkan dengan masih menjadi prioritas dalam program WPUT. Berdasarkan sebaran propinsinya, propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) menjadi propinsi yang paling banyak desanya masuk dalam program WPUT, diikuti dengan Sumatera Utara. Sementara untuk wilayah di luar Jawa dan Sumatera, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara menjadi propinsi paling banyak desanya masuk dalam program WPUT.

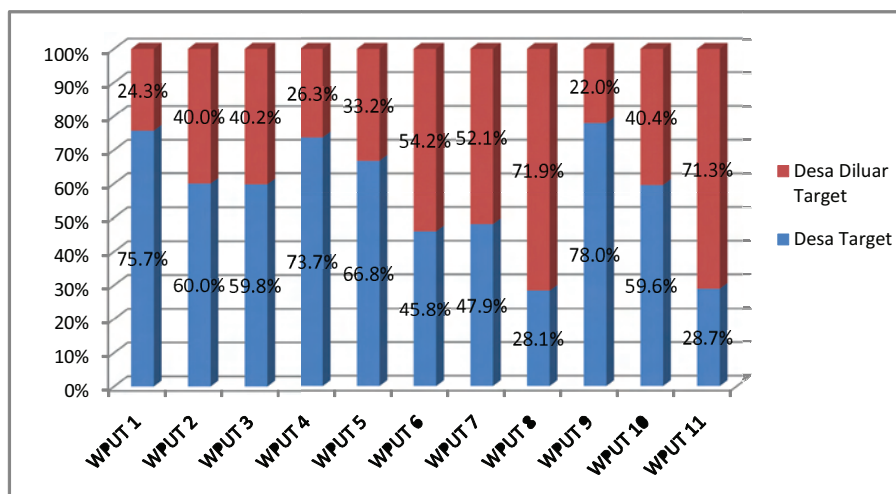
Jika dilihat dari proporsinya terhadap seluruh desa yang ada berdasarkan WPUT seperti ditunjukkan pada gambar 6.22, terlihat bahwa pada WPUT 9 dan WPUT 1, proporsi desa yang menjadi target program USO ini cukup besar. Lebih dari 75% desa di kedua WPUT ini yang mencakup wilayah NAD, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Maluku dan Maluku Utara menjadi target dari program USO pada 2009. Khusus untuk WPUT 9, hal ini menunjukkan

bahwa meskipun jumlah desa yang menjadi target WPUT tidak besar, namun proporsi atau cakupan terhadap total desa yang ada di wilayah tersebut cukup besar.

Tabel 6.16 Target Jumlah Desa untuk Program WPUT Tahun 2009

No	Propinsi	Σ Desa	No	Propinsi	Σ Desa	No	Propinsi	Σ Desa
1	NAD	5.264	12	Jabar	1.196	23	Sulsel	1.134
2	Sumut	3.561	13	Jateng	2.921	24	Sulbar	237
3	Sumbar	1.695	14	DIY	30	25	Sulteng	745
4	Jambi	838	15	Jatim	2.303	26	Sultra	1.053
5	Riau	872	16	Bali	201	27	Sulut	563
6	Kepri	90	17	NTB	247	28	Gorontalo	196
7	Babel	167	18	NTT	2.091	29	Maluku	720
8	Bengkulu	1.015	19	Kalbar	1.026	30	Malut	589
9	Sumsel	1.891	20	Kalteng	1.131	31	Irjabar	768
10	Lampung	805	21	Kaltim	879	32	Papua	247
11	Banten	666	22	Kalsel	1.330	<b>Total</b>		36.471

Gambar 6.22. Proporsi Desa Target Program DERING Tahun 2009 menurut WPUT

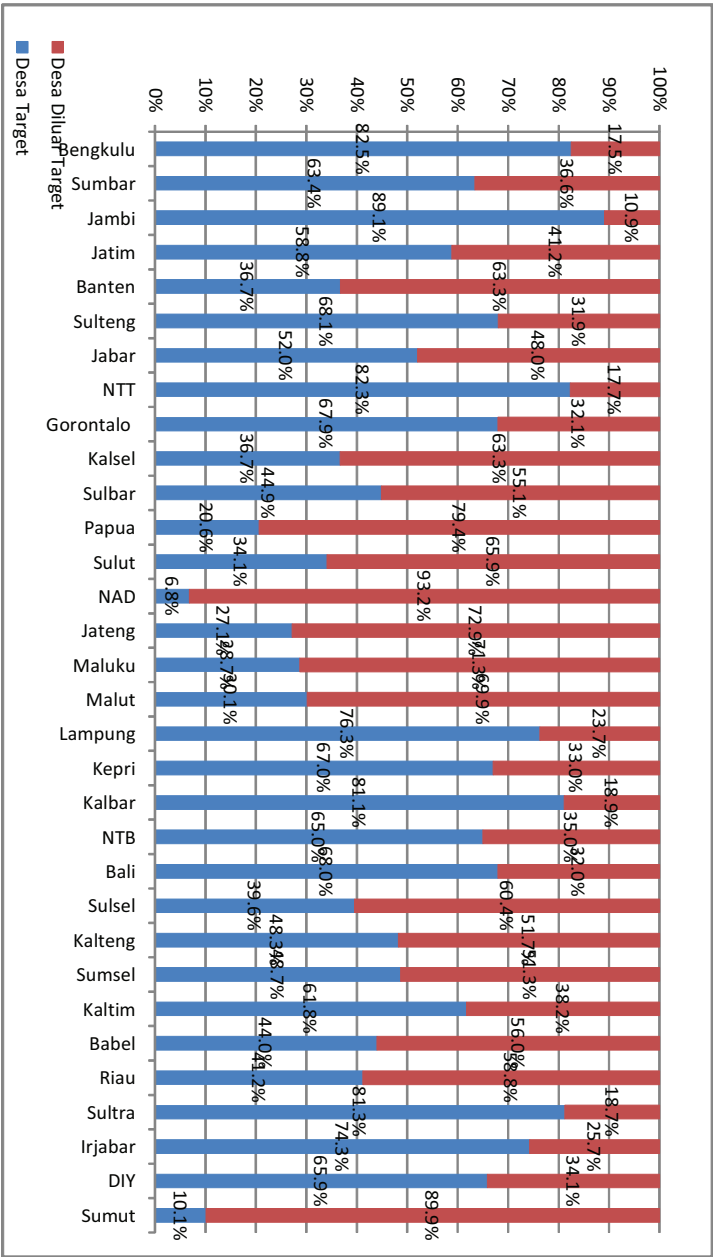


Meskipun memiliki akses relatif cukup baik terhadap pelayanan telekomunikasi dibanding kawasan timur Indonesia, namun Sumatera masih menjadi prioritas dalam program WPUT 2009. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dinamika masyarakat yang lebih berkembang dan membutuhkan dukungan jaringan telekomunikasi



Sementara propinsi-propinsi yang masuk dalam WPUT 8 dan WPUT 11 menjadi wilayah yang rendah proporsi desa yang masuk menjadi target program USO pada tahun 2009. Rendahnya coverage desa yang masuk dalam target program USO di WPUT 8 yang mencakup wilayah Papua dan Irian Jaya Barat disebabkan oleh kondisi geografis yang sangat sulit sehingga cukup berat untuk memberikan jangkauan layanan telekomunikasi. Namun untuk WPUT 11, rendahnya proporsi desa yang masuk program USO ini lebih disebabkan karena sebagian besar desa di wilayah ini sudah terjangkau oleh pelayanan telekomunikasi mengingat WPUT ini mencakup propinsi-propinsi di pulau Jawa. Sehingga meskipun jumlah desa di pulau Jawa yang masuk program USO cukup besar, namun proporsinya dibanding jumlah desa yang ada, relatif kecil karena sebagian besar desa sudah terjangkau layanan telekomunikasi.

Gambar 6.23. Proporsi Desa Target Program DERING Tahun 2009 menurut Propinsi

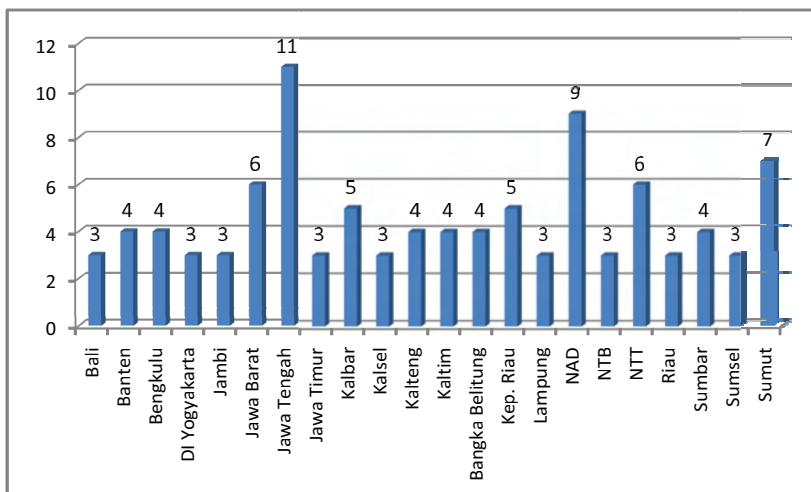


#### 6.4.2. Jumlah Desa PINTER

Program lain dalam rangka kewajiban pelayanan telekomunikasi yang dilakukan oleh pemerintah adalah program desa Pakai Internet (Desa PINTER). Program ini dibuat dalam rangka memperkenalkan dan memulai penterasi telekomunikasi melalui teknologi internet untuk mendukung kegiatan di pedesaan khususnya yang terkait dengan informasi ekonomi misalnya pertanian. Penyelesaian program Desa PINTER ini juga menjadi program 100 hari dari pemerintahan yang baru.

Sampai Desember 2009, telah 100 desa yang terealisasi untuk dapat menjangkau internet melalui program desa PINTER ini. Jumlah 100 desa dalam program DESA PINTER ini tersebar di 22 propinsi di wilayah Indonesia kecuali Sulawesi, Maluku dan Papua seperti ditunjukkan pada gambar 6.24. Dari sebaran tersebut, lokasi Desa PINTER paling banyak adalah di Jawa Tengah sebanyak 11 desa diikuti dengan NAD sebanyak 9 desa dan Sumatera Utara sebanyak 7 desa. Nusa Tenggara Timur juga mendapat alokasi yang cukup banyak yaitu 6 desa. Propinsi-propinsi di Pulau Jawa memang masih relatif banyak yang menjadi lokasi program Desa PINTER dimana 27% desa yang menjadi lokasi berada di Pulau Jawa. Hal ini mengingat teknologi internet masih merupakan hal yang baru bagi pedesaan dan belum banyak penetrasinya yang sampai ke desa kecuali untuk desa yang lokasinya berdekatan dengan kota.

Gambar 6.24. Jumlah Desa Program DESA PINTER Tahun 2009 menurut Propinsi



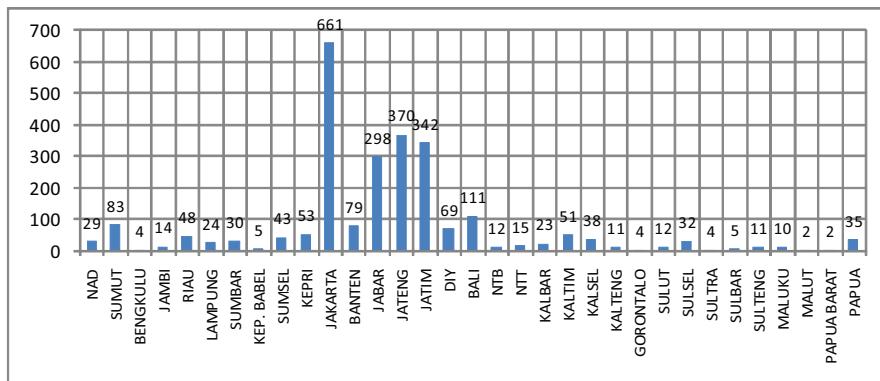
## 6.5. Pelayanan Internet

### 6.5.1. Internet Service Provider

#### A. Jumlah POP ISP

Sampai dengan akhir tahun 2008, terdapat 2530 POP ISP yang telah dibangun oleh penyelenggara Internet Service Provider (ISP). Sebaran dari POP yang dibangun oleh penyelenggara ISP tersebut masih banyak terpusat di Pulau Jawa. Hampir 80% dari POP yang telah dibangun berada di pulau Jawa dengan lokasi terbanyak di DKI Jakarta sebanyak 661 unit. Sebaran menurun propinsi juga menunjukkan propinsi-propinsi di Jawa merupakan lokasi yang paling banyak adanya POP ISP dengan terbanyak di Jakarta sebanyak 661 (26,1%), Jawa Tengah 370 (14,6%), Jawa Timur 342 (13,5%) dan Jawa Barat sebanyak 298 (11,8%). Propinsi di luar Jawa yang cukup banyak dibangunnya POP ISP adalah di Bali sebanyak 111 buah dan Sumatera Utara 83 buah. Sementara propinsi-propinsi di wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua masih sangat sedikit dibangunnya POP ISP. Dari sebaran ini terlihat bahwa sebaran lokasi dibangunnya POP ISP sangat terkait dengan tingkat dinamika kegiatan masyarakat khususnya bisnis dan pendidikan yang juga dicirikan oleh daerah perkotaan yang membutuhkan dukungan layanan internet.

Gambar 6.25. Sebaran lokasi POP ISP per Propinsi Tahun 2008



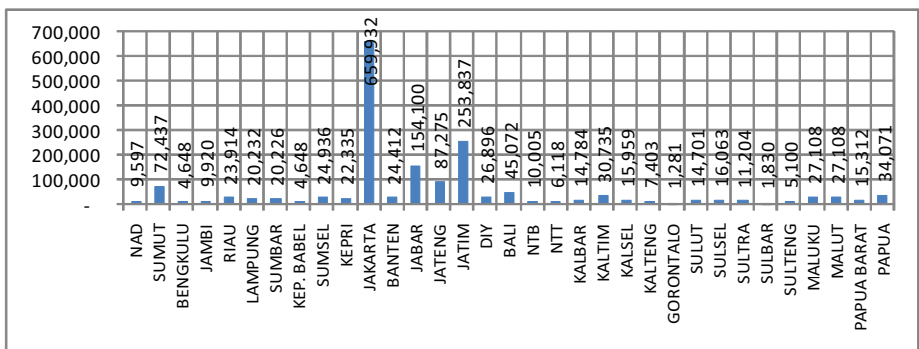
Data sebaran lokasi ISP seperti ditunjukkan oleh gambar 6.25 juga menunjukkan bahwa sampai tahun 2008, seluruh propinsi telah mendapatkan layanan ISP meskipun dengan intensitas yang berbeda. Propinsi-propinsi di Kawasan timur Indonesia misalnya intensitasnya lebih rendah karena jumlah POP ISP yang sangat sedikit. Namun untuk Papua

menunjukkan intensitas layanan internet yang cukup baik dengan jumlah POP ISP yang cukup banyak. Hal ini diduga terkait dengan keberadaan perusahaan pertambangan multinasional di propinsi tersebut yaitu di Timika.

### B. Pelanggan

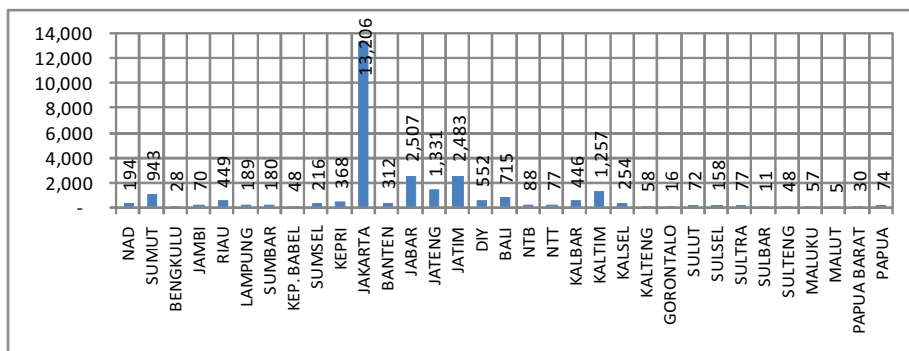
Jumlah pelanggan ISP di Indonesia telah mencapai jumlah lebih dari 1.7 juta pelanggan. Pelanggan ini tersebar di 33 propinsi di Indonesia dengan sebaran jumlah pelanggan berbeda antar daerah. Dan terdiri dari pelanggan perorangan (personal) dan pelanggan perusahaan (corporate). Sebagaimana sebaran POP ISP, pelanggan internet di Indonesia juga terkonsentrasi di Pulau Jawa. Untuk pelanggan personal, terbanyak ada di Propinsi Jakarta dengan jumlah pelanggan hampir 660 ribu orang. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan pelanggan di propinsi lain seperti terlihat pada Gambar 6.26. Urutan kedua jumlah pelanggan perorangan adalah di propinsi Jawa Timur dengan jumlah lebih dari 253 ribu pelanggan, diikuti oleh Jawa Barat dengan lebih dari 154 ribu pelanggan. Jumlah pelanggan yang cukup banyak di luar Jawa hanya di Sumatera Utara dengan lebih dari 72 ribu pelanggan. Jumlah pelanggan perorangan di Kawasan Timur Indonesia seperti di Sulawesi, Maluku dan Papua juga sudah cukup signifikan dengan lebih dari 10 ribu pelanggan kecuali di Sulawesi Barat, Gorontalo dan Sulawesi Tengah. Dari pola sebarannya, distribusi jumlah pelanggan internet perorangan ini memiliki korelasi dengan adanya kota-kota besar di propinsi tersebut seperti Jakarta, Surabaya, Bandung dan Medan.

Gambar 6.26 Sebaran Pelanggan Internet Perorangan Menurut Propinsi Tahun 2008



Untuk pelanggan internet perusahaan, gambar 6.27 menunjukkan populasinya masih sangat terkonsentrasi di Jakarta dengan jumlah pelanggan lebih dari 13 ribu perusahaan. Konsentrasi pelanggan internet perusahaan di Jakarta ini disebabkan oleh posisi Jakarta sebagai kota terbesar dan menjadi pusat kegiatan bisnis dan pusat pemerintahan. Sementara jumlah pelanggan internet perusahaan di propinsi lain masih sangat sedikit. Kecuali di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa tengah dan Kalimantan Timur, jumlah pelanggan internet perusahaan di propinsi lain masih kurang dari 1000 perusahaan. Bahkan di Papua yang jumlah pelanggan internet perorangannya mencapai lebih dari 34 ribu pelanggan, pelanggan internet perusahaannya hanya 74 perusahaan.

Gambar 6.27 Sebaran Pelanggan Internet Perusahaan menurut Propinsi Tahun 2008

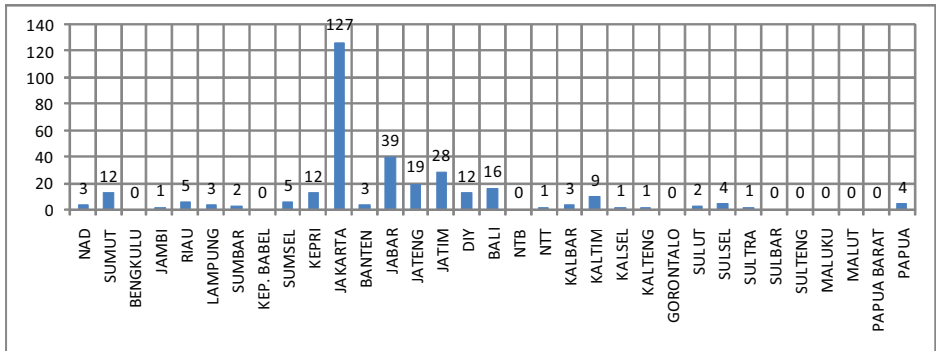


## 6.5.2. Network Access Provider (NAP)

### A. Jumlah POP NAP

Sebagaimana pelanggan POP ISP, sebaran jumlah POP NAP masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jumlah POP NAP yang sudah ada sampai tahun 2008 mencapai 313 POP dengan lokasi terbanyak di Jakarta yang mencapai 127 penyelenggara. Propinsi berikutnya dengan jumlah penyelenggara NAP terbesar adalah Jawa Barat dan Jawa Timur. Penyelenggaraan NAP masih sangat sedikit untuk wilayah di luar Jawa. Di luar Jawa, penyelenggaraan NAP yang cukup signifikan hanya di Sumatera Utara, Kepulauan Riau dan Kalimantan Timur. Hal ini diduga terkait dengan keberadaan kegiatan bisnis yang relatif cukup tinggi di propinsi ini dibanding propinsi lain.

Gambar 6.28 Sebaran Jumlah Penyelenggaraan NAP menurut Propinsi Tahun 2008

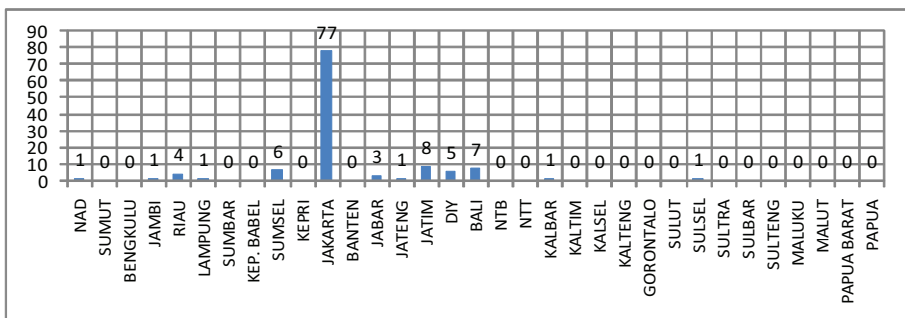


Meskipun jumlah penyelenggaraan NAP khususnya di beberapa propinsi luar Jawa masih sangat minim, namun jangkauan pelayanan NAP sudah menyebar ke seluruh Indonesia. Sampai dengan akhir tahun 2008, seluruh propinsi di Indonesia telah mendapatkan layanan NAP. Layanan tersebut berasal dari penyelenggaraan NAP yang berada di propinsi tersebut maupun dari propinsi tetangganya.

### B. Pelanggan

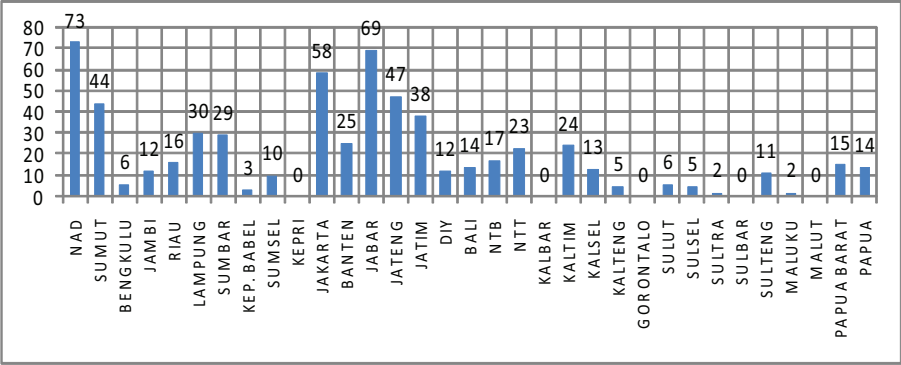
Dari 313 penyelenggaraan NAP di Indonesia, total jumlah pelanggan NAP di Indonesia sampai tahun 2008 telah mencapai 1797 pelanggan POP ISP. Sebaran pelanggan berdasarkan teknologi akses masih terkonsentrasi di Jawa terutama Jakarta. Ini terjadi untuk teknologi akses kabel, FO dan lain-lain. Khusus untuk satelit, sebaran pelanggan terbesar berada di NAD. Untuk penyelenggaraan NAP dengan kabel, jumlah pelanggan NAP dengan kabel ini sangat terkonsentrasi di Jakarta. Dari total pelanggan NAP kabel, 77 pelanggan berada di Jakarta. Pelanggan di propinsi lain jumlahnya tidak ada yang lebih dari 10.

Gambar 6.29 Sebaran Jumlah Pelanggan NAP dengan Kabel menurut Propinsi Tahun 2008



Pelanggan NAP dengan teknologi satelit lebih menyebar dibanding dengan teknologi kabel dan tidak hanya terkonsentrasi di Jawa. Meskipun propinsi-propinsi di Jawa menunjukkan jumlah yang relatif lebih banyak di propinsi lain, namun propinsi dengan pelanggan NAP dengan satelit terbanyak justru berada di NAD seperti terlihat di gambar 6.30. Propinsi lain dengan jumlah pelanggan NAP dengan satelit yang cukup banyak adalah Sumatera Utara, Lampung, Sumatera Barat, Kalimantan Timur dan NTT. Di Pulau Jawa, jumlah pelanggan NAP dengan satelit yang cukup banyak adalah di Jawa Barat, DKI Jakarta dan Jawa Tengah.

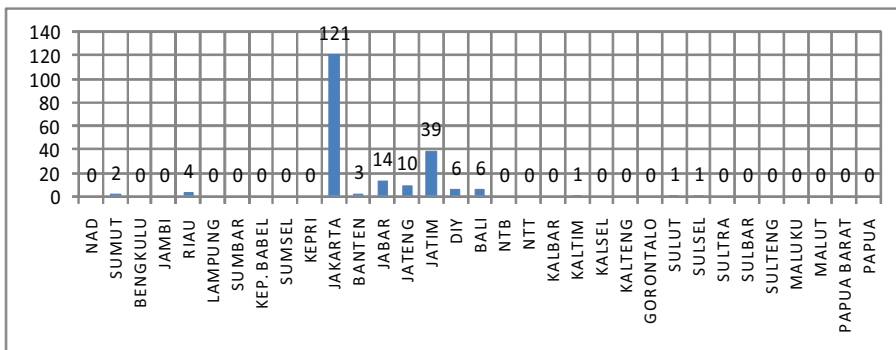
Gambar 6.30 Sebaran Jumlah Pelanggan NAP dengan Satelit menurut Propinsi Tahun 2008



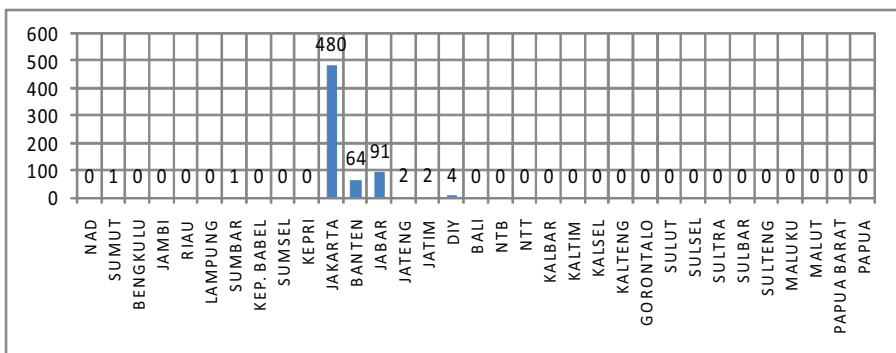
Pelanggan NAP dengan FO juga hanya terkonsentrasi di Jakarta, seperti juga pelanggan NAP dengan kabel. Selain di Jakarta yang terdapat 12 pelanggan NAP dengan kabel, jumlah pelanggan NAP yang signifikan hanya di Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Bahkan di luar Jawa ini banyak propinsi yang tidak terdapat pelanggan NAP dengan FO. Hal yang sama juga terjadi untuk pelanggan NAP dengan teknologi lainnya. Hanya terdapat tiga propinsi yang memiliki pelanggan NAP dengan teknologi lainnya yang cukup tinggi yaitu Jakarta dengan 480 pelanggan, Jawa Barat dengan 91 pelanggan dan Banten dengan 64 pelanggan. Secara geografis ketiga propinsi ini juga letaknya berdekatan. Sementara di banyak propinsi lain bahkan tidak terdapat pelanggan NAP dengan teknologi lain seperti terlihat pada gambar 6.32.



Gambar 6.31 Sebaran Jumlah Pelanggan NAP dengan FO menurut Propinsi Tahun 2008



Gambar 6.32 Sebaran Pelanggan NAP dengan teknologi lainnya menurut Propinsi Tahun 2008

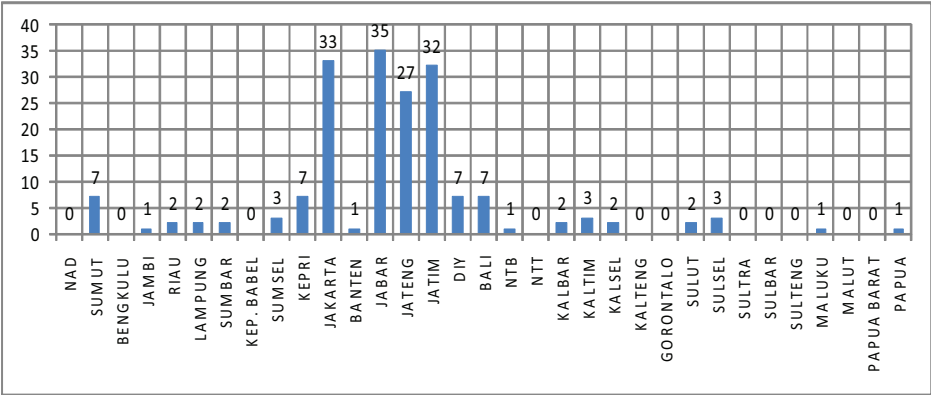


### 6.5.3. Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP)

#### A. Jumlah POP ITKP dan Cakupan Pelayanan ITKP

Pada tahun penyelenggaraan 2008, jumlah penyelenggaraan POP ITKP mencapai 181 POP. Dari jumlah tersebut, sebaran lokasi dari POP tersebut masih sangat terpusat di Pulau Jawa. Dari jumlah total penyelenggaraan POP ITKP, hampir 75% berada di Pulau Jawa. Penyelenggaraan POP ITKP paling banyak adalah di propinsi Jawa Barat dengan jumlah 35 buah atau sekitar 19,3% dari total, diikuti Jakarta sebanyak 33 (18,2%) dan Jawa Timur 32 (17,7%). Sementara penyelenggaraan POP ITKP di propinsi lain di luar Jawa masih kurang dari 10 buah dan hanya cukup banyak di Sumatera Utara, Kepulauan Riau dan Bali seperti terlihat pada gambar 6.33. Meskipun demikian, sampai tahun 2008 seluruh propinsi di Indonesia telah mendapatkan layanan ITKP.

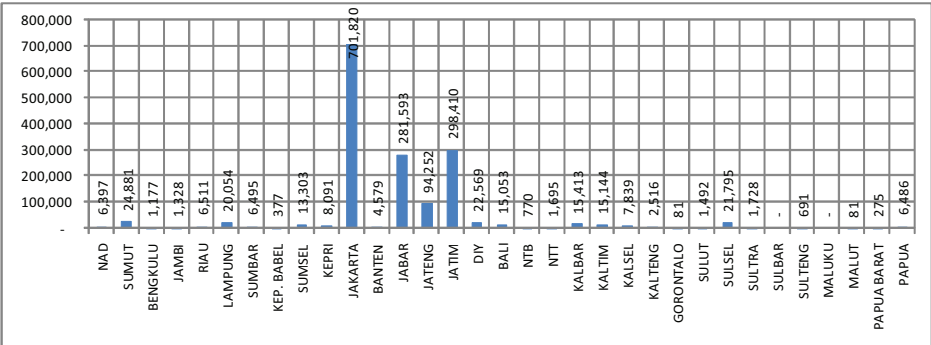
Gambar 6.33. Sebaran Penyelenggaraan POP ITKP menurut Propinsi Tahun 2008



**B. Pelanggan**

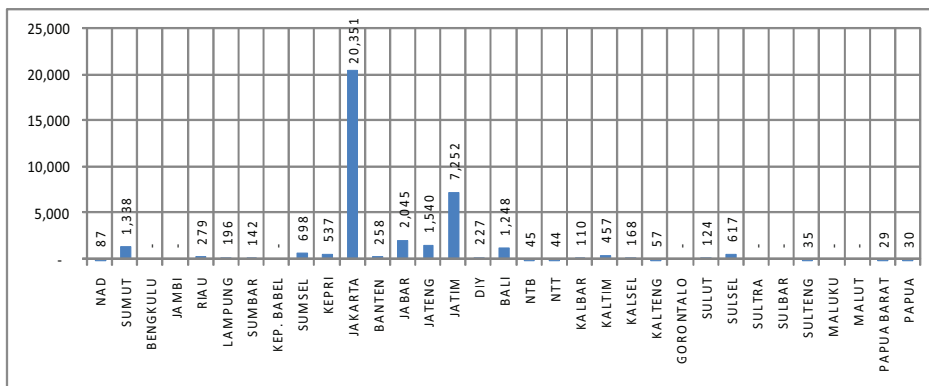
Dari sisi jumlah pelanggannya, sampai tahun 2008 jumlah pelanggan ITKP telah mencapai 1.6 juta pelanggan dimana 98 % adalah pelanggan personal dan hanya 2% pelanggan perusahaan. Sebaran pelanggan personal untuk ITKP ini juga masih terkonsentrasi di Pulau Jawa terutama di DKI Jakarta. Jumlah pelanggan ITKP perorangan di Jakarta sampai tahun 2008 telah mencapai lebih dari 700 ribu pelanggan dan jauh lebih besar daripada propinsi lain. Jumlah pelanggan ITKP perorangan di propinsi lain yang besar berikutnya adalah di Jawa Timur yang hampir mencapai 300 ribu pelanggan dan Jawa Barat yang mencapai lebih dari 281 ribu pelanggan. Sementara jumlah pelanggan ITKP perorangan di propinsi lain luar Jawa masih sangat rendah yaitu kurang dari 25 ribu pelanggan, Jumlah yang cukup menonjol hanya si Sumatera Utara, Lampung dan Sulawesi Selatan yang lebih dari 20 ribu pelanggan.

Gambar 6.34 Sebaran Jumlah Pelanggan ITKP Personal menurut Propinsi Tahun 2008



Jumlah pelanggan ITKP perusahaan jauh lebih sedikit daripada pelanggan ITKP perorangan dan hanya terpusat di Jakarta dan Jawa Timur. Jumlah pelanggan ITKP perusahaan di Jakarta mencapai lebih dari 20 ribu pelanggan dan jauh lebih banyak dibanding provinsi lain. Urutan berikutnya dengan jumlah pelanggan ITKP perusahaan terbanyak adalah Jawa Timur dengan lebih dari 7 ribu pelanggan. Jumlah pelanggan ITKP perusahaan di provinsi-provinsi di luar Jawa masih sangat rendah. Kecuali di Sumatera Utara dan Bali, jumlah pelanggan ITKP perusahaan di provinsi-provinsi di luar Jawa kurang dari 1000 perusahaan.

Gambar 6.35. Sebaran Jumlah Pelanggan ITKP Perusahaan menurut Provinsi Tahun 2008

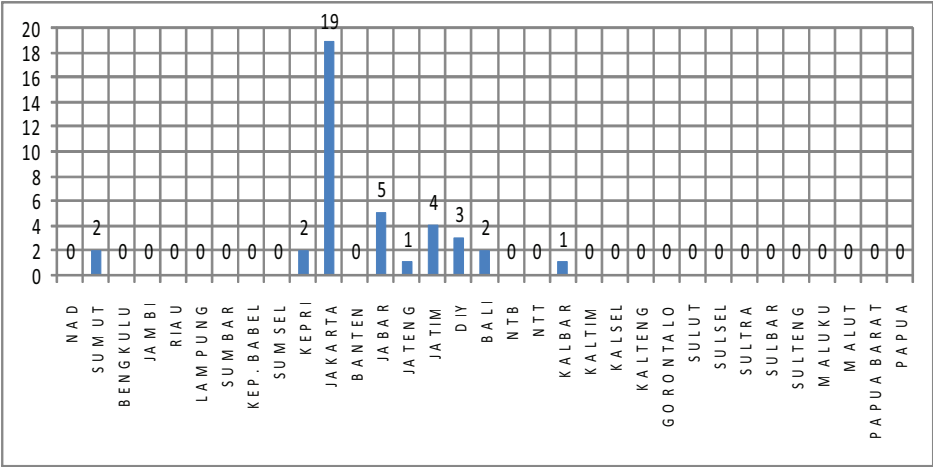


#### 6.5.4. Sistem Komunikasi Data (SISKOMDAT)

##### A. Jumlah POP SISKOMDAT

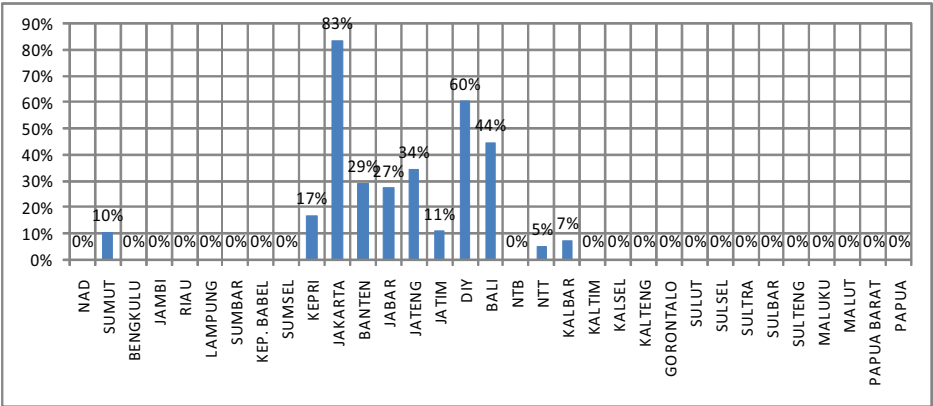
Pada tahun penyelenggaraan 2008, jumlah POP SISKOMDAT yang ada di Indonesia baru mencapai 39 POP. Dari jumlah tersebut, lokasi keberadaannya juga masih sangat terkonsentrasi di Pulau Jawa terutama Jakarta. Jumlah penyelenggara POP SISKOMDAT di Jakarta mencapai 19 buah atau sekitar separuh total POP SISKOMDAT yang ada. Sementara untuk penyelenggara POP SKD di Jawa proporsinya mencapai 83% dari total POP SISKOMDAT yang ada. Penyelenggaraan POP SKD di luar Jawa hanya terdapat di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Bali, dan Kalimantan Barat seperti terlihat pada gambar 6.36.

Gambar 6.36. Sebaran Penyelenggaraan POP SISKOMDAT menurut Propinsi Tahun 2008



Sejalan dengan sebaran penyelenggaraan POP SKD yang belum merata, cakupan wilayah layanan SISKOMDAT juga masih belum merata dan hanya berkumpul di pulau Jawa. Gambar 6.37 menunjukkan cakupan pelayanan Siskomdat yang tinggi hanya di pulau Jawa terutama di Jakarta yang mencapai 83% dan DI Yogyakarta (60%). Cakupan pelayanan Siskomdat yang cukup tinggi untu di luar Jawa hanya terdapat di Bali yang mencapai 44%. Bahkan di banyak propinsi di luar Jawa, masih belum terjangkau layanan Siskomdat.

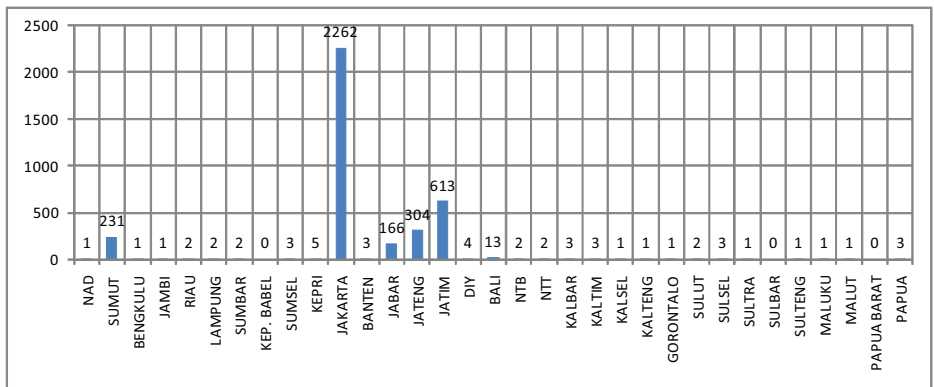
Gambar 6.37. Cakupan Wilayah Layanan Siskomdat menurut Propinsi Tahun 2008



### B. Jumlah Pelanggan SISKOMDAT

Seperti juga dengan jumlah penyelenggaraan POP SKD dan cakupan pelayanannya yang hanya terpusat di Jawa, jumlah pelanggan SISKOMDAT juga terkonsentrasi di Jawa. Dari total 3638 pelanggan pada tahun 2008 dimana sebaran pelanggan pun masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Proporsi pelanggan Siskomdat di Pulau Jawa mencapai 92% dari total pelanggan dan untuk Jakarta proporsinya mencapai 62.1%. Propinsi lain yang jumlah pelanggannya cukup tinggi adalah Jawa Timur dengan 607 pelanggan atau 16,8% dari total. Propinsi di luar Jawa yang cukup banyak jumlah pelanggan SISKOMDAT hanya Sumatera Utara sebanyak 229 pelanggan atau 6,3% dari total pelanggan.

Gambar 6.38 Sebaran Jumlah Pelanggan SISKOMDAT menurut Propinsi Tahun 2008



## Bab 7

# Bidang Frekuensi

Perkembangan sektor telekomunikasi khususnya telekomunikasi seluler yang sangat pesat serta perkembangan teknologi informasi yang cepat menyebabkan penggunaan frekuensi untuk berbagai kebutuhan juga menjadi semakin intensif. Penyajian data statistik bidang frekuensi ini dilakukan untuk memotret pola penggunaan spektrum frekuensi untuk berbagai keperluan serta penggunaannya berdasarkan service. Penggunaan pita frekuensi berdasarkan service akan dipetakan berdasarkan penggunaannya untuk tiap propinsi.

Disajikan juga data monitoring dan penertiban dari pelanggaran dalam penggunaan yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis Ditjen Postel sebagai wujud dari hasil pengaturan frekuensi oleh Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio Ditjen Postel sebagai regulator. Pengaturan dan penataan frekuensi dilakukan untuk menghindari terjadinya interferensi baik interferensi antar sistem maupun interferensi antar pengguna dalam suatu sistem. Pengaturan dan penataan frekuensi juga dilakukan untuk tujuan efisiensi penggunaan spektrum frekuensi sehingga tidak terjadi pemborosan dalam pemakaiannya. Selain itu perlu juga diketahui konsentrasi pemakaian spektrum berdasarkan pita maupun kanal agar diketahui seberapa banyak pemakaian dan seberapa besar yang masih kosong atau kurang pemanfaatannya, oleh karena itu diperlukan suatu analisa data statistik frekuensi dari frekuensi yang telah digunakan.

### 7.1 Ruang Lingkup

Data statistik Bidang frekuensi yang disajikan dalam laporan ini meliputi jumlah penggunaan spektrum frekuensi berdasarkan pita frekuensi, jumlah penggunaan spektrum frekuensi berdasarkan jenis penetapan frekuensi, dan jumlah penggunaan frekuensi berdasarkan peruntukannya. Keseluruhan data tersebut juga dipetakan penggunaannya menurut

propinsi. Selanjutnya juga dilakukan analisis untuk menghitung jumlah penggunaan frekuensi TV, Radio (AM/FM) dan GSM di tiap - tiap propinsi.

Statistik frekuensi yang ditampilkan dalam laporan ini meliputi :

- 1) Statistik penggunaan spektrum frekuensi berdasarkan pita frekuensi (misalnya VLF, LF, MF, HF, dst.) dan propinsi tahun 2007 - 2009;
- 2) Penggunaan frekuensi berdasarkan service dan subservice tahun 2007 - 2009;
- 3) Penggunaan frekuensi menurut kepulauan, propinsi, service dan subservice tahun 2009;
- 4) Jumlah penggunaan frekuensi TV, Radio AM, Radio FM dan GSM untuk tiap propinsi Tahun 2009;
- 5) Monitoring penggunaan frekuensi yang dilaksanakan UPT Tahun 2008 - 2009;
- 6) Tindakan penertiban terhadap pelanggaran penggunaan frekuensi UPT Tahun 2008 - 2009.

Data statistik frekuensi yang disajikan dan dianalisa dalam bab ini diperoleh langsung dari Direktorat Pengelolaan Spektrum Frekuensi Radio Ditjen Postel pada posisi data terakhir yaitu Desember 2009. Sementara data penduduk dan luas wilayah propinsi diperoleh dari Badan Pusat Statistik.

## **7.2. Konsep dan Definisi**

Sub bab ini berisi definisi dari terminologi yang digunakan dalam penyajian data frekuensi agar dapat memberi interpretasi yang sama terhadap terminologi yang digunakan.

1. Telekomunikasi adalah setiap transmisi, emisi atau penerimaan isyarat, sinyal, tulisan, gambar-gambar dan suara atau pernyataan pikiran apapun melalui kawat, radio, optik atau sistem elektromagnetik lainnya;
2. Spektrum Frekuensi Radio adalah susunan pita frekuensi radio yang mempunyai frekuensi lebih kecil dari 3000 GHz sebagai satuan getaran gelombang

elektromagnetik yang merambat dan terdapat dalam dirgantara (ruang udara dan antariksa);

3. Alokasi Spektrum Frekuensi Radio adalah pencantuman pita frekuensi radio tertentu dengan maksud untuk penggunaan oleh satu atau lebih dinas komunikasi radio terrestrial atau dinas komunikasi radio ruang angkasa atau dinas astronomi berdasarkan persyaratan tertentu;
4. Radio adalah istilah umum yang dipakai dalam penggunaan gelombang radio;
5. Gelombang Radio atau Gelombang Hertz adalah gelombang elektromagnetik dengan frekuensi yang lebih rendah dari 3 000 GHz, yang merambat dalam ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan;
6. Komunikasi radio adalah telekomunikasi dengan perantaraan gelombang radio;
7. Komunikasi radio terrestrial adalah Setiap komunikasi radio selain komunikasi radio ruang angkasa atau radio astronomi;
8. Komunikasi radio ruang angkasa adalah setiap komunikasi radio yang mencakup penggunaan satu atau lebih stasiun ruang angkasa, atau penggunaan satu atau lebih satelit pemantul ataupun objek lain yang ada di ruang angkasa;
9. Navigasi radio adalah Radio penentu yang digunakan untuk keperluan navigasi, termasuk pemberitahuan sebagai adanya peringatan tentang benda yang menghalangi;
10. Radio Astronomi adalah Astronomi yang berdasarkan penerimaan gelombang radio yang berasal dari kosmos.

### **7.3. Penggunaan Frekuensi (ISR)**

#### **7.3.1. Penggunaan Berdasarkan Pita Frekuensi**

Penggunaan frekuensi ISR secara kumulatif pada tahun 2009 menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi karena adanya kenaikan penggunaan yang signifikan dari kumulatif



penggunaan tahun 2008<sup>1</sup>. Peningkatan penggunaan frekuensi ISR berdasarkan pita frekuensi pada tahun 2009 mencapai 53% dibanding tahun sebelumnya dari 537.848 pada tahun 2008 menjadi 822.715 pada tahun 2009. Peningkatan penggunaan frekuensi (ISR) pada tahun 2009 ini terjadi pada hampir semua pita frekuensi, termasuk untuk pita MF yang pada tahun 2008 mengalami stagnasi penggunaan, pada tahun 2009 meningkat sebesar 86%. Peningkatan terbesar terjadi penggunaan pita frekuensi SHF yang mencapai 133% dibanding kumulatif penggunaan pada tahun 2008 seperti ditunjukkan pada tabel 7.1. Dari sisi komposisi, penggunaan pita SHF juga adalah yang terbesar dibanding jenis pita frekuensi lainnya.

Peningkatan yang terjadi pada penggunaan pita frekuensi SHF ini cukup signifikan pengaruhnya terhadap total penggunaan pada semua pita frekuensi. Hal ini dapat terjadi karena penggunaan pita frekuensi SHF pada tahun-tahun sebelumnya (2007 dan 2008) adalah yang terbesar kedua setelah pita frekuensi UHF. Dengan peningkatan sebesar 133%, maka secara absolut penurunannya juga cukup besar dan berdampak pada penurunan total penggunaan pita frekuensi. Peningkatan penggunaan frekuensi juga terjadi untuk penggunaan pita frekuensi UHF yang berada pada pita 3 GHz sampai 30 GHz.

Tabel 7.1. Jumlah Penggunaan Frekuensi (ISR) berdasarkan pita frekuensi

No.	Nama Spektrum	Pita Frekuensi	2007	2008	2009*
1	VLF	(3 kHz – 30 kHz)	N.A	N.A	0
2	LF	(30 kHz – 300 kHz)	N.A	N.A	0
3	MF	(300 kHz – 3 MHz)	454	454	845
4	HF	(3 MHz – 30 MHz)	17.466	17.795	24.122
5	VHF	(30 MHz – 300 MHz)	33.328	42.166	64.402
6	UHF	(300 MHz – 3 GHz)	264.758	354.726	447.353
7	SHF	(3 GHz - 30 GHz)	86.040	122.693	285.977
8	EHF	(30 GHz – 300 GHz)	14	14	14
	Jumlah		402.060	537.848	822.715

Data VLF (Very Low Frequency) dan LF (Low Frequency) tidak dapat dimunculkan karena penggunaan frekuensi rendah (kurang dari 300 kHz) menyangkut penggunaan untuk keperluan khusus seperti untuk keperluan militer dan tidak banyak bandwidth yang pada band ini dalam spektrum radio.

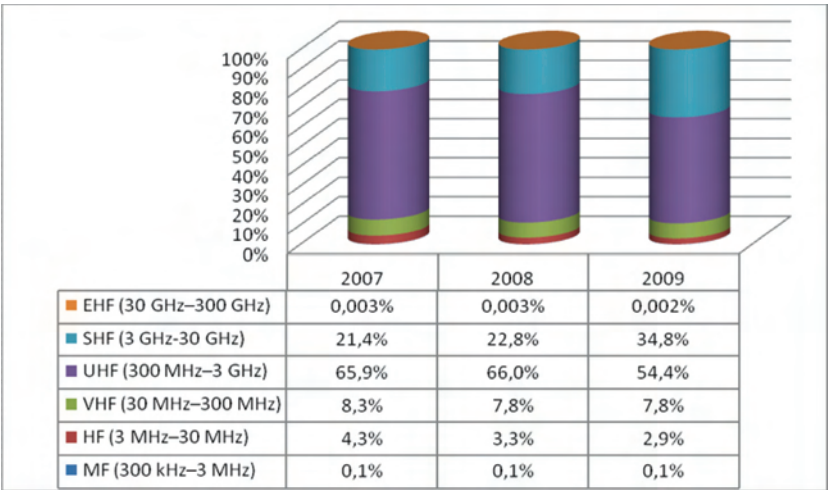
\*) Sampai 7 Januari 2010

<sup>1</sup> Penyajian data penggunaan pita frekuensi tahun 2009 pada buku statistik semester 2 ini menggunakan data kumulatif penggunaan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini berbeda dengan penyajian pada buku semester I dimana data yang disajikan untuk tahun 2009 adalah data riil dari query data yang dilakukan.

Penggunaan pada pita frekuensi ini pada tahun-tahun sebelumnya adalah yang terbesar. Sehingga meskipun dengan kenaikan hanya 26%, namun secara kumulatif penggunaannya pada tahun 2009 menjadi cukup tinggi.

Peningkatan yang besar pada penggunaan pita frekuensi SHF berdampak pada perubahan komposisi penggunaan pita frekuensi di Indonesia pada tahun 2009. Jika pada tahun-tahun sebelumnya, komposisi penggunaan pita frekuensi SHF baru sekitar 21%-22% dari total penggunaan, pada tahun 2009 proporsinya meningkat menjadi 34,8% seperti terlihat pada gambar 7.1. Pada saat yang sama, peningkatan yang tidak terlalu besar pada penggunaan pita UHF menyebabkan proporsinya mengalami penurunan. Proporsi penggunaan pita frekuensi UHF pada tahun 2009 menurun menjadi 54,4% dari total dibanding tahun 2007 dan 2008 yang mencapai lebih dari 65% seperti ditunjukkan gambar 7.1.

Gambar 7.1. Komposisi Penggunaan Frekuensi berdasarkan Pita Frekuensi.

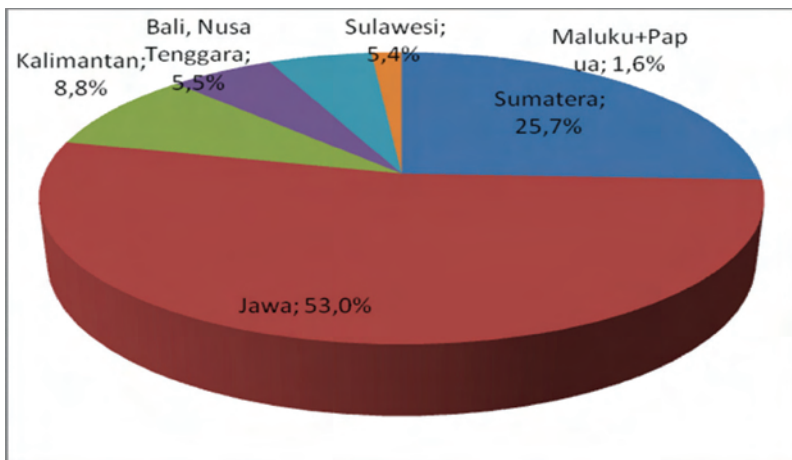


Jika dilihat dari penggunaannya menurut wilayah kepulauan, penggunaan pita frekuensi ISR untuk tahun 2009 paling banyak adalah di Pulau Jawa. Lebih dari separuh atau tepatnya 53% dari total penggunaan pita frekuensi adalah untuk pulau Jawa sebagaimana terlihat pada gambar 7.2. Penggunaan terbanyak berikutnya adalah di Pulau Sumatera yang proporsi penggunaannya mencapai 25,7% dari total. Proporsi yang besar pada kedua daerah ini dapat

dipahami mengingat banyaknya kegiatan-kegiatan yang membutuhkan penggunaan frekuensi di kedua pulau besar ini dibanding pulau besar lainnya. Khususnya Pulau Jawa yang merupakan lokasi pusat pemerintahan dan pusat kegiatan bisnis dengan jumlah penduduk yang sangat padat sehingga penggunaan pita frekuensi untuk berbagai penggunaan banyak terkonsentrasi disini.

Penggunaan pita frekuensi untuk pulau-pulau lainnya relatif kecil. Proporsi penggunaan frekuensi untuk Pulau Sulawesi misalnya hanya 5,4% dari total penggunaan frekuensi dan pulau Kalimantan hanya 8,8%. Bahkan untuk penggunaan frekuensi di Maluku dan Papua hanya 1,6% dari total penggunaan. Penggunaan frekuensi di Bali dan Nusa Tenggara sedikit lebih besar daripada penggunaan di wilayah Pulau Sulawesi meskipun wilayahnya lebih kecil. Kegiatan ekonomi dan bisnis yang lebih tinggi serta terkait dengan kepariwisataan diduga berpengaruh terhadap lebih besarnya penggunaan pita frekuensi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara dibanding penggunaan di wilayah Sulawesi.

Gambar 7.2. Penggunaan Pita Frekuensi menurut pulau besar



Kegiatan ekonomi dan bisnis yang lebih tinggi serta terkait dengan kegiatan pariwisata dan penunjangnya berpengaruh terhadap lebih besarnya penggunaan pita frekuensi di wilayah Bali dan Nusa Tenggara

Besaran penggunaan pita frekuensi menurut propinsi untuk masing-masing pita frekuensi ditunjukkan oleh Tabel 7.2. Dari tabel 7.2 terlihat bahwa Irian Jaya Barat menjadi daerah dengan jenis penggunaan pita frekuensi paling sedikit, Penggunaan pita frekuensi di Irian Jaya Barat hanya untuk pita frekuensi SHF dan UHF yang memang banyak digunakan. Sementara untuk Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Maluku Utara tidak ada penggunaan frekuensi untuk jenis pita EHF dan MF.

Tabel 7.2 dan gambar 7.3. juga menunjukkan bahwa hampir pada semua propinsi, penggunaan terbesar frekuensi adalah untuk jenis pita frekuensi SHF kecuali untuk penggunaan di wilayah Indonesia Timur seperti Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya Barat dan Papua. Proporsi penggunaan pita frekuensi SHF pada daerah-daerah yang dominan penggunaannya berkisar antara 41% sampai 64%. Untuk propinsi Irian Jaya Barat, penggunaan terbanyak adalah untuk pita frekuensi UHF dan propinsi Maluku adalah pita frekuensi VHF. Sementara untuk wilayah Maluku Utara dan Papua, proporsi terbesar adalah penggunaan untuk pita frekuensi HF.

Tabel 7.2. Penggunaan Pita Frekuensi per Propinsi tahun 2009

No	Propinsi	Pita Frekuensi					
		EHF	HF	MF	SHF	UHF	VHF
1	Babel		78		1.210	733	186
2	Bengkulu		59	4	967	550	248
3	Jambi		118	4	2.147	1.241	542
4	Kepri		54	1	2.379	1.394	457
5	Lampung		108	20	3.960	2.812	266
6	NAD		136	28	3.766	2.253	557
7	Riau		336	4	6.842	4.210	1.117
8	Sumbar		84	13	3668	1903	395
9	Sumsel		173	12	5091	2833	1141
10	Sumut		426	39	10.710	6.048	2.047
11	Banten		36	4	7.556	4.304	421
12	DIY		18	1	3.478	1.972	284
13	DKI Jakarta		378	9	19.567	10.187	895
14	Jawa Barat		180	64	25.315	13.878	2.182
15	Jawa Tengah		133	56	14.928	9.061	1.932
16	Jawa Timur		266	35	20.001	12.331	2.073
17	Bali		79	11	4.887	2.362	597
18	NTB		107	5	2.328	1.458	734
19	NTT		332	2	1.344	506	904

No	Propinsi	Pita Frekuensi					
		EHF	HF	MF	SHF	UHF	VHF
20	Kalimantan Barat		245	14	2.955	1.655	433
21	Kalimantan Selatan		81	16	2.611	1.262	860
22	Kalimantan Tengah		298	14	2.369	1.238	597
23	Kalimantan Timur		527	4	5.475	2.657	1.972
24	Sulawesi Utara		103	2	1.779	1.006	275
25	Sulawesi Tengah		147	7	1.108	608	368
26	Sulawesi Selatan*		127	15	4.476	2.541	614
27	Sulawesi Tenggara		47		788	540	302
28	Gorontalo		43		403	146	34
29	Maluku		305	2	387	260	453
30	Maluku Utara		115		82	74	103
31	Irian Jaya				30	43	
32	Papua		1.188	5	677	561	247

\*) Termasuk Sulawesi Barat yang merupakan Propinsi Pemekaran dari Sulawesi Selatan

Gambar 7.3. Komposisi penggunaan Frekuensi menurut Pita Frekuensi per Propinsi



### 7.3.2. Penggunaan Berdasarkan Service

Berbeda dengan penggunaan menurut pita frekuensi, penggunaan kanal frekuensi menurut service menunjukkan pola yang relatif sama dari tahun 2008 ke 2009. Penggunaan kanal frekuensi juga menunjukkan kecenderungan peningkatan untuk semua jenis service pada periode tersebut kecuali penggunaan untuk *Land Mobile (Private)* seperti terlihat pada Tabel 7.3. Secara total, meskipun penggunaan frekuensi menurut service menurun pada tahun 2008 dibanding tahun sebelumnya, namun penggunaannya pada tahun 2009 meningkat 34,1%. Penggunaan frekuensi menurun, service yang mengalami penurunan pada tahun 2008 namun meningkat kembali pada tahun 2009 terjadi untuk penggunaan *Broadcast* dan *Land Mobile (Public)*. Sementara penggunaan frekuensi untuk *Fixed Service* dan *Satellite* menunjukkan peningkatan penggunaan setiap tahunnya dengan pertumbuhan penggunaan rata-rata sebesar 34,8% dan 22,6% per tahun.

Tabel 7.3. Jumlah penggunaan kanal frekuensi menurut service 2007-2009 (kumulatif)

No.	Service	2007	2008	2009*
1	Aeronautical/Penerbangan	6		1.018**
2	Broadcast (TV & Radio)	1.754	1.737	1.805
3	Fixed Service	94.525	122.949	171.483
4	Land Mobile (Private)	50.761	40.092	33.321
5	Land Mobile (Public)	156.597	52.705	77.809
6	Maritim	4		6.268**
7	Satellite	548	627	682
	Total	304.195	218.110	292.386

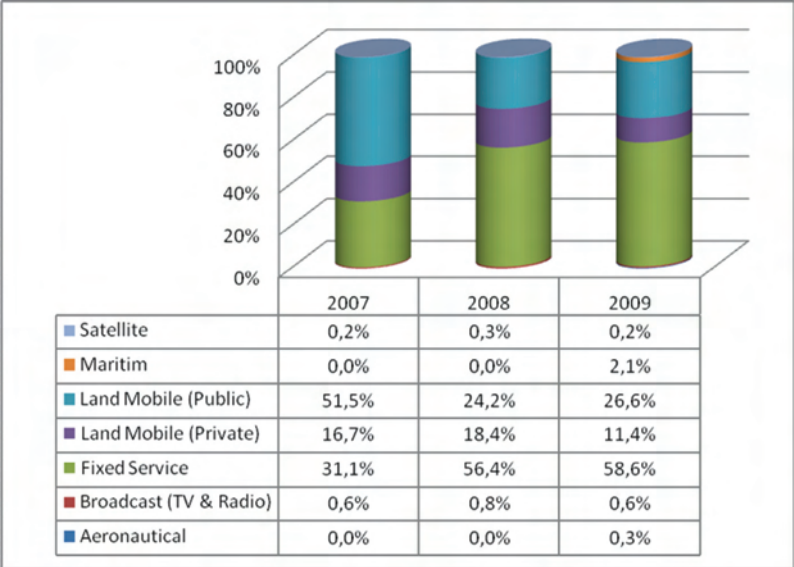
\*)Sampai 7 Januari 2010

\*\*) Merupakan data perhitungan ISR, bukan data jumlah frekuensi yang ditetapkan

Dari proporsi penggunaannya menurut service, juga tidak terjadi perubahan komposisi penggunaan frekuensi antara tahun 2008 dan 2009, namun komposisinya cukup berbeda dibanding tahun 2007. Gambar 7.4 menunjukkan bahwa pada tahun 2007, proporsi terbesar penggunaan frekuensi menurut service adalah untuk penggunaan *Land Mobile (Public)* yang penggunaannya mencapai 51,5% atau lebih dari separuh penggunaan. Sementara penggunaan untuk *fixed service* hanya 31.1%. Namun pada tahun 2008 dan 2009, peningkatan yang besar dalam penggunaan untuk *fixed service* menyebabkan proporsi penggunaannya meningkat dan menjadi yang paling dominan dibandingkan penggunaan untuk service lainnya. Pada tahun 2008 proporsi penggunaan frekuensi untuk *fixed service*

mencapai 56,4% dan pada tahun 2009 meningkat menjadi 58,6%. Sebaliknya proporsi penggunaan untuk *Land Mobile (Public)* menurun menjadi 24,2% pada tahun 2008 dan 26,6% pada tahun 2009.

Gambar 7.4 Komposisi penggunaan frekuensi menurut *service* tahun 2007-2009



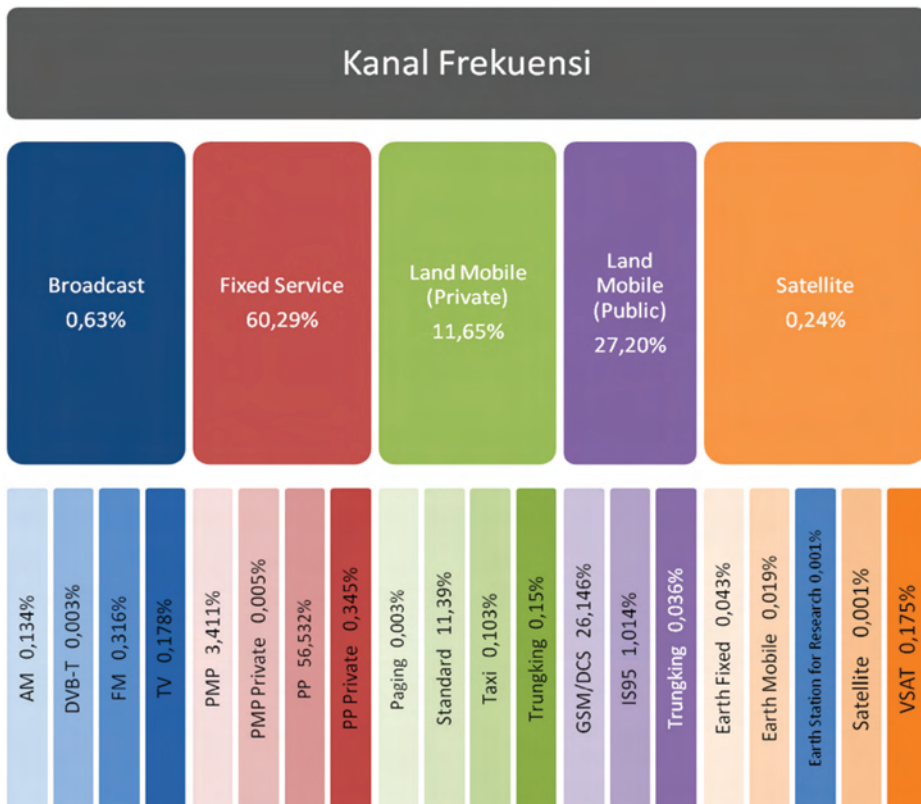
Gambar 7.4 menunjukkan bahwa proporsi penggunaan frekuensi untuk *service* lainnya diluar *Land Mobile (Public)*, *Land Mobile (Private)* dan *Fixed Service* menunjukkan proporsi yang rendah. Penggunaan frekuensi untuk jenis *service Satellite*, *Maritim*, *Broadcast* dan *Aeronautical* menunjukkan proporsi penggunaan yang kurang dari 5%. Bahkan hanya proporsi penggunaan untuk *Maritim* pada tahun 2009 yang lebih dari 1%, sementara untuk *service* lainnya dan tahun sebelumnya kurang dari 1%.

Gambar 7.5 menunjukkan penggunaan frekuensi sampai dengan tingkatan *subservice* pada tahun 2009. Dari gambar tersebut terlihat penggunaan terbesar frekuensi menurut *subservice* adalah untuk PP yang proporsinya mencapai 56,5% dari total penggunaan frekuensi menurut sub *service*. Artinya, lebih dari separuh penggunaan frekuensi adalah untuk *fixed service* PP. Jenis *subservice* lain yang penggunaan frekuensinya cukup signifikan adalah untuk *subservice GSM/DCS* pada kelompok *service Land Mobile (Public)* dengan



proporsi penggunaan mencapai 26,14% dan subservice standard pada kelompok service *Land Mobile (Private)* dengan proporsi penggunaan mencapai 11,4% dari total penggunaan menurut subservice. Semakin tinggi penggunaan frekuensi untuk subservice GSM/DCS sangat terkait erat dengan pertumbuhan telekomunikasi seluler yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir, sehingga berdampak pada penggunaan frekuensi GSM/DCS yang semakin besar. Proporsi penggunaan frekuensi untuk subservice lainnya tergolong kecil-kecil bahkan jauh dibawah tiga subservice tersebut. Penggunaan subservice lainnya kurang dari 1% kecuali untuk penggunaan ISR yang mencapai 1,1%. Penggunaan paling rendah adalah untuk satellite yang proporsinya hanya 0,002% dari total penggunaan frekuensi menurut subservice.

Gambar 7.5. Komposisi Penggunaan Frekuensi menurut Service dan Subservice Tahun 2009



### 7.3.3. Penggunaan Berdasarkan Propinsi

Penggunaan frekuensi berdasarkan subservice menurut propinsi juga menunjukkan bahwa pada semua propinsi, penggunaan terbesar dimasing-masing propinsi adalah untuk jenis subservice PP, PMP pada kelompok service Fixed Service, subservice standard pada kelompok service Land Mobile (Private) dan subservice GSM/DCS pada kelompok service Land Mobile (public). Penggunaan frekuensi (ISR) berdasarkan lokasi (propinsi) dan service/subservice ditunjukkan oleh tabel 7.4. Data pada tabel 7.4 tersebut belum termasuk penggunaan untuk service maritim karena sifat penggunaanya yang bergerak (*mobile*) sehingga tidak dapat ditetapkan lokasi (propinsi) penggunaanya. Penggunaan frekuensi di Irian Jaya Barat bahkan hanya menggunakan untuk service PP dan GSM/DCS dan tidak menggunakan jenis subservice lainnya.

Pada beberapa propinsi, penggunaan subservice GSM/DCS juga cukup signifikan meskipun secara rata-rata masih dibawah penggunaan untuk subservice PP. Penggunaan frekuensi untuk subservice GSM/DCS di Jawa Barat dan Jawa Timur misalnya lebih besar dari penggunaan frekuensi untuk subservice yang sama di wilayah Kalimantan dan Sulawesi. Penggunaan frekuensi untuk subservice GSM/DCS di Sulawesi Selatan juga sangat menonjol di wilayah Sulawesi dimana penggunaannya jauh lebih besar dibanding penggunaan subservice yang sama di propinsi lain di Sulawesi.

Dari tabel 7.4 terlihat bahwa penggunaan frekuensi masih terpusat dan didominasi oleh penggunaan di Pulau Jawa dibanding daerah lainnya dimana penggunaan di Jawa mencapai 53,02% dari total penggunaan frekuensi di seluruh Indonesia. Selain di Jawa, penggunaan frekuensi paling banyak ada di Sumatera yang penggunaannya mencapai 25,65% dari total penggunaan frekuensi. Jika dari sebaran penggunaanya menurut propinsi, daerah yang paling banyak menggunakan frekuensi adalah Jawa Barat bersama Jawa Timur dan DKI Jakarta. Proporsi penggunaan frekuensi di Jawa Barat mencapai 14,55% dari total penggunaan frekuensi menurut service di Indonesia. Sementara proporsi penggunaan frekuensi di Jawa Timur dan DKI Jakarta masing-masing mencapai 12,14% dan 10,87% dari total penggunaan frekuensi nasional. Diluar Jawa, penggunaan frekuensi paling banyak di Sumatera Utara yaitu sebesar 18.783 atau dengan proporsi 6,86% dari penggunaan frekuensi nasional

Tabel 7.4. Penggunaan Frekuensi menurut Propinsi, Service dan Subservice sampai Desember 2009 (satuan : pemancar stasiun radio)

Wilayah	Broadcast				Fixed Service			Land Mobile (private)				Land Mobile (public)				Satellite			Jumlah	
	AM	FM	TV	DVB-T	PMP Private	PP Private	PP	Paging	Taxi	Trunking	Standard	IS95	DCS	Trunking	Satellit	Earth Mobile	Earth Fixed	VSAT		
Babel		9	7	4	23		2	1.206			4	275		674		1		6	2.207	
Bengkulu	4	14			10			964			2	291		526		1		8	1.828	
Jambi		16			83		14	2.125		4	2	676	29	1.074				9	4.054	
Kepri	1	9	11		180		14	2.326		6	1	624	19	1.079	4		2	13	4.289	
Lampung	20	28	19		198			3.956			2	379	195	2.365				5	7.167	
NAD	28	36	39		114		11	3.729		7	30	675	1	2.036	7		10	18	6.741	
Riau	4	24	21		213		7	6.791			71	1.986	78	3.257	11	1	8	14	12.517	
Sumbang	13	22	15		178			3.677	5	12	2	447	2	1.676			2	12	6.063	
Sumsel	12	34	20		215		2	5.077		6	3	1.403	156	2.318	1	1	2	8	9.258	
Sumut	39	68	11		444		9	10.680		11	1	2.616	142	5.221	1		10	20	19.273	
Sumatera	125	260	163	-	1.658	7	82	40.531	5	46	118	9.372	622	20.226	24	1	6	38	113	73.397
Banten	4	14	4		604		87	7.446		4	9	620	136	3.375	13		1	5	12.322	
DIY	1	36	14		195		25	3.443		18	5	274	79	1.658				4	5.754	
DKI Jakarta	8	44	7		1.527	1	187	19.198	3	88	136	2.161	386	7.231	13	1	9	18	80	31.105
Jawa Barat	63	113	28		1.864	7	188	25.055		21	22	2.721	422	11.076	10		2	25	41.637	
Jawa Tengah	56	124	38		693		134	14.810		18	8	2.137	466	7.631	2			5	26.122	
Jawa Timur	35	110	34		1.867		105	19.908		58	42	2.609	517	9.383	2	2		8	46	34.746
Jawa	167	443	125	8	6.790	8	726	89.860	3	207	221	10.522	2.006	40.354	40	3	12	26	165	151.686
Kalbar	13	17	28		149		8	2.934	1		2	701		1.441			1	33	5.328	
Kalsel	16	9	21		99		10	2.596		1	4	927	40	1.086	1	18		4	4.831	
Kalteng	14	25	18		80		8	2.354		1	4	877	11	1.118			2	5	4.516	
Kaltim	3	25	12		199		69	5.402		2	38	2.819		2.000	37		15	2	29	10.652
Kalimantan	46	76	79	-	527	-	94	13.286	1	3	48	5.324	51	5.645	38	-	33	5	71	25.327
Bali	11	27	11		266		27	4.838		4	5	736	110	1.893	1		3	17	7.949	
NTB	5	13	4		36		9	2.315		4	2	929	9	1.294			12	4.632		
NTT	2	17	4		13		6	1.322		5	2	1.216		468			9	25	3.089	
Bali, Nusa Tenggara	18	57	19	-	315	-	42	8.475	-	13	9	2.881	119	3.655	1	-	-	12	54	15.670
Gorontalo		4	2		10		4	397		1	2	74		131				1	626	
Sulsel	15	17	24		300		20	4.435		15	5	788	68	2.070			3	16	7.776	
Sulteng	7	9	29		18		4	1.094		6	2	485		576			3	7	2.240	
Sultra	4	15	26		78			778			2	338		504			3	2	6	1.678
Sulut	2	13	24		78		10	1.748		4	5	381	34	847				2	20	3.168
Sulawesi	24	47	94	-	432	-	38	8.452	-	26	16	2.066	102	4.128	-	-	3	10	50	15.488
Irian Jaya								30						43					73	
Maluku	2	7	5		17		6	373		4		752	208				11	22	1.407	
Maluku Utara					1			80				214		71				2	4	374
Papua	2	12	24		19			637			14	1.456		475	1		18	22	2.680	
Maluku+Papua	4	21	29	-	37	-	6	1.120	-	-	18	2.422	-	797	1	-	-	31	48	4.534
Sub Total	384	904	509	8	9.759	15	988	161.724	9	295	430	32.587	2.900	74.805	104	4	54	122	501	286.102
Total				1.805				172.486				33.321		77.809				681		286.102

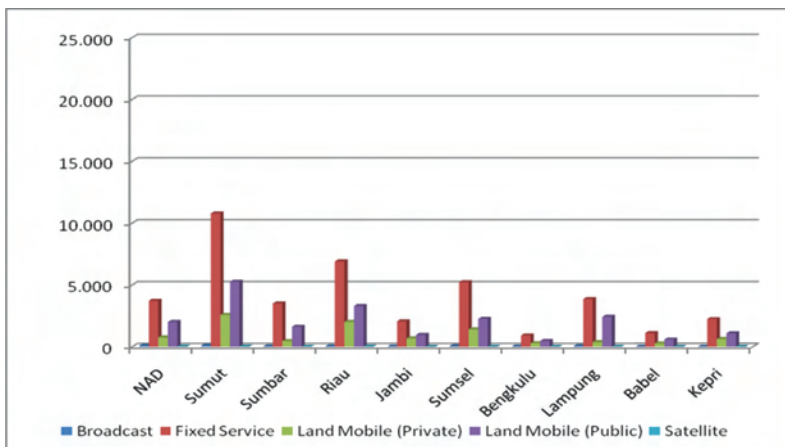
\*) Tidak termasuk penggunaan untuk maritime dan aeronautical service karena sifatnya yang bergerak (mobile) yang tidak dapat ditetapkan lokasinya.

Penggunaan frekuensi menurut service yang tinggi di Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta Daerah erkait kuat dengan banyaknya daerah perkotaan di wilayah tersebut dengan penduduk yang juga padat serta intensitas kegiatan masyarakat yang cukup tinggi.

#### 7.3.4. Pola Penggunaan menurut Wilayah Kepulauan

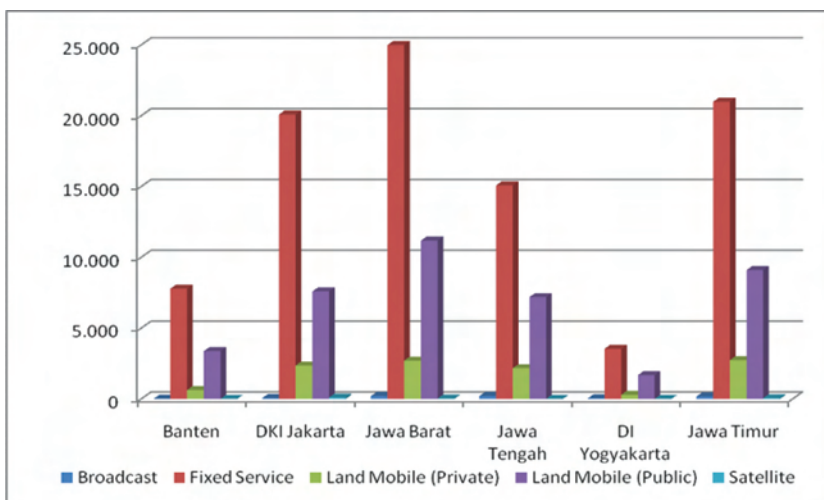
Penggunaan frekuensi menurut service menunjukkan pola dan intensitas yang berbeda antar wilayah kepulauan. Gambar 7.6 yang menunjukkan penggunaan frekuensi menurut service untuk wilayah kepulauan Sumatera menunjukkan intensitas penggunaan pada level menengah. Pada wilayah ini, penggunaan frekuensi menurut service yang terbesar adalah dua propinsi Sumatera Utara, diikuti dengan propinsi Riau , Sumatera Selatan dan Lampung. Jika dilihat dari propinsi dengan penggunaan frekuensi yang besar, secara implisit menunjukkan bahwa daerah-daerah dengan penggunaan frekuensi yang besar juga menunjukkan tingkat perkembangan yang lebih maju dan dinamika sosial ekonomi masyarakat yang lebih tinggi. Dari sisi jenis service yang digunakan, penggunaan frekuensi untuk Fixed service juga masih yang paling tinggi di semua propinsi di wilayah ini. Penggunaan jenis Fixed service yang paling tinggi di wilayah ini juga diikuti dengan penggunaan total frekuensi yang paling tinggi. Hal ini dapat dipahami mengingat penggunaan untuk fixed service ini sangat dominan dibanding service lainnya.

Gambar 7.6. Penggunaan Frekuensi menurut Service di wilayah Sumatera



Penggunaan frekuensi menurut service di Jawa masuk dalam kategori penggunaan frekuensi dengan intensitas yang berada pada level yang tinggi. Penggunaan frekuensi menurut service secara total di propinsi-propinsi di wilayah ini bahkan diatas 10 ribu stasiun pemancar kecuali propinsi Yogyakarta. Pada beberapa propinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur dan DKI Jakarta yang memang merupakan tiga propinsi pengguna frekuensi terbesar, penggunaan untuk Fixed service mencapai lebih dari 20 ribu stasiun pemancar. Penggunaan frekuensi yang tinggi di propinsi-propinsi di wilayah Jawa ini berkorelasi positif dengan kepadatan penduduk yang tinggi dan kegiatan masyarakat yang banyak. Dari sisi jenis penggunaan, disamping penggunaan frekuensi untuk jenis fixed service yang memang paling dominan, penggunaan untuk Land Mobile (Public) khususnya yang berasal dari subservice GSM/DCS juga cukup signifikan di propinsi-propinsi di wilayah ini.

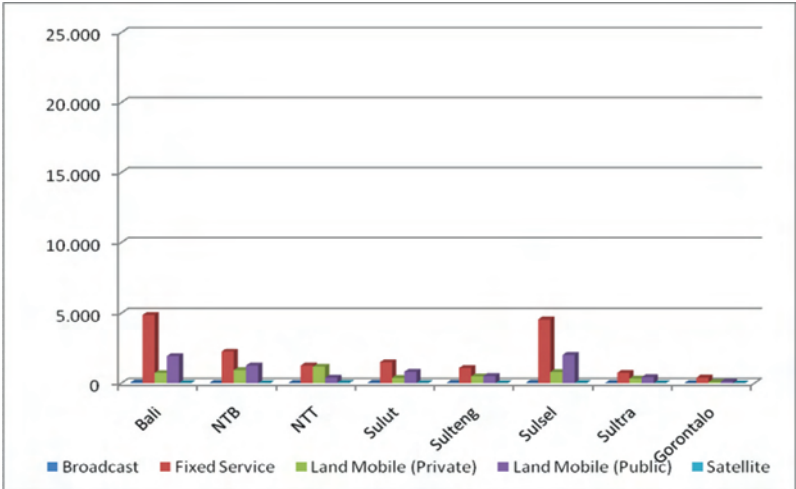
Gambar 7.7. Penggunaan Frekuensi menurut Service di wilayah Jawa



Gambar 7.8 menunjukkan penggunaan frekuensi menurut service di wilayah Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara. Dari gambar tersebut terlihat bahwa penggunaan frekuensi menurut service pada wilayah tersebut pada tahun 2009 ini memiliki intensitas penggunaan yang berada pada level rendah. Penggunaan frekuensi hanya cukup menonjol di propinsi Bali dan Sulawesi Selatan khususnya yang berasal dari penggunaan untuk service untuk fixed service dan Land Mobile (Public). Meskipun demikian, total penggunaan kanal frekuensi di kedua propinsi tersebut masih kurang dari 8000 stasiun radio pemancar. Meskipun kedua propinsi

tersebut relatif cukup maju dan berkembang, namun kepadatan daerah perkotaan yang tidak sebanyak di Jawa dan kepadatan penduduk yang tidak begitu tinggi menyebabkan intensitas penggunaan frekuensi di wilayah ini masih belum tergolong cukup tinggi.

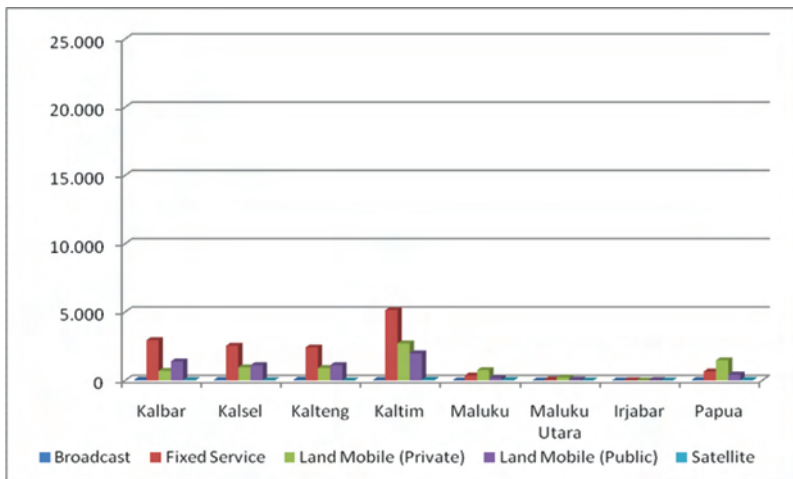
Gambar 7.8. Penggunaan Frekuensi menurut Service di wilayah Bali, Nusa Tenggara dan Sulawesi



Sebagaimana penggunaan frekuensi untuk service di wilayah Pulau Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, penggunaan frekuensi untuk service di wilayah Kalimantan, Maluku dan Papua juga termasuk memiliki intensitas penggunaan dalam kategori yang masih rendah, terutama untuk kawasan Timur Indonesia (Maluku dan Papua). Penggunaan frekuensi untuk service hanya menonjol di Propinsi Kalimantan Timur dengan penggunaan frekuensi untuk fixed service, land mobile (private) dan land mobile (public) cukup signifikan. Gambar 7.9 yang memperlihatkan penggunaan frekuensi menurut service di wilayah Kalimantan. Maluku dan Papua juga menunjukkan terjadinya ketimpangan dalam penggunaan frekuensi menurut service antara wilayah Kalimantan dan Maluku-Papua. Meskipun masih dalam tingkatan yang rendah, namun penggunaan frekuensi di wilayah Kalimantan masih jauh lebih tinggi daripada penggunaannya di wilayah Maluku-Papua. Perbedaan kepadatan penduduk dan kegiatan sosial-ekonomi masyarakat diduga menjadi penyebab perbedaan yang cukup tajam dalam penggunaan frekuensi untuk service di kedua wilayah kepulauan ini.

Dari sisi penggunaan, jenis penggunaan frekuensi menurut service juga menunjukkan pola yang sama dengan wilayah kepulauan lainnya dimana penggunaan untuk fixed service, diikuti dengan penggunaan untuk land mobile (public) dan land mobile (private). Namun pada beberapa daerah terdapat perbedaan pola penggunaan yang cukup terlihat. Di propinsi-propinsi di Kalimantan, penggunaan frekuensi untuk land mobile (private) ternyata cukup signifikan dan hampir mendekati penggunaan untuk land mobile (public). Penggunaan frekuensi untuk land mobile (private) di Kalimantan Timur bahkan melebihi penggunaan untuk land mobile (publik). Bahkan penggunaan frekuensi untuk land mobile (private) di propinsi Maluku dan Papua paling besar dibanding penggunaan untuk service lainnya. Perbedaan pola ini terjadi karena penggunaan subservice GSM/DCS di wilayah ini lebih rendah, sementara penggunaan subservice standard justru lebih besar. Pertanyaannya adalah apakah ini terkait dengan kegiatan usaha pertambangan yang banyak dikembangkan di wilayah ini.

Gambar 7.9. Penggunaan Frekuensi menurut Service di wilayah Kalimantan, Maluku dan Papua



Perbedaan pola penggunaan frekuensi secara keseluruhan menurut service di wilayah Kalimantan, Maluku dan Nusa Tenggara dengan wilayah lainnya adalah karena pengaruh penggunaan subservice GSM/DCS yang lebih rendah di wilayah ini, sementara penggunaan subservice lainnya justru lebih tinggi. Hal ini diduga terkait dengan wilayah yang luas dengan kepadatan penduduk yang rendah

## **7.4. Perbandingan Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah**

Perbandingan penggunaan spektrum frekuensi radio antar propinsi dengan membandingkannya dengan jumlah penduduk dan luas wilayah perlu dilakukan agar dapat diketahui penyebaran penggunaan dan peruntukan frekuensi di suatu daerah. Daerah dengan spektrum frekuensi radio yang banyak tersebar pada wilayah yang tidak luas bisa jadi disebabkan oleh penduduknya yang padat dan kebutuhan penduduk atas frekuensi tersebut cukup tinggi untuk mendukung aktivitasnya. Demikian juga sebaliknya pada daerah yang menggunakan frekuensi sedikit. Pada bagian ini, perbandingan pengukuran penggunaan frekuensi dilakukan terhadap beberapa subservice utama yaitu frekuensi TV, Radio AM, Radio FM dan GDM/DCS.

### **7.4.1. Frekuensi TV**

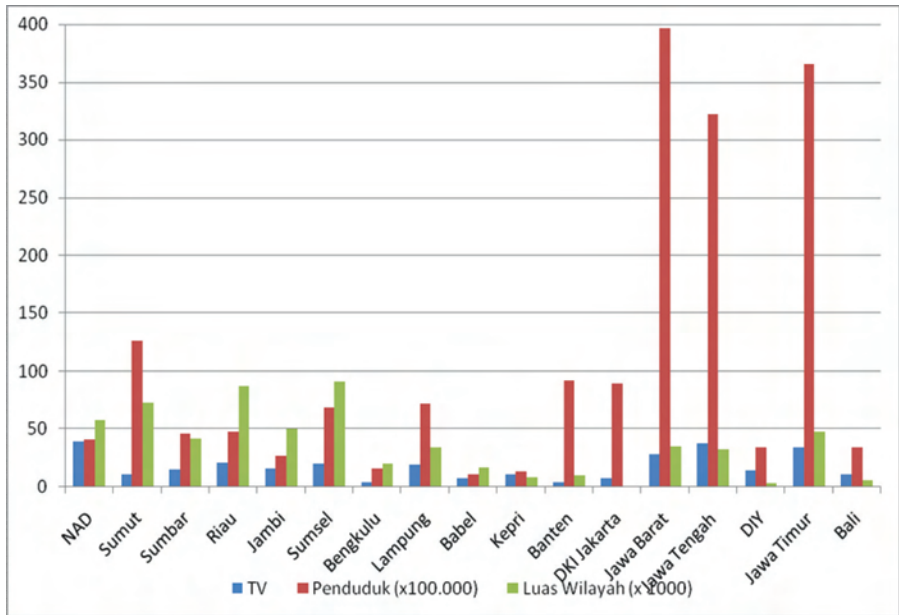
Penggunaan frekuensi TV dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayahnya menunjukkan kondisi yang berbeda antar propinsi. Propinsi-propinsi di Pulau Jawa terutama di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan jumlah penduduk yang paling banyak dibanding dengan propinsi – propinsi di Pulau di luar Pulau Jawa menggunakan frekuensi TV yang tidak terlalu banyak.

Apabila dilihat dari luas Pulau – pulau di Jawa, jumlah frekuensi TV diwilayah ini juga tidak terlalu besar. Untuk propinsi-propinsi di Sumatera, dengan luas wilayah yang cukup besar, ternyata jumlah frekuensinya juga tidak terlalu besar dan juga masih dibawah jumlah frekuensi di wilayah Jawa kecuali untuk NAD.

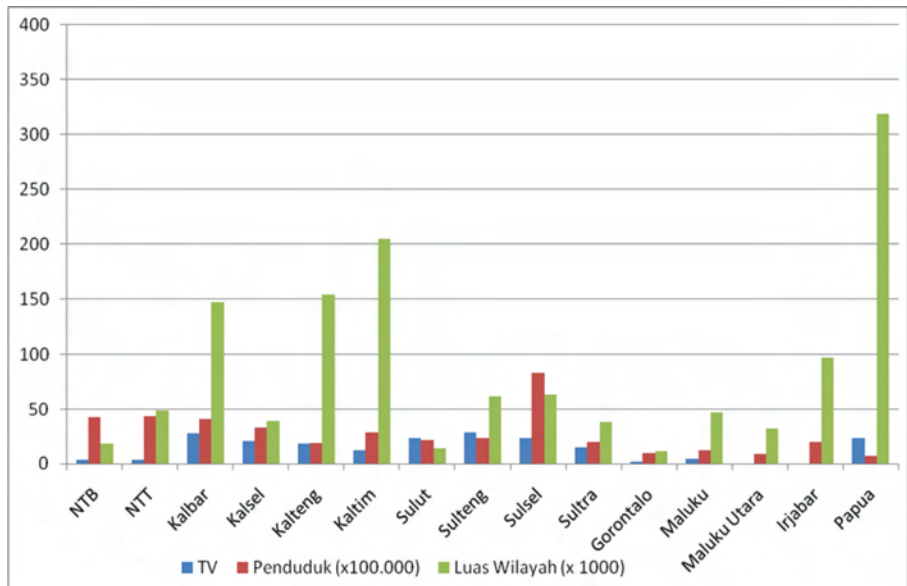
Di propinsi NAD, jumlah frekuensi TV cukup tinggi meskipun luas wilayah tidak terlalu besar dan penduduk juga tidak terlalu banyak. Hal ini diduga terkait dengan upaya penyebaran informasi dengan media frekuensi TV yang lebih merata mengingat penduduk juga tersebar merata dan menunjang kegiatan yang cukup banyak berlangsung di NAD.



Gambar 7.10A. Perbandingan Jumlah Frekuensi TV dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah.



Gambar 7.10B. Perbandingan Jumlah Frekuensi TV dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah.



Pada daerah-daerah diluar Jawa dan Sumatera, jumlah frekuensi TV cenderung rendah pada propinsi dengan wilayah yang luas maupun tidak luas. Jumlah frekuensi dipropinsi dengan wilayah yang luas seperti Papua, Kalimantan kecuali Kalimantan Selatan, jumlah frekuensi juga tidak terlalu banyak meskipun untuk Papua relatif cukup banyak jumlah frekuensi TV. Sementara pada propinsi dengan wilayah yang kecil seperti NTB, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan wilayah Maluku, jumlah frekuensi TV juga rendah. Hal yang menarik adalah bahwa jumlah frekuensi TV di Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Selatan relatif cukup banyak. Dari pola ini terlihat bahwa pada propinsi dengan wilayah daratan yang memanjang, jumlah frekuensi TV atau keberadaan pemancar stasiun frekuensi TV cenderung lebih banyak. Secara sosiologis, pada propinsi dengan pola daratan yang demikian, pusat kepadatan dan keramaian penduduk juga lebih menyebar. Hal ini diduga memiliki keterkaitan dengan penggunaan frekuensi yang juga relatif lebih banyak.

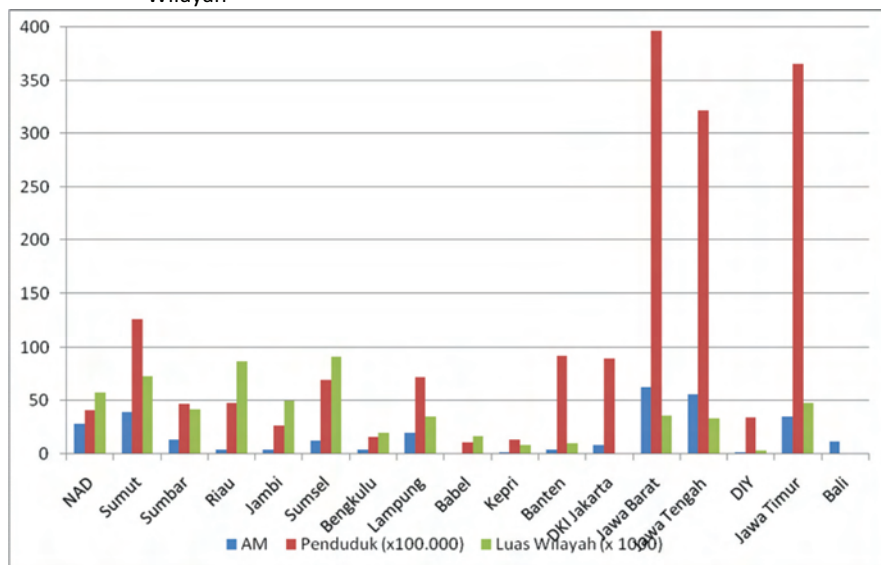
Propinsi dengan wilayah daratan yang luas atau dengan topologi memanjang menunjukkan tingkat penggunaan frekuensi yang relatif tinggi karena penggunaan pemancar stasiun radio frekuensi yang banyak, dilakukan untuk meng-*cover* wilayah yang luas

#### 7.4.2. Frekuensi Radio AM

Perbedaan penggunaan frekuensi AM dengan jumlah penduduk dan luas wilayah di wilayah Sumatera dan Jawa menunjukkan bahwa penggunaan frekuensi cenderung tinggi pada daerah dengan jumlah penduduk tinggi meskipun tidak proporsional. Di pulau Jawa, penggunaan frekuensi radio AM ini cenderung tinggi untuk di propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan kepadatan penduduk tinggi. Tingkat kepadatan penduduk juga cenderung mencerminkan terjadinya pemusatan penduduk dan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Nampaknya untuk wilayah ini, penggunaan frekuensi berbanding lurus dengan jumlah penduduk seperti terlihat pada gambar 7.11A. Sementara untuk wilayah Sumatera, penggunaan frekuensi radio AM yang tinggi terdapat pada propinsi Sumatera Utara yang juga memiliki penduduk lebih tinggi.

Sementara ada propinsi dengan jumlah penduduk rendah, penggunaan frekuensi radio juga cenderung rendah seperti pada propinsi Jambi, Bengkulu dan Riau, kecuali untuk NAD. Propinsi NAD menunjukkan pola yang berbeda dimana meskipun jumlah penduduk tidak terlalu tinggi dan wilayah tidak terlalu luas, namun penggunaan frekuensi radio AM cukup tinggi. Ini diduga terkait dengan daerah-aerah perkotaan di NAD yang lebih menyebar dan danya kebutuhan penggunaan frekuensi radio AM untuk dinamika kegiatan yang berlangsung di NAD.

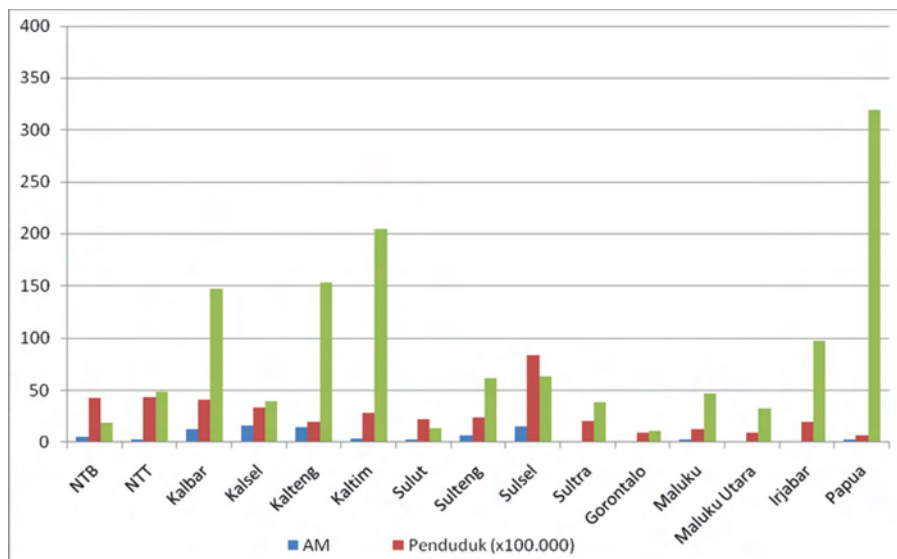
Gambar 7.11A. Perbandingan Penggunaan Frekuensi AM dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah



Untuk wilayah luar Jawa dan Sumatera, penggunaan frekuensi radio juga cenderung mengikuti besaran penduduk. Propinsi dengan penduduk yang relatif lebih banyak meskipun dengan luasan yang tidak besar cenderung menggunakan frekuensi radio AM lebih tinggi seperti di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan. Namun pada propinsi Kalimantan Timur, penggunaan frekuensi cenderung rendah meskipun jumlah penduduk relatif banyak. Sebaliknya dengan Kalimantan Tengah dimana penggunaan frekuensi radio AM relatif tinggi meskipun jumlah penduduk sedikit. Jika dilihat dari gambar 7.11A dan 7.11B, terdapat satu pola yang terlihat secara implisit adalah bahwa penggunaan frekuensi radio AM relatif tinggi pada propinsi yang memiliki daerah pusat keramaian/perkotaan yang cenderung

menyebar dan daerahnya merupakan daerah perkotaan baru. Pada daerah perkotaan modern seperti Jakarta, penggunaan rendah karena sudah lebih banyak menggunakan frekuensi radio FM.

Gambar 7.11B. Perbandingan Penggunaan Frekuensi AM dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

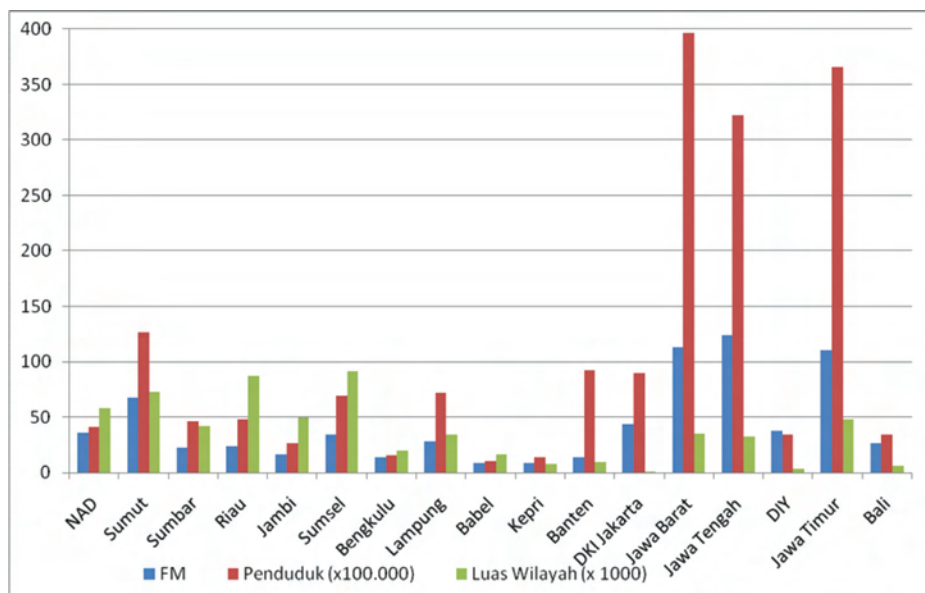


### 7.4.3. Frekuensi Radio FM

Penggunaan frekuensi radio FM menunjukkan pola yang sedikit berbeda dibandingkan dengan penggunaan frekuensi radio AM, terutama terkait dengan penyebarannya menurut propinsi. Perbandingan antara penggunaan frekuensi radio FM dengan luas wilayah dan jumlah penduduk menunjukkan adanya pola tertentu, khususnya di wilayah Sumatera dan Jawa seperti terlihat pada gambar 7.12A. Propinsi dengan jumlah penduduk yang lebih banyak cenderung menggunakan frekuensi FM yang lebih banyak. Propinsi dengan frekuensi FM yang cukup tinggi juga cenderung terdapat pada daerah perkotaan. Hal ini terlihat dari penggunaan frekuensi FM yang tinggi di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki jumlah penduduk yang banyak serta penggunaan frekuensi FM yang tinggi di DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Sumatera Selatan yang memiliki daerah perkotaan banyak meskipun jumlah penduduknya tidak terlalu tinggi. Sebaliknya di propinsi Lampung

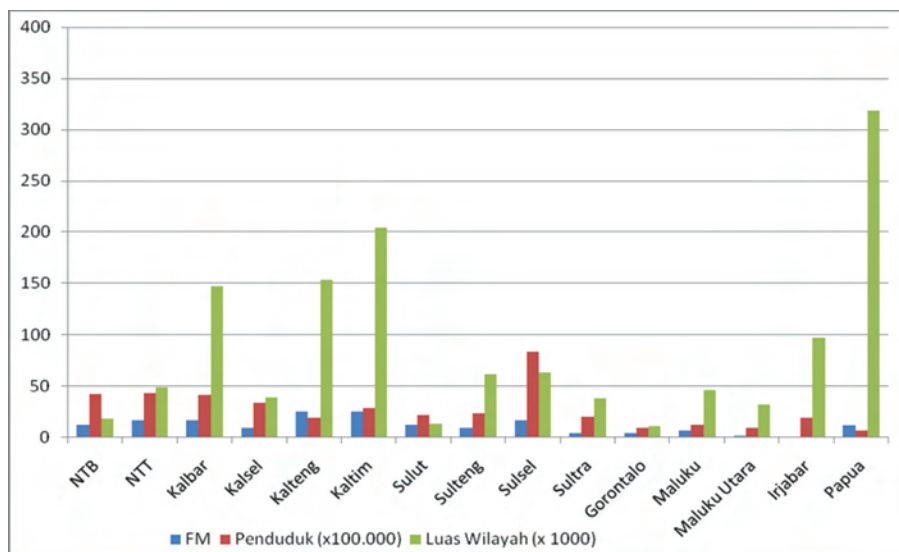
dengan jumlah penduduk relatif banyak, penggunaan frekuensi FM juga tidak banyak. Jumlah frekuensi FM yang tidak banyak pada propinsi Banten disebabkan daerah ini berdekatan dengan DKI Jakarta, karena menggunakan frekuensi FM yang berada di Jakarta.

Gambar 7.12A. Perbandingan Penggunaan Frekuensi FM dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah



Penggunaan frekuensi FM di wilayah luar Jawa dan Sumatera tidak menunjukkan kecenderungan yang sama sebagaimana di Jawa dan Sumatera. Propinsi dengan jumlah penduduk relatif banyak atau daerah perkotaan yang banyak tidak selalu terdapat frekuensi FM yang lebih banyak juga. Propinsi Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan dengan jumlah penduduk relatif banyak dan cukup banyak daerah perkotaan, ternyata belum banyak menggunakan frekuensi FM. Sebaliknya propinsi NTT dan Kalimantan Tengah dengan jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit, namun telah banyak penggunaan frekuensi FM. Pada wilayah luar Jawa dan Sumatera ini, penggunaan frekuensi ini sedikit lebih mengikuti pola luasan propinsi. Propinsi yang memiliki wilayah lebih luas seperti di Kalimantan, cenderung menggunakan frekuensi FM lebih banyak.

Gambar 7.12B. Perbandingan Penggunaan Frekuensi FM dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah

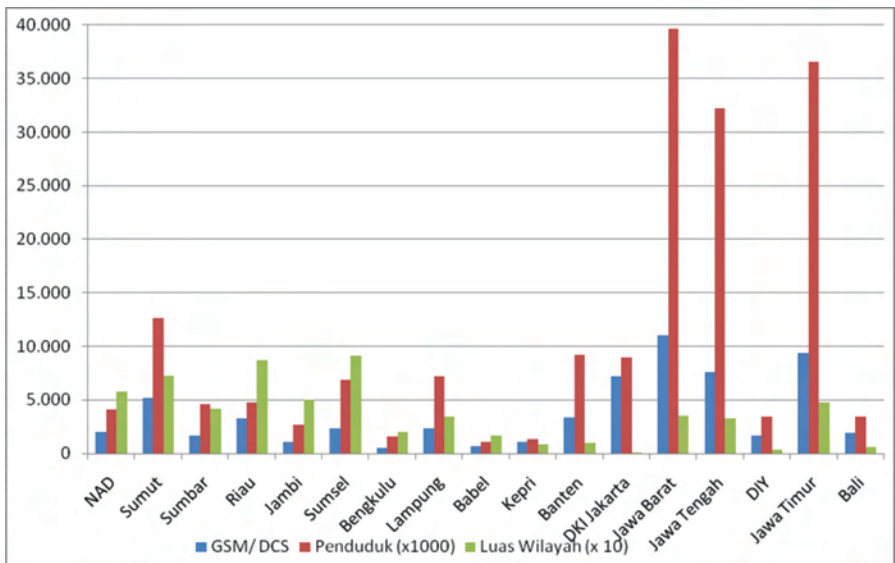


#### 7.4.4. Frekuensi GSM

Penggunaan frekuensi GSM menunjukkan jumlah yang jauh lebih besar untuk semua propinsi dibanding frekuensi lainnya. Penggunaan yang semakin besar ini berkorelasi kuat dengan perkembangan dan jangkauan telepon seluler yang sangat pesat dan meluas dalam beberapa tahun terakhir. Pola penggunaan frekuensi GSM dibandingkan dengan luas wilayah dan jumlah penduduk menunjukkan adanya kecenderungan yang sama seperti yang terlihat pada tabel 7.13A dan 7.13B. Propinsi dengan jumlah penduduk yang besar cenderung menggunakan frekuensi GSM yang juga tinggi. Sementara propinsi dengan jumlah penduduk tidak terlalu besar juga cenderung menggunakan frekuensi GSM yang rendah seperti Bengkulu dan Bangka Belitung. Namun untuk wilayah Kepulauan Riau, meskipun jumlah penduduk relatif tidak terlalu banyak, penggunaan frekuensi GSM-nya relatif cukup tinggi. Ini diduga terkait dengan struktur wilayahnya yang tersebar ke dalam pulau-pulau dan perkembangan daerah perkotaan di masing-masing pulau sehingga membutuhkan adanya penggunaan frekuensi GSM.

Sebaliknya, tidak ada korelasi yang kuat antara luas wilayah dengan penggunaan frekuensi GSM. Di propinsi Sumatera Selatan meskipun wilayahnya relatif luas, namun penggunaan frekuensi GSM tidak terlalu tinggi. Demikian pula dengan wilayah Jambi, Sebaliknya propinsi-propinsi di Jawa yang memiliki daerah yang tidak luas tapi penggunaan frekuensinya cukup tinggi.

Gambar 7.13A. Perbandingan Penggunaan Frekuensi GSM dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah



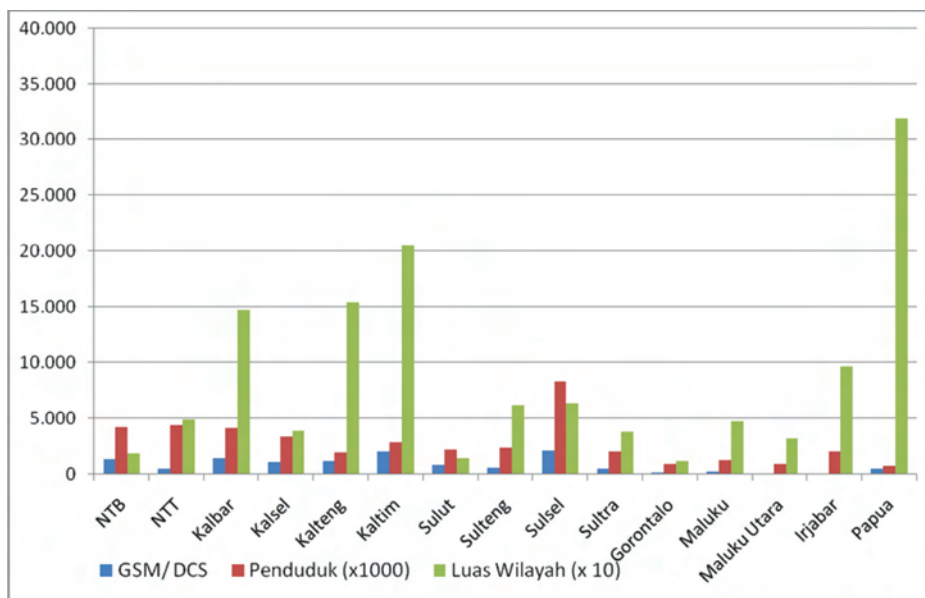
Kepadatan penggunaan frekuensi untuk GSM di Pulau Jawa dan Bali dibandingkan luas wilayahnya menunjukkan bahwa kepadatan pemancar stasiun radio frekuensi GSM atau menara BTS GSM sudah sangat padat sehingga sudah memerlukan adanya penataan yang lebih intensif dengan menerapkan penggunaan menara bersama

Pada daerah di luar Jawa dan Sumatera juga terjadi kecenderungan dimana penggunaan frekuensi GSM berkorelasi positif dengan jumlah penduduk. Pada daerah dengan jumlah penduduk relatif tinggi, penggunaan frekuensinya juga relatif tinggi seperti di Sulawesi Selatan. Namun beberapa daerah dengan jumlah penduduk tidak terlalu tinggi seperti

Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat tapi menggunakan frekuensi yang relatif lebih tinggi dibanding daerah lainnya di Kawasan Timur Indonesia seperti ditunjukkan gambar 7.13B.

Hal ini diduga terkait dengan kepadatan penduduk yang cukup tinggi atau adanya dinamika kegiatan sosial masyarakat yang tinggi pada daerah-daerah tertentu di propinsi ini yang membutuhkan adanya dukungan pemancar frekuensi GSM. Propinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat memiliki daerah-daerah tertentu yang padat kegiatan pertambangan dan berkembangnya daerah perkotaan yang ramai. Pada daerah-daerah inilah diduga adanya penggunaan frekuensi GSM yang relatif tinggi.

Gambar 7.13B. Perbandingan Penggunaan Frekuensi GSM dengan Jumlah Penduduk dan Luas Wilayah



## 7.5. Monitoring dan Penertiban Penggunaan Frekuensi oleh UPT

Monitoring penggunaan frekuensi dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Monitoring yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia sebagai bagian dari tugas memantau penggunaan frekuensi khususnya radio oleh berbagai pihak untuk berbagai kepentingan. Kegiatan monitoring dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran dalam



penggunaan frekuensi di masing-masing wilayah berdasarkan hasil pantauan terhadap kegiatan yang menggunakan frekuensi. Terdapat tiga kategori pelanggaran dalam penggunaan frekuensi ini yaitu penggunaan frekuensi yang tidak memiliki izin (illegal), izin penggunaan frekuensi yang sudah kadaluarsa, dan penggunaan frekuensi yang tidak sesuai peruntukannya. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas dari UPT di masing-masing wilayah kerja UPT-nya.

Selanjutnya berdasarkan temuan pelanggaran tersebut dilakukan penertiban terhadap kegiatan yang menggunakan frekuensi yang melanggar tersebut. Ada empat jenis tindakan penertiban yang dilakukan yaitu dari mulai SOS, peringatan, penyitaan sampai penyegelan atas kegiatan tersebut.

#### **7.5.1. Monitoring dan Penertiban oleh UPT Tahun 2008.**

Sepanjang tahun 2008, ditemukan 1.536 pelanggaran dalam penggunaan frekuensi dari monitoring yang dilakukan diseluruh 33 UPT monitoring yang tersebar di seluruh propinsi di Indonesia. Pelanggaran paling banyak ditemukan di wilayah UPT Semarang sebanyak 179 pelanggaran, diikuti wilayah UPT Bandung (97 pelanggaran) dan UPT Jambi sebanyak 94 pelanggaran. Berdasarkan wilayahnya, pelanggaran penggunaan frekuensi ini paling banyak terjadi di wilayah Jawa sesuai dengan banyaknya penggunaan frekuensi di wilayah ini, disusul dengan wilayah Sumatera. Kedua wilayah ini masing-masing 32,8% dan 33% dari total pelanggaran penggunaan frekuensi.

Namun meskipun intensitas pelanggaran cenderung tinggi pada daerah dengan penggunaan frekuensi tinggi seperti Jawa dan Sumatera, namun jumlah pelanggaran ini tidak proporsional dengan jumlah penggunaan frekuensi antar daerah. Wilayah Jawa dengan penggunaan frekuensi jauh lebih besar daripada Sumatera ternyata jumlah pelanggarannya hampir sama dengan wilayah Sumatera. Bahkan beberapa daerah dengan penggunaan frekuensi tidak terlalu banyak dan aktivitas sosial ekonomi juga tidak tergolong padat seperti Sulawesi Utara dan Sulawesi tengah menunjukkan tingkat pelanggaran tinggi. Berdasarkan monitoring tahun 2008, jumlah pelanggaran di UPT Manado dan Palu masing-masing sebesar 83 dan 73 seperti terlihat pada tabel 7.5.

Tabel 7.5. Hasil Penertiban Frekuensi oleh UPT Tahun 2008

No	WILAYAH PENERTIBAN	PELANGGARAN				TINDAKAN PENERTIBAN			
		Ilegal	Izin Kadalu- rsa	Tidak Sesuai Peruntuk- kannya	Jumlah	SOS	Disita	Dise- gel	Diperi- ngatkan
1	UPT NAD	36	4	7	47	33	12	23	5
2	UPT MEDAN	42	0	15	57	7	7	4	21
3	UPT PADANG	32	0	0	32	19	0	3	6
4	UPT PEKANBARU	68	0	0	68	19	0	10	9
5	UPT JAMBI	76	0	18	94	0	16	48	5
6	UPT BABEL	0	0	0	0	0	0	0	0
7	UPT BATAM	43	0	0	43	0	0	8	10
8	UPT PALEMBANG	37	0	0	37	0	2	5	35
9	UPT BENGKULU	88	0	0	88	0	11	5	66
10	UPT LAMPUNG	23	0	15	38	0	0	3	26
11	UPT DKI JAKARTA	45	0	0	45	1	5	0	39
12	UPT BANTEN	57	0	0	57	6	4	4	0
13	UPT BANDUNG	67	28	2	97	42	0	8	67
14	UPT YOGYAKARTA	48	10	4	62	22	0	0	11
15	UPT SEMARANG	86	87	6	179	0	13	0	141
16	UPT SURABAYA	69	0	0	69	8	9	19	38
17	UPT DENPASAR	57	2	4	63	0	1	5	37
18	UPT MATARAM	0	0	0	0	0	0	0	0
19	UPT KUPANG	0	0	0	0	0	0	0	0
20	UPT SAMARINDA	37	10	0	47	10	0	24	13
21	UPT BALIKPAPAN	32	0	0	32	11	0	9	3
22	UPT PONTIANAK	0	0	0	0	0	0	0	0
23	UPT PALANGKARAYA	41	0	0	41	0	0	0	22
24	UPT BANJARMASIN	0	0	0	0	0	0	0	0
25	UPT MANADO	83	0	0	83	8	8	3	36
26	UPT PALU	73	0	0	73	50	0	0	23
27	UPT MAKASAR	30	0	0	30	0	0	0	0
28	UPT AMBON	13	0	0	13	5	0	0	0
29	UPT GORONTALO	36	0	0	36	3	18	2	18
30	UPT TERNATE	0	0	0	0	0	0	0	0
31	UPT KENDARI	0	0	0	0	0	0	0	0
32	UPT JAYAPURA	3	0	0	3	0	0	3	0
33	UPT MERAUKE	76	26	0	102	0	0	0	1

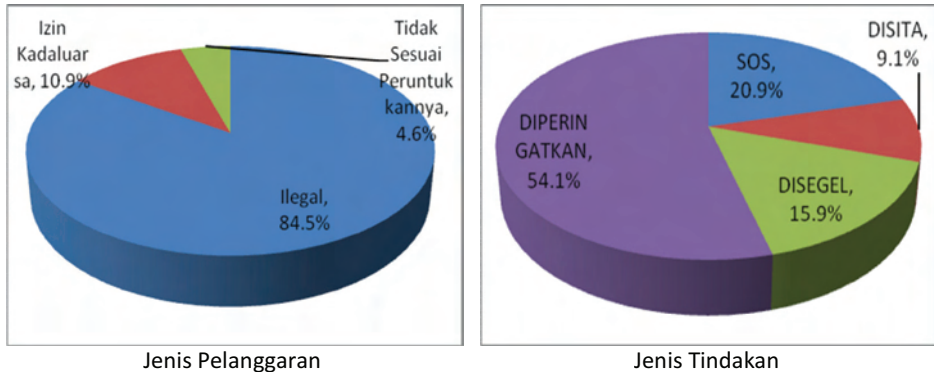
Besarnya tingkat pelanggaran sebenarnya juga mencerminkan kinerja dan ketegasan dari UPT terhadap penggunaan frekuensi di wilayah kerjanya karena pelanggaran sebenarnya mencerminkan temuan yang dilakukan oleh UPT tersebut dalam menjalankan tugas monitoringnya. Dengan kata lain, daerah dengan tingkat pelanggaran tinggi mencerminkan juga kinerja dari UPT tersebut dalam melakukan monitoring dan mendapatkan adanya temuan-temuan pelanggaran penggunaan frekuensi. Dari sisi ini, maka UPT Semarang bisa

dinilai berhasil dalam menjalankan tugas monitoringnya. UPT yang juga cukup menonjol dalam melakukan adalah Merauke dan Jambi. Dengan tingkat penggunaan frekuensi yang relatif rendah dan dinamika kegiatan di kedua daerah tersebut yang tidak setinggi di Jawa, namun monitoring yang dilakukan UPT di kedua daerah tersebut berhasil menemukan pelanggaran dalam jumlah yang cukup besar.

Jika dilihat dari jenis pelanggarannya, paling banyak pelanggaran dalam bentuk penggunaan frekuensi yang tanpa izin, diikuti dengan pelanggaran dalam bentuk izin yang sudah kadaluarsa. Dari total pelanggaran penggunaan frekuensi yang terjadi pada tahun 2008, sebanyak 84,5% adalah pelanggaran dalam bentuk penggunaan frekuensi tanpa izin (*illegal*). Sementara pelanggaran dalam bentuk izin kadaluarsa dan peruntukan yang tidak sesuai, proporsinya masing-masing 10,9% dan 4,6%. Dari pola pelanggaran ini terlihat bahwa masih banyak terdapat kerawanan dalam pemanfaatan penggunaan frekuensi dengan menggunakan frekuensi secara *illegal*.

Berdasarkan jenis tindakan terhadap pelanggaran yang terjadi, gambar 7.14 juga menunjukkan bahwa tindakan paling banyak dilakukan adalah dalam bentuk peringatan disusul dengan tindakan SOS. Dari total tindakan atas pelanggaran yang dilakukan pada tahun 2008, 54,1% adalah dalam bentuk peringatan dan dalam bentuk SOS 20,9%. Sementara tindakan dalam bentuk penyitaan sebanyak 9,1% dan tindakan dalam bentuk penyegelan sebanyak 15,9%. Dari komposisi tersebut terlihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh UPT sebagian besar masih tindakan persuasif dalam rangka mendorong tumbuhnya industri telekomunikasi dan pemanfaatan frekuensi masih tindakan penertiban tetap tegas dilakukan.

Gambar 7.14. Komposisi Jenis Pelanggaran dan Tindakan Penertiban oleh UPT Tahun 2008



### 7.5.2. Monitoring dan Penertiban oleh UPT Tahun 2009.

Monitoring dan penertiban yang dilakukan oleh UPT pada tahun 2009, telah ditemukan 828 jenis pelanggaran dalam penggunaan frekuensi dari 30 wilayah kerja UPT yang teridentifikasi adanya pelanggaran seperti yang terlihat pada tabel 7.6. Dibanding tahun 2008, terjadi penurunan yang sangat tajam dalam temuan pelanggaran penggunaan frekuensi ini sampai sebesar 46,1%. Namun dari sisi daerah temuannya, terjadi peningkatan daerah temuan dari 28 UPT yang ditemukan adanya pelanggaran pada tahun 2008 menjadi 30 UPT pada tahun 2009. Penurunan jumlah temuan pelanggaran ini diduga terkait dari hasil monitoring yang cukup ketat dan tegas pada tahun 2008 yang berhasil menemukan banyak pelanggaran dan penindakan atas pelanggaran tersebut, sehingga pada tahun berikutnya pelanggaran yang terjadi lebih berkurang.

Berbeda dengan yang terjadi pada tahun 2008, pelanggaran paling banyak ditemukan pada tahun 2009 ini justru di wilayah kerja UPT Jambi, UPT Jakarta dan UPT Bengkulu. Temuan pelanggaran yang banyak didapat di wilayah kerja UPT Jambi ini layak mendapat perhatian dan apresiasi bagi UPT Jambi karena ini sekaligus menunjukkan kinerja dan prestasi UPT Jambi dalam melakukan kegiatan monitoring. Dalam dua tahun terakhir, temuan pelanggaran yang cukup banyak didapat oleh UPT Jambi menunjukkan kinerja yang sangat baik dari UPT Jambi.

Tabel 7.6. Hasil Penertiban Frekuensi oleh UPT Tahun 2009

No	WILAYAH PENERTIBAN	PELANGGARAN				TINDAKAN PENERTIBAN			
		Ilegal	Izin Kadalua- rsa	Tidak Sesuai Peruntuk kannya	Jumlah	Disita	Dise- gel	Diperi- ngatkan	Jumlah
1	UPT NAD	10	-	5	15	2	-	13	15
2	UPT MEDAN	50	-	-	50	8	-	42	50
3	UPT PADANG	27	7	3	37	-	3	34	37
4	UPT PEKANBARU	50	-	-	50	-	-	50	50
5	UPT JAMBI	109	-	14	123	1	35	87	123
6	UPT BABEL	16	-	1	17	-	-	16	16
7	UPT BATAM	17	-	-	17	-	-	17	17
8	UPT PALEMBANG	17	-	-	17	-	2	15	17
9	UPT BENGKULU	36	27	5	68	6	1	61	68
10	UPT LAMPUNG	9	-	-	9	-	-	9	9
11	UPT DKI JAKARTA	23	30	14	67	-	-	67	67
12	UPT BANTEN	16	-	-	16	-	-	16	16
13	UPT BANDUNG	18	-	-	18	-	3	15	18
14	UPT YOGYAKARTA	18	-	-	18	-	-	18	18
15	UPT SEMARANG	17	-	-	17	2	-	15	17
16	UPT SURABAYA	53	-	-	53	-	-	53	53
17	UPT DENPASAR	10	-	-	10	-	-	10	10
18	UPT MATARAM	25	-	-	25	14	-	11	25
19	UPT KUPANG	5	2	-	7	-	-	7	7
20	UPT SAMARINDA	27	5	2	34	13	-	21	34
21	UPT BALIKPAPAN	23	-	-	23	9	-	14	23
22	UPT PONTIANAK	14	-	-	14	-	-	14	14
23	UPT PALANGKARAYA	25	-	-	25	-	-	25	25
24	UPT BANJARMASIN	14	-	1	15	-	-	15	15
25	UPT MANADO	8	-	-	8	-	-	8	8
26	UPT PALU	2	-	-	2	-	-	2	2
27	UPT MAKASAR	17	-	-	17	-	-	17	17
28	UPT AMBON	15	4	-	19	-	-	19	19
29	UPT GORONTALO	5	-	-	5	-	-	5	5
30	UPT TERNATE	2	-	-	2	-	-	2	2
31	UPT KENDARI	2	-	-	2	-	-	2	2
32	UPT JAYAPURA	8	-	-	8	-	-	8	8
33	UPT MERAUKE	20	-	-	20	1	1	18	20

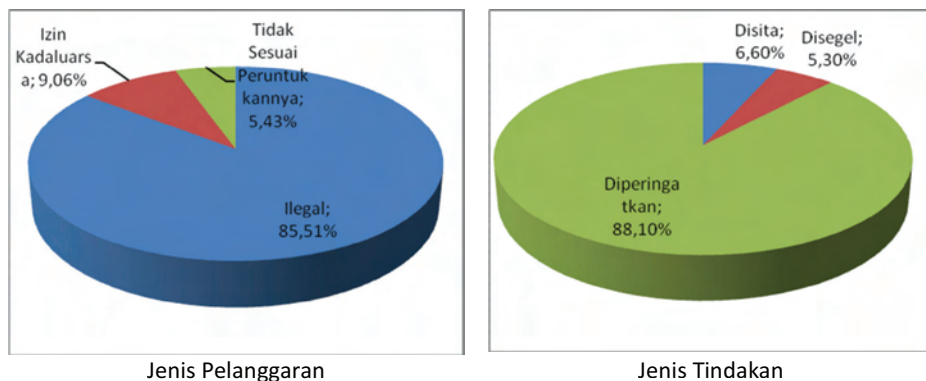
\*) Tidak termasuk UPT Sorongan dan UPT Tahuna yang baru mulai beroperasi

Temuan pelanggaran yang cukup banyak di wilayah kerja UPT Bengkulu juga patut mendapat catatan tersendiri karena penggunaan frekuensi di wilayah Bengkulu sebenarnya juga tidak banyak. Sehingga temuan pelanggaran yang banyak ini menunjukkan kinerja monitoring yang berjalan sangat baik. Sementara temuan pelanggaran yang juga cukup banyak di DKI Jakarta dirasa wajar mengingat penggunaan frekuensi di DKI Jakarta juga

tinggi serta dinamika kegiatan masyarakat yang sangat tinggi termasuk yang membutuhkan penggunaan frekuensi radio sehingga sangat potensial terjadinya pelanggaran. Hal yang menarik dari temuan pelanggaran di DKI Jakarta adalah bahwa pelanggaran yang paling banyak adalah penggunaan frekuensi yang izinnya sudah kadaluarsa.

Dari sisi jenis jenis pelanggaran yang terjadi pada tahun 2009, pelanggaran paling banyak terjadi juga dalam bentuk penggunaan frekuensi tanpa izin (*illegal*) seperti terlihat pada gambar 7.15. Pelanggaran dalam bentuk penggunaan frekuensi secara *illegal* ini mencapai 85,5% dari total pelanggaran yang terjadi. Sementara untuk pelanggaran dalam bentuk izin yang sudah kadaluarsa, proporsinya mencapai 9,1% dan pelanggaran penggunaan frekuensi yang tidak sesuai peruntukan mencapai 5,4% dari total pelanggaran yang ditemukan.

Gambar 7.15. Komposisi Jenis Pelanggaran dan Tindakan Penertiban oleh UPT Tahun 2009



Berdasarkan tindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukan pada tahun 2009, paling banyak adalah dalam bentuk peringatan. Dari total tindakan penertiban yang dilakukan, 88,1% dilakukan dalam bentuk pemberian peringatan kepada kegiatan pengguna frekuensi tersebut. Sementara tindakan dalam bentuk penyegelan hanya 5,3% dan tindakan dalam bentuk penyitaan hanya 6,6% seperti ditunjukkan pada gambar 7.10. Dari komposisi tindakan yang dilakukan terhadap pelanggaran, tampaknya pada tahun 2009 tindakan yang dilakukan oleh UPT masih menggunakan pendekatan yang persuasif dengan harapan tidak mematikan potensi yang ada dan lebih diarahkan pada upaya formalisasi dalam penggunaan frekuensi. Dengan demikian diharapkan penggunaan frekuensi dapat lebih tertib dilakukan mengingat penggunaannya juga diharapkan akan memberikan manfaat yang lebih luas. Para

pelanggar penggunaan frekuensi yang sebagian besar berupa penggunaan secara ilegal, melalui tindakan persuasif ini diharapkan lebih memahami pentingnya melakukan legalisasi dan formalisasi dalam penggunaan frekuensi untuk kepentingan dan kemanfaatan bersama yang lebih besar.

## Bab 8

### Bidang Standardisasi

Penyajian statistik bidang standardisasi ini akan memaparkan data dan analisis dari hasil penerbitan sertifikat dari pengujian peralatan telekomunikasi yang masuk dan akan digunakan di wilayah hukum Indonesia. Perangkat tersebut meliputi berbagai jenis perangkat telekomunikasi baik yang digunakan langsung oleh masyarakat konsumen maupun perangkat pendukung yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri dan akan dipasarkan / digunakan di Indonesia. Penerbitan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Standardisasi dari sisi jenisnya terdiri dari empat jenis yaitu sertifikat baru, sertifikat perpanjangan, sertifikat revisi dan sertifikat perpanjangan dan revisi, dengan pengertian sebagai berikut :

- a) Sertifikat baru adalah sertifikat yang diterima untuk pengujian alat/perangkat yang baru pertama kali diuji.
- b) Sertifikat revisi adalah sertifikat yang dikeluarkan sebagai revisi atas sertifikat awal/baru jika terjadi kesalahan dalam penerbitan (data, detail teknis) atau ada perubahan pada sebagian komponen perangkat.
- c) Sertifikat perpanjangan adalah sertifikat yang diterbitkan atas perpanjangan pengujian dari alat yang sudah diuji sebelumnya dan masa basa berlaku sertifikat sudah habis sehingga perlu diperpanjang.
- d) Sertifikat perpanjangan dan revisi adalah sertifikat yang diterbitkan jika dalam proses perpanjangan sertifikat juga terjadi perubahan pada alat/perangkat telekomunikasi yang diperpanjang sertifikatnya sehingga diperlukan revisi data dalam perpanjangan sertifikatnya.

Ketentuan mengenai kewajiban sertifikasi perangkat telekomunikasi ini diatur dalam Peraturan Menteri Kominikasi dan Informastika Nomor 29/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Sertifikasi Alat dan Perangkat Telekomunikasi.



## **8.1. Ruang Lingkup**

Data standardisasi yang disajikan dalam laporan ini akan diuraikan secara terperinci dengan kurun waktu masing-masing data sebagai berikut:

1. Data penerbitan sertifikat baru pada tahun 2004 - 2009
2. Data penerbitan sertifikat perpanjangan pada tahun 2006 - 2009.
3. Data penerbitan sertifikat revisi pada tahun 2006 - Juni 2009.
4. Data penerbitan sertifikat perpanjangan sekaligus revisi pada tahun 2006 - Juni 2009.
5. Penerbitan sertifikasi per bulanan untuk semua jenis sertifikat tahun 2008 – Juni 2009.

Data sertifikasi standardisasi perangkat yang dipaparkan dalam laporan ini, tidak dipisahkan antara data sertifikasi untuk masing-masing kelompok perangkat (terminal, transmisi dan sentral) maupun jenis di masing-masing kelompok perangkat mengingat semakin bervariasinya jenis perangkat yang diuji. Sehingga dalam penyajiannya digabung menjadi satu untuk masing-masing jenis sertifikat.

Dalam pengujian standardisasi perangkat untuk penerbitan sertifikat dilakukan berdasarkan tipe perangkat dan negara asal. Artinya untuk tipe perangkat telekomunikasi yang sama, kalau berasal dari negara asal yang berbeda dilakukan pengujian dalam rangka sertifikasi. Artinya, dimungkinkan diterbitkan lebih dari satu sertifikat untuk perangkat yang sama jika perangkat tersebut berasal dari negara yang berbeda-beda. Namun untuk tipe perangkat sama dan negara asal sama tapi pemohon pengujiannya berbeda, hanya dilakukan uji dokumen untuk mendapatkan sertifikat.

## **8.2 Konsep dan Definisi**

Sub bab ini berisi definisi dari terminologi yang digunakan dalam penyajian data standardisasi agar dapat memberi interpretasi yang sama terhadap terminologi yang digunakan.

- 1) Alat telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi;

- 2) Perangkat telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.

Perangkat telekomunikasi ini terdiri dari tiga kelompok yaitu :

- a. Peralatan Transmisi, meliputi : *Microwave Radio Link (MRL), Transceiver, Antenne, Cable, Satelit, Very Small Aperture Terminal, Wireless Access, Ractifier, HDSL, Repeater, Wireless Boradband, Broadband Wireless Access (BWA), Radio Broadband Wireless System (BWS), General Packet Radio Services (GPRS) dan Multi Service Optical Network,*
  - b. Peralatan Terminal meliputi : *GSM, CDMA, WCDMA, GSM/CDMA, Marine, Faksimili, Industrial Science Medical, Telephone, Radio Trunking Portable (RTP), Televisi, Immobilizer, Modem, Modem Radio, Handy Talkie (HT), Radio Mobile, Pager, Video, Cordles Phone, Customer Premise Equipment (CPE), Batere Kering dan Bluetooth,*
  - c. Peralatan Sentral, meliputi : *PABX, Base Station, Base Transciever Station (BTS), Radio Base Station (RBS), Multiplexer, Switching, DWDM, Network, Router, Access, TCSM, Serving GPRS Support Node (SGSN), Pencatat Data Pembicaraan Telepon, Wireless Aplication Protocol (WAP), Wireless LAN (WLAN), Wireless Local Loop (WLL), Data Distribution Frame (DDF), IP DSLAM, Gateway, Universal Closure, Short Message Center, Kotak Terminal Batas, Sentra Telepon Digital (STD), Module, Voice Mail System (VMS), dan Voice Compression Device*
- 3) Sertifikasi adalah proses yang berkaitan dengan pemberian sertifikat;
- 4) Sertifikat adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian tipe alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis dan atau standar yang ditetapkan;
- 5) Label adalah keterangan mengenai alat dan perangkat telekomunikasi yang berbentuk gambar, tulisan, atau kombinasi keduanya atau bentuk lain yang mengidentifikasi informasi tentang alat dan perangkat yang telah bersertifikat;
- 6) Pengujian alat dan perangkat telekomunikasi adalah penilaian kesesuaian antara karakteristik alat dan perangkat telekomunikasi terhadap persyaratan teknis yang berlaku;

- 7) Persyaratan teknis adalah parameter listrik/elektronis, persyaratan keselamatan dan atau persyaratan electromagnetic compatibility yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) atau yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

### 8.3. Penerbitan Sertifikat

#### 8.3.1. Perkembangan Penertiban Sertifikat Peralatan

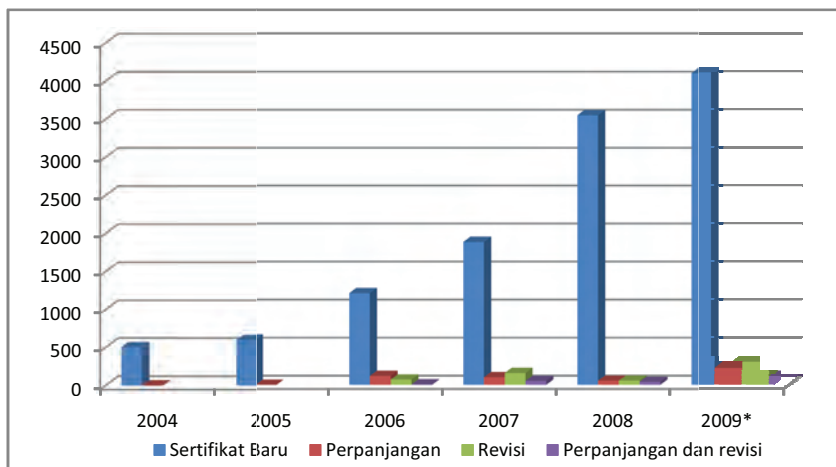
Penebitan sertifikat atas standarisasi perangkat mulai mengalami lonjakan sejak tahun 2006. Sejak tahun tersebut juga mulai diidentifikasi dan didata penerbitan sertifikat yang bersifat perpanjangan, sertifikat revisi dan sertifikat perpanjangan dan revisi. Kalau pada sebelum 2005 penerbitan sertifikat baru kurang dari 600 buah, pada tahun 2006 penerbitan sertifikat baru meningkat sampai 200%. Selanjutnya setelah tahun 2006, penerbitan sertifikat meningkat cukup pesat.

Tabel 8.1. Jumlah Penerbitan Sertifikat untuk masing-masing Jenis 2004 - 2009

Jenis Sertifikat	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Sertifikat Baru	503	596	1.207	1.882	3.551	4.104
Perpanjangan	N.A	N.A	119	102	55	243
Revisi			70	158	56	299
Perpanjangan dan revisi			4	52	40	109
Jumlah	503	596	1.400	2.194	3.702	4.755

Dari sisi jenis sertifikat yang diterbitkan, penerbitan sertifikat masih didominasi oleh jenis sertifikat baru. Tabel 8.1 dan Gambar 8.1 menunjukkan jumlah penerbitan sertifikat baru jauh lebih banyak daripada sertifikat perpanjangan, sertifikat revisi maupun sertifikat perpanjangan dan revisi. Hal ini wajar mengingat lebih banyak perangkat baru yang disertifikasi dibanding dilakukannya perpanjangan atas sertifikat yang sudah diterbitkan. Apalagi dengan perkembangan perangkat telekomunikasi yang pesat baik dari sisi jenis maupun model, menyebabkan penerbitan sertifikat baru meningkat dan jauh lebih banyak.

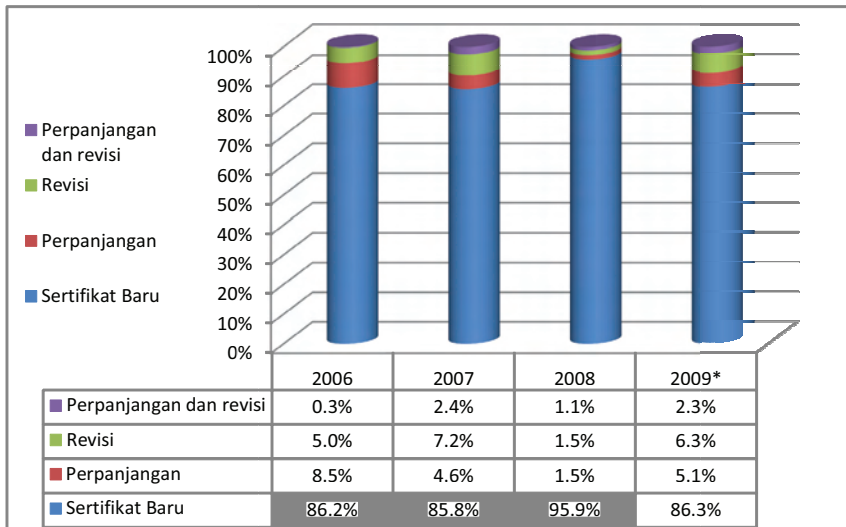
Gambar 8.1. Perkembangan Penerbitan Sertifikat Perangkat Telekomunikasi 2004-2009



Jumlah sertifikat baru yang jauh lebih banyak juga terlihat dari komposisi jenis sertifikat yang diterbitkan selama empat tahun terakhir. Dari total sertifikat yang diterbitkan, rata-rata jumlah sertifikat baru mencapai lebih dari 95% dari total sertifikat. Bahkan penerbitan sertifikat pada tahun 2008, hampir 96% merupakan sertifikat baru. Semenetera penerbitan jenis sertifikat lainnya hanya kurang dari 10%, termasuk sertifikat perpanjangan yang maksimal hanya 8,5% dari total sertifikat yang diterbitkan pada tahun 2006 seperti terlihat gambar 8.2.

Peningkatan yang pesat dari penerbitan sertifikat baru ini juga terlihat dari pertumbuhan penerbitan sertifikat baru yang cukup tinggi. Setelah pada tahun 2005 hanya tumbuh 18,5%, tahun 2006 meningkat dengan pesat dengan pertumbuhan mencapai 102,5%. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan penerbitan sertifikat baru mencapai 56%. Sementara secara total, pertumbuhan penerbitan sertifikat cenderung fluktuatif meskipun masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Dalam lima tahun terakhir pertumbuhan penerbitan sertifikat total mencapai 61,5%. Fluktuasi yang tinggi justru terjadi pada penerbitan sertifikat bukan baru seperti sertifikat revisi, sertifikat perpanjangan maupun sertifikat revisi dan perpanjangan seperti ditunjukkan Tabel 8.2 dan Gambar 8.2.

Gambar 8.2. Komposisi Penerbitan Sertifikat Perangkat Telekomunikasi menurut jenis 2006 – 2009

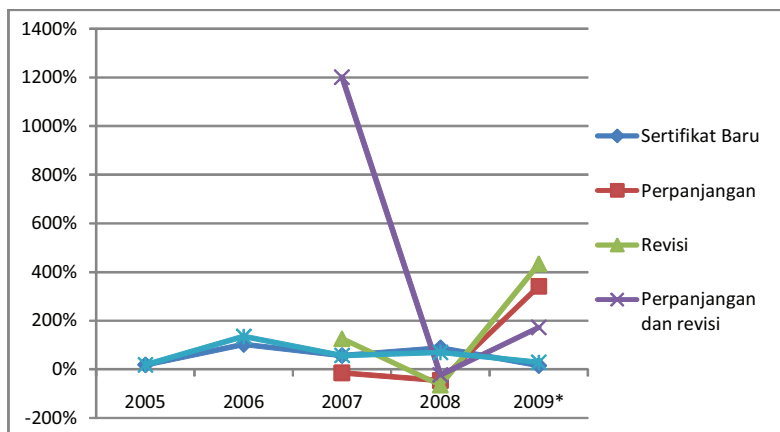


Pertumbuhan yang tinggi mulai tahun 2006 ini juga sangat terkait dengan perkembangan yang pesat dari industri telekomunikasi khususnya untuk telekomunikasi seluler yang semangant beragam penggunaanya dan mulai menyatu dengan internet. Hal ini menyebabkan semakin banyak perangkat baru yang masuk ke Indonesia untuk memenuhi permintaan pasar dan mendukung penyelenggaraan jasa telekomunikasi sehingga penerbitan sertifikat yang dilakukan juga semakin banyak.

Tabel 8.2. Pertumbuhan Penerbitan sertifikat menurut jenis sertifikat

Jenis Sertifikat	2005	2006	2007	2008	2009
Sertifikat Baru	18,5%	102,5%	55,9%	88,7%	15,6%
Perpanjangan			-14,3%	-46,1%	341,8%
Revisi			125,7%	-64,6%	433,9%
Perpanjangan dan revisi			1200,0%	-23,1%	172,5%
Jumlah	18,5%	134,9%	56,7%	68,7%	28,4%

Gambar 8.3. Pertumbuhan Penerbitan Sertifikat Perangkat menurut Jenis Perangkat

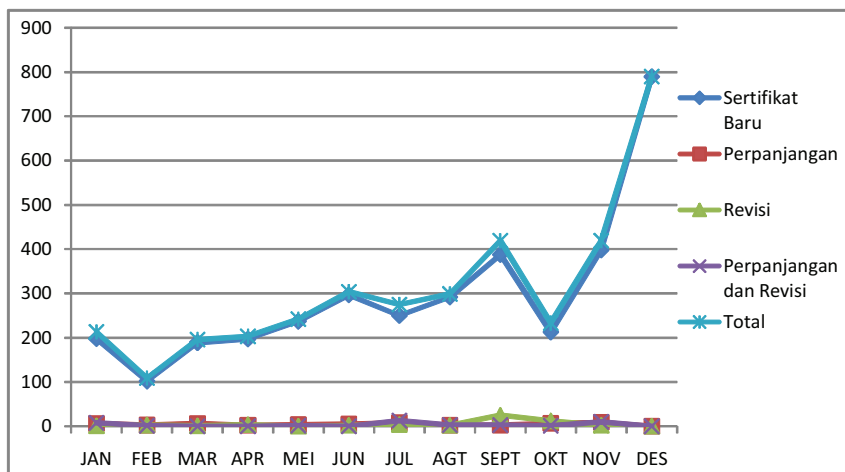


### 8.3.2. Fluktuasi Penerbitan Sertifikat Bulanan

Penerbitan sertifikat standardisasi perangkat menurut bulan menunjukkan pola yang berbeda antara keadaan tahun 2008 dengan tahun 2009. Penerbitan sertifikat pada tahun 2008 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat pada akhir tahun dan mencapai puncaknya pada akhir tahun (bulan Desember). Gambar 8.4 yang menunjukkan fluktuasi bulanan penerbitan sertifikat menunjukkan bahwa pada bulan-bulan awal, penerbitan sertifikat masih rendah yaitu kurang dari 300 sertifikat. Namun pada bulan-bulan September sampai bulan Desember, penerbitan sertifikat meningkat lebih dari 400 sertifikat per bulan kecuali pada bulan Oktober. Dari gambar tersebut juga terlihat bahwa pola frekuensi penerbitan sertifikat total juga sama dengan sertifikat baru.

Penerbitan sertifikat bulanan pada tahun 2009 menunjukkan pola yang hampir merata pada tiap bulannya meskipun terdapat sedikit fluktuasi. Rata-rata jumlah penerbitan sertifikat per bulan pada tahun 2009 berkisar antara 300-500 sertifikat per bulan. Penerbitan sertifikat yang tinggi terjadi pada bulan Maret, April dan Desember yang mencapai hampir 500 sertifikat. Penerbitan sertifikat sedikit menurun pada bulan September yang hanya mencapai kurang dari 300 sertifikat.

Gambar 8.4. Fluktuasi bulanan penerbitan sertifikat perangkat telekomunikasi Tahun 2008

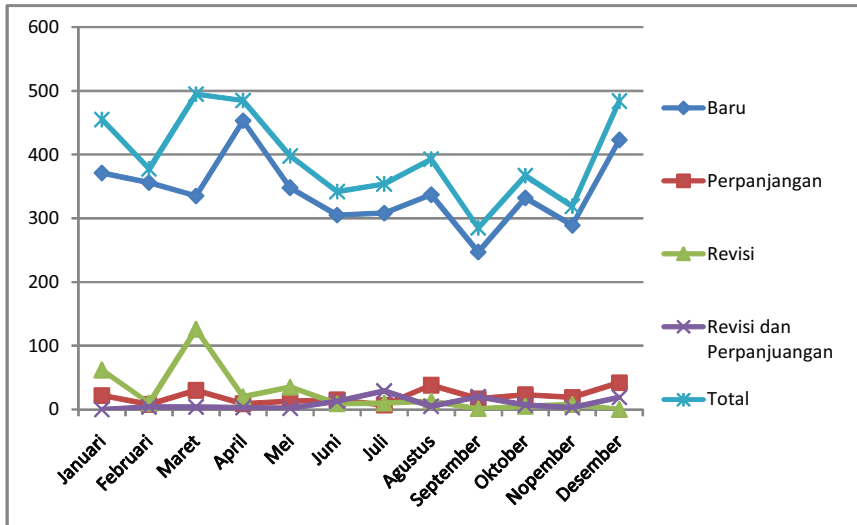


Tabel 8.3. Perkembangan Penerbitan Sertifikat Perangkat Telekomunikasi Tahun 2009

Bulan	Baru	Perpanjangan	Revisi	Revisi dan Perpanjangan	Total
Januari	371	22	62	0	455
Februari	356	8	10	4	378
Maret	335	30	126	4	495
April	453	9	20	3	485
Mei	348	13	35	2	398
Juni	305	15	9	13	342
Juli	308	7	10	29	354
Agustus	337	38	13	5	393
September	247	17	1	20	285
Oktober	332	23	5	7	367
November	289	19	8	3	319
Desember	423	42	0	19	484
<b>Total</b>	<b>4104</b>	<b>243</b>	<b>299</b>	<b>109</b>	<b>4755</b>

Seperti pada tahun 2008, pola bulanan penerbitan sertifikat total pada tahun 2009 juga mengikuti pola yang terjadi pada penerbitan sertifikat baru. Hal ini terjadi karena memang penerbitan sertifikat standarisasi perangkat pada tahun 2009 juga didominasi oleh sertifikat baru untuk perangkat yang baru distandarisasi. Tidak terdapat perbedaan yang besar dalam jumlah sertifikat yang diterbitkan setiap bulannya sebagaimana yang terjadi pada tahun 2008. Fluktuasi jumlah penerbitan relatif kecil.

Gambar 8.5. Perkembangan penerbitan sertifikat perangkat telekomunikasi Tahun 2009



### 8.3.3. Penerbitan Sertifikat Menurut Negara Asal

Jika dilihat dari negara asal dari perangkat yang distandardisasi, perangkat dari Cina sangat mendominasi penerbitan sertifikat standardisasi perangkat pada tahun 2009. Tabel 8.4 menunjukkan bahwa dari total 4538 sertifikat standardisasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Standardisasi, hampir separuhnya atau 2131 sertifikat tersebut adalah untuk perangkat yang berasal dari Cina. Untuk sertifikat baru, dari total 3987 sertifikat baru hasil standardisasi perangkat yang dilakukan pada tahun 2009, lebih dari separuhnya atau 1968 sertifikat baru adalah untuk perangkat dari Cina.

Urutan berikutnya untuk penerbitan sertifikat standardisasi perangkat yang adalah perangkat yang berasal dari Amerika Serikat. Dari total sertifikat yang dikeluarkan pada tahun 2009, sekitar 10% merupakan sertifikat standardisasi untuk perangkat yang berasal dari Amerika Serikat. Selanjutnya yang cukup banyak juga adalah perangkat dari Finlandia, Taiwan dan Jepang. Hal yang menarik adalah bahwa cukup banyak sertifikat revisi yang dikeluarkan untuk perangkat dari Malaysia dan Jepang. Sementara untuk sertifikat perpanjangan, cukup banyak sertifikat untuk perangkat yang berasal dari Amerika Serikat dan Swedia.



Tabel 8.4. Jumlah Sertifikat yang dikeluarkan per Jenis Sertifikat menurut negara asal Tahun 2009

Negara	Baru	Perpanjangan	Revisi	Revisi dan Perpanjangan	Total
China	1968	26	234	3	2131
USA	419	53	15	2	489
Finlandia	113	1	34	0	148
Taiwan	143	3	2	0	148
Jepang	119	14	8	6	147
Italia	125	7	1	3	136
Malaysia	68	10	40	15	133
Meksiko	129	0	4	0	133
Swedia	93	33	0	1	127
Hungaria	119	0	3	0	122
Korea Selatan	112	1	7	1	121
Kanada	72	12	1	1	86
India	78	0	4	0	82
Jerman	62	4	1	7	74
Hongkong	36	0	14	18	68
Indonesia	46	9	4	0	59
Singapura	43	7	0	0	50
Inggris	38	6	2	0	46
Rep. Ceko	43	0	0	0	43
Thailand	36	0	0	0	36
Perancis	31	3	0	0	34
Lainnya	82	9	8	4	103
<b>JUMLAH</b>	<b>3987</b>	<b>198</b>	<b>292</b>	<b>61</b>	<b>4538</b>

Komposisi sertifikat standardisasi yang dikeluarkan untuk masing-masing jenis perangkat juga menunjukkan bahwa sebagian besar sertifikat yang dikeluarkan adalah untuk perangkat asal China. Untuk sertifikat baru, proporsi sertifikat standardisasi perangkat asal China mencapai hampir 50%, diikuti oleh perangkat asal Amerika Serikat sebesar 10,5% seperti ditunjukkan oleh Tabel 8.5 dan Gambar . Sementara untuk penerbitan sertifikat revisi, proporsi perangkat asal China mencapai 61,3%, diikuti dengan sertifikasi standardisasi perangkat asal Malaysia yang mencapai 10,5%.

Namun untuk penerbitan sertifikat perpanjangan, komposisinya menunjukkan perbedaan dengan sertifikat baru. Perangkat dari Amerika Serikat lebih banyak sertifikat perpanjangannya dikeluarkan. Proporsi sertifikat perpanjangan untuk perangkat asal Amerika Serikat mencapai 26,7%, sementara penerbitan sertifikat perangkat asal China proporsinya hanya 13%.

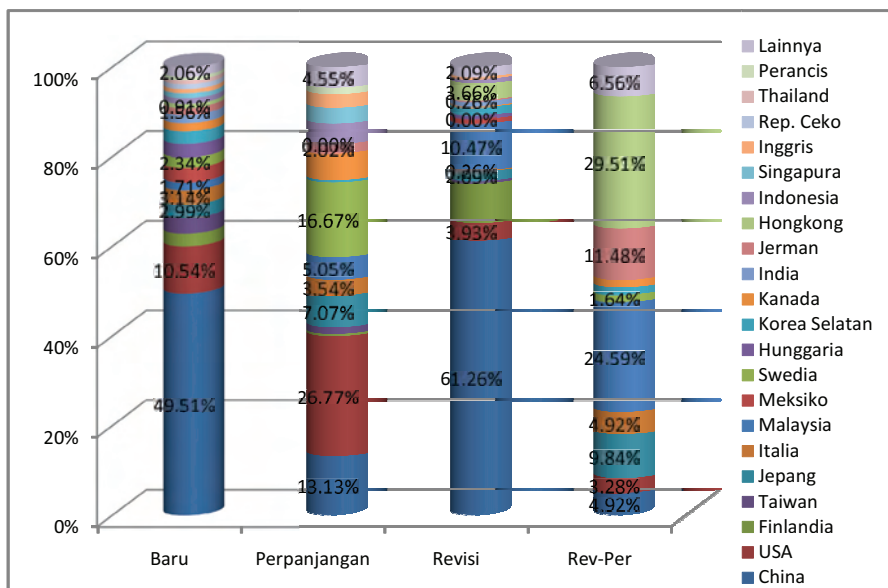
Tabel 8.5. Komposisi asal negara dari sertifikat standardisasi yang dikeluarkan Tahun 2009

Negara	Baru	Perpanjangan	Revisi	Revisi dan Perpanjangan
China	49,51%	13,13%	61,26%	4,92%
USA	10,54%	26,77%	3,93%	3,28%
Finlandia	2,84%	0,51%	8,90%	0,00%
Taiwan	3,60%	1,52%	0,52%	0,00%
Jepang	2,99%	7,07%	2,09%	9,84%
Italia	3,14%	3,54%	0,26%	4,92%
Malaysia	1,71%	5,05%	10,47%	24,59%
Meksiko	3,25%	0,00%	1,05%	0,00%
Swedia	2,34%	16,67%	0,00%	1,64%
Hungaria	2,99%	0,00%	0,79%	0,00%
Korea Selatan	2,82%	0,51%	1,83%	1,64%
Kanada	1,81%	6,06%	0,26%	1,64%
India	1,96%	0,00%	1,05%	0,00%
Jerman	1,56%	2,02%	0,26%	11,48%
Hongkong	0,91%	0,00%	3,66%	29,51%
Indonesia	1,16%	4,55%	1,05%	0,00%
Singapura	1,08%	3,54%	0,00%	0,00%
Inggris	0,96%	3,03%	0,52%	0,00%
Rep. Ceko	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%
Thailand	0,91%	0,00%	0,00%	0,00%
Perancis	0,78%	1,52%	0,00%	0,00%
Lainnya	2,06%	4,55%	2,09%	6,56%

Untuk penerbitan jenis sertifikat revisi dan perpanjangan, meskipun jumlahnya tidak banyak, namun komposisinya juga berbeda dengan komposisi penerbitan sertifikat baru dan total. Sertifikat revisi dan perpanjangan untuk perangkat asal Hongkong memiliki proporsi yang paling banyak diikuti oleh perangkat asal Malaysia. Proporsi sertifikat perpanjangan dan revisi untuk perangkat asal Hongkong mencapai 29,5% dari total sertifikat perpanjangan dan revisi, sementara sertifikat perpanjangan dan revisi untuk perangkat asal Malaysia mencapai 24,6%.

Sebaran penerbitan sertifikat menurut negara asal per bulan juga menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat standardisasi untuk perangkat asal China juga yang paling banyak pada setiap bulannya.

Gambar 8.6. Komposisi Sertidikat Standardisasi Perangkat menurut Negara Asal



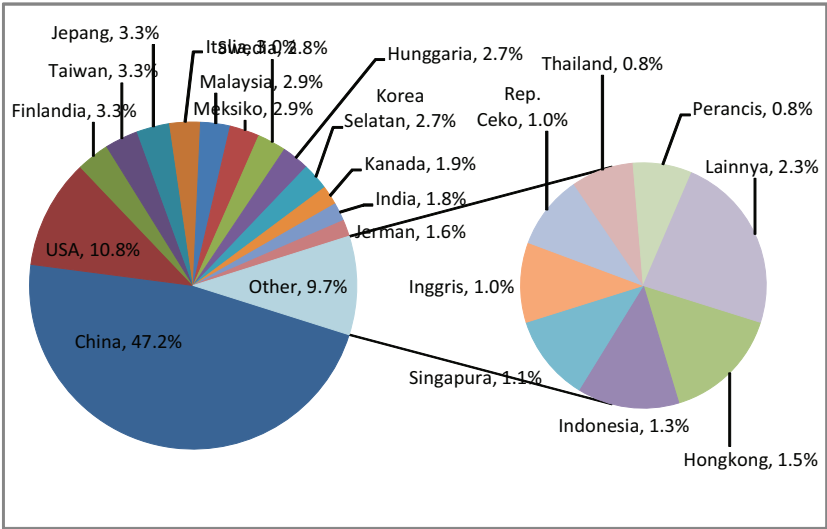
Tabel 8.6 menunjukkan, pada setiap bulannya sepanjang tahun 2009 telah diterbitkan rata-rata sekitar 177 sertifikat dari standardisasi perangkat telekomunikasi asal China. Artinya, dari sertifikat standardisasi perangkat telekomunikasi yang diterbitkan setiap bulannya, 47% merupakan sertifikat untuk perangkat telekomunikasi asal China. Bahkan pada bulan-bulan tertentu seperti bulan Maret, April, Agustus dan Desember diterbitkan lebih dari 200 sertifikat standardisasi perangkat telekomunikasi asal China. Hanya pada bulan November jumlah penerbitan sertifikat perangkat telekomunikasi asal China yang relatif sedikit jumlahnya, namun masih tetap yang paling banyak dibanding perangkat telekomunikasi asal negara lainnya.

Negara berikutnya yang sertifikat standardisasi perangkatnya paling banyak diterbitkan adalah untuk perangkat asal Amerika Serikat. Dalam setiap bulan diterbitkan rata-rata 40 sertifikat dari standardisasi perangkat telekomunikasi asal Amerika Serikat. Sementara untuk perangkat telekomunikasi asal dalam negeri (Indonesia), tidak banyak diterbitkan sertifikasi perangkatnya. Selama tahun 2009, rata-rata hanya lima sertifikat perangkat asal Indonesia yang diterbitkan setiap bulannya.

Tabel 8.6. Jumlah Sertifikat yang dikeluarkan per bulan menurut negara Asal Barang Tahun 2009

Negara	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
China	178	166	227	227	176	169	177	200	124	167	115	205	2131
USA	67	53	47	54	46	40	31	27	33	28	40	23	489
Finlandia	38	1	0	5	36	0	10	24	30	3	1	0	148
Taiwan	18	8	17	14	20	10	13	14	10	5	12	7	148
Jepang	14	10	26	13	10	16	14	6	11	10	4	13	147
Italia	5	7	9	25	7	9	11	12	8	16	14	13	136
Malaysia	13	17	38	5	10	14	6	10	1	6	12	1	133
Meksiko	16	10	9	25	13	2	1	1	5	19	22	10	133
Swedia	24	30	18	20	1	4	2	19	0	4	5	0	127
Hungaria	15	8	18	27	14	2	0	0	5	16	11	6	122
Korea Selatan	5	10	6	8	12	19	10	16	6	12	14	3	121
Kanada	6	1	11	4	9	3	1	4	3	26	11	7	86
India	4	16	5	9	11	2	2	15	1	1	14	2	82
Jerman	7	8	17	5	8	5	4	6	2	7	2	3	74
Hongkong	15	2	18	3	1	4	2	0	19	2	0	2	68
Indonesia	7	2	4	2	5	6	2	8	4	6	9	4	59
Singapura	1	4	2	0	6	3	7	6	12	5	1	3	50
Inggris	2	5	17	1	4	6	3	0	5	0	3	0	46
Rep. Ceko	4	1	2	7	0	2	0	7	1	7	6	6	43
Thailand	6	2	1	10	0	5	2	1	1	5	3	0	36
Perancis	6	4	0	8	3	2	4	2	2	2	1	0	34
Lainnya	4	11	2	13	6	19	9	7	2	17	6	7	103
JUMLAH	455	378	495	485	398	342	316	386	294	366	307	316	4538

Gambar 8.7. Komposisi Penerbitan Sertifikat Stabdarisasi Perangkat menurut Negara Asal.



#### 8.4. Neraca Perdagangan Perangkat Telekomunikasi

Peran strategi standarisasi perangkat bisa dilihat juga dari neraca perdagangan perangkat telekomunikasi yang menggambarkan arus perdagangan masuk (impor) dan keluar (ekspor) perangkat telekomunikasi Indonesia. Neraca perdagangan perangkat telekomunikasi Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan keseimbangan perdagangan (*balance of trade*) yang awalnya positif dengan kecenderungan selisih (*gap*) yang semakin kecil sampai akhirnya menjadi negatif sejak tahun 2008. Sampai dengan tahun 2007, perdagangan perangkat telekomunikasi Indonesia sebenarnya masih surplus dimana ekspor perangkat telekomunikasi baik nilai maupun beratnya masih lebih besar daripada impornya seperti ditunjukkan tabel 8.7. Namun memasuki tahun 2008 meskipun berat ekspornya masih lebih tinggi daripada impornya, namun nilai ekspornya sudah lebih kecil dari nilai impor perangkat telekomunikasi ini. Impor yang terus meningkat ini secara implisit menunjukkan kegiatan pengujian perangkat dan penerbitan sertifikasi perangkat yang akan semakin terus meningkat. Serbuan perangkat telekomunikasi asal impor yang semakin deras membuat standarisasi perangkat menjadi semakin penting untuk menjamin kelayakan dan keamanan dari perangkat telekomunikasi tersebut untuk digunakan.

Tabel 8.7. Ekspor dan Impor Perangkat Telekomunikasi 2005-2008

	Ekspor		Impor	
	Nilai (US\$)	Berat (kg)	Nilai (US\$)	Berat (kg)
2005	916.903.299	76.963.926	203.358.918	28.281.079
2006	912.615.463	63.646.802	209.462.317	22.769.222
2007	791.072.473	61.144.702	664.248.080	18.671.184
2008	1.044.207.325	55.282.207	1.130.915.894	20.398.992
2009	1.886.732.217	42.314.730	2.503.657.803	48.611.492

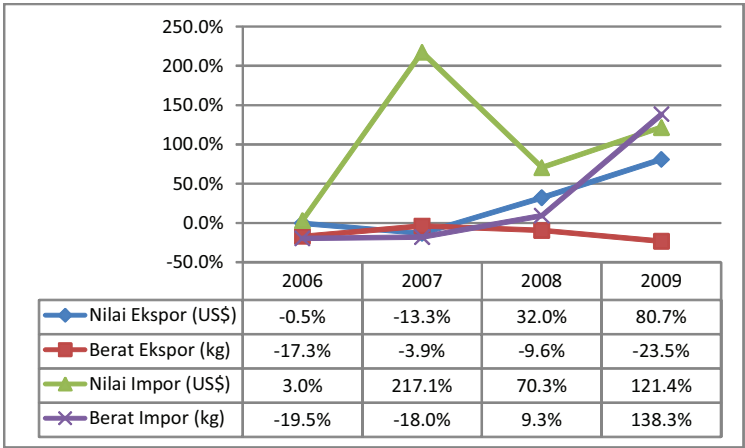
\*) berasal dari jenis barang dengan HS code 8517110000 s/d 8517691000, 8525600000 s/d 8528711000, 8571901010, dan 8443313000 s/d 8443324000

Mulai berubahnya keseimbangan neraca perdagangan perangkat telekomunikasi ini disebabkan oleh pertumbuhan ekspor yang sangat lambat dibandingkan dengan pertumbuhan impornya. Nilai ekspor produk perangkat telekomunikasi Indonesia dalam lima tahun terakhir hanya meningkat rata-rata 24,7% per tahun. Bahkan berat ekspornya justru menunjukkan pertumbuhan yang negatif rata-rata sebesar 13,6% per tahun. Nilai

ekspor dari tahun 2005 ke 2009 secara total hanya meningkat sebesar 105,8% dan beratnya justru menurun 45%. Sementara nilai impor menunjukkan trend yang terus meningkat cukup tinggi dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 102,9% per tahun. Dari tahun 2005 ke tahun 2009, nilai impor bahkan telah meningkat sebesar lebih dari 1000%. Dari sisi beratnya, impor perangkat telekomunikasi menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 27,5%, namun dibandingkan tahun 2005, berat impor produk telekomunikasi ini hanya meningkat sebesar 71,9%.

Trend penurunan ekspor dan penurunan impor ini juga bisa dilihat dari grafik pertumbuhannya seperti ditunjukkan oleh gambar 8.8. Pertumbuhan volume ekspor meskipun menunjukkan trend meningkat, namun peningkatannya rendah. Sementara pertumbuhan volume impornya meskipun fluktuatif tapi trend peningkatannya sangat tinggi. Sementara pertumbuhan nilai ekspor menunjukkan trend penurunan meskipun lambat. Disisi lain pertumbuhan nilai impor menunjukkan trend peningkatan yang tinggi

Gambar 8.8. Trend Pertumbuhan Ekspor dan Impor Perangkat Telekomunikasi



Peningkatan impor yang semakin tinggi membuat peran standardisasi perangkat menjadi semakin penting. Pertumbuhan impor yang semakin tinggi membuat intensitas kegiatan standardisasi semakin tinggi untuk memastikan perangkat yang masuk layak dan aman untuk digunakan.

## Bab 9

# Bidang Pengujian Perangkat Telekomunikasi

Penyajian data statistik pada bidang pengujian perangkat akan menampilkan data-data pengujian yang tercermin dari data penerbitan SP2 dan data Rekapitulasi Hasil Uji dari Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) tahun 2008 - 2009. Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi adalah Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Kegiatan pengujian yang dilakukan di BBPPT meliputi proses pengujian alat/perangkat telekomunikasi antara lain : Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Radio, Alat/Perangkat Telekomunikasi Berbasis Non Radio, Electromagnetic Compatibility Alat/Perangkat Telekomunikasi, Pelayanan Kalibrasi Perangkat Telekomunikasi, dan Jasa Penyewaan Alat. Produk atau hasil akhir dari pengujian ini adalah bukti hasil pengujian alat yang diterbitkan oleh Balai Besar Pengujian perangkat Telekomunikasi (RHU).

Proses pengujian diawali dengan pengajuan oleh pemohon (pemilik alat) lengkap dengan persyaratan yang dibutuhkan ke BBPPT. Permohonan selanjutnya diperiksa kelengkapan persyaratan pengujian. Setelah dinyatakan lengkap, pengujian terhadap alat/perangkat dilakukan sesuai dengan jenis alatnya dan laboratorium atau saran pengujian yang tersedia di BBPPT. Hasil pengujian dokumentasikan dalam bentuk Rekapitulasi Hasil Uji dan data hasil pengujian disampaikan ke Direktorat Standarisasi Ditjen Postel.

Terhadap pelaksanaan pengujian, dikenakan tarif pengujian yang berbeda-beda sesuai dengan jenis pengujian dan fungsi alat yang diuji. Pendapatan dari pelaksanaan pengujian merupakan penerimaan negara bukan pajak di Ditjen Postel.

### 9.1. Ruang Lingkup

Data yang dimunculkan dalam statistik bidang pengujian perangkat telekomunikasi berupa rekapitulasi hasil uji (RHU) dan Surat Perintah Pembayaran (SP2) atas pengujian yang telah dilakukan. Kedua jenis instrumen ini diterbitkan oleh BBPPT sebagai pelaksana pengujian perangkat di Ditjen Postel. Setiap alat/perangkat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia wajib melalui pengujian, sebelum digunakan dan diperdagangkan di wilayah Indonesia dengan informasi pengujian yang terdiri dari nama pemohon, nama alat, merek/type, asal negara pembuat dan informasi nomor dan tanggal RHU. Pengujian dilakukan terhadap setiap perangkat yang diajukan oleh pemohon pengujian yang berbeda.

Pada bagian pertama, data yang disajikan dan dianalisis adalah data rekapitulasi hasil uji atas pengujian yang dilakukan terhadap perangkat-perangkat telekomunikasi oleh BBPPT. Penyajian meliputi jumlah pengujian bulanan dan tahunan dan jumlah perangkat yang diuji menurut kelompok jenis perangkat dan negara asal perangkat. Pada bagian kedua penyajian data adalah besarnya penagihan dari jasa pengujian yang tercantum dalam Surat Perintah Pembayaran (SP2). Data yang digunakan berasal dari data penanganan SP2 yang menyediakan informasi nama permohonan, nama alat, merek/type, negara pabrik pembuat, tanggal diterima, jenis perangkat, besarnya pembayaran dan waktu pembayaran. Penyajian data SP2 juga akan dilakukan menurut bulan, kelompok jenis perangkat dan negara asal perangkat. Secara keseluruhan, lingkup penyajian data statistik pengujian perangkat ini.

- 1) RHU bulanan Januari-Desember tahun 2008 menurut negara asal perangkat
- 2) RHU bulanan Januari-Desember tahun 2008 menurut kelompok jenis perangkat
- 3) RHU bulanan Januari-Desember tahun 2009 menurut negara asal perangkat
- 4) RHU bulanan Januari-Desember tahun 2009 menurut kelompok jenis perangkat
- 5) SP2 bulanan Januari-Desember tahun 2009 menurut negara asal perangkat
- 6) SP2 bulanan Januari-Desember tahun 2009 menurut kelompok jenis perangkat



## 9.2. Statistik Pengujian Perangkat

### 9.2.1. Hasil Pengujian (RHU)

Selama tahun 2008, Balai Besar Pengujian Perangkat telah melakukan pengujian terhadap 2312 perangkat telekomunikasi dari berbagai jenis dan negara asal perangkat. Pengujian yang dilakukan tersebar selama 12 bulan selama tahun 2008. Persebaran intensitas pengujian yang dilakukan BBPPT menunjukkan ada bulan-bulan dimana intensitas pengujian cukup tinggi dan sebaliknya bulan-bulan dimana perangkat yang diuji tidak terlalu padat. Kuartal III pada tahun 2008 adalah periode dimana pengujian perangkat cukup intensif dilakukan. Pada periode ini dilakukan pengujian rata-rata sebanyak 264 perangkat telekomunikasi per bulan atau sekitar 11 perangkat per hari. Sementara kuartal I yang meliputi bulan Januari, Februari dan Maret adalah periode dimana pengujian perangkat tidak terlalu intensif dilakukan. Pada periode ini pengujian dilakukan terhadap rata-rata sebanyak 125 perangkat per bulan atau sekitar 5 perangkat per hari.

Tabel 9.1. Rekapitulasi Hasil Pengujian Perangkat menurut Negara Asal Tahun 2008

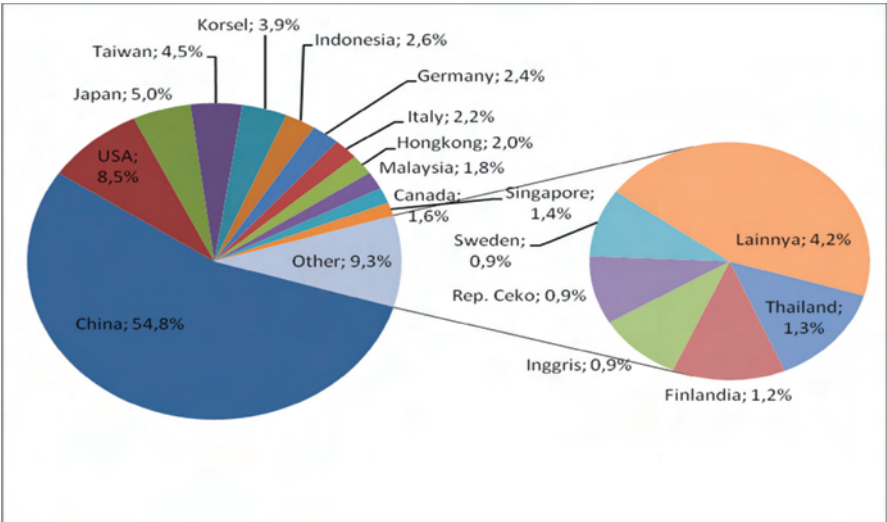
Negara	BULAN												Total
	Jan	Feb	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
China	40	48	69	105	97	125	163	130	176	141	98	74	1266
USA	25	9	13	23	24	19	20	11	12	17	16	8	197
Japan	12	6	8	10	21	6	11	7	9	4	16	6	116
Taiwan	8	3	6	3	10	12	14	13	16	7	8	3	103
Korsel	11	8	6	4	12	5	8	9	11	6	9	1	90
Indonesia	1	0	0	1	23	2	8	2	16	1	6	1	61
Germany	9	0	2	0	2	6	3	6	5	12	8	3	56
Italy	6	1	1	0	6	16	6	2	4	1	3	4	50
Hongkong	1	3	3	0	3	4	4	4	7	6	4	8	47
Malaysia	2	5	0	1	0	1	1	15	6	3	8	0	42
Canada	8	6	1	2	2	4	2	2	4	1	1	4	37
Singapore	1	2	1	1	2	1	5	8	7	4	0	0	32
Thailand	1	3	2	0	0	0	7	1	10	2	2	2	30
Finlandia	5	0	8	6	2	2	4	0	0	1	0	0	28
Inggris	0	1	2	0	2	1	3	2	1	5	0	4	21
Rep. Ceko	0	4	1	0	1	0	1	7	0	2	4	0	20
Sweden	1	0	0	1	3	2	0	2	9	1	0	1	20
Lainnya	5	5	11	8	11	3	6	6	7	15	14	5	96
Jumlah	136	104	134	165	221	209	266	227	300	229	197	124	2312

Pengujian juga tidak berlangsung intensif pada akhir tahun dimana pada bulan Desember 2008 hanya dilakukan pengujian hanya dilakukan terhadap 124 perangkat seperti terlihat pada Tabel 9.1. Pola intensitas pengujian tiap bulannya ini juga menunjukkan volume jenis

perangkat yang masuk untuk digunakan di Indonesia. Dari pola fluktuasi penerbitan RHU ini juga menunjukkan bahwa pada bulan-bulan tertentu seperti pada kuartal III 2008 banyak perangkat telekomunikasi yang masuk untuk digunakan di wilayah Indonesia. Sebaliknya kuartal I adalah periode dimana belum banyak perangkat telekomunikasi yang masuk wilayah Indonesia.

Jika dilihat dari negara asal perangkat yang diuji pada tahun 2008, gambar 9.1 menunjukkan bahwa perangkat asal China mendominasi perangkat telekomunikasi yang diuji di BBPPT selama tahun 2008. Lebih dari separuh atau tepatnya 54,8% perangkat yang diuji di BBPPT pada tahun 2008 adalah perangkat asal China. Secara implisit ini sekaligus menunjukkan bahwa perangkat telekomunikasi asal China yang paling banyak masuk dan mendominasi impor perangkat telekomunikasi di Indonesia. Urutan berikutnya dari perangkat telekomunikasi yang banyak dilakukan pengujian adalah perangkat asal Amerika Serikat, Jepang dan Taiwan. Namun dibandingkan dengan China, proporsi perangkat telekomunikasi asal negara ini yang diuji jauh lebih kecil dibanding perangkat telekomunikasi asal China. Proporsi perangkat telekomunikasi asal Amerika Serikat yang diuji mencapai 8,5%, sementara perangkat telekomunikasi asal Jepang dan Taiwan proporsinya masing-masing 5% dan 4,5%.

Gambar 9.1. Komposisi perangkat yang Diuji menurut Negara Asal Tahun 2008



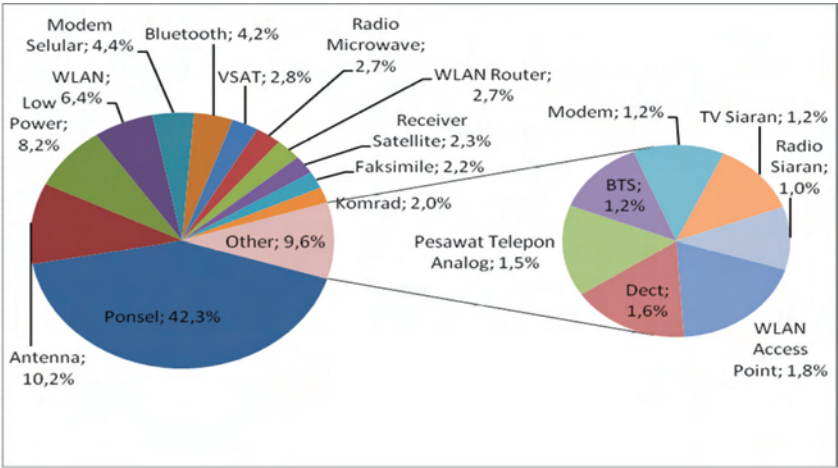
Jika dilihat dari jenis perangkat yang diuji dan sebarannya perbulan, menunjukkan bahwa perangkat yang paling banyak diuji setiap bulannya pada tahun 2008 adalah jenis telepon seluler (Ponsel). Tabel 9.2 menunjukkan pada pada tahun 2008, kecuali pada bulan Februari dan Desember, dilakukan pengujian terhadap lebih dari 50 telepon seluler setiap bulannya. Bahkan pada bulan Juli, September dan Oktober yang merupakan waktu-waktu puncak intensitas pengujian perangkat, telah dilakukan pengujian terhadap lebih dari 100 telepon seluler setiap bulannya. Secara total, pada tahun 2008 telah dilakukan pengujian di BBPT terhadap 924 telepon seluler. Jenis perangkat lain yang banyak diuji adalah untuk perangkat Antenna dan Low Power. Namun pengujian terhadap perangkat jenis Antenna dan Low Power hanya banyak dilakukan pada sekitar kuartal III tahun 2009 dan volume yang diuji pada periode tersebut juga masih berkisar antara 24 sampai 34 perangkat untuk Antenna dan 15 sampai 25 perangkat untuk Low Power. Secara total, selain Tlepon seluler, Antenna, Low Power dan WLAN, jumlah pengujiannya masih kurang dari 100 selama tahun 2009.

Tabel 9.2. Rekapitulasi Hasil Pengujian Perangkat menurut Jenis Perangkat Tahun 2008

Jenis Perangkat	BULAN												Total
	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
Ponsel	58	44	57	80	71	80	101	77	125	108	80	43	924
Antenna	7	9	7	11	15	24	24	34	43	34	8	6	222
Low Power	16	7	12	13	9	15	19	11	25	17	21	14	179
WLAN	3	3	4	12	31	25	14	13	16	10	5	4	140
Modem Selular	4	4	2	5	12	8	16	7	6	10	14	8	96
Bluetooth	3	6	0	4	10	7	7	7	15	13	8	11	91
VSAT	16	7	0	8	1	2	3	4	6	5	2	8	62
Rad-Microwave	10	4	7	2	11	4	5	8	1	4	1	3	60
WLAN Router	0	0	1	4	10	11	15	9	5	3	1	1	60
Receiver Satellite	2	2	13	3	13	4	7	4	0	0	1	2	51
Faksimile	0	2	8	3	0	0	9	12	5	0	8	0	47
Komrad	2	1	2	0	5	5	0	9	1	5	13	0	43
WLAN Access Point	2	0	2	2	5	12	4	5	4	0	2	2	40
Dect	0	0	3	0	2	0	4	5	5	5	6	5	35
Pesawat Telepon Analog	1	6	2	1	0	0	12	2	0	4	1	3	32
BTS	2	0	2	2	3	1	0	5	6	2	1	3	27
Modem	2	0	0	3	4	2	3	4	3	1	2	3	27
TV Siaran	0	0	2	1	0	4	7	2	1	0	5	4	26
Radio Siaran	0	0	0	0	0	0	0	0	18	1	3	0	22
<b>JUMLAH</b>	<b>128</b>	<b>95</b>	<b>124</b>	<b>154</b>	<b>202</b>	<b>204</b>	<b>250</b>	<b>218</b>	<b>285</b>	<b>222</b>	<b>182</b>	<b>120</b>	<b>2184</b>

Besarnya jumlah dan dominannya telepon seluler dalam jenis perangkat yang diuji di BBPPT selama tahun 2008 terlihat jelas dalam komposisi jenis perangkat yang diuji pada tahun tersebut. Gambar 9.2 menunjukkan 42,3% dari perangkat yang diuji adalah dari jenis telepon seluler. Proporsi ini jauh lebih besar daripada perangkat lainnya. Perangkat dari jenis Antenna yang merupakan terbesar kedua jenis perangkat yang diuji, proporsinya hanya 10% dari total jumlah perangkat yang diuji. Demikian pula dengan low power dan WLAN yang proporsinya masing-masing hanya 8,2% dan 6,4% dari total perangkat yang diuji. Perangkat jenis bluetooth dan modem seluler juga mulai banyak yang masuk dan diuji di BBPPT dengan proporsi yang mulai terlihat signifikan yaitu masing-masing 4,4% dan 4,2%.

Gambar 9.2. Komposisi perangkat yang Diuji menurut Jenis Perangkat Tahun 2008



Pada tahun 2009, jumlah perangkat telekomunikasi yang diuji di BBPT mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya dengan penurunan sebesar 7,4% dibanding tahun 2008. Kuartal III yang pada tahun 2008 merupakan puncak intensitas pengujian perangkat, tidak berlangsung kembali di tahun 2009 dan menjadi salah satu penyebab menurunnya jumlah perangkat yang diuji. Pada tahun 2009, jumlah per4,4% dan perangkat telekomunikasi yang diuji pada kuartal III ini justru relatif lebih rendah dibanding bulan lain. Seperti terlihat pada tabel 9.3, intensitas pengujian perangkat yang tinggi pada tahun 2009 hanya terjadi di bulan Juni dan bulan November. Sementara pada bulan-bulan lainnya, jumlah pengujian perangkat kurang dari 200 setiap bulannya. Secara rata-rata, pengujian

perangkat pada tahun 2009 dilakukan terhadap 178 perangkat telekomunikasi setiap bulannya atau 7-8 perangkat tiap hari kerja.

Meskipun secara total jumlah perangkat telekomunikasi yang diuji pada tahun 2009 menurun dibanding tahun 2008, namun untuk perangkat yang berasal dari China menunjukkan peningkatan jumlah yang diuji di BBPPT. Namun peningkatan jenis perangkat dari China yang diuji di BBPPT pada tahun 2009 hanya mencapai hampir 2%. Meskipun demikian, ditengah penurunan yang terjadi secara total, peningkatan jumlah perangkat telekomunikasi asal China yang diuji di BBPPT menunjukkan semakin meningkatnya perangkat telekomunikasi asal negeri ini yang masuk ke pasar Indonesia

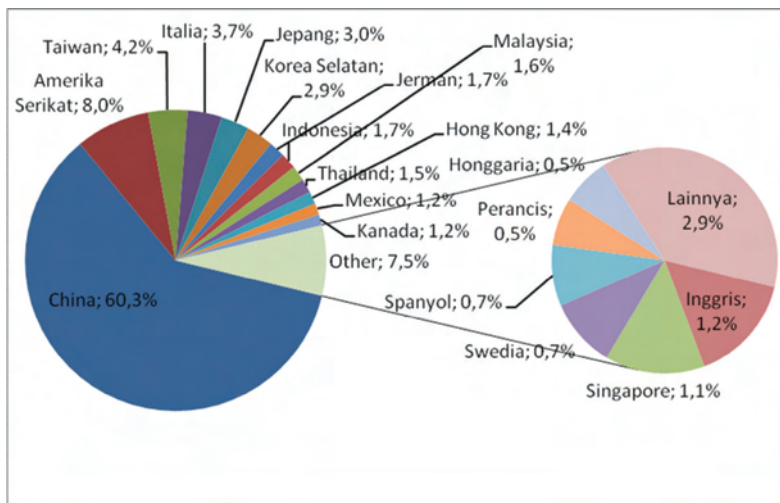
Tabel 9.3. Rekapitulasi Hasil Pengujian Perangkat menurut Negara Asal Tahun 2009

Negara	BULAN												Total
	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
China	78	77	81	127	102	136	129	101	94	98	150	117	1290
USA	9	10	20	18	20	17	4	12	13	15	19	14	171
Taiwan	10	8	9	6	13	7	7	2	11	6	4	7	90
Italia	4	1	17	1	10	11	8	6	3	7	7	4	79
Jepang	2	14	7	8	3	2	7	8	0	1	8	5	65
Korsel	3	5	5	5	9	7	8	3	4	7	6	0	62
Jerman	7	9	3	3	5	1	1	2	0	1	4	1	37
Indonesia	3	3	1	5	1	2	5	3	0	7	2	5	37
Malaysia	4	0	3	4	4	2	2	0	4	1	10	1	35
Thailand	0	2	3	8	4	1	3	1	2	3	3	2	32
Hong Kong	12	3	0	5	2	5	0	1	1	0	0	0	29
Mexico	1	1	7	2	1	2	0	3	0	6	3	0	26
Kanada	1	2	6	2	3	1	0	1	1	2	3	3	25
Inggris	1	2	1	5	0	2	3	2	1	4	1	3	25
Singapore	1	4	0	2	0	1	3	7	0	0	0	5	23
Swedia	9	3	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	16
Spanyol	0	0	1	0	0	1	3	0	2	2	1	4	14
Perancis	0	0	3	2	1	4	0	0	1	0	0	0	11
Hongaria	1	5	2	0	0	0	0	0	0	2	1	0	11
Lainnya	4	2	4	8	7	5	4	4	4	11	5	3	61
<b>JUMLAH</b>	<b>150</b>	<b>151</b>	<b>173</b>	<b>212</b>	<b>185</b>	<b>207</b>	<b>187</b>	<b>156</b>	<b>144</b>	<b>173</b>	<b>227</b>	<b>174</b>	<b>2139</b>

Ditengah penurunan perangkat telekomunikasi yang diuji secara total, peningkatan jumlah perangkat telekomunikasi asal China yang diuji di BBPPT meningkat ini menunjukkan semakin meningkatnya perangkat telekomunikasi asal negeri ini yang masuk ke pasar Indonesia

Dari sisi komposisi perangkat telekomunikasi yang diuji tahun di BBPPT 2009, gambar 9.3 menunjukkan semakin dominannya perangkat telekomunikasi asal China yang diuji di BBPPT. Jika pada tahun 2008 proporsinya 54,8%, maka pada tahun 2009 proporsi perangkat telekomunikasi asal China yang diuji mencapai 60,3%. Perangkat telekomunikasi asal negara lain yang diuji di BBPPT yang cukup terlihat proporsinya hanya perangkat telekomunikasi asal Amerika Serikat dan Taiwan. Namun proporsi perangkat telekomunikasi asal kedua negara ini proporsinya masing-masing hanya 8% dan 4,2%. Perangkat telekomunikasi asal negara lain yang diuji di BBPPT masih sangat rendah proporsinya. Kondisi ini menunjukkan semakin dominannya produk perangkat telekomunikasi asal China yang masuk ke Indonesia dibanding perangkat telekomunikasi asal negara lainnya.

Gambar 9.3. Komposisi perangkat yang Diuji menurut Negara Asal Tahun 2009



Sebagaimana kondisi tahun 2008, pada tahun 2009 Perangkat telekomunikasi yang paling banyak diuji adalah dari jenis telepon seluler. Tabel 9.4 menunjukkan bahwa selama tahun 2009 telah dilakukan pengujian terhadap 755 perangkat telekomunikasi dari jenis telepon seluler atau rata-rata 63 pengujian setiap bulan atau sekitar 2 sampai 3 pengujian per hari kerjanya. Namun dibanding tahun 2008. Jumlah perangkat telepon seluler yang diuji ini lebih sedikit dan terjadi penurunan sekitar 18,3% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan justru terutama terjadi pada pengujian perangkat telekomunikasi dari jenis modem seluler

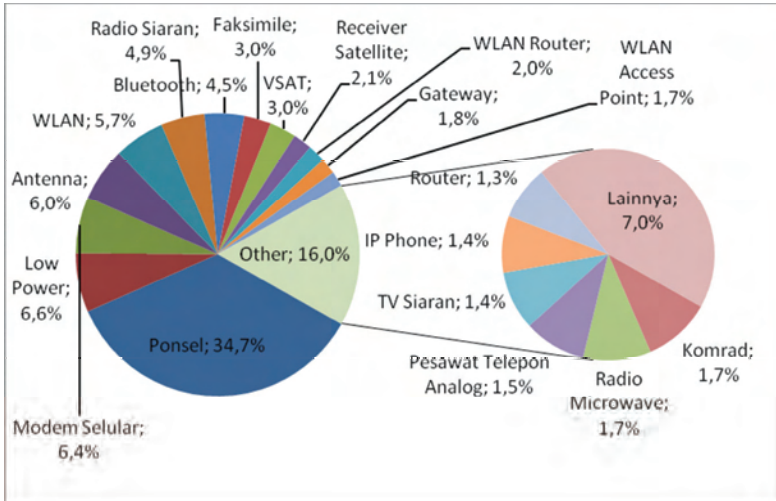
dan radio siaran. Pengujian terhadap dua jenis perangkat telekomunikasi ini meningkat masing-masing sebesar 47% dan 386%.

Tabel 9.4. Rekapitulasi Hasil Pengujian Perangkat menurut Jenis Perangkat Tahun 2009

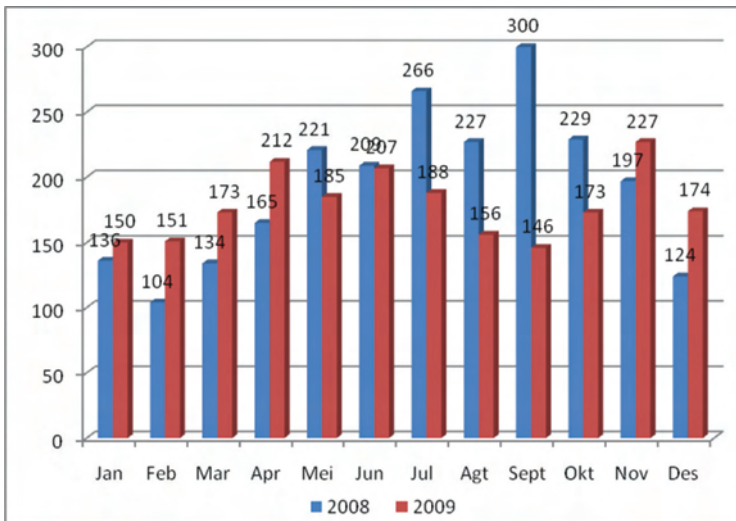
Negara	BULAN												Total
	Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agst	Sept	Okt	Nov	Des	
Ponsel	50	43	45	82	53	77	75	53	52	69	92	64	755
Low Power	14	16	9	11	18	8	14	8	5	9	6	25	143
Modem Selular	5	12	12	9	16	20	9	9	14	14	6	12	138
Antenna	19	10	11	10	18	7	4	2	10	16	16	8	131
WLAN	16	10	3	10	7	11	14	12	12	10	13	6	124
Radio Siaran	1	3	30	7	10	10	13	9	6	11	4	3	107
Bluetooth	4	11	8	13	7	6	8	12	4	10	8	5	97
Faksimile	2	9	3	11	4	5	6	3	4	2	17	0	66
VSAT	3	6	14	9	6	11	2	3	4	4	2	1	65
Rec- Satellite	1	1	0	0	5	12	7	11	1	4	1	3	46
WLAN Router	3	2	3	7	4	1	6	3	0	2	5	7	43
Gateway	2	3	11	3	1	12	3	0	1	0	3	0	39
WLAN AccPoint	2	2	6	4	3	3	4	6	0	1	3	3	37
Komrad	4	5	0	3	3	1	1	5	3	1	6	4	36
Rad- Microwave	0	0	5	5	1	0	0	1	6	1	16	1	36
Psw Telp Analog	6	3	4	4	2	0	2	2	5	4	0	1	33
TV Siaran	6	1	0	2	3	2	2	1	0	4	2	8	31
IP Phone	0	0	0	1	1	2	0	1	8	2	11	4	30
Router	1	0	0	7	1	2	0	1	5	2	2	8	29
Lainnya	11	14	9	14	22	17	17	14	4	7	13	11	153
Jumlah	150	151	173	212	185	207	188	156	146	173	227	174	2173

Komposisi jenis perangkat telekomunikasi yang diuji pada tahun 2009 menunjukkan poroporsi jumlah pengujian terhadap perangkat telepon seluler juga mengalami penurunan. Proporsi jumlah pengujian terhadap perangkat seluler menurun dari 42,3% menjadi 34,7%. Hal yang sama terjadi pada proporsi pengujian untuk perangkat Antenna dan Low Power yang menurun dari 10,2% dan 8,2% pada tahun 2008 menjadi hanya 6,6% dan 6,0%. Sebaliknya proporsi pengujian terhadap perangkat telekomunikasi jenis model seluler dan radio siaran meningkat dari hanya 4,4% dan 1% pada tahun 2008 menjadi 6,4% dan 4,9% pada tahun 2009 seperti ditunjukkan pada gambar 9.4. Gambar 9.4 juga menunjukkan cenderung lebih banyak dan relatif lebih merata jenis perangkat telekomunikasi yang diuji oleh BBPPT.

Gambar 9.4. Komposisi perangkat yang Diuji menurut Jenis Perangkat Tahun 2009



Gambar 9.5. Perbandingan jumlah perangkat yang diuji setiap bulannya Tahun 2008 dan 2009



Perbandingan jumlah perangkat telekomunikasi yang diuji tahun 2008 dan 2009 yang diperlihatkan oleh gambar 9.5 menunjukkan adanya perbedaan pola intensitas pengujian. Pengujian perangkat telekomunikasi di BBPPT pada tahun 2008 cenderung menunjukkan trend yang semakin meningkat dari awal tahun sampai puncaknya di akhir kwartal III tahun



2008, untuk kemudian menurun kembali di akhir tahun. Sementara pengujian perangkat telekomunikasi pada 2009 lebih cenderung fluktuatif dari bulan ke bulan. Gambar 9.5 juga menunjukkan bahwa pengujian perangkat pada semester I tahun 2009 lebih banyak daripada periode yang sama tahun 2008. Namun pada semester II, jumlah perangkat telekomunikasi yang diuji di BBPPT lebih banyak di tahun 2008 dibanding tahun 2009 terutama pada kuartal III.

Jika dilihat secara silang antara jenis perangkat dan negara asal perangkat telekomunikasi yang diuji, tabel 9.5 menunjukkan bahwa hampir untuk semua jenis perangkat telekomunikasi yang diuji di BBPPT pada tahun 2009, sebagian besar berasal dari China kecuali untuk perangkat jenis Radio Siaran dan VSAT. Untuk perangkat telekomunikasi jenis VSAT yang diuji di BBPPT, paling banyak adalah perangkat yang berasal dari Amerika Serikat. Tidak satupun perangkat jenis VSAT yang berasal dari China yang diuji di BBPPT. Sementara untuk perangkat jenis radio siaran, paling banyak yang diuji adalah perangkat asal Italia, Amerika Serikat dan Indonesia.

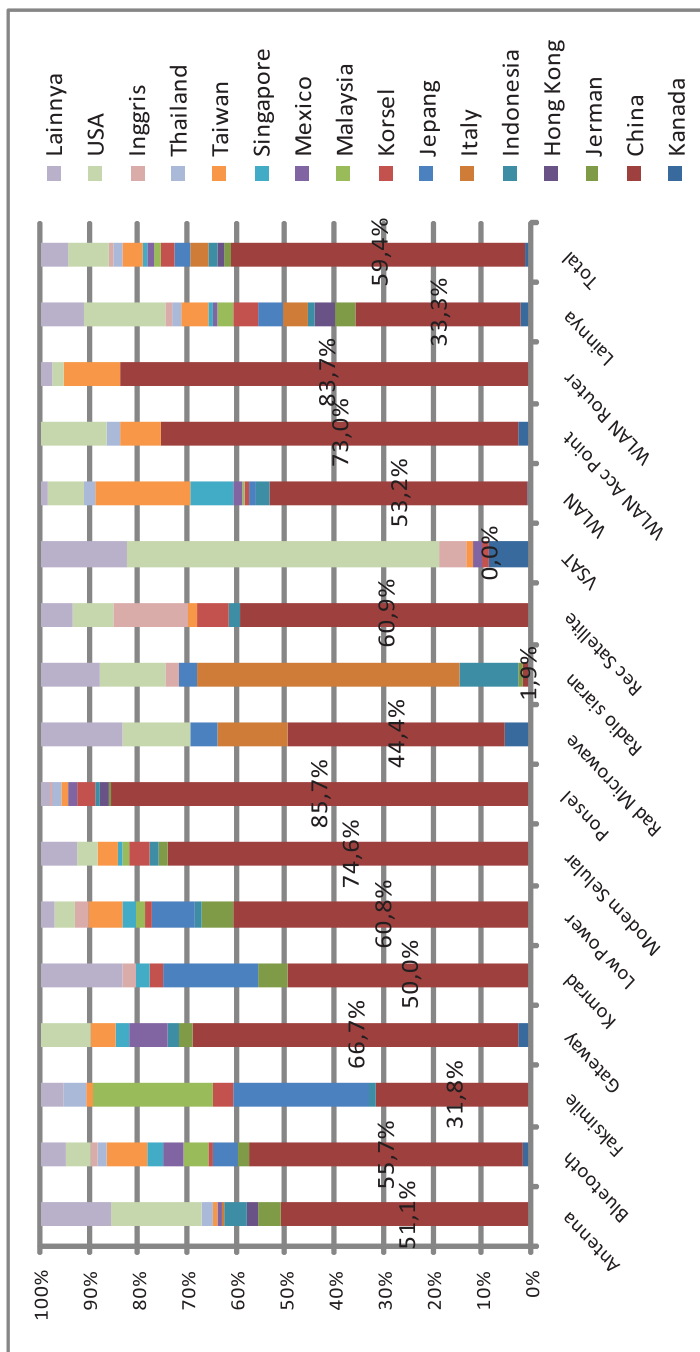
Dominasi perangkat asal China pada hampir semua jenis perangkat yang diuji pada tahun 2009 terutama terlihat pada gambar 9.6. Dari gambar tersebut terlihat bahwa untuk telepon seluler yang menjadi jenis perangkat telekomunikasi paling banyak diuji, sekitar 85,7% adalah telepon seluler yang berasal dari China. Proporsi ini sekali lagi menegaskan dominasi telepon seluler asal China yang masuk ke Indonesia. Apalagi telepon seluler merupakan jenis perangkat telekomunikasi yang paling banyak dilakukan proses pengujian di BBPPT. Dominasi yang hampir serupa juga terjadi untuk perangkat telekomunikasi jenis WLAN Router, WLAN Acces Point dan modem seluler dimana proporsi perangkat telekomunikasi jenis tersebut yang diuji di BBPPT masing-masing mencapai 84%, 73% dan 74,6%.

Tabel 9.5. Jumlah perangkat yang diuji menurut jenis perangkat dan negara asal tahun 2009

Jenis Perangkat	Negara Asal															Total	
	Kana-da	China	Jer-man	Hong Kong	Indo-nesia	Italia	Je-pang	Korsel	Malay-sia	Meksi-ko	Singa-pore	Tai-wan	Thai-land	Inggri-s	USA		Lain-nya
Antenna	0	67	6	3	6	1	0	0	0	1	0	1	3	0	24	19	131
Bluetooth	2	54	2	0	0	0	5	1	5	4	3	8	2	1	5	4	96
Faksimile	0	21	0	0	1	0	18	3	16	0	0	1	3	0	0	3	66
Gateway	1	26	1	0	1	0	0	0	0	3	1	2	0	0	4	0	39
Komrad	0	18	2	0	0	0	7	1	0	0	1	0	0	1	0	6	36
Low Power	0	87	9	0	2	0	13	2	2	0	4	10	0	4	6	4	143
Modem Selular	0	103	3	0	2	0	0	6	2	0	1	6	0	0	6	9	138
Ponsel	5	647	1	14	4	0	0	30	0	13	0	12	15	1	0	13	755
Rad- Microwave	2	16	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	5	6	36
Radio siaran	0	2	1	0	13	59	4	0	0	0	0	0	0	3	15	10	107
Rec- Satellite	0	28	0	0	1	0	0	3	0	0	0	1	0	7	4	2	46
VSAT	6	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	4	43	9	65
WLAN	1	66	0	0	3	0	2	1	1	2	11	24	3	0	9	1	124
WLAN Access Point	1	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	5	0	37
WLAN Router	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	1	43
Lainnya	7	69	12	12	4	14	14	14	9	2	2	16	5	4	47	47	278
Total	25	1267	37	29	37	79	65	62	35	26	23	90	32	25	174	134	2140

Hampir 86% perangkat telekomunikasi jenis telepon seluler yang diuji di BBPPT adalah telepon seluler yang berasal dari China. Komposisi ini kembali menegaskan dominanya produk telepon seluler asal China yang masuk ke Indonesia dan melalui pengujian di BBPPT.

Gambar 9.6. Komposisi jumlah perangkat yang diuji menurut jenis perangkat dan negara asal tahun 2009



### 9.2.2. Surat Perintah Pembayaran (SP2).

Surat perintah pembayaran (SP2) atas pengujian yang dilakukan pada tahun 2009 menunjukkan adanya fluktuasi jumlah maupun nilai pembayaran setiap bulannya. Dari tabel 9.6 yang menunjukkan jumlah penerbitan SP2 dan nilai pembayarannya terlihat penerbitan SP2 pada tahun 2009 cenderung tinggi pada kuartal antara II dan kuartal IV. Rata-rata setiap bulan pada tahun 2009 diterbitkan 192 buah, namun pada kuartal II SP2 yang diterbitkan mencapai rata-rata 202 setiap bulannya dan pada kuartal IV mencapai rata-rata 213 setiap bulannya.

Dari sisi nilai pembayarannya, penerbitan SP2 dengan total nilai pembayaran terbesar adalah pada bulan Oktober 2009 dengan nilai sekitar Rp. 1,57 Milyar dari 232 SP2 yang diterbitkan. Sementara untuk penerbitan SP2 bulan Januari dengan jumlah penerbitan SP2 sebanyak 182, total nilai pembayarannya hanya Rp. 865,7 juta. Dari rata-rata nilai per SP2 yang diterbitkan, terlihat juga bahwa rata-rata nilai per SP2 yang paling tinggi ada pada penerbitan SP2 di bulan Oktober yaitu sebesar Rp. 6,7 juta.

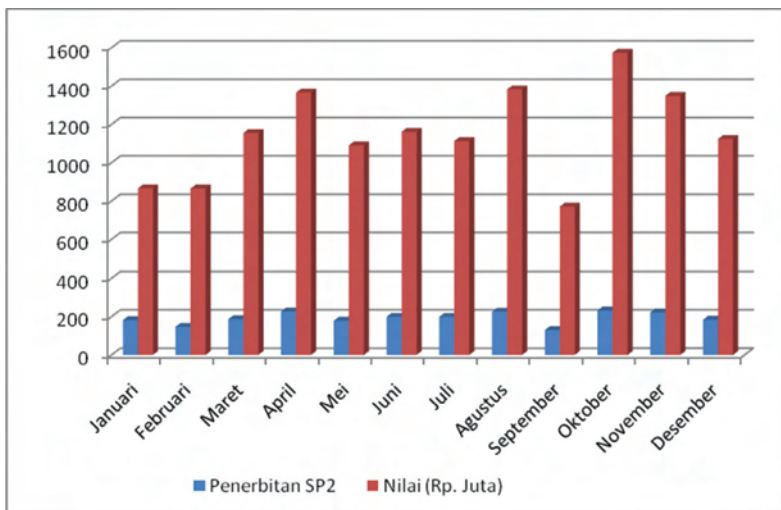
Tabel 9.6. Jumlah dan Nilai Penanganan Surat Perintah Pembayaran (SP2) Tahun 2009

No	Bulan	Jumlah SP2	Nilai Pembayaran (Rp)	Rata-Rata nilai per SP2 (Rp)
1	Januari	182	865.700.000	4.756.593
2	Februari	147	865.000.000	5.884.354
3	Maret	187	1.154.000.000	6.171.123
4	April	227	1.365.000.000	6.013.216
5	Mei	179	1.090.000.000	6.089.385
6	Juni	199	1.160.000.000	5.829.146
7	Juli	199	1.112.500.000	5.590.452
8	Agustus	226	1.382.000.000	6.115.044
9	September	129	771.500.000	5.980.620
10	Oktober	232	1.573.000.000	6.780.172
11	November	222	1.348.000.000	6.072.072
12	Desember	184	1.123.000.000	6.103.261

Lebih jauh, gambar 9.7 juga menunjukkan fluktuasi bulanan yang terjadi pada jumlah penerbitan SP2 dan total nilai pembayarannya. Dari pola tersebut terlihat bahwa dari sisi total nilai penerimaan, total penerimaan dari SP2 paling tinggi terjadi pada bulan-bulan Oktober, Agustus, April dan November. Sementara bulan-bulan dengan total penerimaan rendah terjadi pada bulan September dan Januari. Dari pola tersebut terlihat bahwa bulan

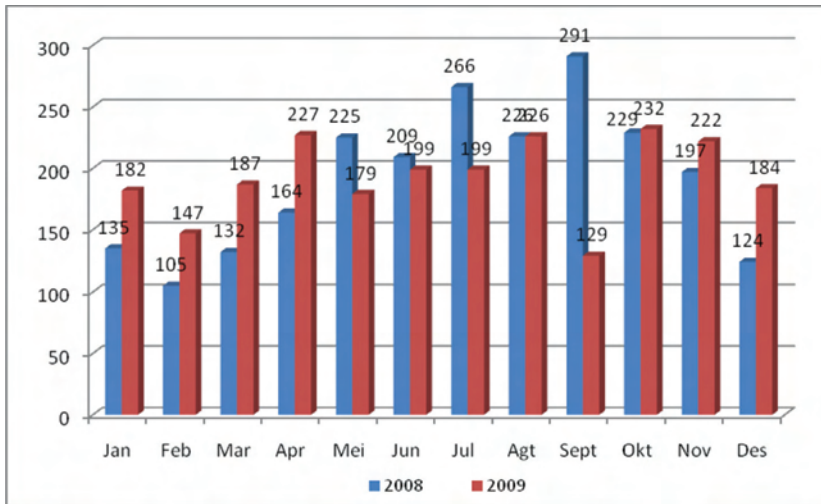
dengan penerbitan SP2 yang rendah juga cenderung menghasilkan total penerimaan yang juga rendah. Namun bulan dengan penerbitan SP2 yang tinggi tidak berarti menghasilkan total penerimaan SP2 yang cukup tinggi.

Gambar 9.7. Fluktuasi Jumlah dan Nilai Penanganan SP2 Tahun 2009



Dibandingkan tahun 2008, tidak terjadi peningkatan yang signifikan dalam penerbitan SP2 pada tahun 2009 dimana hanya terdapat penambahan 10 buah SP2 pada tahun 2009. Meskipun demikian, terdapat perbedaan fluktuasi bulanan antara penerbitan SP2 tahun 2008 dengan SP2 tahun 2009. Penerbitan SP2 tahun 2008 menunjukkan trend yang cenderung meningkat dari awal tahun dengan puncaknya pada kuartal III dan kembali menurun. Sementara penerbitan SP2 pada tahun 2009 cenderung fluktuatif dari bulan ke bulan namun dengan deviasi jumlah yang tidak terlalu besar antar bulan. Pada tahun 2009, tidak terdapat bulan dengan penerbitan SP2 yang sangat besar jauh diatas bulan-bulan lainnya seperti terlihat pada gambar 9.8. Sementara penerbitan SP2 tahun 2008 menunjukkan adanya deviasi jumlah yang cukup besar seperti penerbitan SP2 yang hanya sebanyak 105 buah pada bulan Februari, namun mencapai 291 buah pada bulan September.

Gambar 9.8 Perbandingan Penerbitan SP2 per bulan Tahun 2008 dan 2009



Jika dilihat dari negara asal perangkat yang diterbitkannya SP2, perangkat telekomunikasi dari China paling banyak yang diterbitkan SP2nya. Pada tahun 2009 telah diterbitkan 1377 SP2 untuk perangkat telekomunikasi asal China sebagaimana terlihat pada tabel 9.7. Jumlah ini jauh lebih besar daripada penerbitan SP2 atas perangkat telekomunikasi asal negara lainnya. Jumlah terbesar kedua SP2 yang diterbitkan adalah SP2 atas perangkat dari Amerika Serikat, namun dengan jumlah hanya 202 buah. Demikian juga dengan perangkat dari Taiwan yang jumlah penerbitan SP2-nya hanya 104.

Jumlah penerbitan SP2 yang besar berimplikasi juga pada penerimaan atas pembayaran yang juga besar dari perangkat telekomunikasi yang diterbitkan SP2 dari negara tersebut. Perangkat telekomunikasi dari China menghasilkan nilai pembayaran sebesar Rp. 8,5 milyar, sementara penerbitan SP2 dari perangkat telekomunikasi asal Amerika Serikat menghasilkan nilai pembayaran Rp. 1,03 milyar. Hal yang menarik dari tabel 9.7 adalah bahwa meskipun untuk perangkat telekomunikasi asal Taiwan telah diterbitkan SP2 sebanyak 104, namun total nilai pembayarannya hanya Rp. 534 juta. Sementara penerbitan SP2 untuk perangkat asal Korea Selatan hanya sebesar 76 buah namun memberikan nilai pembayaran Rp. 556 juta. Perangkat asal Meksiko menunjukkan rata-rata nilai pembayaran SP2 yang paling tinggi dibanding perangkat dari negara lain yaitu sebesar Rp. 9,9 juta. Sementara rata-rata nilai per

SP2 untuk perangkat telekomunikasi asal China sebesar Rp. 6,2 juta. Nilai pembayaran per SP2 yang juga tinggi adalah untuk SP2 perangkat telekomunikasi asal Korea Selatan dan Malaysia yaitu sebesar Rp. 7,3 juta dan Rp. 7,2 juta.

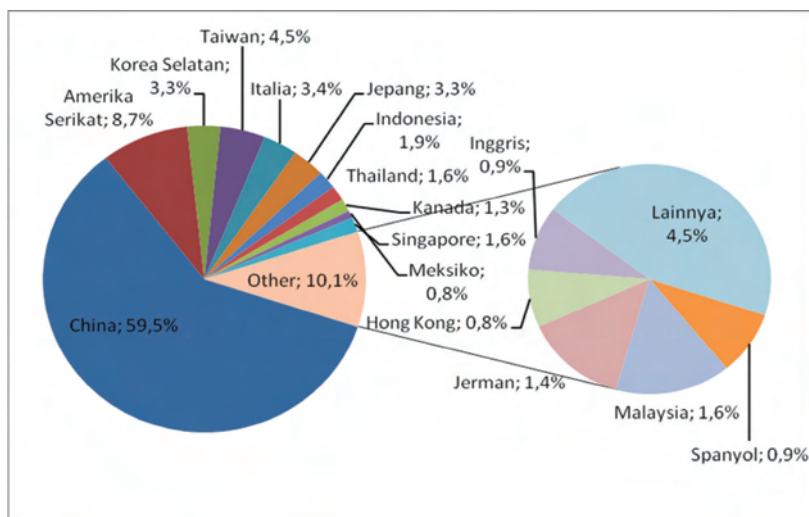
Tabel 9.7. Jumlah dan Nilai Penanganan SP2 menurut negara asal Tahun 2009

No	Bulan	Jumlah SP2	Nilai Pembayaran (Rp)	Rata-Rata nilai per SP2 (Rp)
1	China	1377	8.539.250.000	6.201.344
2	Amerika Serikat	202	1.032.250.000	5.110.149
3	Korea Selatan	76	556.500.000	7.322.368
4	Taiwan	104	534.000.000	5.134.615
5	Italia	79	490.000.000	6.202.532
6	Jepang	76	323.500.000	4.256.579
7	Indonesia	44	259.700.000	5.902.273
8	Thailand	37	220.500.000	5.959.459
9	Kanada	31	193.000.000	6.225.806
10	Meksiko	18	178.500.000	9.916.667
11	Singapore	36	154.500.000	4.291.667
12	Spanyol	21	151.000.000	7.190.476
13	Malaysia	36	141.000.000	3.916.667
14	Jerman	32	134.000.000	4.187.500
15	Hong Kong	19	122.000.000	6.421.053
16	Inggris	21	118.000.000	5.619.048
17	Lainnya	104	662.000.000	6.365.385
Total		2313	13.809.700.000	5.970.471

Jika dilihat dari komposisi penerbitan SP2 menurut negara asal, gambar 9.9 menunjukkan bahwa penerbitan SP2 untuk perangkat telekomunikasi asal China mendominasi penerbitan SP2. Proporsi penerbitan SP2 untuk perangkat telekomunikasi asal China mencapai 63,1%, jauh lebih besar dibanding penerbitan SP2 untuk perangkat dari negara lainnya. Sementara penerbitan SP2 perangkat telekomunikasi asal Amerika Serikat yang merupakan kedua terbesar hanya 9,3%. Bahkan diluar kedua negara tersebut, proporsi penerbitan SP2 untuk perangkat telekomunikasi asal negaranya hanya kurang dari 5%.

Dominasi perangkat telekomunikasi asal China juga ditunjukkan dengan besarnya penerbitan SP2 untuk perangkat telekomunikasi asal China. Penerbitan SP2 yang banyak juga berimplikasi pada total nilai pembayaran yang juga tinggi dari penerbitan SP2 perangkat telekomunikasi asal China

Gambar 9.9 Komposisi Penerbitan dari SP2 menurut Negara Asal Tahun 2009



Penerbitan SP2 menurut jenis perangkat pada tahun 2009 menunjukkan bahwa penerbitan SP2 paling banyak adalah untuk perangkat telekomunikasi jenis telepon seluler. Tabel 9.8 menunjukkan bahwa pada tahun 2009 telah diterbitkan SP2 sebanyak 834 buah dan jauh lebih banyak dibanding penerbitan SP2 untuk perangkat telekomunikasi lainnya. Jumlah penerbitan SP2 terbanyak berikutnya adalah untuk jenis perangkat WLAN dan Modem Analog yang masing-masing hanya sebesar 212 dan 159. Jenis perangkat lain yang cukup banyak penerbitan SP2-nya adalah Low Power, Antenna, Bluetooth dan Radio siaran.

Untuk SP2 menurut jenis perangkat, penerbitan SP2 yang lebih banyak tidak selalu berimplikasi pada total nilai pembayaran yang lebih tinggi dari perangkat telekomunikasi tersebut. Penerbitan SP2 untuk telepon seluler memberikan nilai pembayaran sebesar Rp. 6,5 milyar dan SP2. Namun penerbitan SP2 untuk WLAN sebanyak 212 buah hanya memberikan nilai pembayaran sebesar Rp. 980 juta, lebih rendah dari nilai pembayaran penerbitan SP2 untuk Modem Analog yang mencapai Rp. 1,09 miliar meskipun hanya 159 buah SP2. Demikian pula dengan penerbitan SP2 untuk bluetooth yang mencapai 114 buah hanya memberikan total nilai pembayaran sebesar Rp. 243 juta. Sementara penerbitan SP2 untuk radio siaran yang hanya 107 namun mampu memberikan total nilai pembayaran sebesar Rp. 628 juta.



Tabel 9.8. Jumlah dan Nilai Penanganan SP2 menurut jenis perangkat Tahun 2009

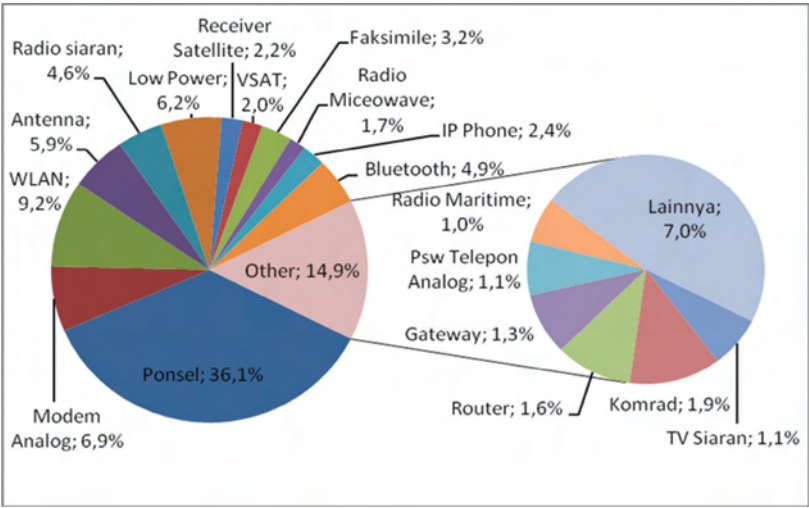
No	Bulan	Jumlah SP2	Niai Pembayaran (Rp)	Rata-Rata nilai per SP2 (Rp)
1	Ponsel	834	6.547.500.000	7.850.719
2	Modem Analog	159	1.096.000.000	6.893.082
3	WLAN	212	980.000.000	4.622.642
4	Antenna	136	811.700.000	5.968.382
5	Radio siaran	107	628.000.000	5.869.159
6	Low Power	143	304.500.000	2.129.371
7	Receiver Satellite	50	296.500.000	5.930.000
8	VSAT	47	292.500.000	6.223.404
9	Faksimile	73	288.000.000	3.945.205
10	Radio Miceowave	39	273.000.000	7.000.000
11	IP Phone	55	252.500.000	4.590.909
12	Bluetooth	114	243.500.000	2.135.965
13	TV Siaran	25	200.000.000	8.000.000
14	Komrad	43	200.000.000	4.651.163
15	Router	36	166.500.000	4.625.000
16	Gateway	30	166.000.000	5.533.333
17	Psw Telepon Analog	26	99.500.000	3.826.923
18	Radio Maritime	22	88.000.000	4.000.000
19	Lainnya	162	876.000.000	5.407.407
Total		2313	13.809.700.000	5.970.471

Besarnya rata-rata nilai pembayaran per SP2 juga menunjukkan perbedaan untuk masing-masing perangkat. Besaran rata-rata nilai per SP2 paling tinggi adalah untuk jenis perangkat TV siaran yaitu sebesar Rp. 8 juta per SP2, diikuti dengan perangkat telepon seluler yang rata-rata nilai pembayaran per SP2 yang diterbitkan sebesar Rp. 7,85 juta. Jenis perangkat telekomunikasi lain yang cukup tinggi rata-rata nilai pembayaran per SP2 adalah untuk radio microwave yaitu sebesar Rp. 7 juta. Sementara perangkat telekomunkasi jenis bluetooth dan low power menunjukkan rata-rata nilai pembayaran SP2 yang rendah yaitu hanya sebesar Rp. 2,1 juta.

Dari komposisi penerbitan SP2 juga menunjukkan bahwa perangkat jenis telepon seluler memiliki proporsi paling besar penerbitan SP2 nya dibanding jenis perangkat lainnya. Proporsi penerbitan SP2 untuk perangkat jenis telepon seluler mencapai 36,1% dari total perangkat yang diterbitkan. Sementara penerbitan SP2 untuk perangkat telekomunikasi lainnya proporsinya hanya kurang dari 10%. Proporsi penerbitan SP2 yang sedikit lebih

menonjol hanya untuk jenis perangkat WLAN dengan proporsi sebesar 9,2%, model analog 6,9%, Low Power 6,2% , Antenna 5,9% dan Bluetooth 4,9% seperti terlihat di gambar 9.10.

Gambar 9.10. Komposisi Penerbitan dari SP2 menurut Jenis Perangkat Tahun 2009



Tabulasi silang penerbitan SP2 perangkat antara jenis perangkat dengan negara asal perangkat telekomunikasi menunjukkan bahwa penerbitan SP2 paling banyak (85,3%) adalah untuk perangkat telekomunikasi asal China. Sekitar 30,7% dari SP2 yang telah diterbitkan adalah untuk perangkat telepon seluler asal China. Proporsi ini jauh lebih besar dibandingkan dengan penerbitan SP2 untuk jenis perangkat telekomunikasi dan negara lainnya. Untuk penerbitan SP2 perangkat telekomunikasi dari China, paling banyak memang untuk perangkat jenis telepon seluler. Urutan terbanyak berikutnya penerbitan SP2 adalah untuk modem seluler asal China juga yang mencapai 108 buah atau hampir 5% dari total seperti terlihat pada tabel 9.9. Kedua perangkat tersebut memang mengalami permintaan yang tinggi dalam beberapa tahun terakhir untuk memenuhi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat.

Sekitar 30% SP2 yang diterbitkan atas pengujian perangkat adalah untuk telepon seluler asal China. Ini semakin menunjukkan besar dan dominannya telepon seluler yang masuk pasar Indonesia, bahkan dibanding perangkat telekomunikasi lain dari negara-negara lainnya.

Tabel 9.9. Jumlah Penerbitan SP2 menurut jenis perangkat dan negara asal Tahun 2009

	Kanada	China	Perancis	Jerman	Indonesia	Italia	Jepang	Korea Selatan	Malaysia	Mexico	Singapura	Taiwan	Thailand	Inggris	USA	Lainnya	Jumlah
Antena	0	63	0	7	8	1	4	0	0	1	0	1	3	0	39	9	136
Bluetooth	3	71	2	2	0	0	5	4	4	0	4	10	2	1	7	5	120
Faksimile	0	32	0	0	2	0	16	0	15	0	2	0	4	0	0	2	73
Gateway	0	17	3	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	6	0	30
IP Phone	1	14	0	0	1	0	0	3	1	1	0	1	0	0	24	8	54
Komrad	0	15	0	2	0	0	9	1	4	0	1	0	0	2	2	7	43
Low Power	2	83	0	10	1	0	12	6	2	1	6	6	0	2	10	2	143
Modem Seluler	3	108	2	0	2	0	1	6	1	0	3	7	0	0	6	9	148
Ponsel	8	711	1	1	4	0	0	38	0	14	1	9	16	1	0	30	834
Radio Microwave	1	14	0	0	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	7	8	39
Radio Siaran	0	4	0	0	18	64	0	0	0	0	0	0	0	3	10	8	107
Receiver Satellite	2	31	0	0	1	0	0	3	0	0	0	2	0	8	3	0	50
Router	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	8	2	36
TV Siaran	0	0	0	2	1	9	0	0	0	0	0	1	0	1	1	10	25
VSAT	6	0	1	0	0	0	3	1	0	0	2	4	1	1	21	7	47
WLAN	2	78	1	0	2	0	3	2	2	0	11	29	4	0	19	0	153
WLAN Access Point	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	7	0	27
WLAN Router	0	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	1	33
Lainnya	3	71	2	7	4	1	18	12	7	1	5	20	7	2	32	23	215
Jumlah	31	1377	12	32	44	79	76	76	36	18	36	104	37	21	203	131	2313

# Bab 10

## Bidang Kelembagaan Internasional

Kegiatan bidang kelembagaan internasional mulai mendapat tempat khusus sejak tanggal 28 November 2002 setelah struktur organisasi Ditjen Postel telah bertambah satu, yaitu Direktorat Kelembagaan Internasional. Tugas pokok dan fungsi dari Direktorat ini adalah untuk melaksanakan sebagian tugas pokok Ditjen Postel di bidang kelembagaan internasional pos dan telekomunikasi, khususnya untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia di bidang pos dan telekomunikasi dan untuk menyelenggarakan hubungan kelembagaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perlunya keterlibatan dalam kegiatan kelembagaan internasional dalam bidang pos dan terutama telekomunikasi ini sejalan dengan semakin meningkatnya intensitas, kompleksitas, beban dan tantangan kerja di bidang pos dan telekomunikasi (khususnya telekomunikasi sesuai dengan kecenderungan semakin tingginya tingkat akselerasi kemajuan ICT secara nasional maupun terutama sekali dalam lingkup global). Semakin pesatnya perkembangan dunia informasi dan telekomunikasi menyebabkan tidak ada lagi batasan geografis maupun administratif dalam bidang ini sehingga diperlukan pengaturan dan penataan antar negara terkait dengan pemanfaatan telekomunikasi.

### 10.1. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup penyajian data statistik bidang Kelembagaan Internasional ini meliputi kegiatan-kegiatan yang diikuti atau melibatkan Ditjen Postel dalam bentuk forum, seminar atau dalam kerangka kerjasama antar negara. Penyajian data ini meliputi :

- 1) Kegiatan kelembagaan Multilateral tahun 2008 - 2009
- 2) Kegiatan kelembagaan Regional tahun 2008 - 2009
- 3) Kegiatan kelembagaan Bilateral tahun 2008 - 2009
- 4) Kegiatan Investasi dan Pasar Internasional tahun 2008 - 2009
- 5) Kegiatan Pengelolaan Orbit dan Satelit tahun 2008 - 2009

## 10.2. Kegiatan Kelembagaan Internasional

Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Departemen Komunikasi dan Infomasi telah berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai organisasi Pos dan Telekomunikasi. Kegiatan tersebut dilakukan baik yang terkait dengan multilateral seperti berbagai seminar internasional dan konferensi, maupun kegiatan yang dibuat dalam kerangka kerjasama multilateral dan regional. Indonesia juga aktif melakukan kerjasama bilateral dengan negara lain untuk bidang pos maupun telekomunikasi. Disamping itu juga keterlibatan atau melakukan kegiatan untuk yang terkait dengan investasi dan pasar internasional serta kegiatan pengelolaan dan orbit satelit

### 10.2.1. Kegiatan Multilateral

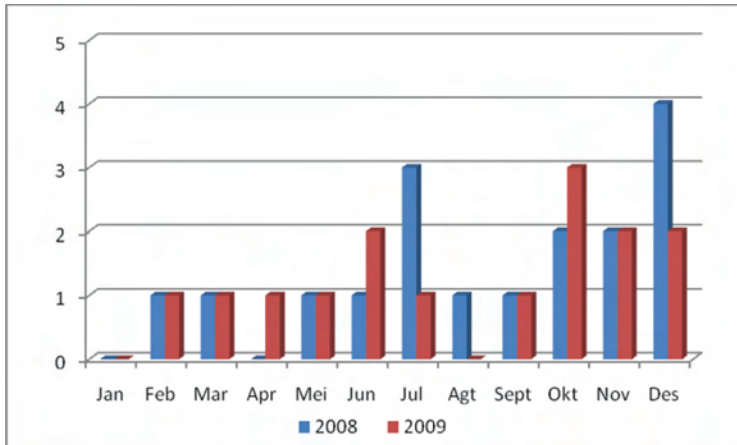
Kegiatan Multilateral yang diikuti Indonesia dalam forum-forum sidang pos dan telekomunikasi adalah dalam bentuk forum organisasi telekomunikasi dunia atau konferensi yang diselenggarakan assosiasi dan organisasi bidang pos dan telekomunikasi dunia. Sepanjang tahun 2008, pihak Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi telah mengikuti sebanyak 17 pertemuan dalam bentuk sidang-sidang dan konferensi yang bersifat multilateral. Sidang-sidang multilateral pada tahun 2008 terutama banyak dilakukan pada kuartal IV tahun 2008 sepetrti terlihat pada tabel 10.1. Sementara pada kuartal I dan II atau pada awal tahun relatif sedikit dilakukan kegiatan multilateral ini,

Tabel 10.1. Jumlah Kegiatan bersifat Multilateral Kelembagaan Internasional 2008 - 2009

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jmlh
2008	0	1	1	0	1	1	3	1	1	2	2	4	17
2009	0	1	1	1	1	2	1	0	1	3	2	2	15

Sebagaimana paa tahun 2008, pada tahun 2009 juga banyak dilakukan pada kuartal IV meskipun secara total lebih sedikit kegiatan sidang sidang internasional yang bersifat multilateral pada tahun 2009 yaitu hanya 15 kegiatan. Gambar 10.1 menunjukkan adanya pola intensitas kegiatan dalam setahun antara tahun 2008 dan 2009. Kegiatan sidang-sidang multilateral yang diikuti pada tahun 2009 kebanyakan adalah kegiatan yang dilakukan sebagai patisipasi Indonesia dalam kaitannya dengan keanggotaan dalam organisasi telekomunikasi internasional. Oleh karena itu, pada beberapa kegiatan, sidang-sidang tersebut juga ada yang bersifat regional.

Gambar 10.1. Perkembangan Kegiatan Multilateral Tahun 2008-2009



### 10.2.2. Kegiatan Regional

Kegiatan sidang-sidang yang bersifat regional yang diikuti Direktorat Kelembagaan Internasional lebih banyak dilakukan pada tahun 2009 daripada sidang-sidang dan pertemuan regional tahun 2008. Sepanjang tahun 2008 telah diikuti 18 kegiatan sidang-sidang dan konferensi yang bersifat regional dengan intensitas paling banyak terjadi pada akhir kuartal I dan sepanjang kuartal II. Namun pada tahun 2009, jumlah kegiatan sidang-sidang, pertemuan dan konferensi yang bersifat regional yang diikuti meningkat menjadi 25 kegiatan dengan beberapa kegiatan juga bersifat multiateral seperti terlihat pada tabel 10.2.

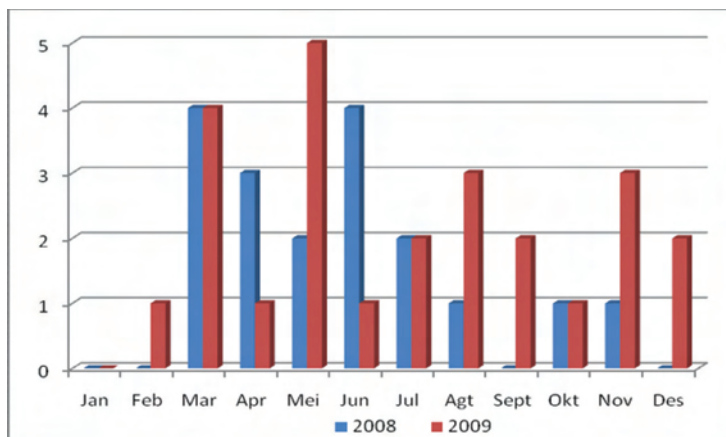
Tabel 10.2. Jumlah Kegiatan bersifat Regional Kelembagaan Internasional 2008-2009

Tahun	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jmlh
2008	0	0	4	3	2	4	2	1	0	1	1	0	18
2009	0	1	4	1	5	1	2	3	2	1	3	2	25

Dari sisi intensitas kegiatannya, terjadi perbedaan pola intensitas kegiatan antara kegiatan sidang-sidang dan konferensi pada tahun 2009 dibanding tahun 2008. Pada tahun 2009, intensitas kegiatan lebih menyebar sepanjang tahun. Terdapat bulan-bulan ada setiap kuartal dimana intensitas kegiatan yang diikuti cukup tinggi seperti bulan Maret di kuartal I, bulan Mei di kuartal II, bulan Agustus di kuartal III dan bulan November di kuartal IV seperti ditunjukkan oleh gambar 10.2. Kegiatan persidangan yang bersifat regional pada tahun 2009

kebanyakan adalah kegiatan persidangan dan konferensi pada regional Asia Tenggara khususnya negara-negara ASEAN.

Gambar 10.2. Perkembangan Kegiatan Regional Tahun 2008 - 2009



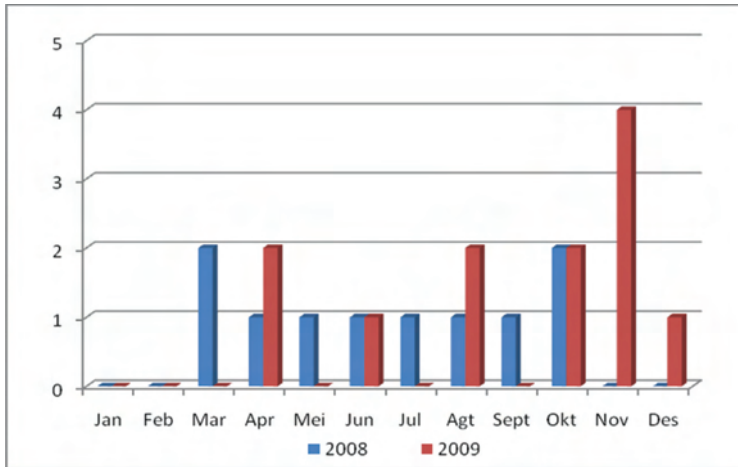
### 10.2.3. Kegiatan Bilateral

Dibanding kegiatan persidangan dan konferensi berskala multilateral dan regional, kegiatan persidangan dalam kelembagaan internasional yang bersifat bilateral lebih sedikit dilakukan. Tabel 10.3 menunjukkan bahwa pada tahun 2008 hanya 10 kegiatan yang diadakan atau diikuti untuk persidangan yang bersifat bilateral. Sementara pada tahun 2009 juga hanya diselenggarakan atau diikuti 12 kegiatan sidang dan konferensi yang bersifat bilateral. Pada tahun 2008, kegiatan lebih menyebar pada bulan-bulan disepanjang tahun. Sementara pada tahun 2009, kegiatan sidang dan konferensi yang bersifat bilateral yang dilakukan atau diikuti lebih banyak berlangsung di akhir tahun khususnya sepanjang kuartal IV tahun 2009 seperti terlihat pada gambar 10.3.

Tabel 10.3. Jumlah Kegiatan bersifat Bilateral Kelembagaan Internasional 2008-2009

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jmlh
2008	0	0	2	1	1	1	1	1	1	2	0	0	10
2009	0	0	0	2	0	1	0	2	0	2	4	1	12

Gambar 10.3. Perkembangan Kegiatan Bilateral Tahun 2008 - 2009



Kegiatan-kegiatan persidangan yang dilakukan yang bersifat bilateral pada tahun 2009 diantaranya adalah kegiatan kerjasama bilateral dalam bentuk *joint committee* atau *joint issue*. Namun dalam kegiatan kelembagaan internasional bidang pos dan telekomunikasi yang bersifat bilateral ini juga banyak dilakukan kegiatan-kegiatan dalam kerangka BIMP-EAGA yang merupakan kegiatan kerjasama antara beberapa negara di Asia Tenggara dalam berbagai bidang termasuk telekomunikasi. Untuk kegiatan yang bersifat kerjasama bilateral, tidak hanya terbatas dengan negara-negara tetangga, tapi juga dengan negara seperti Iran.

#### 10.2.4. Kegiatan Kerjasama Investasi dan Pemasaran

Berbeda dengan kegiatan yang bersifat persidangan dalam rangka konferensi yang bersifat multilateral, regional maupun bilateral, kegiatan kelembagaan internasional dalam rangka investasi dan pasar internasional masih sangat sedikit dilakukan. Tabel 10.4 menunjukkan pada tahun 2008 tidak ada sama sekali kegiatan yang terkait dengan investasi dan pasar internasional. Sementara pada tahun 2009 juga hanya lima kali diselenggarakan kegiatan yang terkait dengan investasi dan pasar internasional. Gambar 10.4 juga menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilakukan terkait dengan investasi dan pasar internasional Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam kerangka investasi dan pasar internasional diantaranya adalah kegiatan *trade in service* dan *telecommunication trade rules*.

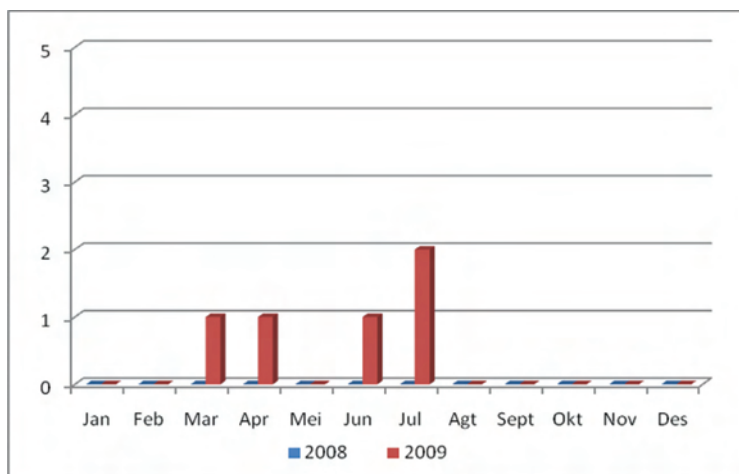


Tabel 10.4. Jumlah Kegiatan terkait Investasi dan Pasar Internasional 2008-2009

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jmlh
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	0	0	1	1	0	1	2	0	0	0	0	0	5

Namun beberapa kegiatan pasar internasional pada tahun 2009 ini juga berlangsung dalam kerangka kerjasama internasional yang lebih luas seperti WTO dan *Apectel Working Group*.

Gambar 10.4. Perkembangan Kegiatan Investasi dan Pasar Internasional Tahun 2008-2009



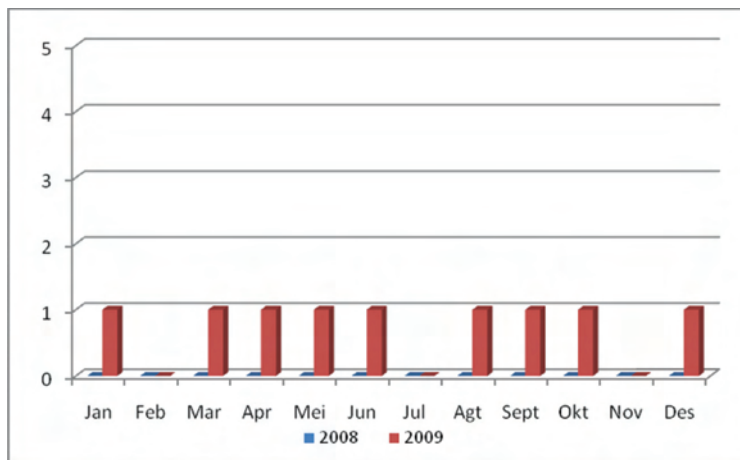
#### 10.2.5. Kegiatan Kerjasama Pengelolaan Orbit dan Satelit

Kegiatan kelembagaan internasional dalam kerangka pengelolaan orbit dan satelit hanya berlangsung pada tahun 2009. Selama tahun 2009 telah diikuti sebanyak 9 kegiatan internasional yang terkait dengan pengelolaan orbit dan satelit telekomunikasi. Kegiatan-kegiatan tersebut tersebar hampir di setiap bulan di tahun 2009 seperti terlihat pada tabel 10.5 dan gambar 10.5. Kegiatan-kegiatan dalam rangka pengelolaan orbit dan satelit yang diikuti sebagian besar adalah kegiatan dalam rangka *satellite coordination meeting* antara Indonesia dengan negara mitra. Kegiatan lain yang diikuti adalah ITU *working group* dan peluncuran satelit telekomunikasi Palapa oleh Indonesia.

Tabel 10.5. Jumlah Kegiatan Pengelolaan Orbit dan Satelit 2008-2009

	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	Jmlh
2008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2009	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	9

Gambar 10.5. Perkembangan Kegiatan kerjasama Pengelolaan Orbit dan Satelit Tahun 2008 - 2009

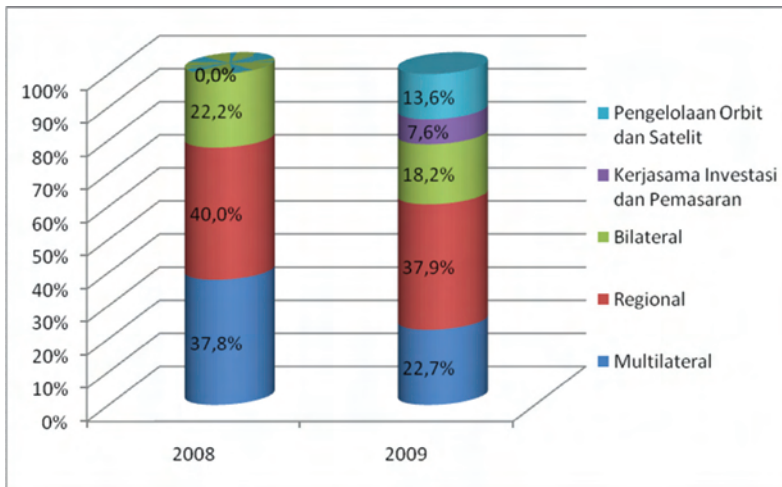


Dari sisi komposisi kegiatan antara tahun 2008 dan 2009 juga terlihat adanya perbedaan komposisi kegiatan-kegiatan persidangan atau pertemuan yang dilakukan atau diikuti dalam rangka kelembagaan internasional. Namun secara umum pada tahun 2008 maupun 2009, kegiatan paling banyak dilakukan atau diikuti adalah kegiatan yang bersifat regional seperti terlihat pada gambar 10.6. Pada tahun 2008, 40% kegiatan yang diselenggarakan atau diikuti adalah kegiatan yang bersifat regional, diikuti oleh kegiatan yang bersifat multilateral dengan proporsi 37,8%.

Namun pada tahun 2009, proporsi kegiatan yang bersifat regional dan terutama kegiatan yang bersifat multilateral mengalami penurunan masing-masing menjadi hanya 37,9% dan 22,7%. Proporsi kegiatan yang bersifat bilateral juga mengalami penurunan dari 22,2% pada tahun 2008 menjadi 18,2% pada tahun 2009. Namun untuk kegiatan yang bersifat regional dan bilateral, penurunan terjadi bukan karena menurunnya frekuensi kegiatan pada kedua bidang tersebut pada tahun 2009, tetapi lebih disebabkan oleh mulai adanya kegiatan yang terkait dengan kerjasama investasi dan pemasaran dan kegiatan terkait pengelolaan orbit

dan satelit pada tahun 2009. Proporsi kegiatan kelembagaan internasional yang terkait dengan pengelolaan orbit dan satelit pada tahun 2009 ini cukup signifikan yaitu 13,6% seperti terlihat pada gambar 10.6. Pada tahun 2008, kedua kegiatan tersebut belum diikuti.

Gambar 10.6. Komposisi Kegiatan Kelembagaan Internasional Tahun 2008 dan 2009



### 10.3. Penerbitan Izin Hak Labuh (*Landing Right*) Satelit

Selain menyelenggarakan atau mengikuti kegiatan pertemuan, sidang-sidang dan konferensi berskala internasional dalam rangka kerjasama dan pengembangan pos dan telekomunikasi, kegiatan lain yang dilakukan dalam tupoksi Kelembagaan Internasional adalah penerbitan izin hak labuh (*landing right*) satelit. Penerbitan izin ini diberikan kepada berbagai pihak yang menempatkan satelit dalam rangka kegiatan telekomunikasi serta negara yang menjadi administrasinya.

Selama tahun 2009, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi melalui Subdirektorat Pengelolaan Orbit dan Satelit telah mengeluarkan lima izin hak labuh kepada lima perusahaan pengelola satelit telekomunikasi seperti terlihat pada tabel 10.6. Lima izin hak labuh tersebut diterbitkan untuk orbit dari delapan satelit yaitu Telstar 10, Intelsat-902, Emersat 4S, Asiasat-4, Inmasrat-4, Asiasat-3S, Intelsat-8 dan Telstar-10. Ke-delapan satelit tersebut menempati slot orbit yang tersebar antar 65E sampai 166 BT. Dministrator dari

satelit-satelit tersebut juga tersebar di negara-negara yang berbeda yaitu China untuk satelit Telstar dan Asiasat, Amerika Serikat untuk satelit Intelsat, Uni Emira Arab untuk satelit Emarsat dan Inggris untuk satelit Inmarsat.

Tabel 10.6. Izin Hak Labuh yang Dikeluarkan oleh Ditjen Pos dan Telekomunikasi

No	Nama Perusahaan	Satelit		Slot Orbit	Administrasi
		Nama Filing	Nama Komersial		
1	PT. INDOSAT, Tbk	APSTAR-4 INTELSAT-9	TELSTAR-10 INTELSAT-902	76.5 E 62 E	CHINA USA
2	PT. SOG INDONESIA	THURAYA-3	EMARSAT-4S	98.5 BT	UEA
3	PT. PATRA TELEKOMUNIKASI	ASIASAT-4	ASIASAT-4	122 BT	CHINA
4	PT. DINI NUSA KUSUMA	INMARSAT-4	INMARSAT-4- 143.5E	143.5 BT	INGGRIS
5	PT. MEDIATAMA ANUGRAH CITRA	ASIASAT-1/CK USASAT-14H APSTAR-4	ASIASAT-3S INTELSAT-8 TELSTAR-10	105.b BT 166 BT 76.5 BT	CHINA USA CHINA

# Bab 11

## Analisis Statistik Ekonomi Bidang Postel

Industri jasa telekomunikasi dan industri ikutannya yang berkembang dengan sangat pesat dan menjadi *new emerging industries* tak pelak memberi dampak yang signifikan terhadap perekonomian. Meskipun dalam perekonomian Indonesia yang agraris, kontribusinya masih kalah dibanding sektor-sektor primer, namun perkembangan industri telekomunikasi menjadi bagian penting dari proses transformasi perekonomian dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Bahkan untuk daerah perkotaan, perkembangan sektor telekomunikasi ini menjadi bagian penting pengembangan sektor jasa yang kedepan menjadi sektor utama perekonomian.

Perkembangan pesat dari industri sektor perekonomian ini dapat dilihat dari perannya yang semakin lama semakin meningkat dalam struktur perekonomian. Dengan sendirinya, hal ini berdampak bukan hanya pada output, tapi juga penyerapan tenaga kerja, bahkan proporsi pendapatan rumah tangga yang dibelanjakan di sektor telekomunikasi ini. Dari sisi pemerintah, perkembangan ini juga ditandai dengan sumbangan bagi penerimaan negara dari jasa-jasa pemerintah yang disediakan dalam bidang telekomunikasi.

### 11.1. Ruang Lingkup

Analisis ekonomi dalam data statistik pos dan telekomunikasi ini akan melihat peran dari kegiatan dan industri bidang pos dan telekomunikasi termasuk jasa yang disediakan pemerintah dalam mendukung pengembangan industri pos dan telekomunikasi terhadap perekonomian nasional. Peran dan kontribusi ini dilihat dari dua aspek yaitu kontribusi Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi terhadap penerimaan negara melalui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dihasilkan dari penyediaan jasa pendukung oleh unit kerja di Ditjen Postel bagi industri pos dan telekomunikasi. PNBP Bidang Postel adalah penerimaan negara bukan pajak yang dihasilkan oleh unit-unit kerja di lingkup Ditjen Postel yang mencakup PNBP dari jasa titipan, PNBP dari jasa telekomunikasi, PNBP dari penerbitan

sertifikat perangkat telekomunikasi (termasuk pendapatan Negara bukan pajak pada biaya pengujian perangkat telekomunikasi) dan PNBP dari Frekuensi yang meliputi PNBP dari PREOR dan SKOR dan PNBP dari BHP Frekuensi. PNBP dari bidang Postel ini menjadi bagian dari penerimaan negara yang masuk dalam pos penerimaan dalam negeri pada pos PNBP lainnya. Dengan demikian, PNBP dari bidang Postel ini turut memperkuat juga penerimaan negara dalam negeri khususnya penerimaan diluar pajak.

Bagian kedua adalah kontribusi kegiatan dan bidang pos dan telekomunikasi terhadap pendapatan domestik nasional yang dicerminkan oleh Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. PDB adalah ukuran output dari semua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara pada sektor-sektor ekonomi yang ada di negara tersebut, termasuk didalamnya sektor komunikasi. Sementara kontribusi dari bidang postel adalah dalam bentuk output yang dihasilkan dari kegiatan jasa bidang pos dan telekomunikasi yang memberi kontribusi terhadap output nasional. Namun dalam analisa ini, kontribusi bidang komunikasi belum termasuk output dari industri manufaktur bidang telekomunikasi atau yang menghasilkan perangkat telekomunikasi, yang berada dalam output pada sektor industri pengolahan.

Sumber data untuk analisis ini berasal dari internal Ditjen Postel berupa data PNBP yang dihasilkan dari kegiatan di masing-masing satuan kerja (Satker) di lingkup Ditjen Postel. Sementara data pembanding untuk data penerimaan negara adalah data yang berasal dari Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan untuk data penerimaan negara dari masing-masing sumber penerimaan. Untuk analisa output sektor jasa telekomunikasi, sumber data berasal dari Badan Pusat Statistik untuk data PDB berdasarkan lapangan usaha dan sektor usaha. Keseluruhan data ini adalah data yang sudah dipublikasikan maupun data yang belum dipublikasikan.

### **11.2. Konsep dan Definisi**

Dalam analisa statistika ekonomi ini, beberapa istilah yang digunakan dan penjelasannya adalah sebagai berikut :

- 1). PNBP adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak, yaitu penerimaan yang didapat oleh instansi pemerintah pusat atas jasa-jasa yang diselenggarakan atau yang diterima

pungutan yang dilakukan oleh instansi pemerintah yang bukan termasuk pajak dan retribusi dan masuk dalam kas negara.

- 2). PNDN adalah Penerimaan Negara Dalam Negeri yaitu keseluruhan penerimaan yang didapat oleh negara yang terdiri dari penerimaan dari pajak yaitu penerimaan dari pajak dalam negeri, penerimaan dari pajak perdagangan internasional, serta penerimaan dari bukan pajak yang terdiri dari penerimaan dari sumberdaya alam, bagian laba Badan Usaha Milik Negara (BUMN), PNBP lainnya dan pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU) milik pemerintah yang masuk dalam kas negara sebagai komponen penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- 3). PNBP lainnya adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) selain yang berasal dari penerimaan dari sumberdaya alam, bagian laba BUMN dan pendapatan dari Badan Layanan Umum milik negara.
- 4). PNBP bidang Posstel adalah PNBP yang berasal dari penyelenggaraan jasa-jasa bidang Pos dan Telekomunikasi yang dilakukan oleh unit-unit kerja di lingkungan Ditjen Posstel dan masuk dalam kas negara.
- 5). PDB adalah produk domestik bruto yaitu keseluruhan (total) output yang dihasilkan oleh perekonomian suatu negara melalui sektor-sektor ekonomi di negara tersebut.

### **11.3. Peran Ditjen Posstel dalam Penerimaan Negara**

Kontribusi Ditjen Posstel dalam penerimaan negara dianalisis dari besaran PNBP yang dihasilkan dari jasa-jasa di bidang pos dan telekomunikasi yang diberikan oleh unit-unit kerja di lingkungan Ditjen Posstel dan kontribusinya terhadap penerimaan negara yang tercatat dalam APBN. Pada bagian awal akan dipaparkan perkembangan penerimaan Ditjen Posstel dalam bentuk PNBP dari masing-masing unit/bidang kerja, pertumbuhan penerimaan tersebut dan tingkat pencapaiannya dari target yang ditetapkan. Selanjutnya akan dilakukan analisis pangsa dari total penerimaan PNBP tersebut terhadap penerimaan negara dari tiga jenis yaitu total penerimaan negara dalam negeri (PNDN), total penerimaan negara bukan pajak dan total penerimaan negara bukan pajak lainnya (PNBP lainnya).

### 11.3.1. PNBP Bidang Perposan

PNBP yang berasal dari bidang perposan berasal dari penerimaan yang berasal dari pelayanan di bidang jasa titipan yaitu penerbitan ijin usaha jasa titipan . Tabel 11.1 menunjukkan perkembangan PNBP dari jasa titipan dari 2005 sampai dengan 2009. Tabel tersebut menunjukkan relatif rendahnya baik nilai maupun pertumbuhan realisasi penerimaan dari penyelenggaraan pelayanan yang terkait jasa titipan ini. Dalam lima tahun terakhir, PNBP dari bidang perposan ini realisasinya tidak pernah mencapai lebih dari Rp. 30 juta. Meskipun target penerimaan dinaikan 150% pada tahun 2006, namun realisasi pada penerimaan pada tahun tersebut justru menurun hampir 20% dibanding tahun sebelumnya.

Ketika target penerimaan pada tahun berikutnya (2007) hanya dinaikkan 50%, realisasi penerimaan juga tidak mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Oleh karena itu, setelah mengalami peningkatan cukup tinggi dari tahun 2004 ke 2005, realisasi penerimaan sejak tahun 2006 justru mengalami penurunan dan tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Bahkan pada tahun 2007, realisasi penerimaan PNBP dari bidang perposan ini hanya mencapai kurang dari 30% dari target yang ditetapkan. Penurunan PNBP pada tahun berikutnya terjadi karena tidak semua usaha jasa titipan yang booming pada tahun 2005 (dari penerimaan atas sertifikasi jasa titipan dan jasa pelayanan lainnya setelah dibolehkannya keterlibatan swasta pada sektor tersebut) dapat bertahan.

Tabel 11.1. Perkembangan PNBP dari Jasa Titipan Tahun 2005-2009

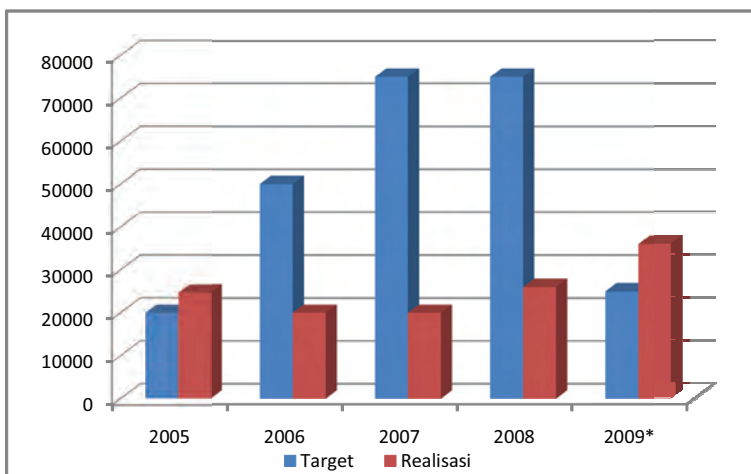
No	Tahun	Target (Ribu Rp.)	Realisasi (Ribu Rp.)	Pertumbuhan Target (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Tingkat Pencapaian Target
1	2005	20.000	24.700		2066,7%	123,5%
2	2006	50.000	20.000	150,0%	-19,0%	40,0%
3	2007	75.000	20.000	50,0%	0,0%	26,7%
4	2008	75.000	26.000	0,0%	30,0%	34,7%
5	2009	25000	36.000	-66,7%	38,5%	144,0%

Realisasi penerimaan baru melebihi target pada tahun 2009 dimana realisasi penerimaan mencapai 44% diatas target yang ditetapkan. Hal itupun dapat terjadi karena target penerimaan pada tahun 2009 diturunkan sampai hanya 33% dar target tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, realisasi penerimaan pada tahun 2009 ini juga meningkat hampir 40%



dari tahun sebelumnya. Namun dari realisasi juga terlihat bahwa penerimaan PNBP dari jasa titipan tahun 2009 ini pada semester II tidak sebaik penerimaan pada semester I.

Gambar 11.1. Perbandingan antara Target dan Realisasi PNBP Sektor Jasa Titipan



### 11.3.2. PNBP Bidang Telekomunikasi

PNBP yang berasal dari bidang telekomunikasi berasal dari penerimaan yang berasal dari penyediaan jasa-jasa (BHP) yang terkait dengan kegiatan telekomunikasi yang disediakan oleh Ditjen Postel. Perkembangan sektor telekomunikasi yang sangat pesat dalam 10 tahun terakhir terutama dengan pertumbuhan industri telekomunikasi seluler dan telepon nirkabel memberi pengaruh besar terhadap PNBP sektor telekomunikasi. Kemunculan beberapa operator seluler baru dalam lima tahun terakhir telah turut mendorong peningkatan PNBP bagi Ditjen Postel dari jasa telekomunikasi ini. Tabel 11.2 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan PNBP dari bidang telekomunikasi ini memperlihatkan terjadinya peningkatan secara gradual.

Atas dasar perkembangan industri telekomunikasi yang cepat itu pula, maka target penerimaan yang ditetapkan untuk PNBP dari bidang telekomunikasi ini juga ditingkatkan menyesuaikan dengan potensi dan prospek perkembangan sektor telekomunikasi. Target penerimaan PNBP dalam lima tahun terakhir ditingkatkan rata-rata 32,9% per tahun. Namun demikian, realisasi penerimaan dari PNBP telekomunikasi ini hanya sedikit lebih besar dari

target yang ditetapkan. Bahkan jika dirata-rata dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan realisasinya lebih rendah daripada pertumbuhan targetnya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa PNBP dari telekomunikasi ini cukup menjadi andalan dan diharapkan untuk terus meningkat.

Namun pada tahun 2008, ketika PNBP bidang telekomunikasi ini ditargetkan meningkat 11,4%, realisasi penerimaannya justru menurun sebesar 1% dibanding tahunnya. Hal ini pula yang menyebabkan untuk pertama kalinya dalam lima tahun terakhir, pencapaian realisasi PNBP bidang telekomunikasi ini lebih rendah dari target yang ditetapkan.

Tabel 11.2. Perkembangan PNBP dari Sektor Telekomunikasi Tahun 2005-2009

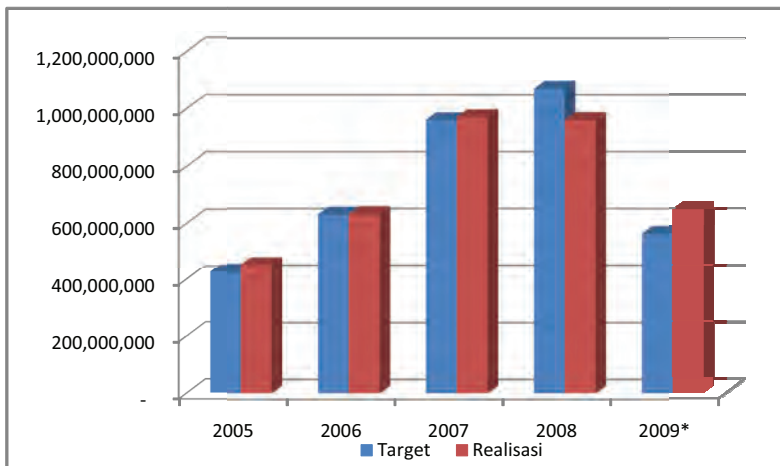
No	Tahun	Target (Ribu Rp.)	Realisasi (Ribu Rp.)	Pertumbuhan Target (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Tingkat Pencapaian
3	<b>2005</b>	426.000.000	449.845.483,1	19,9%	16,2%	105,6%
4	<b>2006</b>	627.821.671	628.767.084,2	47,4%	39,8%	100,2%
5	<b>2007</b>	960.000.000	970.360.150,6	52,9%	54,3%	101,1%
6	<b>2008</b>	1.069.340.072	960.272.968,3	11,4%	-1,0%	89,8%
7	<b>2009*</b>	559.908.621	644.619.476,0	-47,6%	-32,9%	115,1%

Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya penurunan realisasi PNBP bidang telekomunikasi pada tahun 2008 dan menyebabkan pencapaiannya lebih rendah dari target. Pertama adalah akibat terjadinya penurunan penerimaan dari operator seluler sebagai akibat pasar yang mulai jenuh dan persaingan yang semakin ketat. Kedua adalah karena sistem penarikan dari operator yang dilakukan per semester sehingga penerimaan di semester 2 tahun 2008 *carry over* ke tahun sebelumnya.

Tabel 11.2 dan gambar 11.2 juga memperlihatkan bahwa pada tahun 2009, target penerimaan diturunkan jauh lebih rendah daripada target PNBP pada tahun 2008 dengan penurunan hampir 50%. Penurunan ini disebabkan oleh adanya penurunan tarif interkoneksi dari 1% menjadi 0,5% sehingga target penerimaan yang berasal dari interkoneksi itu juga perlu dilakukan penyesuaian. Seperti diperkirakan, realisasi penerimaan PNBP dari bidang telekomunikasi ini juga menunjukkan penurunan pada tahun 2009 dibanding tahun sebelumnya dengan penurunan mencapai hampir 33%. Namun demikian, realisasi penerimaan ini masih lebih besar dari target yang ditetapkan dengan

pencapaian 15% lebih tinggi dari yang target yang ditetapkan. Penerimaan PNBP bidang telekomunikasi ini juga cenderung hampir berimbang antara semester I dan semester II.

Gambar 11.2. Perbandingan antara Target dan Realisasi PNBP Sektor Telekomunikasi



### 11.3.3. PNBP Bidang Standarisasi

PNBP bidang standarisasi adalah penerimaan negara bukan pajak yang diterima dari jasa pengujian dan sertifikasi alat atau perangkat telekomunikasi yang diselenggarakan oleh unit kerja di Ditjen Postel. Perkembangan penerimaan PNBP dari bidang standarisasi ini ditunjukkan pada Tabel 11.3. Sejalan pula dengan perkembangan industri telekomunikasi yang sangat pesat, termasuk kondisi Indonesia yang merupakan pasar yang sangat besar dan potensial bagi industri telekomunikasi, maka penerimaan PNBP dari standarisasi perangkat ini juga menunjukkan trend peningkatan yang tinggi dan pertumbuhan penerimaan yang semakin tinggi. Hal ini juga tercermin dari penetapan target yang semakin ditingkatkan baik sebagai respon atas potensi pertumbuhan industri telekomunikasi atau penerimaan PNBP tahun sebelumnya.

Pertumbuhan penerimaan PNBP standarisasi yang tinggi ini dapat dilihat dari peningkatan realisasi penerimaan ini mencapai 75,8% per tahun dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2006, PNBP dari standarisasi ini meningkat tajam dengan peningkatan mencapai 153,3% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan yang sangat besar ini terjadi karena pada tahun 2006 Dirjen Bea Cukai sedang melakukan pemeriksaan yang intensif melalui razia besar-Statistik Ditjen Postel Semester II Tahun 2009

besaran terhadap barang yang masuk ke dalam negeri termasuk produk telekomunikasi yang harus melakukan pengujian. Pada saat yang sama, permintaan domestik terhadap produk telekomunikasi juga memasuki periode yang booming khususnya telepon seluler dengan harga yang semakin murah. Sehingga hal ini berdampak pada lonjakan produk yang harus diuji dan berpengaruh pada peningkatan penerimaan dari pengujian ini.

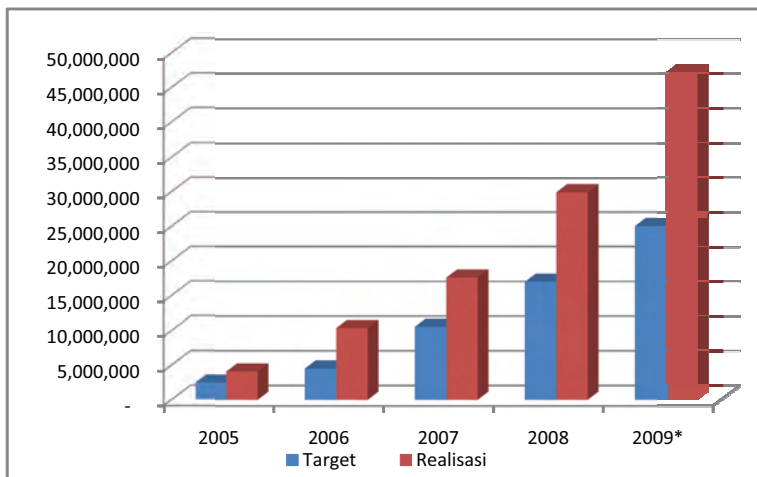
Setelah tahun 2006, realisasi penerimaan ini juga cenderung meningkat lebih tinggi daripada pertumbuhan pada tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan penerimaan ini juga tidak terlepas dari pertumbuhan industri telekomunikasi yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir. Strategi co-branding atau paket yang dilakukan operator seluler yang bekerjasama dengan produsen perangkat telepon seluler membuat harga semakin murah dan terjangkau, sehingga permintaan terhadap perangkat telepon seluler dan perangkat pendukungnya bagi operator juga semakin tinggi.

Tabel 11.3. Perkembangan PNBPN dari Bidang Standarisasi Tahun 2005-2009

No	Tahun	Target (Ribu Rp.)	Realisasi (Ribu Rp.)	Pertumbuhan Target	Pertumbuhan Realisasi	Tingkat Pencapaian Target
3	<b>2005</b>	2.460.000	4.072.935,5	53,7%	48,7%	165,6%
4	<b>2006</b>	4.500.000	10.316.936,1	82,9%	153,3%	229,3%
5	<b>2007</b>	10.500.000	17.609.534,0	133,3%	70,7%	167,7%
6	<b>2008</b>	17.000.000	29.862.510,0	61,9%	69,6%	175,7%
7	<b>2009*</b>	25.000.000	47.233.912,0	47,1%	58,2%	188,9%

Realisasi penerimaan dari PNBPN dari pengujian dan sertifikasi ini juga selalu melebihi target penerimaan yang ditetapkan dari tahun ke tahun. Bahkan pencapaian penerimaan ini dalam lima tahun terakhir rata-rata mencapai 85% diatas target yang ditetapkan. Peningkatan target yang ditetapkan ternyata juga masih tetap dapat diikuti dengan penerimaan PNBPN sertifikasi yang lebih tinggi dari target tersebut, meskipun pada tahun 2007 ketika target penerimaan PNBPN ditargetkan meningkat 133%, realisasi penerimaannya hanya meningkat 70,7%. Pada tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan realisasi penerimaan ini selalu lebih besar dari peningkatan target penerimaan yang ditetapkan. Pada tahun 2009, peningkatan penerimaan yang besar pada semester II menjadikan realisasi penerimaannya mencapai 188,9% dari target penerimaan yang ditetapkan untuk PNBPN dari standarisasi ini.

Gambar 11.3. Perbandingan antara Target dan Realisasi PNBP Bidang Standarisasi



#### 11.3.4. PNBP Bidang Frekuensi

PNBP bidang frekuensi berasal dari dua sumber yaitu PNBP dari BHP frekuensi dan PNBP yang berasal dari PREOR dan SKOR. Kedua sumber tersebut terkait dengan kegiatan pelayanan yang diberikan Bidang Frekuensi pada Ditjen Pos dan Telekomunikasi. Penerimaan PNBP dari bidang frekuensi, khususnya dari BHP Frekuensi ini adalah sumber penerimaan terbesar diantara sumber PNBP lainnya di lingkungan Ditjen Postel yang diberikan ke kas negara.

Tabel 11.4 yang menunjukkan penerimaan perkembangan PNBP dari BHP frekuensi termasuk target, realisasi dan pertumbuhannya memperlihatkan bahwa penerimaan dari BHP frekuensi ini menunjukkan trend penerimaan yang terus meningkat. Bahkan ketika target penerimaan PNBP ini diturunkan pada tahun 2007, realisasi penerimaannya pada tahun tersebut justru meningkat sampai 25% dari tahun sebelumnya. Meskipun pertumbuhan realisasi penerimaan menunjukkan pola yang masih fluktuatif, namun pertumbuhan realisasi penerimaan dari BHP frekuensi ini mencapai rata-rata 55,8% tiap tahunnya. Pertumbuhan realisasi penerimaan PNBP dari BHP Frekuensi ini menurun pada

tahun 2009 karena secara absolut nilai penerimaannya sudah sangat tinggi (lebih dari Rp. 8 triliun) setelah peningkatan realisasi penerimaan yang tajam pada tahun 2008.

Tabel 11.4. PNBP dari BHP Frekuensi Tahun 2005-2009

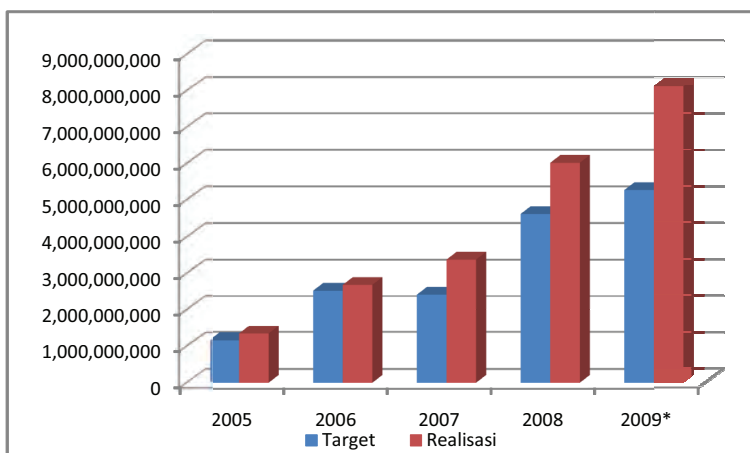
No	Tahun	Target (Ribu Rp.)	Realisasi (Ribu Rp.)	Pertumbuha n Target (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Tingkat Pencapaian Target
1	2005	1.143.350.890	1.322.607.170,9	50,4%	37,6%	115,7%
2	2006	2.516.907.000	2.675.569.428,2	120,1%	102,3%	106,3%
3	2007	2.409.289.000	3.368.167.814,7	-4,3%	25,9%	139,8%
4	2008	4.612.975.824	6.016.990.913,7	91,5%	78,6%	130,4%
5	2009	5.269.827.618	8.109.402.315,9	14,2%	34,8%	153,9%

Pertumbuhan realisasi penerimaan ini juga masih sedikit lebih besar daripada pertumbuhan pertumbuhan target yang ditetapkan yang meningkat rata-rata rata-rata 54% tiap tahunnya. Peningkatan penerimaan paling besar terjadi pada tahun 2006 yang mencapai 102,3%. Sebagaimana pada PNBP telekomunikasi, peningkatan yang tinggi ini sejalan dengan pertumbuhan industri telekomunikasi dan informasi yang sangat pesat sejak tahun 2006. Peningkatan penerimaan yang sangat besar di tahun 2006 dan berlanjut di tahun-tahun berikutnya karena pada tahun 2005 mulai dilakukan lelang untuk frekuensi 3G yang nilainya cukup besar dan penerimaannya mulai masuk ke kas negara pada tahun 2006. Dampak dari kegiatan ini juga terlihat dari peningkatan target maupun realisasinya penerimaan BHP frekuensi pada tahun 2008 dan 2009 yang meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya.

Peningkatan realisasi penerimaan yang tinggi juga berdampak pada pencapaian realisasi penerimaan PNBP BHP frekuensi yang selalu melampaui target yang ditetapkan. Pencapaian realisasi penerimaan ini dalam lima tahun terakhir mencapai rata-rata 29% diatas target yang ditetapkan. Perbandingan antara target dan realisasi penerimaan PNBP dari BHP frekuensi ini ditunjukkan pada gambar 11.4. Tahun 2009 ini merupakan tahun dimana tingkat pencapaian realisasi penerimaannya terbesar dalam lima tahun terakhir. Pada tahun 2009, realisasi penerimaan PNBP BHP frekuensi ini mencapai 59% diatas target yang ditetapkan, terutama setelah terjadinya peningkatan penerimaan yang sangat besar pada semester II tahun 2009.

Berbeda dengan BHP Frekuensi, penerimaan PNBP dari PREOR dan SKOR menunjukkan trend peningkatan dengan pola peningkatan yang fluktuatif. Setelah meningkat pada tahun 2005, target penerimaan yang ditingkatkan sebesar 50% dari tahun sebelumnya tidak diikuti dengan realisasi penerimaan PNBP dari PREOR dan SKOR yang justru menurun pada tahun 2006.

Gambar 11.4. Perbandingan antara Target dan Realisasi PNBP dari BHP Frekuensi



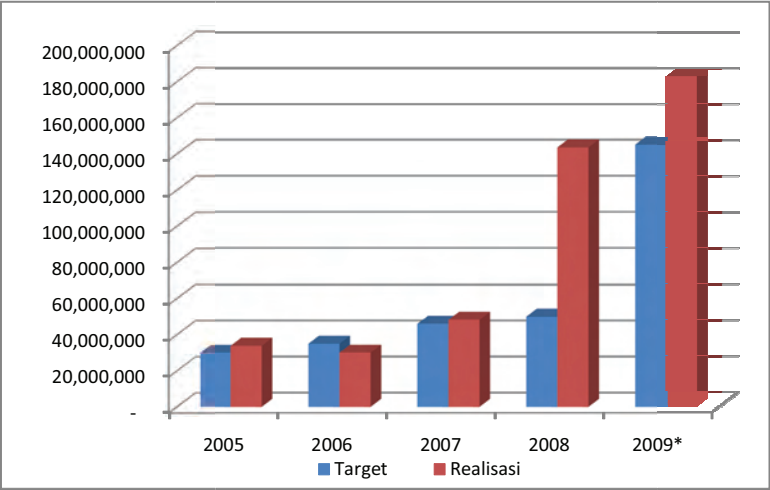
Peningkatan yang signifikan justru terjadi pada tahun 2007 dimana realisasi penerimaan meningkat 60% dan tahun 2008 yang meningkat bahkan mencapai hampir 200% dari tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil di tahun 2008, maka target penerimaan di tahun 2009 ditingkatkan sampai 190%. Namun realisasi penerimaan pada tahun ini tidak menunjukkan peningkatan sesuai yang diharapkan meskipun masih melampaui target penerimaan yang ditetapkan pada tahun 2009.

Tabel 11.5. PNBP dari PREOR dan SKOR (Frekuensi) Tahun 2005-2009

No	Tahun	Target (Ribu Rp.)	Realisasi (Ribu Rp.)	Pertumbuhan Target (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Tingkat Pencapaian Target
1	2005	30.000	33.825	50,0%	2,1%	112,8%
2	2006	35.000	30.040	16,7%	-11,2%	85,8%
3	2007	46.000	48.250	31,4%	60,6%	104,9%
4	2008	50.000	143.467	8,7%	197,3%	286,9%
5	2009	145.000	182.875	190,0%	27,5%	126,1%

Pertumbuhan realisasi penerimaan dari PREOR dan SKOR ini dalam lima tahun terakhir mencapai rata-rata 55,3% tiap tahunnya. Namun rata-rata peningkatan realisasi ini masih lebih rendah daripada rata-rata peningkatan target penerimaan yang diharapkan meningkat 59% per tahun. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan realisasi penerimaan pada tahun 2006 yang menyebabkan target penerimaan pada tahun tersebut tidak tercapai. Namun pada tahun-tahun berikutnya, realisasi penerimaan cenderung meningkat dan tingkat pencapaian penerimaannya melampaui target yang ditetapkan. Realisasi penerimaan PNBP dari PREOR dan SKOR yang melambat pada semester II tahun 2009 dibanding semester I menyebabkan tingkat pencapaian realisasi penerimaan pada tahun 2009 hanya mencapai 126% dari target yang ditetapkan.

Gambar 11.5. Perbandingan antara Target dan Realisasi PNBP dari PREOR dan SKOR



### 11.3.5. PNBP Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi

PNBP Kewajiban pelayanan universal telekomunikasi adalah PNBP yang dihasilkan dari pelaksanaan kewajiban pelayanan universal (*Universal Service Obligation/USO*) Telekomunikasi yang merupakan program dari Ditjen Postel. Program ini dilakukan dalam rangka mendorong kemajuan pembangunan melalui peningkatan akses masyarakat terhadap sarana dan prasana telekomunikasi yang seluas-luasnya. Karena sifat layanan yang diberikan melalui perluasan pembangunan infrastruktur telekomunikasi, maka dari program



ini, Ditjen Postel juga memperoleh penerimaan dari masyarakat/stakeholder yang memanfaatkan pelayanan tersebut.

Peningkatan realisasi penerimaan dari USO ini masih fluktuatif sejak mulai diterima tahun 2006. Meskipun demikian, target penerimaan ditetapkan terus meningkat. Pada tahun kedua program USO (2007), realisasi penerimaan PNBPN ini memang meningkat dan lebih besar dari target yang ditetapkan. Namun pada tahun 2008, realisasi penerimaan PNBPN USO ini mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya meskipun target penerimaannya lebih besar dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2009, target penerimaan ditingkatkan lebih tinggi dengan peningkatan mencapai 75,2%.

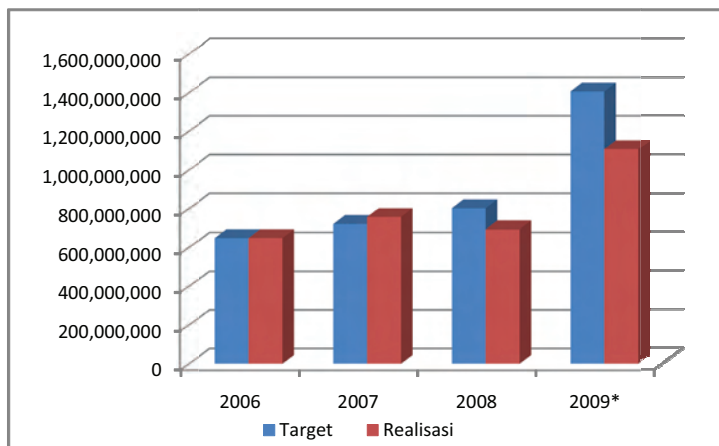
Tabel 11.6. PNBPN dari Kewajiban Pelayanan Universal (USO) Tahun 2006-2009

No	Tahun	Target (Ribu Rp.)	Realisasi (Ribu Rp.)	Pertumbuhan Target (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)	Tingkat Pencapaian Target
1	2006	649.862.074	650.073.748			100,0%
2	2007	720.000.000	756.447.662	10,8%	16,4%	105,1%
3	2008	802.005.054	693.502.957	11,4%	-8,3%	86,5%
4	2009*	1.405.003.761	1.107.276.107	75,2%	59,7%	78,8%

Peningkatan target penerimaan yang tinggi di tahun 2009 juga diikuti dengan peningkatan realisasi penerimaan. Namun peningkatan realisasi penerimaan PNBPN tahun 2009 ini masih lebih rendah dari peningkatan targetnya. Akibatnya pencapaian penerimaannya masih lebih rendah dari target yang ditetapkan.

Meskipun pada semester II terjadi peningkatan penerimaan PNBPN dari program USO ini, namun tetap tidak dapat mencapai target Penerimaan karena tingginya target penerimaan yang ditetapkan. Dengan demikian, dalam dua tahun terakhir, realisasi penerimaan PNBPN dari USO ini tidak mencapai target penerimaannya.

Gambar 11.6. Perbandingan antara Target dan Realisasi PNBPN dari USO



#### 11.3.6. Komposisi PNBPN Bidang Posel dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Negara

Secara total, penerimaan PNBPN bidang Pos dan telekomunikasi juga menunjukkan trend peningkatan seperti ditunjukkan oleh Tabel 11.7. Peningkatan paling signifikan mulai terlihat sejak tahun 2006 dimana total PNBPN di bidang Pos dan Telekomunikasi ini meningkat 120% dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan penerimaan yang tinggi terjadi pada 2006 disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari standarisasi dan frekuensi dengan peningkatan yang cukup tinggi yang masing-masing meningkat 153% dan 99% dari penerimaan tahun sebelumnya. Disamping itu, pada tahun 2006 mulai ada penambahan PNBPN yang berasal dari PNBPN dari program USO yang mulai berjalan pada tahun 2006.

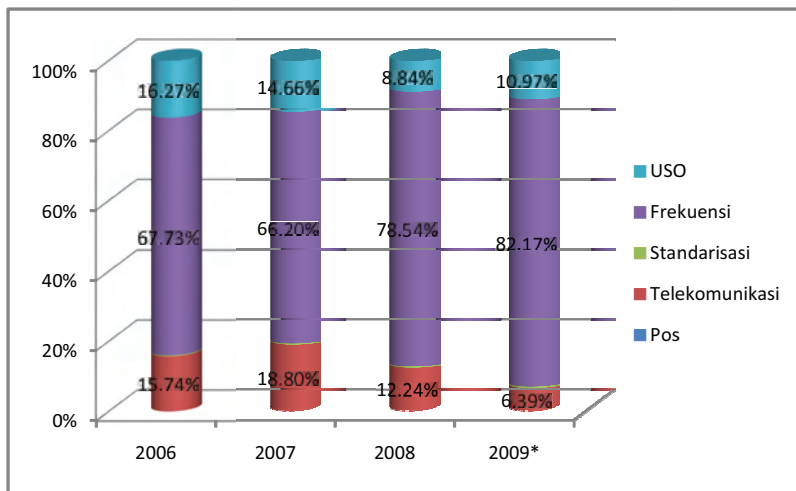
Peningkatan signifikan juga terjadi pada tahun 2008 yang meningkat sampai 58% dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2009, pertumbuhan penerimaan PNBPN Pos dan Telekomunikasi ini kembali menurun menjadi hanya 28,6%. Dalam empat tahun terakhir, total PNBPN dari bidang Pos dan Telekomunikasi ini meningkat 58,2% dengan pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh penerimaan bidang frekuensi. Pada tahun 2009, penerimaan yang tinggi yang berlangsung ada semester II menjadikan total penerimaan PNBPN lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya dan melanjutkan trend pertumbuhan penerimaan yang positif.

Tabel 11.7. Realisasi PNBP Bidang Pos dan Telekomunikasi Tahun 2005-2009

No	Tahun	Pos (Rp.000)	Telkomunikasi (Rp.000)	Standarisasi (Rp.000)	Frekuensi (Rp.000)	USO (Rp. 000)	Total PNBP (Rp.000)
1	2005	24.700	449.845.483,1	4.072.935,5	1.322.640.996		1.776.584.115
2	2006	20.000	628.767.084,2	10.316.936,1	2.675.599.468	650.073.748	3.964.777.236
3	2007	20.000	970.360.150,6	17.609.534,0	3.368.216.065	756.447.662	5.112.653.411
4	2008	26.000	960.272.968,3	29.862.510,0	6.017.134.381	693.502.957	7.700.798.816
5	2009*	36.000	644.619.476,0	47.233.912,0	8.109.585.191	1.107.276.107	9.908.750.686

Dari sisi proporsi penerimaan PNBP di lingkup Pos dan Telekomunikasi, Gambar 11.7 menunjukkan bahwa proporsi terbesar penerimaan PNBP Ditjen Postel berasal dari bidang frekuensi. Penerimaan yang berasal dari bidang frekuensi rata-rata mencapai lebih dari 73% dari total penerimaan PNBP bidang Pos dan Telekomunikasi. Proporsi penerimaan dari frekuensi ini bahkan semakin meningkat dalam dua tahun terakhir dari dengan proporsi penerimaan yang lebih dari 75% dari total PNBP bidang pos dan telekomunikasi. Proporsi yang semakin besar ini terjadi karena mulai adanya penerimaan dari lelang frekuensi 3G. Sementara penerimaan dari bidang Pos merupakan sumber PNBP dengan proporsi yang paling kecil karena relatif stagnannya pertumbuhan usaha jasa titipan di Indonesia

Gambar 11.7. Proporsi penerimaan PNBP antar Bidang dalam PNBP Pos dan Telekomunikasi



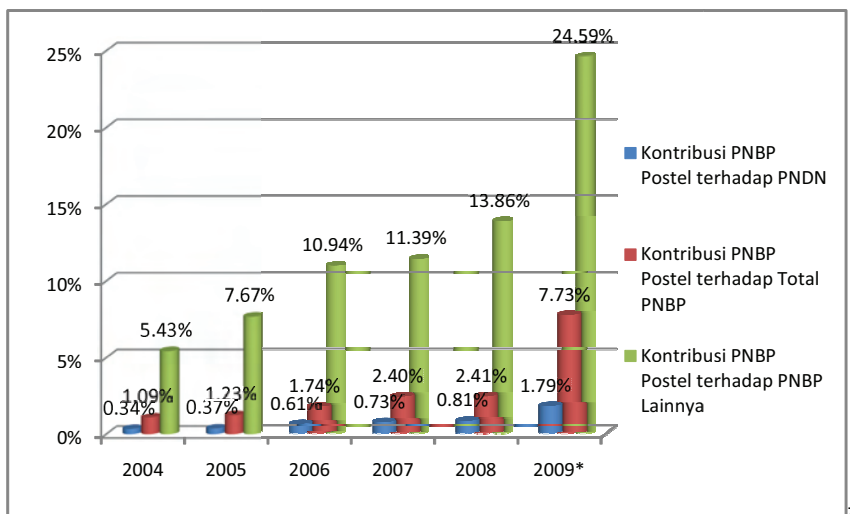
Penerimaan PNBPN dari bidang Pos dan Telekomunikasi yang masuk ke kas negara ini dengan sendirinya memberikan kontribusi bagi penerimaan negara khususnya penerimaan negara bukan pajak. Sejalan dengan semakin berkembangnya industri telekomunikasi dengan sangat cepat dan meningkatnya PNBPN dari bidang pos dan telekomunikasi, maka peran dari PNBPN bidang pos dan telekomunikasi ini juga semakin meningkat terhadap penerimaan negara. Peningkatan peran dan kontribusi dari PNBPN bidang pos dan telekomunikasi ini dapat dilihat dari tiga aspek yaitu kontribusi terhadap penerimaan negara dalam negeri, kontribusi terhadap total PNBPN dan kontribusi terhadap PNBPN lainnya.

Penerimaan negara dalam negeri (PNDN) adalah jumlah seluruh penerimaan negara dalam APBN yang bersumber dari dalam negeri yang meliputi penerimaan perpajakan dan penerimaan bukan pajak. Dengan demikian dalam PNBPN ini tidak termasuk penerimaan dari hibah. Total PNBPN adalah seluruh penerimaan negara dalam negeri dalam APBN (tidak termasuk penerimaan dari perpajakan) yang meliputi penerimaan dari sumberdaya alam, penerimaan dari laba BUMN dan PNBPN lainnya. Sedangkan PNBPN lainnya adalah seluruh total penerimaan negara bukan pajak diluar penerimaan dari sumberdaya alam dan laba BUMN.

Gambar 11.8 menunjukkan perkembangan kontribusi PNBPN bidang Pos dan telekomunikasi terhadap penerimaan negara yang menunjukkan trend peningkatan yang sangat signifikan. Peran PNBPN bidang pos dan telekomunikasi terhadap total penerimaan negara dalam negeri (PNDN) pada kuartal III tahun 2009 telah hampir mencapai 2% setelah hanya 0,34% pada tahun 2004. Peningkatan yang signifikan ini tidak terlepas dari pertumbuhan industri telekomunikasi yang sangat pesat terutama dengan semakin berkembangnya industri telekomunikasi seluler dengan produk yang semakin beragam.

Peningkatan kontribusi PNBPN bidang pos dan telekomunikasi paling terlihat dalam perannya terhadap total PNBPN dan khususnya terhadap PNBPN lainnya. Kontribusinya terhadap total PNBPN nasional pada kuartal III telah mencapai 7,73% setelah pada tahun 2008 baru mencapai 2,41%. Bahkan peningkatan kontribusi ini semakin terlihat jika dibandingkan dengan kontribusinya pada tahun 2004 yang baru mencapai 1.09%.

Gambar 11.8. Kontribusi PNBP Bidang Pos dan Telekomunikasi terhadap penerimaan negara



PNBP dari jasa bidang pos dan telekomunikasi ini nampaknya menjadi andalan baru penerimaan negara bukan pajak bagi keuangan negara. Hal ini terlihat dari kontribusi PNBP bidang pos dan telekomunikasi yang semakin signifikan dan semakin penting bagi PNBP lainnya (PNBP diluar penerimaan dari sumberdaya alam, bagian laba BUMN dan BLU). Pada kuartal III tahun 2009, kontribusi PNBP bidang pos dan telekomunikasi ini telah mencapai hampir 25% terhadap PNBP lainnya. Artinya, hampir seperempat dari PNBP lainnya disumbangkan oleh PNBP bidang pos dan telekomunikasi. Peningkatan yang terjadi pada tahun 2009 ini sangat signifikan mengingat pada tahun 2008, kontribusinya baru mencapai 13,86%. Dengan kata lain, peran PNBP bidang pos dan telekomunikasi terhadap PNBP lainnya meningkat hampir dua kali lipat. Apalagi jika dibandingkan dengan kontribusinya pada tahun 2004 yang baru mencapai 5,43%, kontribusi PNBP bidang pos dan telekomunikasi ini dalam lima tahun telah meningkat hampir lima kali lipat. Pertumbuhan dan perkembangan industri telekomunikasi memang telah menjadikan PNBP bidang pos dan telekomunikasi sebagai sumber penerimaan negara yang penting.

Kontribusi PNBP bidang pos dan telekomunikasi ini terhadap PNBP lainnya dalam lima tahun telah meningkat hampir lima kali lipat. Ini menjadikan PNBP bidang pos dan telekomunikasi sebagai sumber penerimaan negara yang penting dan andalan baru diantara sumber PNBP lainnya

#### 11.4. Peran Industri Pos dan Telekomunikasi dalam Pendapatan Nasional

Analisis lainnya tentang peran ekonomi dari bidang pos dan telekomunikasi terhadap perekonomian secara makro dilakukan dengan pendekatan output. Kontribusi bidang pos dan telekomunikasi terhadap perekonomian dengan pendekatan output ditunjukkan oleh peran sektor pos dan telekomunikasi terhadap pembentukan pendapatan domestik bruto (PDB) nasional. Perkembangan produk domestik bruto Indonesia dari tahun 2005 sampai kuartal ke-3 tahun 2009 menurut lapangan usaha termasuk bidang telekomunikasi ditunjukkan oleh tabel 11.8. PDB bidang komunikasi tergabung dalam lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi.

Dari tabel 11.8 terlihat bahwa bahwa PDB bidang komunikasi yang tergabung dalam mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejalan dengan peningkatan PDB. Bahkan pada saat beberapa sektor lain khususnya sektor primer mengalami peningkatan yang lambat, sub sektor komunikasi khususnya untuk pos dan telekomunikasi menunjukkan peningkatan yang cukup pesat.

Tabel 11.8. PDB atas dasar harga Berlaku Tahun 2005 – Q3 2009 (Rp. Milyar)

LAPANGAN USAHA	2005	2006	2007	2008*	Q3 2009**
1. Pertanian	364.169,3	433.223,4	547.235,6	713.291,4	654.664,7
2. Pertambangan dan Penggalian	309.014,1	366.505,4	440.826,2	543.363,8	390.780,4
3. Industri Pengolahan	760.361,3	919.532,7	1.068.806,4	1.380.731,5	1.098.479,0
4. Listrik, Gas Air & Bersih	26.693,8	30.354,8	34.726,2	40.846,7	34.876,7
5. Bangunan	195.110,6	251.132,3	305.215,7	419.321,6	408.068,4
6. Perdagangan Hotel & Restoran	431.620,2	501.542,1	590.822,3	692.118,8	550.480,0
7. Pengangkutan dan Komunikasi	180.584,9	231.808,6	265.256,9	312.454,1	263.025,8
a. Pengangkutan	110.157,3	142.799,0	149.926,6	171.203,0	135.110,9
b. Komunikasi	70.427,6	89.009,6	115.330,3	141.251,1	127.914,9
1. Pos dan Telekomunikasi	63.434,1	79.806,0	103.324,4	126.532,7	114.688,5
2. Jasa Penunjang Komunikasi	6.993,5	9.203,6	12.005,9	14.718,4	13.226,4
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	230.522,7	269.121,4	305.216,0	368.129,7	300.365,9
9. Jasa-Jasa	276.204,2	336.258,9	399.298,6	483.771,3	430.403,9
<b>PDB</b>	<b>2.774.281,1</b>	<b>3.339.479,6</b>	<b>3.957.403,9</b>	<b>4.954.028,9</b>	<b>4.131.144,8</b>
<b>PDB Tanpa Migas</b>	<b>2.458.234,3</b>	<b>2.967.303,1</b>	<b>3.540.950,1</b>	<b>4.426.384,7</b>	<b>3.828.845,5</b>

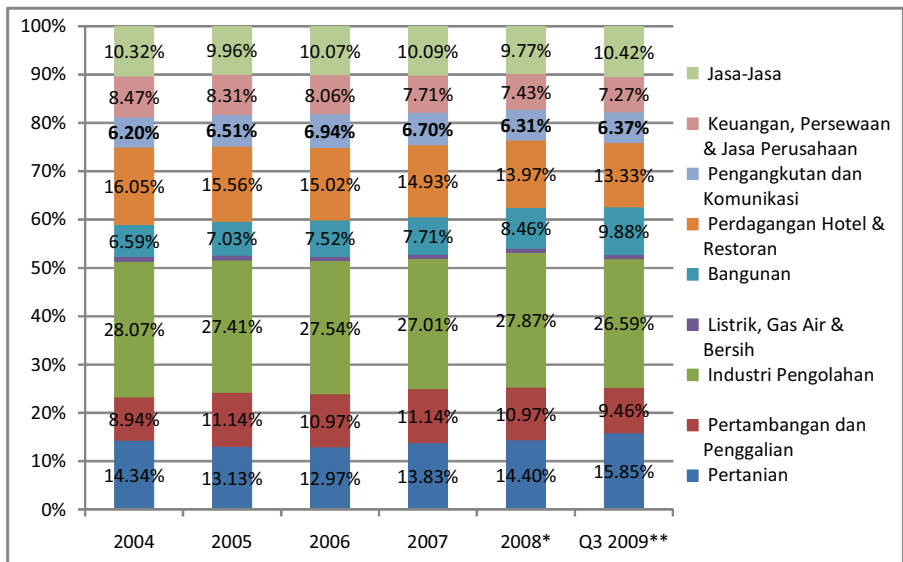
\*) Angka sementara

\*\*) Angka sangat sementara

Jika dilihat dari pangsanya terhadap perekonomian nasional, kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDB di Indonesia dalam lima tahun terakhir disumbang oleh sektor industri

pengolahan diikuti oleh sektor pertanian sebagai *leading sector* perekonomian nasional seperti ditunjukkan oleh gambar 11.9. Sampai dengan kuartal III tahun 2009 sektor industri pengolahan memberi kontribusi sebesar 26,6%, diikuti oleh sektor pertanian dengan kontribusi 10,42 %. Gambar 11.9 juga menunjukkan bahwa peran dari sektor pengangkutan dan telekomunikasi mengalami peningkatan cukup signifikan dari 6,2% pada tahun 2004 menjadi 6,37% pada kuartal III 2009. Jika dilihat kontribusinya terhadap PDB non migas maka kontribusi sektor pengangkutan dan telekomunikasi ini lebih besar lagi yaitu mencapai 7,87% pada kuartal III 2009. Bahkan peningkatan kontribusi ini berlangsung ketika sektor-sektor lain mulai berkurang maupun mengalami stagnasi perannya terhadap PDB. Namun dibandingkan dengan pencapaian pada kuartal III tahun 2008 (*year on year*), pangsa dari sektor pengangkutan dan komunikasi ini masih sedikit lebih rendah.

Gambar 11.9. Kontribusi Sektoral Terhadap PDB dengan Migas Tahun 2003-Q3 2009



Sektor pengangkutan dan komunikasi bersama sektor bangunan menjadi dua sektor perekonomian yang kontribusinya terhadap perekonomian (PDB) mengalami peningkatan secara stabil.

Tabel 11.8 menunjukkan perkembangan kontribusi dari masing-masing lapangan usaha ekonomi terhadap perekonomian. Khusus untuk lapangan usaha pengangkutan dan komunikasi, tabel tersebut juga menunjukkan peran sampai dengan subsektor komunikasi dan pecahannya yaitu bidang pos dan telekomunikasi dan bidang jasa telekomunikasi. Dari tabel tersebut terlihat bahwa meskipun peran sektor pengangkutan dan komunikasi lebih didominasi oleh subsektor pengangkutan, namun dari tahun ke tahun subsektor komunikasi menunjukkan peran yang semakin besar. Sebaiknya subsektor transportasi justru semakin menurun perannya terutama dari tahun 2006 ke tahun 2009.

Kontribusinya subsektor komunikasi yang pada tahun 2004 baru mencapai 2,35% terhadap PDB, pada kuartal III 2009 kontribusi sudah mencapai 2,10%. Sementara sektor pengangkutan justru menurun dari 3,85% pada 2004 menjadi 3,27% sampai kuartal III tahun 2009. Perkembangan yang pesat dalam industri telekomunikasi, khususnya sejak 2006 yang ditandai dengan penggunaan teknologi 3G turut berperan dalam mendorong peningkatan subsektor komunikasi dalam PDB nasional.

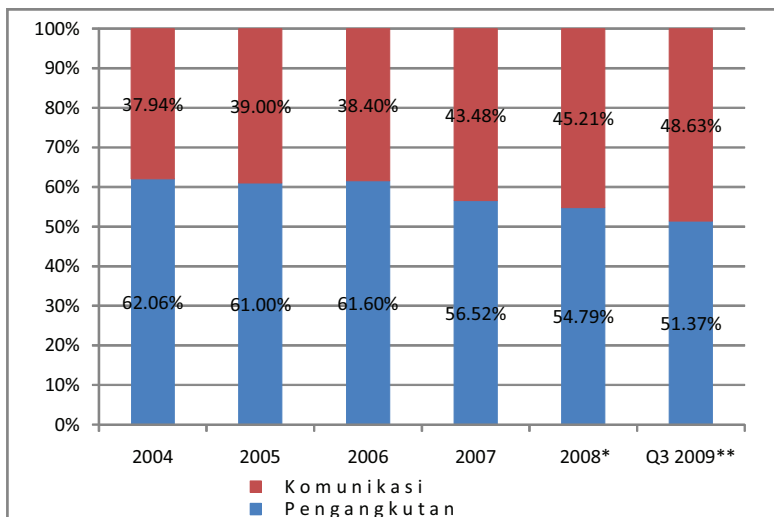
Tabel 11.9. Peran Sektor Pos dan Telekomunikasi Terhadap PDB Tahun 2003 - Q3 2009

LAPANGAN USAHA	2004	2005	2006	2007	2008*	Q3 2009**
1. Pertanian	14,34%	13,13%	12,97%	13,83%	14,40%	15,85%
2. Pertambangan dan Penggalian	8,94%	11,14%	10,97%	11,14%	10,97%	9,46%
3. Industri Pengolahan	28,07%	27,41%	27,54%	27,01%	27,87%	26,59%
4. Listrik, Gas Air & Bersih	1,03%	0,96%	0,91%	0,88%	0,82%	0,84%
5. Bangunan	6,59%	7,03%	7,52%	7,71%	8,46%	9,88%
6. Perdagangan Hotel & Restoran	16,05%	15,56%	15,02%	14,93%	13,97%	13,33%
7. Pengangkutan dan Komunikasi	6,20%	6,51%	6,94%	6,70%	6,31%	6,37%
- P e n g a n g k u t a n	3,85%	3,97%	4,28%	3,79%	3,46%	3,27%
- K o m u n i k a s i	2,35%	2,54%	2,67%	2,91%	2,85%	3,10%
* Pos dan Telekomunikasi	2,11%	2,29%	2,39%	2,61%	2,55%	2,78%
* Jasa Penunjang Komunikasi	0,25%	0,25%	0,28%	0,30%	0,30%	0,32%
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	8,47%	8,31%	8,06%	7,71%	7,43%	7,27%
9. Jasa-Jasa	10,32%	9,96%	10,07%	10,09%	9,77%	10,42%

Semakin menguatnya peran subsektor komunikasi terlihat dari Gambar 11.10 yang semakin memperjelas mulai menuju arah pergeseran kontribusi antara sektor subsektor komunikasi dan pengangkutan dalam struktur PDB nasional.



Gambar 11.10. Proporsi subsektor komunikasi dalam sektor pengangkutan dan komunikasi



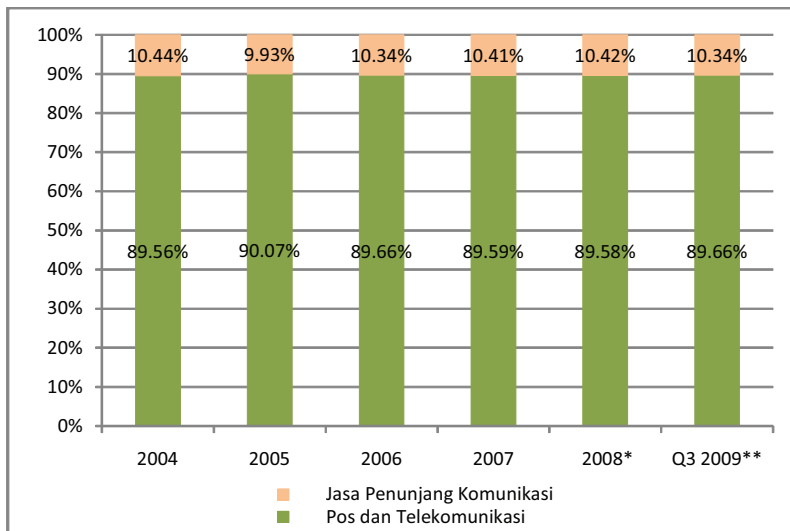
Pangsa subsektor pengangkutan yang pada tahun 2004 mencapai 62,06%, menjadi hanya 51,4% pada kuartal III 2009. Sebaliknya pangsa subsektor komunikasi meningkat dari 37,94% pada 2004 menjadi 48,63% pada kuartal III 2009. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya peran bidang komunikasi dalam pembentukan PDB dengan kontribusi yang hampir seimbang dengan subsektor pengangkutan. Dalam beberapa tahun kedepan, diperkirakan kontribusi subsektor komunikasi ini akan lebih dominan dibanding subsektor pengangkutan.

Jika dilihat lebih mendalam pada subsektor komunikasi, nampak pada PDB dari subsektor komunikasi ini lebih dominan disumbang oleh bidang pos dan telekomunikasi daripada bidang jasa penunjang telekomunikasi. Gambar 11.11 menunjukkan pangsa kontribusi antara bidang Pos dan Telekomunikasi dengan bidang jasa penunjang telekomunikasi dalam pembentukan PDB subsektor komunikasi. Dari grafik tersebut terlihat bahwa pangsa bidang pos dan telekomunikasi menunjukkan proporsi yang semakin meningkat dan semakin dominan meskipun peningkatannya berangsur lambat.

Dari kecenderungan dominasi bidang pos dan telekomunikasi terhadap subsektor komunikasi, menunjukkan bahwa peran subsektor komunikasi yang semakin meningkat terhadap PDB memang berasal dari peran bidang pos dan telekomunikasi yang semakin

meningkat. Dengan kata lain terjadi peningkatan dalam output bidang pos dan telekomunikasi yang memberikan sumbangan output yang lebih besar terhadap pembentukan PDB nasional.

Gambar 10.11. Proporsi bidang dalam subsektor komunikasi pada PDB Tahun 2003-Q3 2003



Dalam beberapa tahun kedepan, diperkirakan kontribusi subsektor komunikasi ini akan lebih dominan dibanding subsektor pengangkutan. Peran subsektor komunikasi yang ini didominasi oleh bidang pos dan telekomunikasi sekaligus menunjukkan semakin meningkatnya peran pos dan telekomunikasi dalam pembentukan output nasional

Sumber peningkatan peran dari bidang pos dan telekomunikasi terhadap pembentukan pendapatan nasional juga dapat dilihat dari pertumbuhan bidang tersebut dibanding pertumbuhan subsektor dan sektor lain maupun pertumbuhan ekonomi nasional. Tabel 11.10 menunjukkan pertumbuhan sektor-sektor perekonomian (dihitung berdasarkan harga konstan) di Indonesia.

Tabel 11.10. Laju Pertumbuhan Sektoral PDB di Indonesia 2005-2008 (%)

LAPANGAN USAHA	2005	2006	2007	2008
1. Pertanian	2,72%	3,36%	3,50%	4,69%
2. Pertambangan dan Penggalian	3,20%	1,70%	1,98%	0,55%
3. Industri Pengolahan	4,60%	4,59%	4,66%	3,66%
4. Listrik, Gas Air & Bersih	6,30%	5,76%	10,40%	10,86%
5. Bangunan	7,54%	8,34%	8,61%	7,31%
6. Perdagangan Hotel & Restoran	8,30%	6,42%	8,46%	7,19%
7. Pengangkutan dan Komunikasi	12,76%	14,38%	14,38%	16,18%
a. P e n g a n g k u t a n	6,25%	6,63%	2,78%	2,73%
b. K o m u n i k a s i	24,58%	26,39%	29,54%	30,13%
1. Pos dan Telekomunikasi	25,29%	25,82%	29,44%	30,12%
2. Jasa Penunjang Komunikasi	18,49%	31,61%	30,41%	30,26%
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	6,70%	5,47%	7,99%	8,24%
9. Jasa-Jasa	5,16%	6,16%	6,60%	6,45%
PDB	5,69%	5,51%	6,32%	6,01%
PDB Tanpa Migas	6,57%	6,13%	6,92%	6,47%

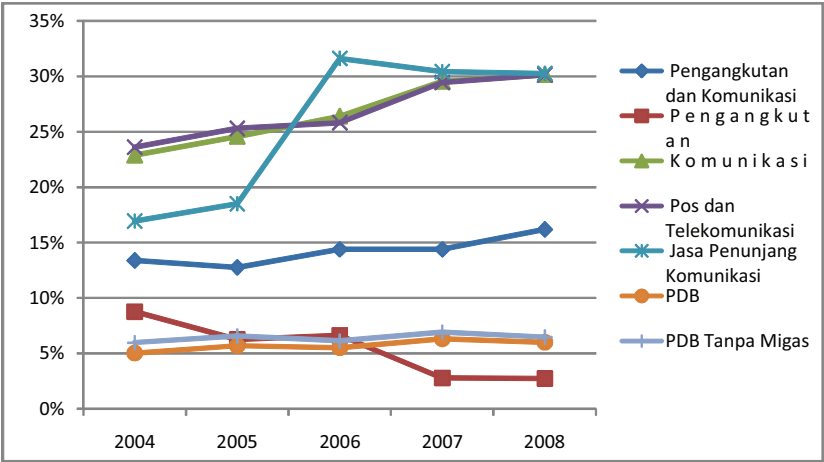
Dari tabel tersebut sangat jelas terlihat bahwa pertumbuhan subsektor komunikasi jauh lebih tinggi dibanding sektor-sektor lainnya. Ketika PDB hanya tumbuh 6,01% dan sektor-sektor lain tumbuh paling tinggi hanya 10% pada tahun 2008, sektor penagngkutan dan komunikasi tumbuh 16,18%. Bahkan jika dilacak lebih jauh sampai subsektornya terlihat bahwa pada subsektor komunikasi, pertumbuhannya pada tahun 2008 mencapai 30,13% yang merupakan pertumbuhan tertinggi dan jauh lebih tinggi dari sektor maupun subsektor lainnya. Bukan hanya menunjukkan pertumbuhan yang paling tinggi, subsektor komunikasi beserta turunannya yaitu bidang pos dan telekomunikasi dan bidang jasa penunjang telekomunikasi menunjukkan pertumbuhan yang semakin meningkat. Pertumbuhannya yang pada tahun 2005 baru 24,58%, pada tahun 2008 pertumbuhannya mencapai 30,13%.

Ketika ekonomi hanya tumbuh antara 5%-6,01% per tahun dan sektor lain tumbuh kurang dari 10%, maka sektor pengangkutan dan komunikasi dapat tumbuh hingga 16,18%. Bahkan subsektor komunikasi tumbuh 30,13% dan bidang pos dan telekomunikasi tumbuh 30,12% dengan rata-rata pertumbuhan dalam lima tahun terakhir masing-masing 26,7% dan 26,9%

Berdasarkan trend kontribusi dan pertumbuhan terhadap pembentukan PDB ini menunjukkan bahwa bidang pos dan telekomunikasi merupakan bidang yang memiliki

prospek paling cerah dibanding bidang lain. Pertumbuhan yang sangat tinggi dan kontribusi yang semakin meningkat menunjukkan bahwa dimasa datang, bidang pos dan telekomunikasi ini akan semakin memberikan peran yang signifikan dalam perekonomian Indonesia. Apalagi perkembangan pada industri ini juga merespon dari pertumbuhan penduduk dan kebutuhan dalam mendukung kegiatan manusia termasuk gaya hidup sehingga pertumbuhannya akan semakin pesat dimasa datang.

Gambar 11.12. Trend pertumbuhan sektor telekomunikasi pada PDB Tahun 2004-2008



11.5. Kinerja dan Peran Industri Telekomunikasi Seluler

Industri telekomunikasi seluler adalah industri yang memiliki perkembangan yang paling pesat dalam bidang telekomunikasi dan melibatkan banyak pihak sebagai pelaku usaha maupun pekerja didalamnya. Sejak muncul di Indonesia tahun 1990-an, industri telekomunikasi seluler ini mengalami *booming* yang sangat pesat justru pada tahun 2000-an dengan semakin efisiennya teknologi di bidang telekomunikasi seluler ini. Kegiatan ekonomi yang muncul mulai dari industri pembuatan perangkat, jasa penyelenggaraan telekomunikasi, perdagangan perangkat (importir, perdagangan besar, retailer), perdagangan pulsa dan jasa perbaikan perangkat. Perkembangan industri telekomunikasi seluler ini dengan sendirinya juga memberikan kontribusi bagi penerimaan negara dalam bentuk pajak yang harus dibayarkan oleh operator dan belanja BHP.

Indikator penting dari industri telekomunikasi seluler di Indonesia menunjukkan terjadinya kecenderungan peningkatan untuk semua indikator seperti ditunjukkan tabel 11.11. Jumlah pelanggan mengalami peningkatan sangat pesat sampai 254% dalam lima tahun dengan peningkatan rata-rata 46,7% per tahun. Peningkatan jumlah pelanggan ini juga diikuti dengan peningkatan belanja operator yang dalam lima tahun meningkat sebesar 75,6% dengan peningkatan rata-rata 25,6% per tahun. Belanja modal yang dilakukan oleh operator yang mencerminkan investasi yang dilakukannya juga meningkat dalam periode lima tahun terakhir. Peningkatan belanja modal ini bahkan mencapai 502% dalam lima tahun dengan rata-rata peningkatan sebesar 63,9% per tahun sampai 2008.

Belanja pegawai operator menunjukkan trend yang fluktuatif sejalan dengan upaya efisiensi yang dilakukan oleh operator dalam merespon persaingan yang semakin ketat. Setelah meningkat sampai Rp. 13,7 triliun pada tahun 2007, belanja pegawai menurun kembali pada tahun 2008. Namun untuk belanja operasional operator, juga menunjukkan trend peningkatan bahkan cukup tinggi. Dalam empat tahun terakhir, belanja operasional operator telah meningkat sebesar 68,7% dengan peningkatan rata-rata sebesar 19,2% per tahun. Peningkatan yang cukup signifikan pada belanja modal dan belanja operasional menunjukkan bahwa operator telekomunikasi seluler optimis dan menilai investasi di bidang telekomunikasi seluler masih sangat menjanjikan di Indonesia.

Tabel 11.11. Profil Kinerja Industri Telekomunikasi Seluler Indonesia 2005-2009

No.	Indikator	2005	2006	2007	2008	Q3-2009
1	Jumlah Pelanggan	51.675.481	69.817.046	104.198.516	162.282.086	173.443.972
2	Belanja Operator (Rp. Miliar)	65.362	82.390	106.316	132.227	116.969
3	Belanja Modal (CapEx) (Rp. Miliar)	9.539	11.457	21.349	39.565	57.500
4	Belanja SDM (Gaji) (Rp. Miliar)	9.980	12.158	13.703	12.296	7.889
5	Belanja Operasional (Rp. Miliar)	44.274	55.630	67.895	74.684	44.851
6	Belanja BHP (Rp. juta)	1.569.351	3.144.729	3.369.289	5.682.316	6.729.136
7	- PNPB Telekomunikasi (Rp. juta)	426.000	627.822	960.000	1.069.340	508.361
8	- PNPB Frekuensi (Rp. juta)	1.143.351	2.516.907	2.409.289	4.612.976	6.220.775
9	Pajak Operator (Rp. Juta)	7.645	9.702	10.312	10.946	7.645
10	Pendapatan Operasional (Rp. Miliar)	54.141	69.412	84.561	92.047	78.240
11	Jumlah Pegawai *)	43.139	42.816	41.574	40.675	46.275
12	Belanja BHP+Pajak/ Penerimaan Negara	2,3%	2,6%	2,1%	2,4%	1,5%
13	PDB (Rp. Triliun)	2.774	3.340	3.957	4.954	4.131

\*) Data operator merupakan data gabungan dari operator besar yaitu Telkom Group, Indosat, Exelcomindo, Bakrie Telecom dan Mobile-8

Peningkatan yang cukup signifikan pada belanja modal dan belanja operasional menunjukkan bahwa operator telekomunikasi seluler optimis dan menilai investasi di bidang telekomunikasi seluler masih sangat menjanjikan di Indonesia

Dari sisi penerimaan bagi negara, operator telekomunikasi seluler ini memberikan kontribusi dalam bentuk pajak operator dan PNBP dari Belanja BHP yang berasal PNBP Telekomunikasi dan PNBP Frekuensi. Belanja BHP operator telekomunikasi seluler juga menunjukkan peningkatan yang besar terutama pada tahun 2006 yang meningkat lebih dari 100% dibanding tahun sebelumnya. Dalam empat tahun terakhir belanja BHP operator telepon seluler ini telah meningkat sebesar 262% dengan peningkatan rata-rata 58,7% per tahun. Sumbangan terbesar terhadap belanja BHP maupun pertumbuhannya ini berasal dari PNBP Frekuensi yang nilainya pada semester III 2009 telah mencapai Rp. 6,2 triliun.

Pendapatan dari pajak yang dibayarkan oleh operator juga menunjukkan peningkatan sejalan dengan peningkatan omset dari bisnis penyelenggaraan jasa telekomunikasi seluler ini. Dalam empat tahun terakhir, pajak yang dibayarkan operator meningkat dari Rp. 7,6 miliar pada 2005 menjadi Rp. 10,95 miliar pada tahun 2008 atau meningkat sebesar 43,2% dengan rata-rata peningkatan 13,1% per tahun. Namun peningkatan sumber pendapatan negara dari jasa telekomunikasi seluler ini tidak membuat kontribusinya terhadap pendapatan negara dalam negeri meningkat. Hal ini karena peningkatan penerimaan negara dari penyelenggaraan jasa telekomunikasi seluler ini masih lebih kecil dari peningkatan total penerimaan negara dalam negeri. Namun kontribusi masih berada pada kisaran 1,5% sampai 2,5%.